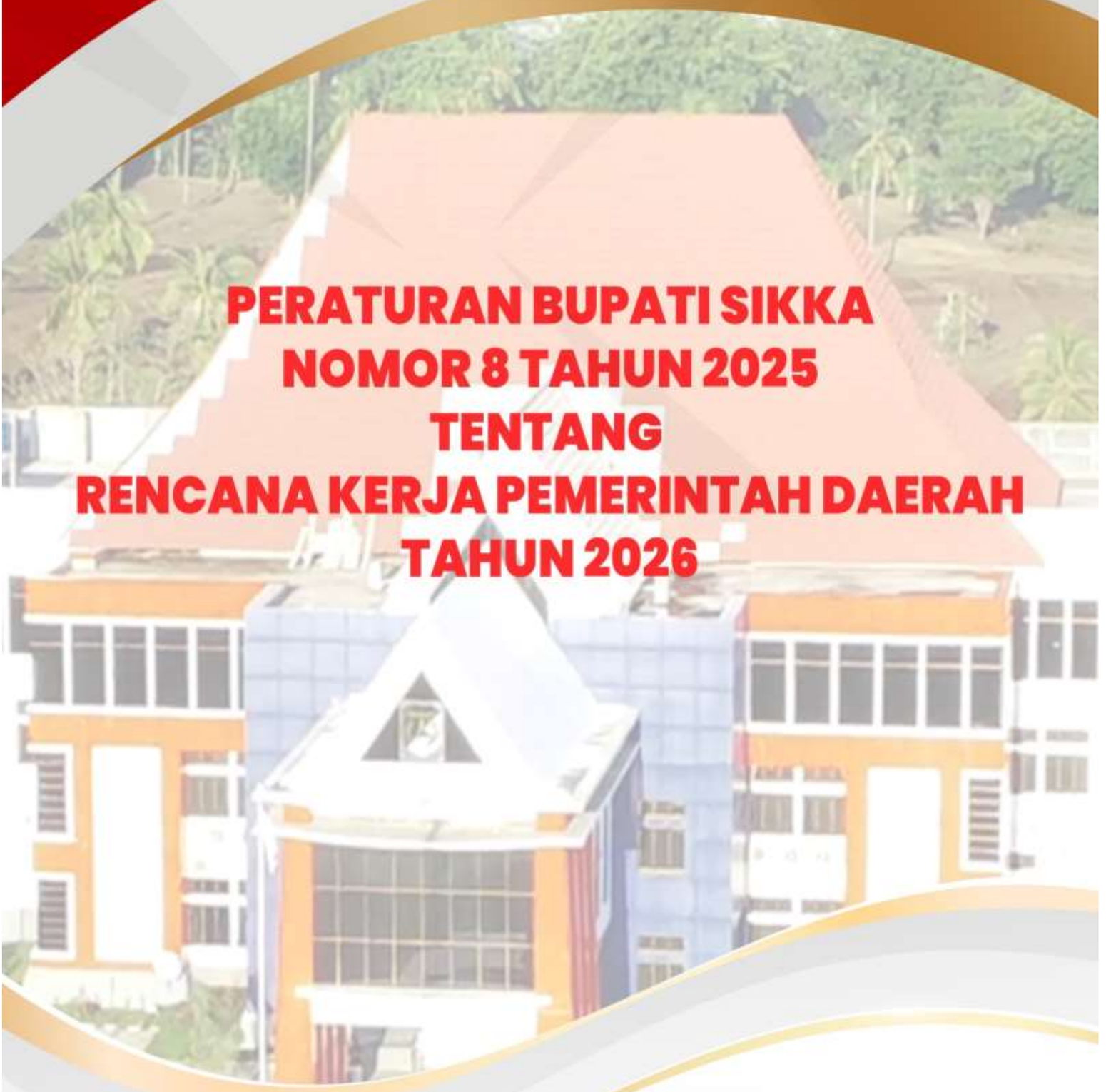
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA



PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SIKKA



BUPATI SIKKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan pada Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA–Perangkat Daerah sebelum disepakati oleh DPRD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada setiap Perangkat Daerah.

8. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
10. Bupati adalah Bupati Sikka.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
13. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka.
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka.

Pasal 2

RKPD disusun untuk :

a. mewujudkan sinergisitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
b. mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Pasal 3

RKPD digunakan sebagai:

a. pedoman perumusan, penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
b. pedoman dalam rangka penyusunan Rancangan KUA dan PPAS untuk dibahas sebagai landasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026.

BAB II

RKPD

Pasal 4

(1) Sistematika penyusunan RKPD Tahun 2026, terdiri dari:
    a. bab I Pendahuluan;
    b. bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
    c. bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
    d. bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
    e. bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
    f. bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
    g. bab VII Penutup.

(2) isi dan uraian RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah melakukan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD secara berkala setiap triwulan
(2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke Bupati.
(3) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memberikan arahan pergeseran dan perubahaan kebijakan perencanaan pembangunan.

Pasal 6

Berdasarkan Arahan Kebijakan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dilakukan pergeseran dan perubahan RKPD

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere

pada tanggal, Juni 2025

BUPATI SIKKA,

ttd

JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
Pada tanggal, Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA

CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA

FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas berkat dan tuntunanNya, Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 terdiri dari tujuh (7) bagian yang terdiri dari (1) pendahuluan; (2) gambaran umum kondisi daerah; (3) kerangka ekonomi dan keuangan daerah; (4) sasaran dan prioritas pembangunan daerah; (5) Rencana kerja dan pendanaan; (6) kinerja penyelenggaran pemerintah; dan (7) Penutup.

Akhirnya dengan rendah hati dan menaruh rasa hormat, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang akan memberikan masukan dan saran yang konstruktif, untuk penyempurnaan dokumen ini dan proses penyusunan dokumen pada tahap berikutnya.

Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.

Maumere, Juni 2025

Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Sikka,

MARGARETHA MOVALDES DA MAGA BAPA, S.T.,M.Eng.
Pembina Tingkat I
NIP 19761206 200012 2 003

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar II
Daftar Isi III
Daftar Tabel VII
Daftar Grafik XIII
Daftar Gambar XIV

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-3
1.3.1. Hubungan Antara RKPD dengan RKP I-4
1.3.2. Hubungan antara RKPD Kabupaten Sikka dengan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur I-5
1.4 Maksud dan Tujuan I-5
1.5. Sistematika Dokumen RKPD I-5

BAB II GAMBARAN UMUM II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
a. Geografi II-1
1. Luas dan Batas Administrasi II-1
2. Topografi dan Kemiringan II-2
3. Klimatologi II-3
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup II-3
5. Ketahanan Energi II-6
6. Indeks Risiko Bencana II-6
b. Demografi II-7
1. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur II-9
2. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan II-9
3. Penduduk Menurut Agama II-10
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-11
a. Kesejahteraan Ekonomi II-11
1. Struktur Ekonomi Wilayah II-11
2. Pertumbuhan Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) II-12
3. Pendapatan Perkapita II-14
4. Pertumbuhan Ekonomi II-15
5. Inflasi II-16
6. Angka Kemiskinan II-16
7. Indeks Gini II-17
b. Kesejahteraan Sosial Budaya II-18
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-18
2. Sektor Pendidikan II-19
3. Usia Harapan Hidup II-20
4. Pengeluaran Per Kapita II-21
5. Indeks Ketahanan Pangan II-22
2.3. Aspek Pelayanan Umum II-22
a. Fokus Layanan Pemerintah Wajib II-23
1. Pendidikan II-23
2. Kesehatan II-26
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-30
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-36
5. Ketentraman, Ketertiban Umum,

dan Perlindungan Masyarakat II-37
6. Sosial II-39
7. Tenaga Kerja II-39
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-41
9. Pangan II-43
10. Pertanahan II-44
11. Lingkungan Hidup II-45
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-50
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-51
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-52
15. Perhubungan II-53
16. Komunikasi dan Informatika II-54
17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-55
18. Penanaman Modal II-58
19. Kepemudaan dan Olahraga II-60
20. Statistik II-60
21. Persandian II-61
22. Kebudayaan II-61
23. Perpustakaan II-62
24. Kearsipan II-63
b. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan II-64
1. Pariwisata II-64
2. Pertanian II-67
3. Perikanan II-77
4. Energi dan Sumber Daya Mineral II-81
5. Perdagangan II-82
6. Perindustrian II-84
7. Transmigrasi II-87
c. Penunjang Urusan Pemerintahan II-87
1. Perencanaan Pembangunan II-88
2. Keuangan II-89
3. Pengawasan II-90
4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan II-92
5. Penelitian dan Pengembangan II-92
6. Sekretariat Dewan II-94
2.4. Aspek Daya Saing II-94
a. Daya Saing Ekonomi Daerah II-94
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita II-94
2. Nilai Tukar Petani II-95
3. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif II-96
b. Daya Saing SDM II-97
1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3) II-97
2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) II-97
c. Daya Saing Iklim Berinvestasi II-99
1. Rata-rata Lama Perizinan II-99
2. Jumlah Demonstrasi II-101
2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2024 dan Realisasi RPJMD II-102
2.5.1. Evaluasi Pelaksanaan SPM II-102
1. Urusan Pendidikan II-102
2. Urusan Kesehatan II-102
3. Urusan Pekerjaan Umum II-103
4. Urusan Perumahan Rakyat II-103
5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-104

6. Urusan Sosial II-104
2.5.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 ..... II-106
2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah II-197
2.6.1. Permasalahan Berdasarkan Aspek Sasaran Pembangunan II-197
2.6.2. Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah II-197
1. Pendidikan II-197
2. Kesehatan II-198
3. Pekerjaan Umum II-198
4. Perumahan dan Permukiman II-198
5. Keamanan dan Ketertiban II-198
6. Sosial II-199
7. Tenaga Kerja II-199
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-199
9. Keluarga Berencana II-199
10. Ketahanan Pangan II-199
11. Lingkungan Hidup II-200
12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-200
13. Perhubungan II-201
14. Komunikasi dan Informatika II-201
15. Kearsipan II-201
16. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-201
17. Koperasi dan UMKM..... II-201
18. Penanaman Modal II-202
19. Pertanahan II-202
20. Kepemudaan dan Olahraga II-202
21. Kebudayaan II-202
22. Pertanian II-202
23. Pariwisata II-203
24. Perikanan II-203
25. Perdagangan II-203
26. Perindustrian II-204
27. Transmigrasi II-204
28. Perencanaan Pembangunan II-204
29. Pengawasan II-204
30. Keuangan II-204
31. Penelitian dan Pengembangan II-204
32. Kepegawaian II-205
33. Sekretariat Daerah II-205
34. Pemerintahan Umum II-205

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1. Pertumbuhan Produk Domestika Regional Bruto III-1
3.1.2. Pendapatan Perkapita III-3
3.1.3. Pertumbuhan Ekonomi III-4
3.1.4. Inflasi..... III-5
3.1.5. Angka Kemiskinan III-6
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-7
3.2.1. Pendapatan Daerah..... III-7
3.2.2. Belanja Daerah III-17
3.2.3. Pembiayaan Daerah III-26

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.1.1. Visi Misi IV-1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran IV-7
4.1.3. Tekad Pembangunan Daerah IV-13
4.1.4. Strategi Pembangunan Daerah IV-14
4.1.5. Arah Kebijakan Pembangunan IV-17
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2026 ..... IV-22

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN V-1
5.1. Rencana Target Indikator Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Tahun 2026 ..... V-1
5.2. Program, Indikator, Target Kinerja dan Anggaran V-2
5.2.1. Kegiatan yang berkaitan dengan SPM V-2
5.2.2. Kegiatan yang diusulkan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD V-8
5.2.3. Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan V-46

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1
6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU VI-1
6.2. Indikator Kinerja Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah VI-2

BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Nama Ibu Kota Kecamatan dan Luas Wilayah Per Kecamatan II-1
Tabel 2.2. Kondisi Suhu Udara dan Kelembaban Udara Kabupaten Sikka Tahun 2024 ..... II-3
Tabel 2.3. Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-4
Tabel 2.4. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-5
Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024..... II-7
Tabel 2.6. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2024 ..... II-8
Tabel 2.7. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Kabupaten Sikka Tahun 2024..... II-9
Tabel 2.8. Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-13
Tabel 2.9. Persentase Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-14
Tabel 2.10. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-15
Tabel 2.11. Inflasi Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024..... II-16
Tabel 2.12. Indeks Gini Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-18
Tabel 2.13. Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya Tahun 2020-2024 ..... II-19
Tabel 2.14. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-20
Tabel 2.15. Persentase Usia Harapan Hidup Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-21
Tabel 2.16. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-21
Tabel 2.17. Data Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Sikka dan Provinsi NTT Tahun 2020 – 2024..... II-22
Tabel 2.18. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-23
Tabel 2.19. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-25
Tabel 2.20. Rasio Penduduk terhadap Sarana Kesehatan dan Paramedis Kabupaten Sikka Tahun 2019-2024..... II-29
Tabel 2.21. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2024..... II-31
Tabel 2.22. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-32
Tabel 2.23. Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2020 -2024..... II-32
Tabel 2.24. Jaringan Irigasi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 II-32
Tabel 2.25. Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Sikka Tahun 2024 II-33
Tabel 2.26. Jumlah Infrastruktur Pendidikan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2024..... II-34
Tabel 2.27. Infrastruktur Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2023 dan 2024..... II-34

Tabel 2.28. Peruntukan Ruang di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-35
Tabel 2.29. Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ... II-36
Tabel 2.30. Angka Kriminalitas Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-37
Tabel 2.31. Indikator Kinerja Satpol PP Kab. Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-37
Tabel 2.32. Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-38
Tabel 2.33. Indikator Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-39
Tabel 2.34. Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-40
Tabel 2.35. Keadaan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024. II-40
Tabel 2.36. Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020-2024..... II-41
Tabel 2.37. Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-42
Tabel 2.38. Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2020-2024 .... II-42
Tabel 2.39. Kebutuhan, Produksi dan Ketersediaan Pangan Per Kapita Per Tahun Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-43
Tabel 2.40. Skor PPH Ketersediaan Tahun 2020-2024 ..... II-44
Tabel 2.41. Skor PPH Konsumsi Tahun 2020-2024 ..... II-44
Tabel 2.42. Kinerja Pertanahan di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-44
Tabel 2.43. Uji Pencemaran Air, Tanah dan Udara Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-45
Tabel 2.44. Data Lahan-lahan yang Telah Dikonservasi di Kabupaten Sikka II-46
Tabel 2.45. Data Ketersediaan Air di Kabupaten Sikka Tahun 2022..... II-48
Tabel 2.46. Jumlah Sambungan Rumah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-49
Tabel 2.47. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Sikka Tahun 2020-2022 ..... II-49
Tabel 2.48. Capaian Kinerja Pelayanan Kependudukan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-50
Tabel 2.49. Jumlah Desa Berdasar Klasifikasi Desa Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-51
Tabel 2.50. Capaian Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-51
Tabel 2.51. Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-52
Tabel 2.52. Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-53
Tabel 2.53. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Semua Angkutan Umum) II-54
Tabel 2.54. Nilai SPBE Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-54
Tabel 2.55. Capaian Kinerja Telekomunikasi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-55
Tabel 2.56. Jenis Koperasi di Kabupaten Sikka II-56
Tabel 2.57. Koperasi di Kabupaten Sikka Berdasarkan Status... II-56
Tabel 2.58. Jenis UMKM Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten Sikka II-57

Tabel 2.59. Capaian Pelaksanaan Urusan UMKM di Kabupaten Sikka II-57
Tabel 2.60. Perkembangan UMKM di Kabupaten Sikka II-57
Tabel 2.61. Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 ..... II-58
Tabel 2.62. Nilai Investasi Berdasar Sektor Kabupaten Sikka Tahun 2020-2022 ..... II-59
Tabel 2.63. Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-60
Tabel 2.64. Indeks Kinerja Statistik Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-60
Tabel 2.65. Kinerja Persandian Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-61
Tabel 2.66. Kinerja Fokus Seni dan Budaya Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-62
Tabel 2.67. Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-63
Tabel 2.68. Kinerja Pengelolaan Arsip Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-63
Tabel 2.69. Kinerja Pariwisata Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 II-64
Tabel 2.70. Jumlah Hotel Tahun 2020-2024 ..... II-65
Tabel 2.71. Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-66
Tabel 2.72. Kinerja Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 II-67
Tabel 2.73. Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-67
Tabel 2.74. Luas Panen Tanaman Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-68
Tabel 2.75. Harga Produk Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-69
Tabel 2.76. Produksi Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-70
Tabel 2.77. Produksi Buah dan Sayuran Tahunan Tahun 2020-2024 ..... II-71
Tabel 2.78. Produksi Tanaman Biofarmaka Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-72
Tabel 2.79. Produksi Tanaman Sayuran Buah Semusim Tahun 2020-2024 ..... II-72
Tabel 2.80. Produksi Buah dan Sayuran Tahunan Tahun 2020-2024 ..... II-73
Tabel 2.81. Produksi Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-73
Tabel 2.82. Data Populasi Ternak Besar Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-75
Tabel 2.83. Data Populasi Ternak Kecil Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-75
Tabel 2.84. Data Populasi Ternak Unggas Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-76
Tabel 2.85. Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-76
Tabel 2.86. Data Populasi Hewan Penular Rabies Anjing dan Realisasi Vaksinasi Hewan Penular Rabies Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-77
Tabel 2.87. Nilai Produksi dan Komoditas Utama Perikanan Tangkap di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 (Rupiah) II-79

Tabel 2.88. Armada perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2024 II-79
Tabel 2.89. Jenis alat tangkap di Kabupaten Sikka II-80
Tabel 2.90. Jumlah Kelompok Nelayan Pembudidaya Ikan Lele di Kabupaten Sikka Tahun 2022 ..... II-80
Tabel 2.91. Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-81
Tabel 2.92. Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-82
Tabel 2.93. Jumlah Pasar di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 II-84
Tabel 2.94. Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Industri Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-85
Tabel 2.95. Kinerja Industri Pengolahan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-85
Tabel 2.96. Kinerja Transmigrasi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-87
Tabel 2.97. Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-87
Tabel 2.98. Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-88
Tabel 2.99. Kinerja Keuangan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 II-89
Tabel 2.100. Kinerja Pengawasan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-91
Tabel 2.101. Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-92
Tabel 2.102. Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-93
Tabel 2.103. Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-94
Tabel 2.104. Angka Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-95
Tabel 2.105. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Sikka Tahun 2017-2021 ..... II-97
Tabel 2.106. Struktur Umur dan Umur Median Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-98
Tabel 2.107. Rasio Ketergantungan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-99
Tabel 2.108. Rata-rata Lama Perizinan di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-99
Tabel 2.109. Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-101
Tabel 3.1. Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... III-2
Tabel 3.2. Persentase Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... III-3
Tabel 3.3. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... III-5
Tabel 3.4. Inflasi Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... III-6
Tabel 3.5. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sikka III-7
Tabel 3.6. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... III-9
Tabel 3.7. Dana Perimbangan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... III-10



BUPATI SIKKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan pada Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA–Perangkat Daerah sebelum disepakati oleh DPRD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada setiap Perangkat Daerah.

8. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
10. Bupati adalah Bupati Sikka.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
13. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka.
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka.

Pasal 2

RKPD disusun untuk :

a. mewujudkan sinergisitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
b. mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Pasal 3

RKPD digunakan sebagai:

a. pedoman perumusan, penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
b. pedoman dalam rangka penyusunan Rancangan KUA dan PPAS untuk dibahas sebagai landasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026.

BAB II

RKPD

Pasal 4

(1) Sistematika penyusunan RKPD Tahun 2026, terdiri dari:
    a. bab I Pendahuluan;
    b. bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
    c. bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
    d. bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
    e. bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
    f. bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
    g. bab VII Penutup.

(2) isi dan uraian RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah melakukan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD secara berkala setiap triwulan
(2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke Bupati.
(3) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memberikan arahan pergeseran dan perubahaan kebijakan perencanaan pembangunan.

Pasal 6

Berdasarkan Arahan Kebijakan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dilakukan pergeseran dan perubahan RKPD

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere

pada tanggal, Juni 2025

BUPATI SIKKA,

ttd

JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
Pada tanggal, Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA

CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA

FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG

Tabel 3.8.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2020-2024	III-11
Tabel 3.9.	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sikka Tahun 2026	III-12
Tabel 3.10.	Rincian Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sikka Tahun 2026	III-13
Tabel 3.11.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020	III-23
Tabel 3.12.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2024	III-24
Tabel 3.13.	Proyeksi Belanja Kabupaten Sikka Tahun 2026	III-25
Tabel 3.14.	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024	III-27
Tabel 3.15.	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Sikka Tahun 2026	III-28
Tabel 5.1.	Rencana Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2026	V-1
Tabel 5.2.	Rencana Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2026	V-1
Tabel 5.3.	Kegiatan yang berkaitan dengan SPM Tahun 2026	V-2
Tabel 5.4.	Rekapitulasi Kegiatan yang diusulkan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD	V-8
Tabel 5.5.	Rincian usulan Permasalahan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD	V-17
Tabel 5.6.	Rekapitulasi Pagu Anggaran per PD Tahun 2026	V-46
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sikka	VI-1
Tabel 6.2.	Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan Tahun 2026	VI-2

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1. Grafik Indeks Resiko Bencana..... II-7
Grafik 2.2. Grafik Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Sikka Tahun 2004..... II-9
Grafik 2.3. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Sikka Tahun 2024 ..... II-11
Grafik 2.4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-12
Grafik 2.5. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-12
Grafik 2.6. Pendapatan Perkapita Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-14
Grafik 2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-15
Grafik 2.8. Inflasi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-16
Grafik 2.9. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-17
Grafik 2.10. Persentase kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-17
Grafik 2.11. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2024 ..... II-18
Grafik 2.12. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sikka, Ende dan Flores Timur 2019-2023..... II-18
Grafik 2.13. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-19
Grafik 2.14. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-20
Grafik 2.15. Indeks Distribusi Guru SD dan SMP Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-26
Grafik 2.16. Angka Kelahiran Bayi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-27
Grafik 2.17. Angka Kematian Bayi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... II-27
Grafik 2.18. Angka Kematian Ibu Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 II-28
Grafik 2.19. Prevalensi Stunting Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 II-29
Grafik 2.20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... II-45
Grafik 2.21. Volume Sampah yang Terangkut ke TPA Tahun 2020-2024..... II-45
Grafik 2.22. Indikator Kepuasan Masyarakat Layanan Kependudukan II-50
Grafik 2.23. Nilai Penanaman Modal Tetap Bruto Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 (Rp miliar) II-58
Grafik 2.24. Produksi Perikanan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 II-78
Grafik 2.25. Konsumsi Ikan Kabupaten Sikka tahun 2020-2024 .... II-78
Grafik 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... III-1
Grafik 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... III-2
Grafik 3.3. Pendapatan Perkapita Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... III-4
Grafik 3.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... III-4
Grafik 3.5. Inflasi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... III-5
Grafik 3.6. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..... III-6

Grafik 3.7. Persentase kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 ..... III-7

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1.	Hubungan RKPD dengan Dokumen Lainnya	I-3
Gambar 2.1.	Peta Geografis Kabupaten Sikka.....	II-1
Gambar 2.2.	Peta Topografi Kabupaten Sikka.....	II-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan Pembangunan, prioritas program Pembangunan serta rencana kerja dan pembiayaan untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Secara operasional akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupkan dokumen tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yaitu :

a. persiapan penyusunan RKPD;
b. penyusunan Rancangan Awal RKPD;
c. penyusunan Rancangan RKPD;
d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
e. perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
f. akhirnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati

RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2026 merupakan Rencana Kerja tahun pertama dari pelaksanaan dokumen perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka tahun 2025-2029. RKPD ini memuat arah kebijakan pembangunan selama periode Tahun 2026 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menangah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.

RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2026 yang disusun secara simultan dan terintegrasi dengan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dengan mempedomani Visi dan misi kepala daerah terpilih sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi serta Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tahunan tetap mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Bupati.

Dokumen RKPD merupakan penjabaran dari kebijakan nasional yang juga disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi Standar Pelayanan Minimal, *Monitoring, Center, for strategis Prevencion* (MCSP KPK) dan Reviuw Inspektorat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rujukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa

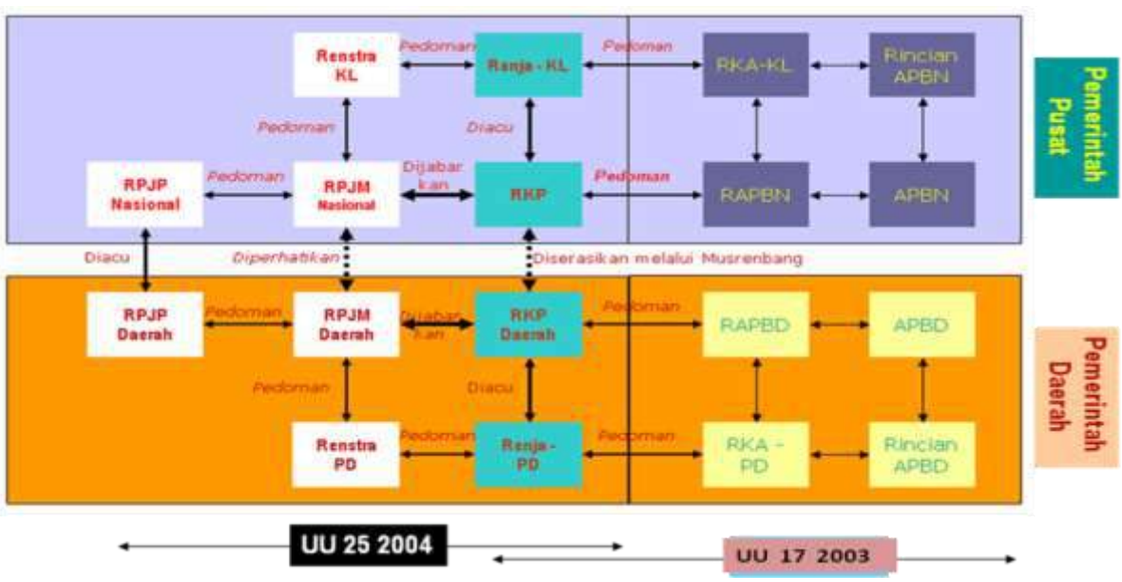
Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2045 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi NTT Tahun 2025 Nomor ....);
19. Peraturan Bupati Sikka Nomor 47 Tahun 2019 tentang Satu Data Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 47).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Secara normatif, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran RPJMD. RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, dimana rencana kerja Perangkat Daerah akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKPD Provinsi dan RKP Nasional, RKPD Kabupaten Sikka disinkronkan melalui Forum Musrenbang Provinsi NTT dan Forum Musrenbang Nasional.

Gambar 1.1. Hubungan RKPD dengan Dokumen Lainnya



1.3.1. Hubungan Antara RKPD dengan RKP

Penyusunan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2026 mengacu pada arah kebijakan Nasional yang termuat dalam RKP Tahun 2026 dengan Tema **"Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**" dengan program :

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan Kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan Narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersesiaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani.
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas, terjangkau bersanitasi baik baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program Kredit usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota Inovatif-karakteristik mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan pengingkatan prestasi olah raga.

Program Hasil Terbaik cepat :

1. Memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBS dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6. Menaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh) TNI/Polri dan pejabat negara
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai (BLT) dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

1.3.2. Hubungan Antara RKPD Kabupaten Sikka dengan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penyusunan RKPD Kabupaten Sikka juga memperhatikan Rencana Kerja pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 dengan tema : **Peningkatan Produktivitas dalam memenuhi kebutuhan pangan dan energi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif**, dengan prioritas :

1. Pembangunan Ekonomi berkelanjutan, dengan fokus pada :
   a. Memajukan sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan dan keluatan sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan berbasis potensi daerah
   b. Memperkaya ekowisata, geowisata, geopark, dan wisata budaya berbasis komunitas, menampilkan jati diri dan pesona NTT ke dunia
   c. Mengakselerasi program penciptaan lapangan kerja dan wira usaha baru serta meningkatkan kapasitas wirausaha
   d. Memastikan seluruh Masyarakat NTT yang bekerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaa

2. Pemberdayaan Komunitas, dengan fokus pada :
   a. Mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal khususnya oleh anak muda milenial dan perempuan
   b. Digitalisasi, kolaborasi dan revitalisasi koperasi menuju kemandirian ekonomi
   c. Menciptakan ekosistem yang mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis Potensi Desa
   d. Optimalisasi dan penguatan kapasitas BUMDES untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat

3. Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan, dengan fokus pada :
   a. Membangun jalan, sumber daya air, air minum bersih,kelistrikan, dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (green and blue infrastructure), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim
   b. Meningkatkan kualitas layanan transportasi public guna meningkatkan konektivitas antar wilayah
   c. Pembangunan infrastruktur digitan untuk memperluas akses inbternet dan komunikasi

4. Pemerataan Akses dan Layanan Kesehatan, dengan fokus pada :
   a. Pencegahan dan percepatan penurunan stiunting dengan pendekatan pentahelix
   b. Memastikan seluruh Masyarakat NTT sebagai peserta aktif BPJS
   c. Penguatan infrastruktur di fasilitas layanan kesehatan
   d. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses
   e. Pemerataan distribusi dan peningkatan kualitas SDM Kesehatan

5. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, dengan fokus pada :
   a. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur Pendidikan berkualitas
   b. Membangun sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah
   c. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus
   d. Insentif Pendidikan bagi siswa/mahasiswa berprestasi kurang mampu serta tenaga pendidik di daerah perifer
   e. Mengoptimalkan penggunaan teknologi iuntuk pembelajaran ormal dan non formal

6. Reformasi Birokrasi dan HAM, dengan fokus pada :
   a. Mentraformasi pelayanan public menjadi lebih transparan, efisien, professional proaktif dan melayani
   b. Meningkatkan kesejahteraan Asn sebagai salah satu penggerak ekonomi
   c. Memperkuat sumber pendapat daerah
   d. Meningkatkan keamanan daerah dan melindungi hak-hak Masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif Masyarakat dan kerja sama lintas sektor

7. Kolaborasi Ayo Bangun NTT, dengan fokus pada :
   a. Melibatkan dan mengoptimalkan kontribusi diaspora dan potensi Keluarga Besar NTT untuk membangun daerah
   b. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh program pemerintah kabupaten/kota serta CSO/NGO untuk Pembangunan di Provinsi NTT

1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergisitas dan menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026;
b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2026;
c. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sikka Tahun 2026.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, yang menguraikan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyusunan RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM, yang memuat tentang Kondisi Umum daerah dari Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, Aspek Pelayanan Umum, Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Pembangunan, Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, yang memuat tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN, yang memuat tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2026, Arah Kebijakan Pembangunan, Program Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2026

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN, yang memuat tentang Rencana Target Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dan Program, Indikator, Target Kinerja dan Anggaran

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, yang memuat tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

a. **Geografi**

1. **Luas dan Batas Administrasi**

Kabupaten Sikka terletak di Pulau Flores, memiliki luas wilayah1.731,91 Km2 atau 173.191 Ha, dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ende;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Sawu.

Gambar 2.1. Peta Geografis Kabupaten Sikka



Sumber : Olahan BAPPERIDA Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa secara geografis, Kabupaten Sikka terletak pada 8°22'– 8°50' Lintang Selatan dan 121°55'40"-122°41'30" Bujur Timur.

Secara administratif Kabupaten Sikka terbagi atas 21 Kecamatan, 13 Kelurahan, 181 Desa. Kecamatan dengan desa terbanyak terdapat di Kecamatan Talibura sebanyak 20 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Mapitara dan Alok Barat masing-masing sebanyak 4 desa/kelurahan.

Nama ibu kota kecamatan dan luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Nama Ibu Kota Kecamatan
dan Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah	
			Km	%
1.	Paga	Paga	71,52	4,27
2.	Tanawawo	Wolofeo	89,55	5,35
3.	Mego	Lekebai	101,9	6,08
4.	Lela	Lela	45,96	2,74
5.	Bola	Bola	44,97	2,68
6.	Doreng	Edat	54,03	3,22
7.	Mapitara	Hebing	82,89	4,95
8.	Talibura	Talibura	287,3	17,15
9.	Waiblama	Tanarawa	120,05	7,17
10.	Waigete	Waigete	233,01	13,91

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah	
			Km	%
11.	Kewapante	Kewapante	22,09	1,32
12.	Hewokloang	Baowunut	17,9	1,07
13.	Kangae	Waipare	39,69	2,37
14.	Nelle	Nelle Urung	13,31	0,79
15.	Koting	Koting B	14,16	0,85
16.	PaluE	Uwa	39,69	2,37
17.	Nita	Nita	111,72	6,67
18.	Magepanda	Magepanda	136,21	8,13
19.	Alok	Kota Uneng	21,04	1,26
20.	Alok Barat	Wailiti	48,17	2,88
21.	Alok Timur	Waioti	80,2	4,79
Jumlah			1.675,36	100

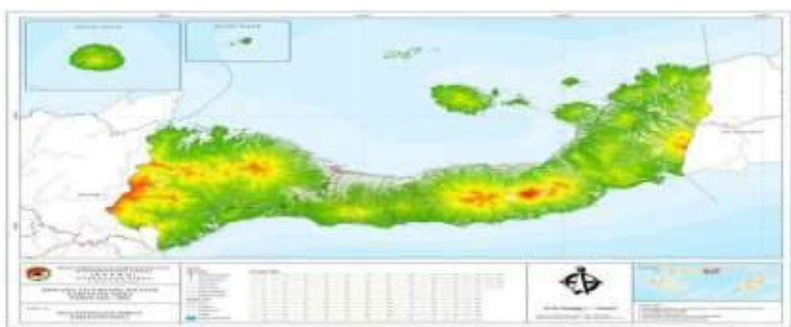
Sumber : Kabupaten Sikka dalam angka, 2025

Berdasarkan tabel diatas, luas wilayah per kecamatan di atas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Talibura dengan luas wilayah 287,30 Km2 atau 17,15%, sedangkan kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Nelle 13,31 Km2 atau 0,79%.

2. Topografi dan Kemiringan

Topografi adalah keadaan permukaan bumi pada suatu kawasan atau daerah. Peta Topografi menggambarkan relief permukaan model tiga dimensi dan identifikasi jenis lahan. Topografi Kabupaten Sikka terlihat dari peta ketinggian lahan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Sikka



Sumber : RTRW Kabupaten Sikka Tahun 2025-2044

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa topografi Kabupaten Sikka diklasifikasikan dalam lima kelas ketinggian dengan uraian sebagai berikut :

1. Topografi dengan ketinggian 0-25 mdpl, yaitu dengan luas 29.863 Ha atau 17,24% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, meliputi sebagian besar daerah pesisir pantai utara dan daerah pesisir pantai selatan serta daerah pesisir pantai pulau-pulau kecil lainnya;
2. Topografi dengan ketinggian 25-100 mdpl, yaitu dengan luas 20.843 Ha atau 12,03% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lanjutan daerah pesisir yang sebagian besar juga terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Sikka dan sebagian kecilnya di bagian selatan dan pulau-pulau kecil lainnya;
3. Topografi dengan ketinggian 100-500 mdpl, yaitu seluas 48.171 Ha atau 27,81% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lereng atau kaki gunung dan perbukitan yang juga merupakan daerah peralihan

dari dataran rendah ke dataran tinggi atau pegunungan, yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka.

4. Topografi dengan ketinggian 500-1000 mdpl, yaitu seluas 70.216 Ha atau 40,54% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan daerah pegunungan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka;
5. Topografi dengan ketinggian lebih dari 1000 m dpl, yaitu seluas 4.098 ha atau 2,37% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi, yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka.

3. Klimatologi

Klimatologi merupakan gambaran dan penjelasan sifat iklim di suatu wilayah yang terdiri dari komponen suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, curah hujan, dan hari hujan. Kondisi suhu udara dan kelembaban udara di wilayah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Kondisi Suhu Udara dan Kelembaban Udara Kabupaten Sikka Tahun 2024

Bulan	Suhu			Kelembaban		
	Min	Maks	Rata-rata	Min	Maks	Rata-rata
Januari	26	30,5	34,6	45	86	97
Februari	26	30,3	34,8	36	71	100
Maret	26	29,3	33,9	45	77	99
April	25	28,6	33	50	83	100
Mei	24	27,1	31,6	70	89	99
Juni	23	25,8	29,9	58	87	100
Juli	22	25,3	29,5	51	85	98
Agustus	22	25,8	29,8	61	83	96
September	23	27,8	30,9	58	76	97
Oktober	25	28,9	31,8	64	79	99
November	25	30,1	32,8	54	74	97
Desember	25	29,1	33,5	49	84	100

Sumber : BMKG Stasiun Fransiskus Seda Sikka, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Sikka dikelilingi oleh Laut Flores dan Laut Sawu dengan iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Wilayah di Kabupaten Sikka memiliki suhu yang cenderung panas. Dari data statistik, suhu tertinggi pada tahun 2024 adalah bulan Januari yaitu sebesar 30,05°C dan terendah pada bulan Juli yaitu sebesar 25,3℃. Kelembaban terendah terjadi pada bulan Februari dengan kelembaban udara sebesar 36,0℃. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Mei yaitu sebesar 89,0℃.

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan nilai komposit atau gabungan dari indeks kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut. Di Kabupaten Sikka pada Tahun 2024 memiliki nilai IKLH dengan kategori baik dengan Nilai 72,82 dengan kategori Baik. Pada tingkatan Nasional Kabupaten Sikka menempati peringkat ke 58 dari 514 Kab./Kota di Indonesia berkaitan dengan indeks kualitas lingkungan hidupnya. Sedangkan pada tingkatan provinsi, Kabupaten Sikka menempati peringkat pertama (1) dari 22 Kab./Kota yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.3 Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,88	60,60	68,98	75,44	72,82
2.	Indeks Kualitas Air	53,75	55,45	50	50	53,33
3.	Indeks Kualitas Udara	90.03	91,67	92,37	92,37	93,72
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,59	41,17	65,66	65,66	67,60

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terdapat fluktuasi dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selama periode tersebut. Penurunan pada tahun 2021 diikuti oleh peningkatan pada tahun 2022 diikuti oleh peningkatan pada tahun 2023 dan meningkat lagi pada tahun 2024. Ini mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup, terutama Indeks Kualitas Air yang semakin menurun secara signifikan pada tahun 2023. Perubahan dalam Indeks Kualitas Air di Kabupaten Sikka selama periode tersebut mengindikasikan tantangan dalam menjaga kualitas air yang sehat. Peningkatan pada tahun 2024 harus lebih meningkatkan untuk mendukung kesehatan dan lingkungan yang berkelanjutan.

Indeks kualitas udara menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam Indeks Kualitas Udara selama periode tersebut, mulai dari 92,37 pada tahun 2023 hingga mencapai 93,72 pada tahun 2024. Ini adalah indikasi positif yang menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Sikka semakin baik.

a) Kualitas Udara

Udara merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi untuk hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Udara mempunyai arti yang sangat penting di dalam kehidupan makhluk hidup dan keberadaan habitatnya. Oleh karena itu pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk mendapatkan udara sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan maka pengendalian pencemaran udara menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara yang mengalami penurunan mutu dan penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Dalam pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara yaitu sumber yang bergerak (umunya kendaraan bermotor), sumber yang tidak bergerak (umunya kegiatan industri) dan kegiatan lainnya. Sementara pengendalian pencemaran udara selalu terkait dengan serangkaian kegiatan pengendalian yang bermuara dari batasan baku mutu udara. Baku udara baik emisi dan baku mutu udara ambien disusun dalam rangka pengendalian pencemaran udara.

Karena tidak tersedianya sarana dan prasarana pemantau kualitas udara di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka maka pemantauan kualitas udara di Kabupaten Sikka dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT yang melakukan pemantauan setahun sekali dan Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Kementrian Lingkungan Hidup setiap 6 bulan mengirimkan alat pemantau kualitas udara ambien Metoda Passive Sampler yang dipasang pada beberapa titik pemantauan dimana hasil dari pemantauan alat ini akan dikirimkan kembali ke Kementrian Lingkungan Hidup untuk diperiksa kualitas udara ambien yang terdapat di Kabupaten Sikka. Kabupaten

Sikka pada Tahun 2024 memiliki nilai indeks kualitas udara 93,72 dengan kategori sangat baik.
Peningkatan jumlah kendaraan di Kabupaten Sikka dapat menjadi salah satu ancaman terhadap kualitas udara di Kabupaten Sikka. Data perkembangan jumlah kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mobil Penumpang	1.726	1.799	1.857	1.892	1.979
Bus	88	91	93	91	91
Truk	2.496	2.622	2.729	2.828	2.936
Sepeda Motor	49.533	52.547	55.122	58.147	61.232
Jumlah	93.847	57.059	59.801	62.958	66.238

Sumber: Kabupaten Sikka dalam angka, 2025

Jika ditilik dari data tabel diatas, adanya kenaikan jumlah kendaraan yang signifikan di Kabupaten Sikka. Jenis kendaraan mobil penumpang, naik sebanyak 87 kendaraan, jenis Truk naik sebanyak 108 kendaraan, dan peningkatan yang paling kelihatan adalah jenis kendaraan sepeda motor yang naik sebanyak 3.085 kendaraan, kemudian untuk jenis kendaraan Bus, tidak ada kenaikan. Pertumbuhan kendaraan ini sangat berpengaruh terhadap emisi karbon yang mengancam kualitas udara di Kabupaten Sikka jika tidak diantisipasi oleh pemerintah.

b) Kualitas Air

Indeks kualitas air di Kabupaten Sikka pada tahun 2024 adalah 53,33, yang terkategori sedang. Pada tingkatan Nasional, Kabupaten Sikka menempati peringkat ke 63 dari 514 Kab/Kota. Sedangkan pada Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka menempati peringkat ke 4 dari 22 Kab./Kota. Berikut terdapat beberapa gambaran berkaitan dengan kualitas pemantauan kualitas air sungai, air sumur dan air laut yang ada di Kabupaten Sikka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Kualitas Air Sungai

Pemantauan Kualitas air kali/sungai belum dilakukan, yang dilakukan adalah pemantauan kualitas sumber air yang mempunyai potensi terkena dampak lingkungan yakni sumber air baku mata air wairpuang Kec. Nita dan sumber air baku mata air wairkibung Kec. Nita.

2) Kualitas Air Sumur

Pemantauan kualitas air sumur meliputi : parameter fisik dan kimia. Parameter fisik meliputi temperature dan residu terlarut. Parameter kimia meliputi pH dan Oksigen terlarut (DO). Parameter fisik yang diuji adalah temperatur dan residu terlarut. Parameter kimia yang diuji adalah pH dan DO. Berdasarkan Peraturan Batas Max Air Minum yakni dalam peraturan pemerintah 22 Tahun 2021 hasil analisis menunjukan bahwa mutu kualitas air tanah (air sumur) berada dibawah baku mutu dan memenuhi syarat sebagai air bersih.

3) Kualitas Air Laut

Hasil pemeriksaan kualitas air laut yang dilakukan oleh petugas/staf Laboratorium BLHD Provinsi NTT meliputi pemeriksaan fisika dan kimia. Diantaranya pemeriksaan fisika meliputi pemeriksaan warna dan temperatur air laut dan pemeriksaan kimia meliputi pH dan Salinitas. Pemeriksaan yang dilakukan untuk parameter biologi dan kimia lain dilakukan di Laboratorium BLHD Provinsi NTT.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah indikator penting dalam pelestarian alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Data pada tabel di atas menunjukkan perbaikan yang tidak konsisten. Tahun 2020-2024 fluktuatif. Indeks di tahun 2020 sebesar 59,59, turun menjadi 41,17 pada tahun 2021 yang kemudian meningkat lagi secara signifikan menjadi 65,66 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 tidak ada peningkatan nilai indeks dan ada kenaikan menjadi 67,60 pada tahun 2024.

Tutupan Lahan di Kabupaten Sikka meliputi bandara, danau/situ, empang/waduk, hutan lahan basah, hutan lahan kering, pasir pasut, perkebunan, permukiman dan tempat berkegiatan, rawa, rumput/tanah kosong, Semak belukar, Sungai, dan tegalan.

Hal ini dapat menjadi perhatian untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi penggunaan sambungan air di masa mendatang.

5. Ketahanan Energi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi pada pasal 1 yang dimaksudkan dengan ketahanan energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Ketahanan energi dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 menjelaskan ketahanan energi terbagi atas Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* dan Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*. Secara kabupaten Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* dan Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)* tidak dihitung oleh ESDM Provinsi NTT.

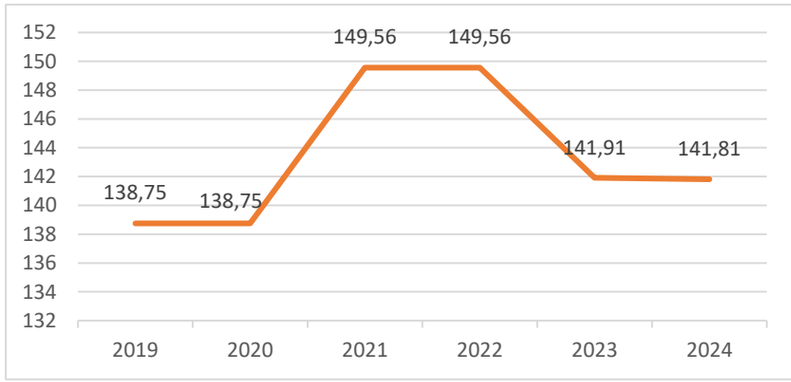
6. **Indeks Risiko Bencana**

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah perangkat analisis kebencanaan yang menunjukan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. Indeks ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap Kabupaten/Kota di Indonesia.

Indeks ini dihitung melalui beberapa komponen yaitu bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempabumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logisitik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.

Indeks Resiko Bencana Indonesia di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2024 yang dikeluarkan oleh BNPB dapat dilhat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.1 Grafik Indeks Resiko Bencana



Sumber LKPJ : 2025

IRB Kabupaten Sikka 2019-2024 mengalami fluktuatif. Kabupaten Sikka berada dalam indeks resiko sedang. IRB Kabupaten Sikka pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 138.75, pada tahun 2021 dan 2022 meningkat sebesar 149.56, dan pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan menjadi 141.81.

b. Demografi

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (2) yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk suatu negara atau daerah bisa diartikan menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal atas daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dalam sosiologi penduduk adalah kumpulan manusia yang telah menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk dalam suatu daerah dapat bertumbuh negatif maupun positif. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah dari penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna dalam memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah pada masa yang akan datang titik dengan diketahui jumlah dari penduduk maka akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk dalam aspek sosial, ekonomi maupun politik. Pertumbuhan dari penduduk memengaruhi secara langsung upaya peningkatan mutu maupun manfaat sumber daya manusia. pertumbuhan penduduk juga bisa berpengaruh terhadap kemampuan sumber daya alam untuk memberikan daya dukung dan daya tampung.

Berdasarkan data sistem informasi administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tahun 2024 dapat ditampilkan pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Paga	16.715	16.798	16.801	17.308	17.656
Mego	13.257	13.408	13.489	13.816	9.908
Tanawawo	8.906	9.101	9.219	9.572	14.522
Lela	11.763	11.835	11.803	11.949	12.165
Bola	10.978	10.933	10.829	10.893	11.175

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Doreng	12.100	12.228	12.085	12.382	12.803
Mapitara	6.702	6.792	6.726	7.022	7.412
Talibura	22.887	23.392	23.401	24.436	25.396
Waigete	25.570	25.866	26.171	26.998	8.929
Waiblama	8.353	8.395	8.308	8.536	27.659
Kewapante	14.696	14.872	14.918	15.334	15.612
Hewokloang	9.409	9.548	9.541	9.691	9.948
Kangae	18.313	18.444	18.545	19.039	19.451
Palue	9.363	9.417	9.449	9.874	6.442
Koting	6.403	6.506	6.513	6.751	6.786
Nelle	6.264	6.230	6.202	6.331	10.258
Nita	22.375	22.409	22.246	22.796	23.715
Magepanda	12.987	13.225	13.477	14.152	14.682
Alok	32.102	32.483	32.524	32.673	32.962
Alok Barat	22.321	22.661	22.993	23.890	24.548
AlokTimur	32.365	32.711	32.959	33.568	34.585
Jumlah	323.828	327.254	328.199	337.011	346.614

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sikka mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 mencapai 323.828 jiwa, kemudian pada tahun 2021 mencapai 327.254 jiwa, tahun 2022 mencapai 328.199 jiwa, tahun 2023 mencapai 337.011 jiwa. Sedangkan pada tahun 2024 mencapai 346.614 jiwa.

Tabel 2.6 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jml Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per Km^2
1	Paga	71,52	17.656	5,09	228,08
2	Tanawawo	89,55	9.908	2,86	112,14
3	Mego	101,9	14.522	4,19	147,59
4	Lela	45,96	12.165	3,51	267,25
5	Bola	44,97	11.175	3,22	249,72
6	Doreng	54,03	12.803	3,69	237,64
7	Mapitara	82,89	7.412	2,14	89,40
8	Talibura	287,30	25.396	7,33	99,74
9	Waiblama	120,05	8.929	2,58	67,49
10	Waigete	233,01	27.659	7,98	118,77
11	Kewapante	22,09	15.612	4,50	678,72
12	Hewokloang	17,9	9.948	2,87	528,38
13	Kangae	39,69	19.451	5,61	503,48
14	Nelle	13,31	6.442	1,86	432,88
15	Koting	14,16	6.786	1,96	434,49
16	PaluE	39,69	10.258	2,96	258,45
17	Nita	111,72	23.715	6,84	211,06
18	Magepanda	136,21	14.682	4,24	101,09
19	Alok	21,04	32.962	9,51	3265,23
20	Alok Barat	48,17	24.548	7,08	468,98
21	Alok Timur	80,20	34.585	9,98	1990,40
	TOTAL	**1.675,36**	**346.614**	**100**	**216,76**

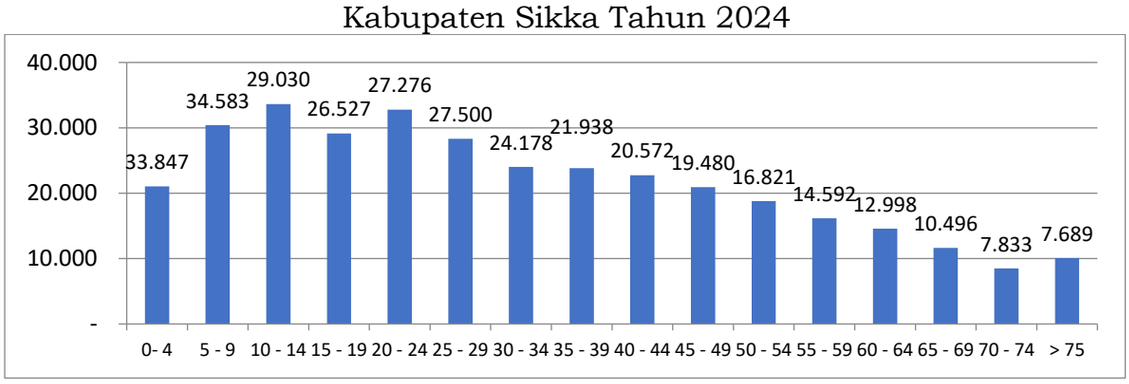
Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Sikka pada tahun 2024 sebanyak 346.614 jiwa dengan luas wilayah sebesar 1.675,36 km^2 sehingga kepadatan penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebesar 216,76 jiwa per km^2. Kepadatan penduduk dihitung berdasarkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi. Penduduk yang paling padat berada di Kecamatan Alok sebesar 3.265,23 jiwa per km^2 sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk yang jarang terdapat di Kecamatan Waigete yakni sebanyak 67,49 jiwa per km^2.

1. **Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur**

Komposisi penduduk menurut umur dapat memberikan suatu ciri terhadap penduduk apakah tergolong sebagai penduduk yang produktif atau yang tidak produktif. Komposisi seperti ini dapat menggambarkan pola perilaku sosial ekonomi penduduk. Penduduk yang berumur 0-14 tahun dan yang berumur lebih dari 64 tahun dikategorikan sebagai penduduk yang tidak produktif. Komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten Sikka Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.2 Grafik Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Sikka Tahun 2024



Sumber: Kabupaten Sikka dalam angka, 2024

Berdasarkan grafik diatas, Jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok umur 10-14 tahun sebesar 29.030 jiwa dan Jumlah penduduk paling sedikit adalah kelompok umur 75+ tahun dengan jumlah 7.689 jiwa. Usia produktif di Kabupaten Sikka pada kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 211.882 jiwa atau 63,82% dan jumlah penduduk usia non produktif sebanyak 123.478 jiwa atau 36,81%.

2. **Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan**

Komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan adalah untuk mengukur penduduk menurut jenis pekerjaan yang dilakukannya. Komposisi penduduk menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7 Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Kabupaten Sikka Tahun 2024

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/ Tidak Bekerja	59.487
2	Mengurus Rumah Tangga	59.443
3	Pelajar/Mahasiswa	83.392
4	Pensiunan	2.350
5	Pegawai Negeri Sipil	4.570
6	Tentara Nasional Indonesia	291
7	Kepolisian RI	628
8	Perdagangan	107

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
9	Petani/Pekebun	89.205
10	Peternak	51
11	Nelayan/Perikanan	7.546
12	Industri	23
13	Konstruksi	15
14	Transportasi	15
15	Karyawan Swasta	8.438
16	Karyawan BUMN	333
17	Karyawan BUMD	106
18	Karyawan Honorer	1.836
19	Buruh Harian Lepas	1.577
20	Buruh Tani/Perkebunan	100
21	Buruh Nelayan/Perikanan	27
22	Buruh Peternakan	4
23	Pembantu Rumah Tangga	62
24	Tukang Cukur	10
25	Tukang Listrik	13
26	Tukang Batu	574
27	Tukang Kayu	406
28	Tukang Sol Sepatu	2
29	Tukang Las/Pandai Besi	25
30	Tukang Jahit	112
31	Penata Busana	3
32	Penata Rambut	9
33	Mekanik	60
34	Seniman	5
35	Perancang Busana	1
36	Pendeta	9
37	Pastor	311
38	Wartawan	27
39	Ustadz/Mubaligh	1
40	Anggota DPRD Provinsi	1
41	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	24
42	Dosen	371
43	Guru	5.672
44	Pengacara	14
45	Notaris	8
46	Arsitek	2
47	Konsultan	4
48	Dokter	96
49	Bidan	710
50	Perawat	643
51	Apoteker	32
52	Penyiar Radio	1
53	Pelaut	318
54	Sopir	3.040
55	Pedagang	392
56	Perangkat Desa	670
57	Kepala Desa	16
58	Biarawati	939
59	Wiraswasta	11.158
60	Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	628
61	Tenaga Tata Usaha	1
62	Operator	3
63	Teknisi	3
64	Pekerjaan Lainnya	693
	TOTAL	**346.614**

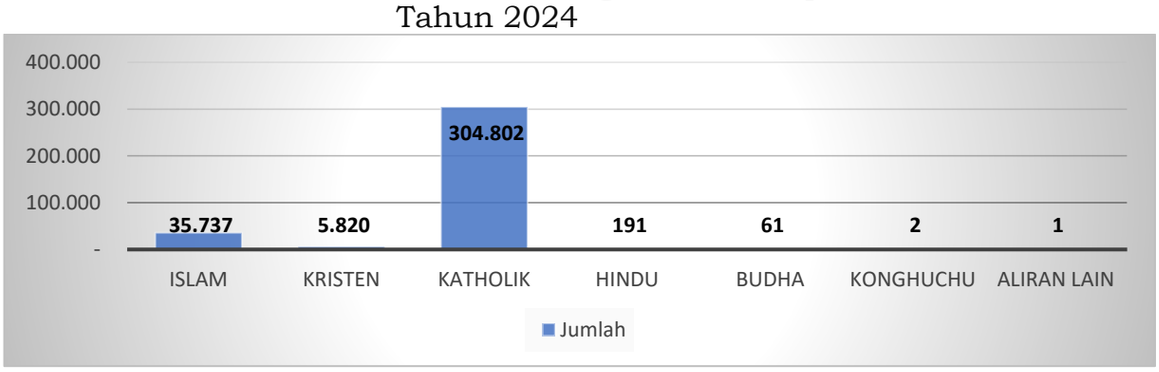
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Berdasarkan tabel di atas Jenis pekerjaan dengan penduduk terbanyak pada tahun 2024 adalah dari sektor pertanian/perkebunan sejumlah 89.205 jiwa atau sebesar 25,73%. Sedangkan jenis pekerjaan lain menyumbang sebesar 693 jiwa atau sebesar 0,19%. Yang belum memiliki pekerjaan atau tidak bekerja sebesar 59.487 atau sebesar 17,16%.

3. Penduduk Menurut Agama

Penduduk menurut agama menggambarkan komposisi atau distribusi penduduk berdasarkan agama yang dianutnya. Komposisi penduduk menurut agama yang dianutnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Sikka Tahun 2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Berdasarkan grafik di atas, Penduduk yang menganut agama Katholik adalah yang paling besar sejumlah 304.805 jiwa sedangkan penganut agama yang paling kecil adalah aliran lain-lainnya sejumlah 1 jiwa.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi 2 (dua) fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan fokus pada kesejahteraan sosial. Berikut data dan analisis atas kedua fokus tersebut.

A. Kesejahteraan Ekonomi

1. Struktur Ekonomi Wilayah

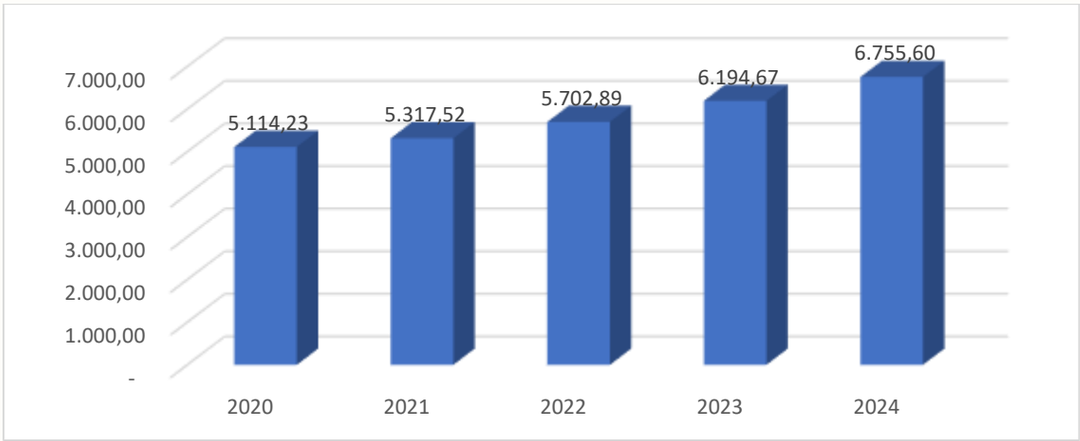
Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tidak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar dan lain-lain. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai indikator-indikator ekonomi daerah sebagai berikut:

2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dari masyarakat dalam wilayah domestik suatu daerah. PDRB terdiri dari :

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
   PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun perhitungan. PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

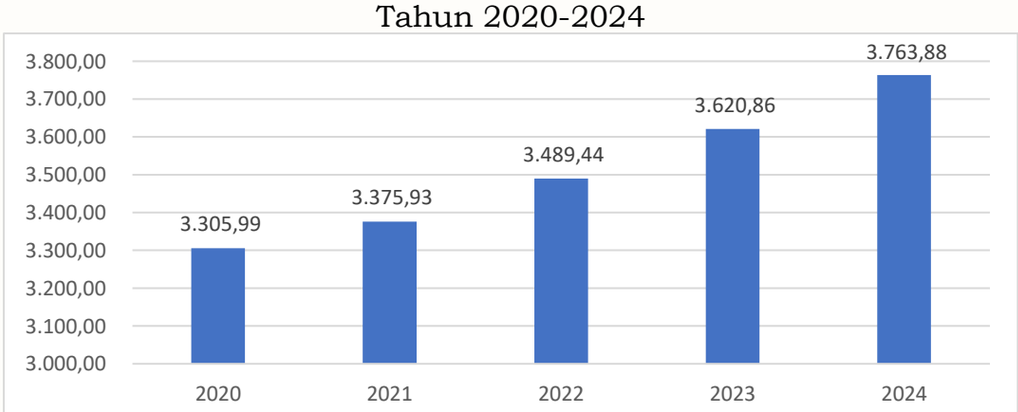


Sumber Data : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2020 sebesar Rp5.114,23,- triliun mengalami kenaikan pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp5.317,52,- triliun pada Tahun 2022 meningkat lagi menjadi Rp5.702,89, triliun pada Tahun 2023 naik menjadi sebesar Rp6.194,67 triliun dan pada Tahun 2024 naik menjadi sebesar Rp6.755,60 triliun.

2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).
   PDRB ADHK dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



Sumber : Data Olahan dari Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

PDRB ADHK Kabupaten Sikka dari Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 PDRB ADHK sebesar Rp3.305,99 triliun mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp3.375,93, triliun naik pada Tahun 2022 menjadi sebesar Rp3.489,44 triliun dan naik pada tahun 2023 sebesar Rp3.620,86 triliun dan naik lagi pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp3.763,88.

3. Pembentukan Sektor dalam PDRB
   Pembentukan Nilai PDRB dari masing-masing Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8. Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Sektor	Nilai (Rp. Juta)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.162.265,78	1.203.838,17	1.255.464,77	1.309.050	1.351.600
2	Pertambangan dan Penggalian	44.796,23	45.765,52	46.792,06	47.770	49,410
3	Industri Pengolahan	54.264,11	54.780,10	58.362,76	62,760	65,170
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.326,75	4.591,35	4.670,87	5.200	5,670
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.488,46	3.757,46	3.788,48	3.850	3,920
6	Konstruksi	168.823,53	173.110,78	174.588,89	188.310	192,860
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	357.056,81	362.122,77	387.588,56	409.900	447,160
8	Transportasi dan Pergudangan	175.100,96	178.803,10	186.938,10	191.300	182,870
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20.213,73	20.946,90	22.067,05	23.530	24,750
10	Informasi dan Komunikasi	302.298,42	315.765,87	331.317,48	344.760	360,250
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	111.956,04	113.940,61	114.825,90	115..740	119,500
12	Real Estate	66.857,53	68.829,71	71.260,99	73.690	76,500
13	Jasa Perusahaan	6243,02	5611,22	5772,34	6.120	6,460
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	426.643,91	426.170,20	427.024,36	427.570	443,730
15	Jasa Pendidikan	288.754,74	284.115,88	283.636,58	292.000	309,850
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69.519,82	72.695,28	73.963,49	75.470	78,810
17	Jasa lainnya	43.060,78	41.186,00	41.761,91	43.800	45,360
	PDRB	**3.305.670,65**	**3.376.030,93**	**3.489.820**	**3.620.860**	**3.763.880**

Sumber: *Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025*

Dilihat dari sumber pembentuknya, PDRB Kabupaten Sikka hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian, dengan nilai sekitar Rp1,3 triliun lebih. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2024, Nilai sektor sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp1.351.600 triliun, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp447,160,- dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp443,730 triliun. Sedangkan nilai sektor yang paling kecil pada sektor Jasa Perusahaan sebesar Rp6.460 triliun, sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp5.670 triliun dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp3.920 triliun.

Dari Besaran pembentukan Nilai PDRB dari masing-masing Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 secara Persentase dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9. Persentase Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Sektor	Kontribusi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	36,41	37,43	38,17	38,53	38,51
2	Pertambangan dan Penggalian	1,14	1,12	1,09	1,04	0,99
3	Industri Pengolahan	1,75	1,7	1,71	1,84	1,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,13	0,13	0,14	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08
6	Konstruksi	4,74	4,76	4,71	4,85	4,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,48	10,36	10,79	11,12	11,41
8	Transportasi dan Pergudangan	5,15	5,06	5,39	5,57	4,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61
10	Informasi dan Komunikasi	6,25	6,3	6,19	5,96	5,88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,86	3,92	3,95	3,75	3,61
12	Real Estate	1,94	1,91	2	2,06	2,17
13	Jasa Perusahaan	0,2	0,18	0,18	0,17	0,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,22	12,86	12,08	11,55	11,88
15	Jasa Pendidikan	10,63	10,17	9,65	9,41	9,63
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,16	2,24	2,14	2,19	2,39
17	Jasa lainnya	1,24	1,16	1,13	1,11	1,1
	PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

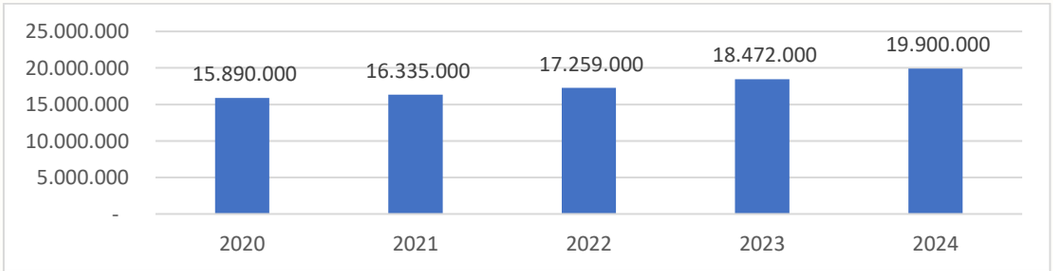
Sumber: *Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025*

Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Sikka hingga tahun 2024 masih didominasi dari sektor pertanian sebesar 38%, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 11,41%, dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,88%. Sedangkan kontribusi sektor yang paling kecil pada sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,17%, sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,13% dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang hanya berkontribusi sebesar 0,08%.

3. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita dihitung dengan membagi total pendapatan (seperti Produk Domestik Bruto/PDB) dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita Kabupaten Sikka dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2020 Pendapatan perkapita Kabupaten Sikka sebesar Rp15.890.000 naik lagi pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp16.335.000,-. Pada tahun 2022 Pendapatan Perkapita naik menjadi sebesar Rp17.259.000,- dan pada tahun 2023 naik lagi menjadi sebesar Rp18.472.000,-. Pada Tahun 2024 Pendapatan Perkapita menjadi sebesar Rp.19.900.000,-. Pendapatan perkapita Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.6 Pendapatan Perkapita Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

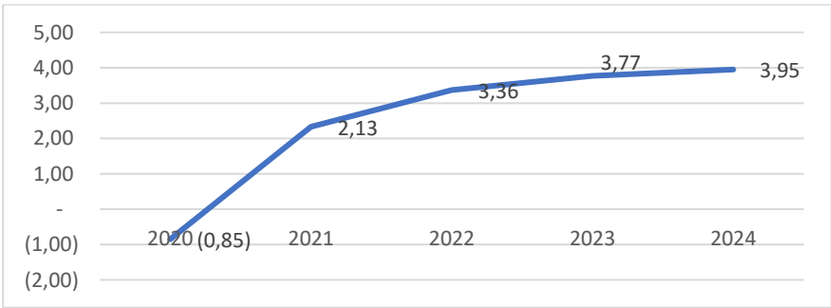


Sumber: *Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025*

4. **Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka selama periode tahun 2020–2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kabupaten sikka -0,85 mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 2,13% dan terus meningkat pada tahun 2022 sebesar 3,37%, naik lagi tahun 2023 sebesar 3,77% dan pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan lagi menjadi 3,95%.

Grafik 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



Sumber: *Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025*

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka dilihat dari Pertumbuhan masing-masing sektor PDRB menurut sektor/lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,8	3,58	4,24	4,32	3,25
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,29	2,16	2,24	2,10	3,42
3.	Industri Pengolahan	-3,26	0,95	6,54	7,53	3,84
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	8,73	6,12	1,73	11,28	9,16
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,18	7,71	0,83	1,73	1,65
6.	Konstruksi	-8,71	2,54	0,85	7,86	2,42
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,18	1,42	7,03	5,71	9,20
8.	Transportasi dan Pergudangan	-17,35	2,11	4,5	2,33	-4,40
9.	Penyediaan Akomodasi makan dan Minum	-15,24	3,63	5,35	6,19	5,21
10.	Informasi dan Komunikasi	7,21	4,46	4,93	4,06	4,49
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,44,	1,77	0,78	0,79	3,25
12.	Real Estate	-2,32	2,95	3,53	3,41	3,81
13.	Jasa Perusahaan	-31,07	-10,12	2,87	6,09	5,50
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,14	-0,11	0,2	0,13	3,78
15.	Jasa Pendidikan	0,72	-1,61	-0,17	2,96	5,95
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,9	4,57	1,74	2,04	4,43
17.	Jasa Lainnya	-11,52	-4,35	1,4	4,87	3,58
	Total	**-0,85**	**2,13**	**3,37**	**3,77**	**3,95**

Sumber: *Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025*

Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dari masing-masing sektor lapangan usaha kontribusi PDRB Kabupaten Sikka tahun 2024 tertinggi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,20 meningkat dari 5,71 pada tahun 2023. Sektor Jasa pendidikan sebesar 5,95 meningkat dari Tahun 2023 sebesar 2,96. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 4,43 meningkat dari tahun 2023 sebesar

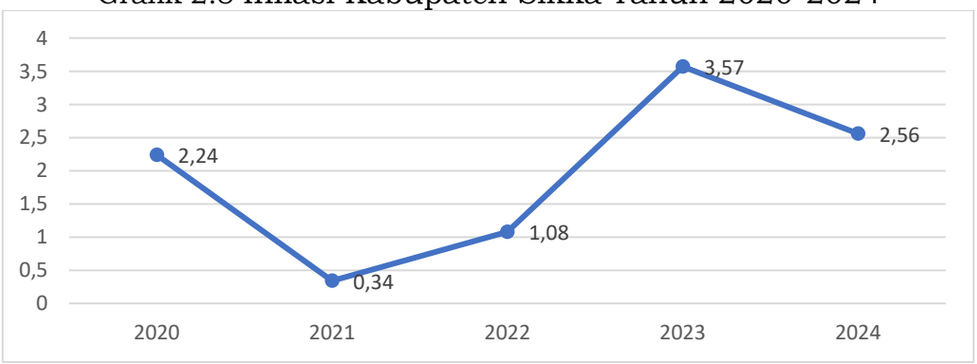
2,04, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,25 meningkat dari Tahun 2023 sebesar 0,79.

Sedangkan Sektor ekonomi yang mengalami perlambatan terdapat pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar -4,40 menurun dari Tahun 2023 sebesar 2,33, Sektor Industri Pengolahan sebesar 3,84 menurun dari Tahun 2023 sebesar 7,53, Sektor Konstruksi sebesar 2,42 pada tahun 2024 menurun dari Tahun 2023 sebesar 7,86.

5. **Inflasi**

Inflasi adalah proses kenaikan harga barang-barang secara umum. Apabila terjadi kenaikan harga barang (inflasi) tanpa dibarengi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, maka akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan akibatnya adalah terjadinya kemacetan transaksi yang selanjutnya akan berdampak pada sektor produksi dan perekonomian secara keseluruhan.

Grafik 2.8 Inflasi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa inflasi Kabupaten Sikka mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 inflasi sebesar 2,24 persen, menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,34 persen. Pada tahun 2022 naik menjadi sebesar 1,08 persen, naik lagi pada tahun 2023 menjadi sebesar 3,57 persen dan turun pada tahun 2024 menjadi sebesar 2,56 persen.

Jika dibandingkan dengan Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024 sebesar 0,47 dan Nasional sebesar 1,57, Maka Inflasi Kabupaten Sikka masih terlalu tinggi. Perbandingan Inflasi Kabupaten Sikka dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11 Inflasi Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Wilayah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Sikka	2,24	0,34	1,08	3,57	2,56
2.	Provinsi NTT	0,61	1,67	6,65	2,42	0,47
3.	Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57

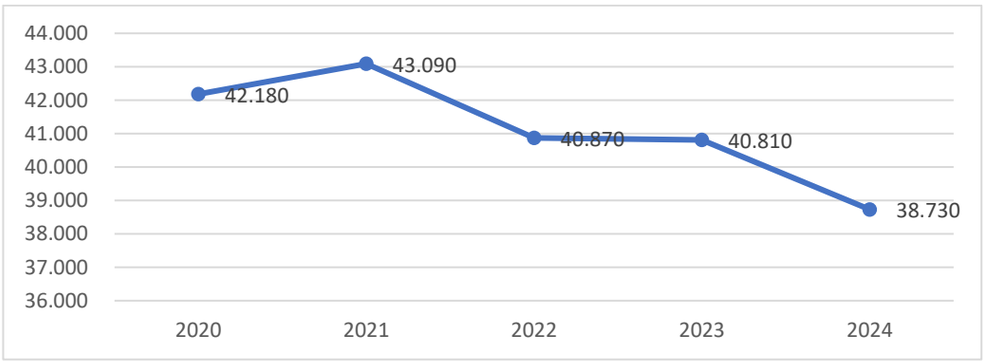
Sumber : NTT dalam Angka, 2025

6. Angka Kemiskinan

Kesuksesan pembangunan dapat diukur dengan angka kemiskinan yang dihitung berdasarkan persentase orang miskin di suatu wilayah. Persentase orang miskin di Kabupaten Sikka lebih rendah dibandingkan dengan tingkat Provinsi NTT, namun lebih tinggi dari Nasional. Jika dibandingkan dengan penurunan kemiskinan di tingkat provinsi dan nasional, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sikka mengalami perkembangan yang tidak positif.

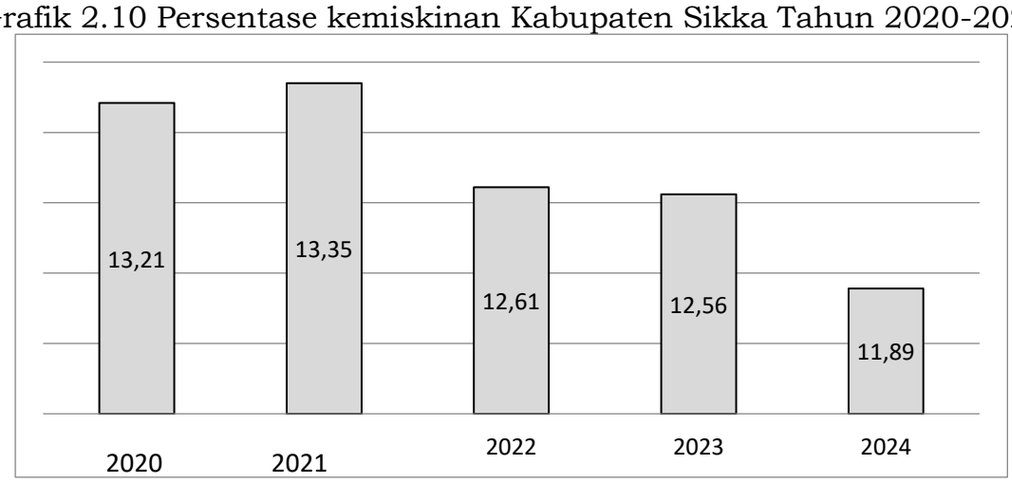
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sikka dari Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.9 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



Dari grafik diatas, Jumlah Penduduk miskin Kabupaten Sikka dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 42.180 jiwa (13,12%), naik pada tahun 2021 menjadi 43.090 jiwa (13,35), turun lagi di tahun 2022 menjadi 40.870 jiwa (12,61%) dan turun Lagi di tahun 2023 menjadi 40.810 jiwa (12,56%) dan di tahun 2024 turun lagi menjadi 38.730 jiwa (11,89%). Persentase kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 2.10 Persentase kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



7. Indeks Gini

Indeks Gini (Rasio Gini) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu wilayah. Rasio Gini erat berkaitan dengan corak dan karakter ekonomi yang mewarnai suatu daerah. Rasio Gini menghasilkan angka antara 0 dan 1, dimana nilai 0 mengindikasikan adanya kesetaraan sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan ekstrem.

Analisis Rasio Gini dalam evaluasi RPJPD dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tingkat kesenjangan sosial-ekonomi dalam wilayah tersebut. Dengan mengevaluasi Rasio Gini, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi daerah atau kelompok masyarakat yang mengalami ketimpangan yang tinggi, sehingga dapat merancang program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi kesenjangan dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut merupakan kondisi Rasio Gini di Kabupaten Sikka dari tahun 2020-2024.

Tabel 2.12 Indeks Gini Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sikka	0,384	0,361	0,342	0,326	0,299
Propinsi NTT	0,354	0,339	0,34	0,325	0,316
Nasional	0,385	0,381	0,381	0,388	0,381

Sumber: BPS, Kabupaten Sikka Dalam Angka 2024, Provinsi NTT Dalam Angka 2024, Statistik Indonesia 2020-2024

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa indeks gini Kabupaten Sikka dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2020 indeks gini Kabupaten Sikka sebesar 0,384, naik pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,361, turun pada tahun 2022 menjadi sebesar 0,342, turun pada tahun 2023 menjadi sebesar 0,326, turun pada tahun 2024 menjadi sebesar 0,299.

B. Kesejahteraan Sosial Budaya

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam kerangka kualitas hidup manusia, untuk mencapai kualitas hidup manusia yang baik memerlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas-sektor, serta kapasitas untuk melaksanakannya. Kualitas hidup manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya IPM. IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

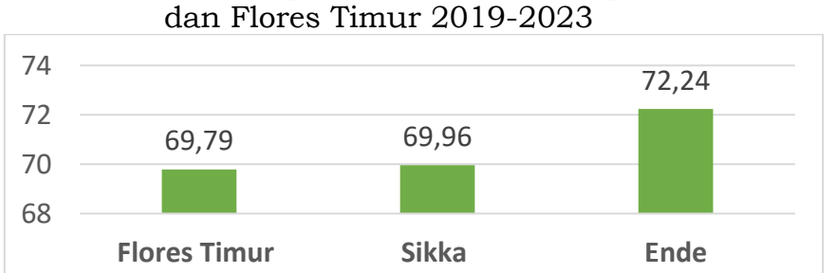
Grafik 2.11
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2024

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sikka	67,77	68,08	68,66	69,41	69,96
Propinsi NTT	65,19	65,28	65,9	66,68	69,14
Nasional	71,94	72,29	72,91	74,39	75,02

Sumber: BPS, Kabupaten Sikka Dalam Angka 2024, Provinsi NTT Dalam Angka 2024, Statistik Indonesia 2020-2024

IPM Kabupaten Sikka pada tahun 2024 sebesar 69,96 dengan kenaikan sebesar 0,76 poin dari capaian tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sikka tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 lebih rendah dibandingkan IPM Provinsi NTT dan Nasional, sedangkan pada tahun 2024 IPM Kabupaten Sikka lebih tinggi dari IPM Provinsi NTT tetapi lebih rendah IPM Nasional.

Grafik 2.12 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sikka, Ende dan Flores Timur 2019-2023



Jika dibandingkan dengan Kabupaten Flores Timur sebesar 69,79. IPM Kabupaten Sikka pada tahun 2024 lebih tinggi, dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Ende sebesar 72,24.

Kualitas pembangunan manusia diukur dengan sejumlah komponen dasar yaitu, yaitu pendidikan, kesehatan dan hidup yang layak. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mewakili dimensi pendidikan, kualitas hidup yaitu angka harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, dan rata-rata pengeluaran per kapita mewakili dimensi hidup layak. Ringkasan capaian dari faktor pembentuk IPM di Kabupaten Sikka dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.13 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya Tahun 2020-2024

No	Komponen	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Harapan Hidup	64,91	73,49	73,75	73,97	74,24
2	Rata-Rata Lama Sekolah	7,76	8,24	8,67	9,18	9,22
3	Angka Harapan Lama Sekolah	13,16	13,43	13,44	15,97	16,01
4	Usia Harapan Hidup	64,91	67,45	67,86	73,97	74,24
5	Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	15.900	8.021,00	8.362,00	8.678,00	923.314,70
6.	IPM	65,11	68,08	68,66	69,41	69,96

Sumber: BPS, Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2020-2024

2. Sektor Pendidikan

Aspek pendidikan merupakan komponen penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat tercermin dari komponen pendidikan yang di bangun pada suatu daerah. Komponen pertama pada sektor pendidikan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 Tahun ke atas untuk menepuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.13 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada Tahun 2020 adalah 7,76, Tahun 2021

naik menjadi 8,24, Tahun 2022 naik menjadi sebesar 8,67 dan pada Tahun 2023 naik menjadi 9,18 sedangkan pada Tahun 2024 naik menjadi 9,22.

Data Harapan Lama Sekolah (HLS) selama Tahun 2020-2024 menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Dengan rata-rata pertumbuhan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Sikka tahun sebesar 13,67 persen. Pada tahun 2024, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sikka melampaui Provinsi NTT (13,23) dan Nasional (13,21).

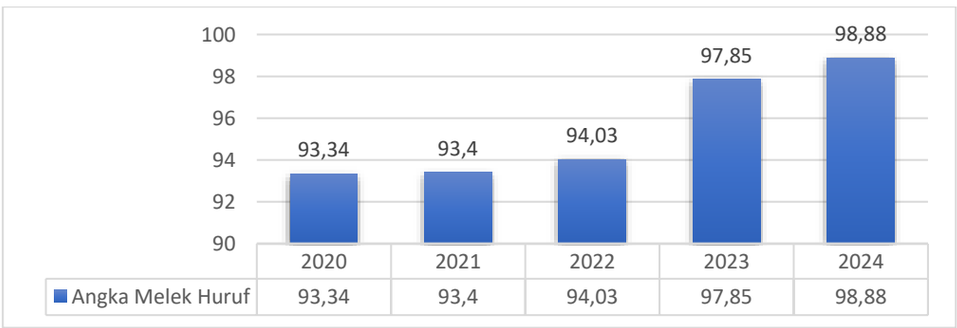
Tabel 2.14. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sikka	13,98	14,89	15,03	15,97	16,01
Propinsi NTT	13,18	13,2	13,21	13,22	13,23
Nasional	12,98	13,08	13,10	13,16	13,21

Sumber: BPS, Kabupaten Sikka Dalam Angka 2024, Provinsi NTT Dalam Angka 2024, Statistik Indonesia 2018-2024

Selain dua indikator tersebut terdapat indikator, meskipun tidak digunakan lagi sebagai komponen menghitung Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH Kabupaten Sikka selama periode Tahun 2019-2024 selalu meningkat sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.14 Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2024



Sumber: Data Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2025

Grafik di atas memperlihatkan perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Sikka terus mengalami peningkatan, pada pada tahun 2020 sebesar 93,34, pada tahun 2021 meningkat menjadi 93,40, pada tahun 2022 meningkat menjadi 94,03 sedangkan tahun 2023 meningkat tajam sebesar 97,85 dan pada tahun 2024 meningkat sebesar 98,88.

3. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Semakin tinggi angka kematian maka semakin tinggi UHH. UHH digunakan sebagai indikator derajat kesehatan penduduk dan kemampuan pemerintah menyediakan fasilitas

kesehatan, terpenuhinya kecukupan gizi dan kalori penduduk, dan kesehatan lingkungan yang baik. UHH diketahui melalui jumlah umur semua orang yang meninggal di Kabupaten Sikka dijumlah kemudian dibagi jumlah orang yang meninggal pada tahun tersebut.

Faktor dominan yang memengaruhi Angka Harapan Hidup adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal-hal yang memengaruhi kelangsungan hidup lebih lama meliputi pola makan, penyakit bawaan dari lahir/penyakit degeneratif, lingkungan tempat tinggal, dan stres atau tekanan. Di sisi lain, faktor-faktor kesehatan yang memengaruhi dan berhubungan dengan Angka Harapan Hidup, termasuk kebiasaan merokok, status gizi, menopause, dan osteoporosis.

Maka, Angka Kematian Bayi yang berusia 0 tahun turut memengaruhi capaian UHH di Kabupaten Sikka secara signifikan. Gambaran Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Sikka pada tahun 2020 Angka Harapan Hidup Kabupaten Sikka mencapai 67,24. Dan pada tahun 2021 Angka Harapan Hidup Kabupaten Sikka mencapai 67,45 atau mengalami kenaikan sebesar 0,21 tahun dibandingkan tahun 2020. Tahun 2022 meningkat menjadi 67,86 atau mengalami kenaikan sebesar 0,41 tahun dibandingkan tahun 2021, pada tahun 2023 meningkat menjadi 73,97 atau mengalami kenaikan sebesar 6,11 dibandingkan tahun 2022, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 74,24 atau mengalami kenaikan sebesar 0,27 dibandingkan tahun 2023. Perbandingan tren data UHH di Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.15 Persentase Usia Harapan Hidup Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024

Komponen	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sikka	67,24	67,45	67,86	73,97	74,24
Propinsi NTT	67,01	67,15	67,47	67,77	71,57
Nasional	71,47	71,57	71,85	72,18	72,39

Sumber: BPS, Kabupaten Sikka Dalam Angka 2024, Provinsi NTT Dalam Angka 2024, Statistik Indonesia 2020-2024

4. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita masyarakat Sikka berdasarkan data BPS tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita masyarakat Sikka sebesar Rp 8.081.000,00. Terjadi peningkatan setiap tahun dan mencapai Rp 9.233.000,00 pada tahun 2024.

Tabel 2.16 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun (dalam ribuan)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sikka	8.081,00	8.021,00	8.362,00	8.678,00	9.233,00
Propinsi NTT	7.598,00	7.554,00	7.977,00	8.248,00	9.758,00
Nasional	11.013,00	11.156,00	11.479,00	11.899,00	11.479,00

Sumber: BPS, Kabupaten Sikka Dalam Angka 2024, Provinsi NTT Dalam Angka 2024, Statistik Indonesia 2020-2024

5. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indeks Ketahanan Pangan adalah Ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Indikator ketahanan pangan meliputi ketersediaan pangan, akses terhadap pangan serta pemanfaatan pangan sebagai aspek-aspek utama penopang ketahanan pangan (Sulistyo & Winarko, 2015). Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabitas pasokan dan harga pangan. Hasil perhitungan IKP 2023 berdasarkan sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan cut off point IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Indeks Ketahanan Pangan Provinsi NTT pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17 Data Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Sikka dan Provinsi NTT Tahun 2020 - 2024

No.	Wilayah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Sikka	72,81	73,54	75,72	73,89	72,81
2	Provinsi NTT	66,92	67,35	68,42	68,42	68,42

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional, 2024

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu dari tahun 2019 sampai pada tahun 2024 indeks ketahanan pangan di Kabupaten Sikka lebih tahan (baik) dibandingkan dengan Provinsi NTT. Hal ini dapat menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Sikka lebih baik di bandingkan provinsi NTT karena Kabupaten Sikka merupakan daerah agraris.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis pada kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan.

Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sikka merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan partisipasi masyarakat terutama dalam memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penilaian masyarakat dalam survei IKM dijadikan dasar pertimbangan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka dalam proses perencanaan pembangunan diwaktu yang akan datang.

Berdasarkan data tersebut maka dapat dianalisis bahwa pada tahun 2020 menandai peningkatan yang signifikan dalam IKM Pelayanan Perizinan, mencapai 91,75 persen. Ini merupakan indikator yang positif dan menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan pelayanan telah berhasil. Pada tahun 2021, meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IKM Pelayanan Perizinan masih tetap tinggi, yaitu 90,25 persen. Meskipun demikian, ini menunjukkan pentingnya terus memantau dan meningkatkan kualitas pelayanan agar tetap memenuhi harapan masyarakat. Terakhir di tahun 2022 mengalami kembali peningkatan IKM Pelayanan Perizinan menjadi 91,75 persen, mencapai level yang sama dengan tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan terus berlanjut. Secara keseluruhan, data menunjukkan tren positif dalam peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Sikka dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2.18 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	IKM Pelayanan Perizinan	91,75%	90,25%	91,75%	91,75%	91,75%
2	IKM Pelayanan Kependudukan	-	-	72,77%	72,77%	72,77%

Sumber: Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024-2026

a. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

1. Pendidikan

Pemenuhan atas hak mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan sebuah keadilan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Warga negara Indonesia akan mendapatkan kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan. Maka dari itu pembangunan manusia melalui dimensi pendidikan menjadi fokus bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam

melaksanakan agenda kebijakan pendidikan yang sangat berkualitas dan berkelanjutan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pendidikan (anak usia dini dan non-formal) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pendidikan pada jenjang SMA dan SMK serta pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kondisi ini menegaskan bahwa pemerintah daerah telah memiliki kewenangan secara otonom dalam memahami masalah, kebutuhan dan lebih bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan agar kemajuan daerahnya masing-masing dan pelayanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Bila ukuran seperti perubahan jumlah murid digunakan, bisa jadi ditemukan penurunan jumlah murid sekolah dasar dengan interpretasi terjadi penurunan partisipasi sekolah. Namun, bila digunakan APS, maka akan ditemukan peningkatan partisipasi di tingkat SD yang disebabkan semakin rendahnya jumlah penduduk usia SD.

Gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk pada umumnya dapat dilihat pada beberapa indikator, antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan jumlah siswa di masing-masing kelompok usia sekolah dibagi jumlah penduduk pada kelompok umur bersangkutan, misalnya APS usia 7-12 tahun adalah jumlah siswa berusia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun, dan seterusnya untuk kelompok usia 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Dalam hal ini bisa saja siswa berusia 12 tahun sudah duduk di bangku SMP atau siswa berusia 16 tahun tetapi masih duduk di bangku SMP.

Dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat dilihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada. Meningkatnya partisipasi sekolah menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Dalam konteks penuntasan Program Wajib Belajar (Wajar) 9 (sembilan) Tahun, angka partisipasi sangat krusial, karena berhubungan dengan sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mencapai angka partisipasi 100 persen di jenjang SLTP. Seperti APS, Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Tabel 2.19 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	APK					
	SD/MI/Paket A	104,23	112,07	110,21	109,83	101,17
	SMP/MTs/Paket B	97,90	113,16	109,41	102,75	91,03
	SMA/SMK/MA/Paket C	103,05	111,57	112,55		
2.	APM					
	SD/MI/Paket A	93,62	96,66	96,74	96,93	88,01
	SMP/MTs/Paket B	78,73	83,03	85,29	88,98	69,56
	SMA/SMK/MA/Paket C	52,48	52,98	53,60		
3.	APS					
	SD/MI/Paket A	97,18	99,34	99,38	99,92	
	SMP/MTs/Paket B	79,92	97,7	97,76	98,13	
	SMA/SMK/MA/Paket C	31,19	32,11	32,57		

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka; Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka, 2024; dan Statistik Pendidikan NTT, 2024

Data menunjukkan adanya variasi nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun ke tahun, baik pada tingkat SD, SMP, maupun SMA. Di tingkat SD, APK pada tahun 2020 sebesar 104,23, pada tahun 2021 naik menjadi 112,07 persen, tahun 2022 turun menjadi 110,21 persen, tahun 2023 turun menjadi 109,83 dan tahun 2024 turun lagi menjadi 101,17 persen. Sementara itu, di tingkat SMP, APK mengalami fluktuasi dengan tren naik-turun dalam empat tahun terakhir, sedangkan di tingkat SMA, APK mengalami peningkatan selama periode yang sama. Meskipun demikian, fluktuasi ini menunjukkan peningkatan jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan tingkat pendidikan yang sesuai.

Selain APK, APM juga mengalami fluktuasi dalam periode 2020-2024 untuk tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA. APM di tingkat SD pada tahun 2020 sebesar 93,62 persen, kemudian naik menjadi 96,93 persen pada tahun 2023 dan turun menjadi 88,01 pada tahun 2024. Di tingkat SMP, APM mengalami kecenderungan meningkat dari tahun 2020 sampai 2023 yaitu 78,73 persen pada tahun 2020, 83,03 persen pada tahun 2021, 85,03 persen pada tahun 2022, 88,98 pada tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 69,59 persen. Di tingkat SMA, APM juga mengalami fluktuasi, dengan nilai 52,48 persen pada tahun 2020, dan peningkatan menjadi 53,60 persen pada tahun 2022.

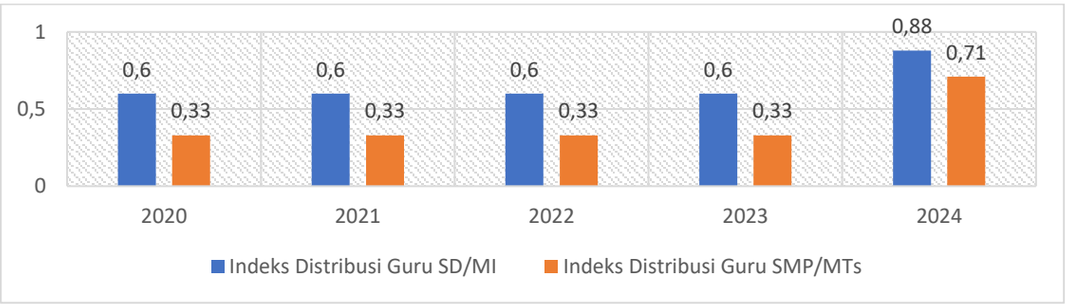
Indeks APK adalah indikator lain dalam aspek pendidikan. APS Kabupaten Sikka pada tingkat SD, SMP dan SMA terus mengalami peningkatan dalam periode 2020-2024.

Meningkatnya partisipasi penduduk dalam pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seharusnya sejalan dengan peningkatan fasilitas pendidikan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, rasio antara rombongan belajar dan ketersediaan ruang kelas diatur. Dalam aturan ini, rasio antara kelas dan rombongan belajar yang ideal yaitu 1:28 (per kelas diisi maksimum 28 siswa). Namun, indikator ini sudah tidak dihitung lagi di Kabupaten Sikka karena ada perubahan indikator sasaran utama. Padahal, Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan baik pada jenjang SD/sederajat maupun SMP/sederajat pada lingkup pemerintah kota atau kabupaten.

Sarana dan prasarana ini mencakup perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Terkait dengan hal ini, prasarana belajar yang penting untuk dimiliki dan diperhatikan oleh setiap satuan pendidikan adalah keberadaan ruang kelas untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (BNSP, 2020). Ketentuan terkait pengaturan ruang kelas ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Rasio guru terhadap murid disesuaikan melalui asesmen nasional menjadi indeks distribusi guru. Indeks Distribusi Guru adalah alat ukur untuk mengetahui ketidakmerataan guru disuatu wilayah. Indeks Distribusi Guru SD Tahun 2020 sebesar 0,6, Tahun 2021 sebesar 0,6, Tahun 2022 sebesar 0,6, Tahun 2023 sebesar 0,6 dan Tahun 2024 sebesar 0,88. Sedangkan Indeks distribusi Guru SMP Tahun 2020 sebesar 0,33, Tahun 2021 sebesar 0,33, Tahun 2022 sebesar 0,33, Tahun 2023 sebesar 0,33 dan Tahun 2024 sebesar 0,71. Indeks Distribusi Guru SD dan SMP/MTs Kabupaten Sikka pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 3.7:

Grafik 2.15 Indeks Distribusi Guru SD dan SMP Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2025.

2. Kesehatan

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara. Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan sehingga pelaksanaannya mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

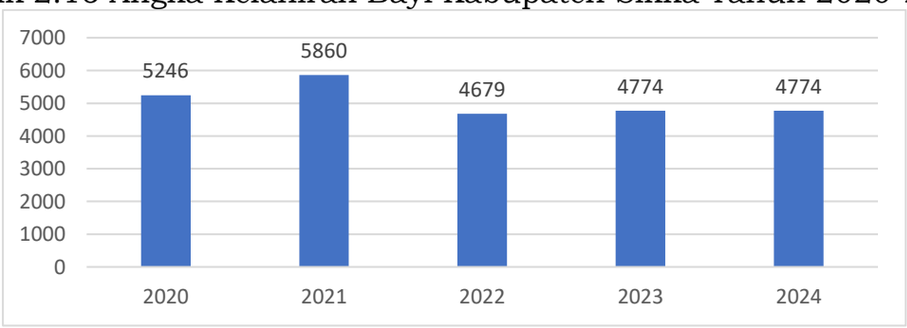
Setiap daerah membuat program dan strategi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, baik berupa pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur, maupun pengembangan sistem pelayanan kesehatan. Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan seperti Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses

terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

a. Angka Kelahiran Bayi dan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kelahiran Bayi, juga dikenal sebagai Angka Kelahiran Total, adalah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya. TFR digunakan untuk membandingkan keberhasilan antarwilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan meningkatkan rata-rata usia kawin, dan meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan denyut nadi. Angka kelahiran bayi tahun 2018 sebesar 5.200 yang menunjukkan seorang ibu melahirkan 9 anak semasa reproduksinya. *Total Fertility Rate* (TFR) terus menurun mencapai angka 4.343 pada tahun 2023.

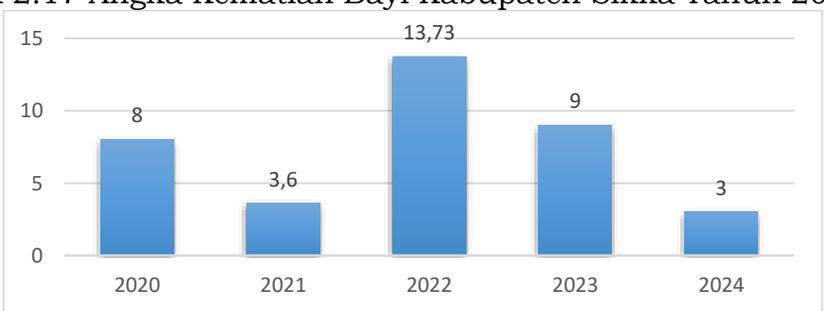
Grafik 2.16 Angka Kelahiran Bayi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTT, 2024

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang berkaitan langsung dengan tingkat kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran pada Tahun 2020 8 per 1000 kelahiran, pada Tahun 2021 menurun menjadi 3,6 per 1000 kelahiran namun pada Tahun 2022 meningkat menjadi 13,73 per 1000 kelahiran. Sedangkan pada Tahun 2023 menurun menjadi 9 per 1000 KLH dan pada Tahun 2024 menurun menjadi 3 per 1000 KLH. Angka Kematian Bayi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.17 Angka Kematian Bayi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



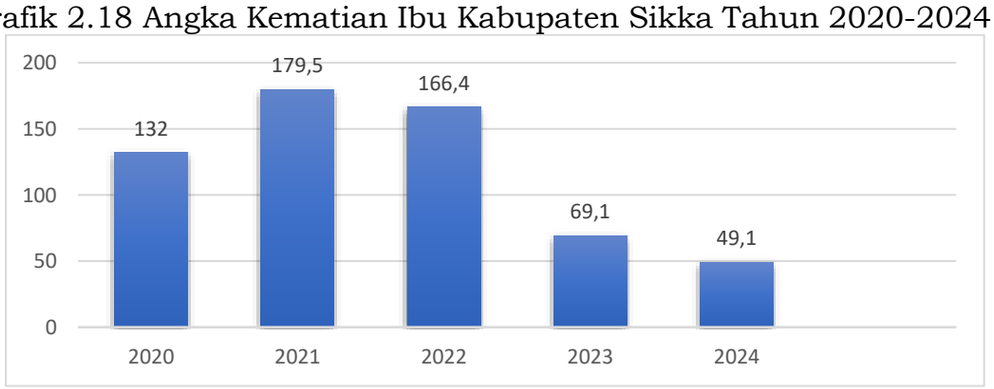
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2025

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sikka. Angka kematian ibu menggambarkan jumlah ibu atau wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) Tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu berguna dalam menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, ibu waktu melahirkan dan masa nifas. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sikka pada tahun 2018 hingga 2023 cenderung fluktuatif. Angka kematian ibu di Kabupaten Sikka pada tahun 2018 sebesar 192/100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 179/100.000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan lagi sekitar 166/100.000 kelahiran hidup. Tahun 2023 mengalami penuruan yang cukup signifikan sebesar 69/100.000 Kelahiran Hidup.

Grafik 2.18 Angka Kematian Ibu Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2025.

Dilihat dari grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa kematian ibu di Kabupaten Sikka mengalami fluktuasi, walaupun masih dibawah target nasional. AKI Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Tahun 2020 sebesar 132 per 100.000 KH (7 kasus), pada Tahun 2021 179,5 per 100.000 KH dan pada Tahun 2022 sebanyak 166,4 per 100.000 KH (8 kasus), sedangkan pada Tahun 2023 turun menjadi 69,1 per 100.000 KH (3 kasus) dan pada Tahun 2024 menjadi 49,1 per 100.000 KH (2 kasus).

c. Balita Gizi Buruk

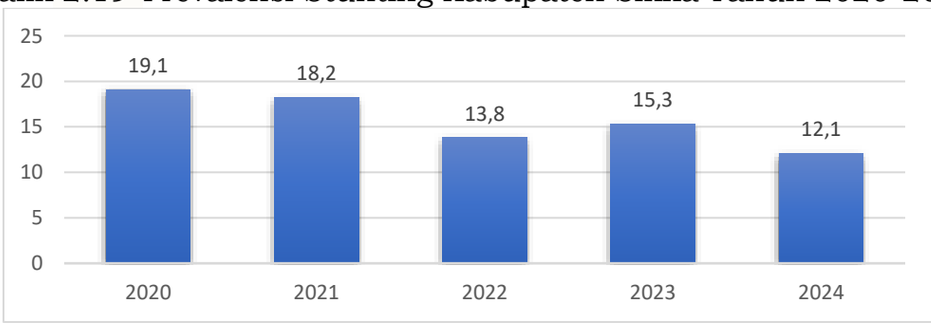
Berdasarkan hasil penimbangan Balita di Posyandu Tahun 2020-2024 kasus gizi kurang yang mendapatkan perhatian dan penanganan dari Pemerintah Kabupaten Sikka yaitu sebesar 100% atau semua balita gizi kurang telah mendapatkan perhatian dari Pemerintah.

d. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standard usianya. Masalah *stunting* dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, pola asuh yang kurang baik, rendahnya akses pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya

adalah akses sanitasi dan air bersih. Prevalensi Stunting Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.19 Prevalensi Stunting Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2025.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian data *stunting* di Kabupaten Sikka sejak Tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi. Kondisi data *stunting* di Kabupaten Sikka pada periode Agustus 2020 tercatat sebesar 19,1 % , pada Tahun 2022 ini mengalami penurunan menjadi 18,7%, pada Tahun 2023 menjadi 15,3 %, dan pada Tahun 2024 turun menjadi 12,1%.

e. Sarana Kesehatan dan Paramedis

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh beberapa jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sikka. Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri dari puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan desa sedangkan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium dan fasilitas kesehatan lainnya.

Tabel 2.20 Rasio Penduduk terhadap Sarana Kesehatan dan Paramedis Kabupaten Sikka Tahun 2019-2024

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Posyandu per satuan balita	26,61	25,36	31,66	36,73	33,54	32,4
2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	0,0008	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
3	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,000009	0,000009	0,000009	0,000009	0,000009	0,000009
4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:0,0040	1:0,0055	1:0,0058	1:0,0071	1:0,0071	1:0,0071
5	Rasio cakupan Desa Uci	91.30	91.30	90	95	84,7	95

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2023

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar atau sosial untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi termasuk Keluarga Berencana, imunisasi bagi para balita gizi dan penanggulangan diare.

Berdasarkan data di atas, rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Sikka pada tahun 2018 sebesar 25,61. Hal ini menunjukkan dari 1000 balita terdapat 25,61 atau 26 posyandu. Rasio posyandu per satuan balita terus

meningkat sampai Tahun 2023 dengan rasio sebesar 33,54 per 1000 balita. Rasio ideal posyandu per satuan balita menurut Kementerian Kesehatan adalah 1:1000. Dengan demikian kecenderungan arah perkembangan cakupan ini sejak tahun 2018 senantiasa masih berada dalam tuntutan ideal.

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan dimana dalam menyelenggarakan upaya kesehatan bagi masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Idealnya rasio puskesmas dengan jumlah penduduk yaitu 1 puskesmas berbanding 1000 penduduk. sebagaimana ketentuan dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas bahwa fungsi Puskesmas Pembantu adalah untuk menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan puskesmas di wilayah kerjanya, yang didirikan dengan perbandingan 1 postu untuk melayani 2 sampai 3 Kelurahan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan rawat inap dan gawat darurat. Rumah sakit di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 1 unit yang mulai beroperasi pada Tahun 2022. Rasio rumah sakit per 1000 penduduk di Kabupaten Sikka tahun 2020 hingga tahun 2023 mencapai 0,009.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk adalah ukuran yang digunakan untuk menilai ketersediaan tenaga medis dalam suatu wilayah atau negara. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi jumlah tenaga medis dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada suatu periode tertentu. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak tenaga medis yang tersedia untuk memberikan layanan kesehatan kepada penduduk. Rasio tenaga medis per satuan penduduk dapat bervariasi antarnegara dan wilayah, tergantung pada faktor-faktor seperti kebijakan kesehatan, distribusi geografis penduduk, tingkat kesehatan, dan faktor-faktor lainnya. Rasio ini dapat dihitung untuk berbagai jenis tenaga medis, termasuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Rasio tenaga medis di Kabupaten Sikka pada tahun 2018 mencapai 35 kemudian meningkat menjadi 71 pada tahun 2022.

Desa UCI (*Universal Child Immunization*) adalah desa/kelurahan dimana 90 persen jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Di Kabupaten Sikka pada tahun 2018, rasio cakupan desa UCI sebesar 91,30 persen. Rasio ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 90 persen, hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 95 persen dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 84,7 persen dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2023 sebesar 95 persen.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Sarana dan Prasarana Jalan

Pengembangan infrastruktur melalui Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah aspek yang sangat penting dalam memajukan suatu daerah. Salah satu titik fokus utama dalam hal ini adalah Sarana dan Prasarana Umum, yang mencakup berbagai elemen seperti jaringan jalan. Dalam konteks Kabupaten Sikka, panjang jalan merupakan salah satu indikator vital dalam mengevaluasi tingkat ketersediaan aksesibilitas transportasi dan konektivitas antarwilayah.

Dalam upaya untuk memahami dan meningkatkan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Sikka, analisis terhadap panjang jalan berdasarkan kondisinya menjadi sangat penting. Informasi mengenai panjang jalan yang terawat dengan baik, yang membutuhkan perbaikan, dan yang belum terlayani secara memadai dapat memberikan pandangan yang holistik tentang status dan kebutuhan infrastruktur jalan di daerah tersebut. Dengan memperhatikan analisis panjang jalan berdasarkan kondisi, pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dapat merencanakan dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Hal ini juga memungkinkan adanya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Sikka.

Tabel 2.21 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2024

No.	Kondisi Jalan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Kondisi Baik	293,013	375,34	376,15	379,71
2.	Kondisi Rusak Sedang	186,127	161,30	161,30	129,30
3.	Kondisi Rusak Ringan	132,884	108,55	108,55	144,55
4.	Kondisi Rusak Berat	232,221	199,06	198,25	227,86
5.	Persentase Jalan Kabupaten (Kondisi Baik)	56,75	63,56	63,56	57,75
6.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten)	844,25	844,25	844,25	881,42

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2025

Kondisi infrastruktur jalan Kabupaten Sikka tahun 2024 pada persentase 57,75%. Pada tahun 2021, panjang jalan yang baik adalah sekitar 293,013 kilometer, dan pada tahun 2024, panjang jalan dalam kondisi baik meningkat menjadi sekitar 379,71 kilometer. Ini mencerminkan upaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Sikka. Namun kondisi jalan yang sedang rusak mengalami fluktuasi, meskipun ada penurunan dari tahun 2021 hingga 2024, kondisi ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebelum kembali menurun pada tahun 2024. Hal ini bisa mengindikasikan tantangan dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan di beberapa wilayah, serta kemungkinan upaya perbaikan yang dilakukan pada tahun 2021, kemudian adanya penurunan yang signifikan dalam panjang jalan dalam kondisi rusak. Pada tahun 2021, panjang jalan dalam kondisi rusak adalah sekitar 132,884 kilometer, dan pada tahun 2024, panjang jalan rusak turun menjadi sekitar 144,55 kilometer. Ini mencerminkan efektivitas upaya perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur jalan di Kabupaten Sikka. Kemudian Kondisi jalan yang rusak berat juga menunjukkan penurunan selama periode tersebut. Meskipun terdapat fluktuasi, data menunjukkan bahwa panjang jalan dalam kondisi rusak berat mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2024. Hal ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam perbaikan infrastruktur jalan yang lebih serius.

Data ini mencerminkan upaya positif dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Sikka selama periode tahun 2021 hingga 2024. Namun, masih diperlukan pemantauan dan alokasi sumber daya yang tepat untuk menjaga dan meningkatkan kondisi jalan yang masih memerlukan perbaikan, terutama yang dalam kondisi rusak.

Tabel 2.22 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Panjang Jalan	1.073,13	1.073,13	1.057,4	1.057,4	1.057,4
2.	Jumlah Kendaraan	53.847	57.063	2.729	2.828	2.936
3.	Rasio	0,0199	0,0188	38,74	37,39	36,01

Sumber: Provinsi NTT Dalam Angka 2024; Dinas PUPR Kabupaten Sikka

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Kabupaten Sikka selama periode 2020-2024 mengalami tren penurunan dalam rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Pada tahun 2020 sebesar 0,0199, pada tahun 2021 sebesar 0,0188, pada tahun 2022 sebesar 38,74, pada tahun 2023 sebesar 37,39 dan pada tahun 2024 sebesar 36,01. Jumlah kendaraan di Kabupaten Sikka terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, atau faktor-faktor lain yang mendorong orang untuk memiliki lebih banyak kendaraan. Meskipun jumlah kendaraan terus meningkat, panjang jalan di Kabupaten Sikka tetap relatif stabil selama periode tersebut, yaitu sekitar 1.057,4. Ini bisa menjadi masalah jika pertumbuhan kendaraan terus berlanjut tanpa perluasan infrastruktur jalan yang sesuai.

Analisis ini menekankan pentingnya perencanaan infrastruktur jangka panjang yang mempertimbangkan pertumbuhan kendaraan. Perluasan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang tepat waktu dan efisien dapat membantu mencegah kemacetan dan memastikan mobilitas yang lancar bagi penduduk Kabupaten Sikka. Berdasarkan analisis ini dapat digunakan untuk menghitung Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 seperti yang terlihat pada Tabel berikut ini

Tabel 2.23 Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2020 -2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Panjang Jalan	Km	844,25	844,25	844,25	844,25	881,42
Jumlah Penduduk	Jiwa	323.828	324.252	327.000	322.181	346.614
Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk	**Km/jiwa**	**0,002624**	**0,002607**	**0,00258**	**0,002620**	**0,002543**

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2025.

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 mengalami penurunan disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun sedangkan panjang Jalan Kabupaten tetap. Jumlah panjang jalan yang stagnan dari tahun ke tahun juga mengindikasikan tidak adanya upaya dalam meningkatkan kuantitas jalan.

Tabel 2.24 Jaringan Irigasi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Jaringan Irigasi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jaringan primer	5.093	4.024	5.093	5.093	5.093
2.	Jaringan Sekunder	70.363	40.546,21	40.546,21	40.546,21	40.546,21
3.	Jaringan Tersier	1.390	-	-	-	-
4.	Luas lahan budidaya	4.357	-	-	-	-
5.	Rasio	17,637	-	-	-	-

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2024

Untuk menunjang sektor pertanian diperlukan adanya upaya penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air. Upaya ini disebut irigasi dimana para petani dapat mengendalikan debit air yang dibutuhkan untuk mengairi lahan pertanian ataupun membuang aliran air ke jaringan pembuangan supaya mencapai hasil panen yang berkualitas dan berkelanjutan. Irigasi didukung oleh berbagai komponen yang kemudian disebut sebagai jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi terbagi menjadi jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan data pada tabel di atas terangkum data jaringan irigasi di Kabupaten Sikka dari tahun 2020-2024. Jumlah jaringan primer stagnan hingga tahun 2020 yaitu sebanyak 5.093 jaringan dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 4.024 meski naik kembali menjadi 5.093 di tahun 2022, tetap dengan jumlah 5.093 pada tahun 2023, dan tetap dengan jumlah 5.093 pada tahun 2024. Jaringan sekunder mengalami penurunan drastis di tahun 2021 menjadi 40.546,21 yang sebelumnya berjumlah 70.363 sejak tahun 2020-2024. Jaringan tersier juga stagnan tanpa penambahan dari tahun 2020-2024 yang diikuti dengan tidak tersedianya data pada tahun 2021-2024 sehingga sulit untuk diketahui jumlah penambahan atau pengurangannya. Dari data tersebut terlihat Kabupaten Sikka masih mengalami permasalahan dalam penyediaan jaringan irigasi. Terlepas tidak tersedianya data luas lahan dan rasio yang dari sejak 2020-2024, dengan asumsi terjadi peningkatan, maka penyediaan jaringan irigasi ini dapat menjadi ancaman yang serius bagi sektor pertanian.

b. Sarana dan Prasarana Sosial

Sarana dan prasarana sosial memiliki peran penting dalam membangun dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Sikka, sebagai bagian dari Indonesia, juga memiliki sejumlah sarana dan prasarana sosial yang merupakan tulang punggung pembangunan wilayah ini. Sarana dan prasarana sosial mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan layanan publik lainnya yang mendukung kehidupan sehari-hari penduduk. Dalam konteks Kabupaten Sikka, penting untuk mengkaji perkembangan, ketersediaan, dan kualitas dari berbagai sarana dan prasarana sosial guna memahami sejauh mana pemerintah daerah telah berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek ini.

Terkait infrastruktur ibadah diketahui bahwa gereja Protestan memiliki rasio tertinggi dibandingkan agama lainnya, yang menunjukkan bahwa gereja Protestan relatif lebih banyak melayani penduduk dibandingkan jumlah unit ibadahnya. Sementara itu, gereja Katolik memiliki rasio yang lebih rendah dibandingkan dengan agama lainnya. Analisis ini dapat membantu dalam pemahaman distribusi sarana ibadah dan pemeluk agama di Kabupaten Sikka.

Tabel 2.25 Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Sikka Tahun 2024

No	Bangunan Tempat Ibadah	Tahun 2024		
		Jumlah (unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio
1	Masjid/Mushola/Langgar	90	24.125	0,003730
2	Gereja Katolik	39	279.242	0,000139
3	Gereja Protestan	11	2.546	0,004321
4	Pura	1	374	0,002674
5	Vihara	1	259	0,003861
	Jumlah	**142**	**306.546**	

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2025

Selain sarana dan prasarana ibadah, terdapat infrastruktur pendidikan. jumlah infrastruktur pendidikan pada berbagai tingkat (TK, SD, SMP, dan SMA) dapat mencerminkan ketidaksetaraan akses pendidikan di Kabupaten Sikka. Wilayah-wilayah yang kehilangan lebih banyak unit pendidikan mungkin mengalami kesulitan dalam memberikan akses pendidikan yang setara. Ini dapat mengarah pada ketimpangan pendidikan antara wilayah-wilayah yang memiliki lebih banyak unit pendidikan dan yang memiliki lebih sedikit unit pendidikan. Siswa di wilayah yang kehilangan unit pendidikan mungkin harus bepergian lebih jauh untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan siswa di wilayah lain, yang dapat menciptakan ketidaksetaraan.

Tabel 2.26 Jumlah Infrastruktur Pendidikan Kabupaten Sikka
Tahun 2021-2024

Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023	2024
Taman Kanak-Kanak (TK)	96	92	92	92
Sekolah Dasar (SD)	343	336	336	336
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	91	89	89	89
Sekolah Menengah Atas (SMA)	47	43	43	45

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Selanjutnya, terkait infrastruktur terjadi peningkatan jumlah posyandu di Kabupaten Sikka sedangkan untuk fasilitas kesehatan lainya di Kabupaten Sikka tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Kabupaten Sikka memiliki satu rumah sakit umum yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten, dan dua rumah sakit swasta. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur rumah sakit dalam kabupaten ini mungkin terbatas. Keterbatasan ini dapat memengaruhi kapasitas penanganan kasus-kasus medis yang serius, terutama dalam situasi darurat atau bencana alam yang mengakibatkan lonjakan pasien.

Tabel 2.27 Infrastruktur Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2023 dan 2024

Fasilitas Kesehatan	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Pemilikan/Pengelola			Pemilikan/Pengelola		
	Pemkab	Swasta	Jumlah	Pemkab	Swasta	Jumlah
Rumah Sakit Umum	1	2	3	1	2	3
Puskesmas Rawat Inap	14	-	14	14	-	14
Puskesmas Non Rawat Inap	11	-	11	11	-	11
Puskesmas Pembantu	61	-	61	61	-	61
Posyandu	650	-	650	650	-	650

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2025

Kaitannya dengan penanganan bencana alam yang tinggi di Kabupaten Sikka, penting untuk memastikan bahwa rumah sakit dan puskesmas memiliki rencana darurat yang kuat untuk menangani korban bencana dan pasien yang memerlukan perawatan medis mendesak. Selain itu, peran Posyandu dalam memberikan penyuluhan dan pemantauan kesehatan masyarakat dapat membantu dalam persiapan dan penanganan pasca-bencana untuk mencegah penyebaran penyakit dan mengatasi kebutuhan kesehatan masyarakat yang mungkin meningkat dalam situasi darurat.

Meskipun infrastruktur kesehatan yang stabil adalah langkah positif, pemangku kepentingan perlu terus memonitor dan mengevaluasi infrastruktur ini untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan tetap sesuai dengan

kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul akibat perubahan iklim atau bencana alam yang lebih sering terjadi.

c. Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memegang peran vital dalam pembangunan Kabupaten Sikka. Dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, strategi penataan ruang yang efektif menjadi kunci untuk mengakomodasi kebutuhan perkotaan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Peruntukan ruang yang cermat, seperti alokasi lahan untuk pemukiman, pertanian, industri, dan pariwisata, harus dipertimbangkan secara seksama untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, integrasi antara Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga memungkinkan Kabupaten Sikka untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan berdaya saing tinggi. Melalui partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, penataan ruang yang berbasis pada peruntukan ruang yang tepat dapat membantu menciptakan kawasan perkotaan yang terencana dengan baik dan infrastruktur dasar yang memadai. Dengan demikian, Kabupaten Sikka dapat menuju arah pembangunan yang berkelanjutan, nyaman, dan aman bagi seluruh penduduknya.

Tabel 2.28 Peruntukan Ruang di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan luas wilayah ber HPL/HGB	-	-	-	-	
2	Persentase Ruang Terbuka Hijau	3,0	0	0	0	0
3	Persentase Ruang Publik yang berubah Peruntukannya	0,35	0	0	0	0

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2024

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2019, Kabupaten Sikka memiliki persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 2,03 persen. Kemudian, persentase tersebut meningkat menjadi 3,0 persen pada tahun 2020. Persentase ini masih sangat jauh dari amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dimana ditetapkan luasan minimal RTH adalah 30 persen dari luas total wilayah perkotaan, dengan proporsi 20 persen sebagai RTH publik dan 10% sebagai RTH privat. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, data mengenai rasio ruang terbuka hijau tidak tersedia, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan analisis terkait peningkatan atau penurunan. Selanjutnya, data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat persentase ruang publik yang mengalami perubahan peruntukannya sebesar 0,35 persen. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, tidak ada data yang tersedia untuk persentase ruang publik yang mengalami perubahan peruntukannya.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi peningkatan dalam persentase Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2020, informasi mengenai peruntukan ruang di Kabupaten Sikka masih terbatas pada beberapa tahun terakhir, terutama pada tahun 2022 dan 2023. Oleh karena itu, diperlukan pengumpulan data yang lebih lengkap dan konsisten untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terkait peruntukan ruang di Kabupaten Sikka.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Aspek perumahan rakyat dan kawasan permukiman menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menganalisis kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman selama periode tertentu, kita dapat mempertimbangkan beberapa indikator kunci yang mencerminkan kondisi dan perkembangan dalam hal ini. Salah satu indikator penting adalah Rasio Rumah Layak Huni, yang mengukur proporsi rumah di wilayah ini yang memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kenyamanan. Rasio Luas Permukiman Layak Huni adalah parameter yang menunjukkan seberapa besar luas wilayah yang telah dibangun dengan permukiman yang memadai. Persentase Luas Permukiman Kumuh adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana wilayah ini menderita dari permukiman yang tidak layak. Indikator lain yang relevan adalah Persentase Jaringan Irigasi, yang mencerminkan sejauh mana wilayah ini memiliki infrastruktur penting untuk pertanian dan distribusi air. Selain itu, Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak menunjukkan sejauh mana penduduk memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang aman dan sehat. Terakhir, Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik mencerminkan kemampuan wilayah ini dalam mengelola air hujan dan meminimalkan risiko banjir serta dampak lingkungan lainnya.

Melalui pemantauan dan analisis indikator-indikator ini, kita dapat memahami kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sikka selama periode 2018-2022, mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan, dan merencanakan tindakan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk yang tersedia pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.29 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Rumah Layak Huni/Persentase rumah layak huni	0,37	0,89	0,52	0,52	1,27
2	Rasio luas permukiman layak huni	99,62	99,36	97,59	97,59	94,77
3	Persentase Luas Permukiman Kumuh / (luas wilayah kumuh yang ada ha)	0,38	0,64	2,41	2,41	145,66 ha
4	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	20.890	20.425	20.004	20.004	19,861
5	Persentase Jaringan Irigasi (ha)	50,71%	46,25%	46,25%	46,25%	1.833,33 ha
6	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak	46,9%	49,34%	50,97%	50,97%	51,03%
7	Persentase Drainase Skala Kota	57,53%	61,67%	64,94%	64,94%	65,36%
8	Jumlah Produksi Listrik	-	-	91.854 Kva	91.854 Kva	8.815.155
9	Jumlah Daya Listrik Terpasang	-	89.335 Kva	89.335 Kva	89.335 Kva	106.084.300

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, Sikka dalam angka, 2025

Jika dilihat pada tabel diatas, kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten terjadi beberapa perubahan yang signifikan. Luas permukiman layak huni relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tingkat kejahatan rendah dan suasana yang aman membuat warga dan pengunjung merasa nyaman beraktivitas. Ketentraman mengacu pada keadaan di wilayah atau masyarakat berada dalam keadaan damai, tenang dan bebas dari gangguan atau ancaman yang dapat menimbulkan ketidakamanan atau kecemasan. Ketertiban umum mengacu pada keadaan dimana masyarakat mematuhi aturan, norma, dan hukum yang berlaku. Hal ini seperti perilaku warga yang tidak melanggar norma-norma sosial atau hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang teratur, terkendali dan aman bagi seluruh anggota masyarakat. Perlindungan masyarakat merujuk pada upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk melindungi keamanan, hak dan kesejahteraan warga dari potensi ancaman atau bahaya baik dari faktor internal maupun eksternal. Berikut data angka kriminalitas di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.30 Angka Kriminalitas Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kasus Narkoba	1	1	1	1	-
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	1	4	3	3	-
3	Jumlah Kejahatan Seksual	5	1	5	5	-
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	39	36	54	54	-
5	Jumlah Kasus Pencurian	25	98	41	41	-
6	Jumlah Kasus Penipuan	9	10	1	1	-
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	0	0	0	-
8	Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun	80	190	286	286	303
9	Jumlah Penduduk	321.953	324.252	327.000	327.000	346.614
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,00024	0,00058	0,00087	0,00087	0,000874171

Sumber: Statistik Kriminal Provinsi NTT 2018-2022, Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data tersebut datas, menunjukkan pentingnya upaya yang berkelanjutan dalam memperkuat tindakan keamanan dan pencegahan kejahatan di Kabupaten Sikka ini. Pihak berwenang perlu melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab fluktuasi ini dan mengimplementasikan strategi yang tepat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sikka. Selanjutnya akan dibahas terkait penegakan perda dan tingkat penyelesaian pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tabel berikut ini menyajikan datanya.

Tabel 2.31 Indikator Kinerja Satpol PP Kab. Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Persen)	100	100	100	100	100
2	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	100
3	Angka Kriminalitas (Jumlah Tindak Pidana)	80	190	286	286	67
4	Persentase perda dan perkada yang ditegakan	55,55	44,44	33,33	33,33	55,55
5	Persentase penyelenggaran trantibumlinmas	370.76	315,55	60	170	223,33
6	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2025

Kab. Sikka memiliki tingkat penyelesaian penyelenggaraan K3 yang bagus dalam lima tahun terakhir, begitu juga dengan penegakan Perda dan cakupan perlindungan masyarakat. Hal ini menunjukan upaya yang telah dikeluarkan dalam penegakan hukum memperlihatkan hasil serta komitmen dan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sikka dalam mengelola dan mempertahankan standar tinggi terkait keselamatan dan kesehatan kerja serta kepatuhan terhadap aturan hukum setempat. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga memberikan dampak positif pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sikka. hal ini juga bisa dilihat dari angka kriminalitas tindak pidana yang kemudian menurun secara drastis menjadi 67 di tahun 2024, setelah tahun-tahun sebelumnya berada di angka ratusan. Hal ini kemudian diikuti dengan persentase penegakan perda dan perkada yang juga turut meningkat di tahun 2024. Dalam hal pelaksanaan kewajiban dalam penyelenggaraan trantibulinmas, sebagaimana telah disebutkan kinerja yang telah dilakukan mendorong nilai penyelenggaraan menjadi di angka 223,33 persen. Sehingga Kab. Sikka dalam hal keamanan di masyarakat sudah sangat terjamin, meski dapat dilakukan peningkatan dalam penegakan tidak hanya perda tapi juga perkada.

Tabel 2.32 Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	3:10000	3:10000	3:10000	3:10000	3:10000
2.	Jumlah linmas per 10.000 penduduk	-	-	78:1000	78:1000	74:10000
3.	Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1
4.	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	18 Menit	18 Menit	18 Menit	18 Menit	--
5.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	21.69%	21.69%	21.69%	21.69%	21.69%

Sumber: RKPD Kabupaten Sikka, 2023

Indikator Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), terdapat perlambatan tingkat waktu tanggap yang mencapai 18 menit, yang mana standar yang seharusnya adalah 15 menit. Waktu tanggap merupakan indikator krusial dalam mengevaluasi kinerja tim pemadam kebakaran dalam merespon situasi darurat. Perlunya upaya untuk memperbaiki respon dan memastikan bahwa tim dapat tiba di lokasi secepat mungkin. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan dalam waktu tanggap dan mengambil tindakan yang tepat, WMK dapat memperbaiki kinerja mereka dalam memberikan layanan yang cepat dan efektif dalam situasi darurat kebakaran. Lebih lanjut dalam hal cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota pada tahun 2019 dan 2020, cakupan pelayanan bencana kebakaran naik presentasenya dari 5 persen ke 21 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal periode, pelayanan terkait kebakaran di Kabupaten Sikka masih belum mengalami perkembangan yang signifikan. Tahun 2021 hingga 2023

menunjukkan lonjakan yang signifikan dalam cakupan pelayanan bencana kebakaran, mencapai 21,69 persen. Ini menandakan kemajuan yang berarti dalam upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki kesiapan dan respon terhadap kebakaran.

6. Sosial

Pelayanan urusan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka menyasar kepada masyarakat yang masuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS sendiri merupakan seseorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan oleh karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut bisa berupa kemiskinan, keterlantaran, kejahatan, ketunaan, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Dalam rangka mengurangi jumlah Penduduk Miskin dan Keluarga Sasaran (PMKS), pemerintah daerah berupaya memberikan bantuan dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial. Terdapat peningkatan persentase PMKS yang menerima bantuan sosial dari pemerintah daerah, yang meningkat dari 22,21 persen pada tahun 2018 menjadi 53,77 persen pada tahun 2022. Sementara itu, persentase PMKS yang ditangani juga mengalami peningkatan dari 55,40 persen pada tahun 2018 menjadi 1,80 persen pada tahun 2022. Ini menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah PMKS di Sikka. Namun Pemerintah Kabupaten Sikka belum melaksanakan indikator persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, serta persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial karena pembangunan panti sosial belum dilakukan.

Tabel 2.33 Indikator Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase PMKS/PPKS yang memperoleh bantuan sosial	39,79	27,11	53,77	53,77	62,81
2.	Persentase PMKS yang tertangani	1,349	11,808	1,80	1,80	1,80
3.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	-	-	-	-	-
4	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	6,25	6,25	6,25	6,25	-

Ket: Pada tahun 2022 PMKS berubah nomenklatur menjadi PPKS
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2023

7. Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah dapat dipandang sebagai refleksi perekonomian dari wilayah tersebut. Sehingga perubahan perekonomian yang terjadi pada suatu wilayah akan berdampak pada masalah ketenagakerjaan yang di antaranya berkaitan dengan masalah pasar kerja di wilayah itu. Kondisi pasar kerja tersebut merupakan elemen penting dalam penentuan permintaan

barang dan jasa dalam perekonomian. Permintaan terhadap barang dan jasa ini selanjutnya akan menentukan permintaan terhadap pekerja yang berarti juga memengaruhi sisi penawaran pekerja. Selain itu, perubahan komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin menentukan siapa yang berpotensi masuk dalam pasar kerja, di samping mutu pendidikan juga memengaruhi pasar kerja. Secara teoritis, ketenagakerjaan (khususnya sisi penawaran tenaga kerja) dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk jumlah penduduk, struktur umur, jenis kelamin, tingkat pendapatan riil dan distribusinya, angka upah riil, struktur ekonomi, partisipasi dalam sistem pendidikan, kebiasaan atau tradisi peran kerja dan partisipasi kerja. Tanpa pertambahan penduduk sekalipun, sebagian besar angkatan kerja di masa mendatang kini sudah lahir.

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerja yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan dan lain-lain.

Tabel 2.34 Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat pengangguran terbuka	4,00	4,54	4,5	2,62	2,33
2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	73,42	73,92	71,62	74,35	73,99
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	2166	311	211	93	343

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2020-2024

Pada tabel di atas menunjukkan keadaan ketenagakerjaan Kabupaten Sikka sejak tahun 2020 menunjukkan kondisi yang tidak cukup menggembirakan, dimana peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diikuti dengan penurunan pengangguran. Dalam lima tahun terakhir, angka pengangguran di Kabupaten Sikka mulai meningkat di tahun 2020. Pada tahun 2021 merupakan puncak tertinggi persentase pengangguran selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 4,54 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia kerja yang terjun ke pasar kerja (sebagai pekerja atau pencari kerja/penganggur) terhadap total penduduk usia kerja. Berdasarkan informasi ketenagakerjaan yang dikumpulkan dalam (Sakernas, 2022) terlihat bahwa keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam angkatan kerja selama periode 2019-2021 mengalami peningkatan pada tahun 2021, yakni dari 65,91 persen pada tahun 2019 menjadi 73,92 persen pada tahun 2021.

Tabel 2.35 Keadaan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	73,42	73.29	68,40	74,35	73,99
2	Angka partisipasi angkatan kerja	0,65	0,67	0,68	0,69	0,73

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	45	45	55	44	-
4	Pencari kerja yang ditempatkan	5	6	320	93	-
5	Tingkat pengangguran terbuka	4,00	4,54	4.51	2,62	2,33
6	Keselamatan dan perlindungan	2.086	2.286	2.486		-
7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	-

Sumber: Renstra Dinas Nakertrans 2024-2026; RPJMD Perubahan Kabupaten Sikka 2019-2023; Kabupaten Sikka Dalam Angka 2019-2023

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Upaya pembangunan manusia terdapat istilah mengenai pembangunan berbasis gender yang mencakup pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Keberhasilan sebuah pembangunan memiliki ketergantungan pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan. Meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan terhadap akses yang setara beserta kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat yang diperoleh dapat secara adil dan merata. Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender semakin terlihat di semua bidang pembangunan, baik pada bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial maupun politik. Menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah berarti hanya sebagai suatu tindakan yang dipandang dari sisi humanisme belaka. Namun peran yang dilakukan oleh perempuan dalam kesertaannya di bidang pembangunan merupakan tindakan dalam rangka mengangkat harkat serta kualitas dari perempuan itu sendiri.

Laporan Pembangunan Manusia Tahun 1995 memperkenalkan ukuran pembangunan manusia yang bersifat gabungan (komposit) dari empat indikator, yang menyoroti tentang status perempuan dan laki-laki khususnya mengukur prestasi dalam kemampuan dasar. Ukuran komposit yang dimaksud adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan perbandingan antara IPM laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Angka IPG yang mendekati 100 menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki (Kemen-PPPA, 2020). Dengan demikian, saat ini masih ditemukan adanya kesenjangan antara pembangunan laki-laki dan perempuan yang ada di Kabupaten Sikka. Hal ini terlihat dari indeks pembangunan gender Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 yang fluktuatif dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 88,81, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 89,87. Selain itu nilai IPG Kabupaten Sikka masih jauh di bawah Provinsi NTT dan Nasional (lihat tabel dibawah ini).

Tabel 2.36 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020-2024

WILAYAH	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Sikka	89,15	88,93	88,81	89,38	89,87
Provinsi NTT	92,73	92,63	92,96	93,38	93,77
Nasional	89,15	88,93	91,63	91,85	91,85

Sumber: BPS Indonesia, 2020-2024

Kemiskinan, pernikahan dini, kriminalitas hingga kekerasan pada anak dan kekerasan berbasis gender merupakan beberapa hambatan bagi para perempuan dan anak agar dapat memiliki kebebasan dalam berpartisipasi dan mendapatkan haknya dalam berbagai bidang kehidupan. Kondisi di Kabupaten Sikka menunjukkan masih terdapat kasusnya kekerasan pada anak sebanyak 6,65 persen kasus 2018 kemudian menurun menjadi 6,60 persen kasus 2019, mengalami penurunan yang cukup jauh sekitar 6,10 persen kasus 2020, terjadi lagi penurunan di tahun 2021 dan di tahun 2022 kemudian mengalami peningkatan yang cukup drastis pada tahun 2023 sebesar 12,51 persen kasus kekerasan anak di Kabupaten Sikka.

Tabel 2.37 Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio KDRT	0,12	0,11	0,10		0,01
2.	Jumlah Kasus Kekerasan Anak	6,10	5,60	5,10		6,93

Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2025

Perempuan di Kabupaten Sikka yang belum mencapai tingkat kemandirian juga dipengaruhi oleh rendahnya upaya pemberdayaan terhadap mereka. Tingkat pemberdayaan yang rendah disebabkan oleh minimnya partisipasi politik perempuan di Kabupaten Sikka, baik dalam hal pemahaman tentang politik maupun aktif terlibat dalam kegiatan politik. Kurangnya pemberdayaan juga berdampak pada kesulitan bagi perempuan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan menjadi pekerja profesional yang mandiri secara finansial.

Sementara, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi, dan teknisi (Kemen-PPPA, 2020). Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Sikka cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 angka IDG Kabupaten Sikka sebesar 62,53, pada tahun 2021 menjadi 61,53 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 63,55, pada tahun 2023 naik lagi menjadi 65,51. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 62,39. Angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IDG Nasional dan Provinsi NTT yang masing-masing memperoleh nilai sebesar 78,26 dan 77,62 pada tahun 2024 (lihat tabel dibawah ini).

Tabel 2.38 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2020-2024

Jenis Kelamin	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sikka	62,53	61,53	63,55	65,1	62,39
Propinsi NTT	64,29	64,28	75,22	75,1	78,26
Nasional	75,57	76,26	76,59	76,9	77,62

Sumber: BPS, 2020-2024

9. Pangan

Pangan merupakan segala sesuatu yang bisa dimakan dan memberikan energi, nutrisi, serta zat gizi penting bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia, termasuk tumbuhan, hewan, dan hasil olahan. Ketersediaan pangan merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui tingkat pemenuhan kebutuhan pokok akan pangan. Untuk mengetahui ketersediaan pangan, informasi mengenai pengadaan pangan menjadi penting. Pengadaan pangan pangan suatu mencakup seluruh tahap produksi, distribusi, hingga konsumsi untuk memenuhi kebutuhan makanan suatu wilayah atau negara. Pengukuran tingkat ketahanan pangan dilakukan melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan tingkat ketersediaan dan kualitas gizi dan variasi pola konsumsi penduduk.

Kebutuhan pangan yang cukup tinggi tersebut, ternyata sebagian besar dipenuhi oleh pasokan dari luar daerah. Sumber utama pemasok pangan untuk Sikka tercatat adalah Jawa dan Sulawesi. Dari data yang disajikan terlihat bahwa yang mampu dipenuhi oleh daerah hanya sekitar 10 persen sampai 15 persen. Angka ini mengirimkan pesan yang sangat kuat betapa besar risiko yang dihadapi oleh Kabupaten Sikka, jika sesuatu terjadi di daerah pemasok ataupun rantai distribusi terhambat. Risiko tersebut tidak hanya karena pasokan dari luar daerah, bahkan risiko rawan pangan juga muncul dari dalam daerah. Diberitakan oleh media massa bahwa pada tahun 2023 terdapat 4 desa di Sikka mengalami rawan pangan akibat kekeringan.

Tabel 2.39 Kebutuhan, Produksi dan Ketersediaan Pangan Per Kapita Per Tahun Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Tahun	Kebutuhan Pangan (Kg)	Ketersediaan Pangan Berdasarkan Produksi (kg)	Ketersediaan Pangan dari Luar Daerah (Kg)	Ketersediaan Pangan (Kg)
2020	108,6	31	217	248
2021	111,5	21	271	292
2022	106,3	20	225	245
2023				
2024	-	-	-	-

Sumber: Statistik Ketahanan Pangan 2020-2024 (Badan Ketahanan Pangan)

Berdasar Tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat ketercukupan pangan dapat dipenuhi dengan baik, jauh melebihi kebutuhannya. Dilihat dari aspek kebutuhan pangan per kapita, penduduk Kabupaten Sikka relatif lebih tinggi dari angka nasional. Berdasar data BPS tahun 2022, rata rata kebutuhan konsumsi pangan per berkisar pada angka 90 kg per tahun, namun penduduk Sikka membutuhkan lebih dari 100 kg. Namun demikian dilihat dari perkembangannya angka kebutuhan itu terus menunjukkan penurunan, angka ini mengindikasikan terus meningkatnya diversifikasi pangan.

Ketersediaan pangan yang bergantung pada pasokan dari luar daerah itu dikonfirmasi oleh nilai skor PPH ketersediaan Kabupaten Sikka yang juga relatif rendah. Ketika nasional telah mencapai angka di atas 90, karena terus mengalami peningkatan, Kabupaten Sikka tetap berada pada angka 65,2. Angka skor PPH ketersediaan ini dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, angka ini menyatakan bahwa ketergantungan Sikka terhadap bahan pangan dari luar semakin tinggi.

Tabel 2.40 Skor PPH Ketersediaan Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Sikka	Provinsi NTT	Nasional
2020	77,42	80,54	86,30
2021	65,2	69,54	96,7
2022	65,2	65,23	92,9
2023	89,5	75,28	94,1
2024	92,07		

Sumber: Statistik Ketahanan Pangan 2020-2024 (Badan Ketahanan Pangan)

Dalam perspektif konsumsi, skor PPH Kabupaten Sikka juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi NTT maupun Nasional. Dilihat dari tren yang terjadi, skor PPH Kabupaten Sikka terus mengalami penurunan, sejalan dengan penurunan yang terjadi di Provinsi NTT. Kecenderungan penurunan trend skor PPH ini menunjukkan bahwa diversifikasi pangan di Sikka semakin memburuk. Diversifikasi yang makin buruk harus menjadi perhatian karena dampak dari kondisi pangan yang semakin buruk akan berdampak luas pada kesehatan secara keseluruhan.

Tabel 2.41 Skor PPH Konsumsi Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Sikka	Provinsi NTT	Nasional
2020	61,8	67,3	86,3
2021	65,2	73,4	87,2
2022	68,7	75,3	92,8
2023	69,7	74,3	94,1
2024	78,6	-	-

Sumber: Statistik Ketahanan Pangan 2020-2024 (Badan Ketahanan Pangan); BPS 2020-2024

10. Pertanahan

Pertanahan dalam suatu wilayah mengacu pada area atau kawasan tertentu di wilayah yang memiliki dokumentasi resmi berupa sertifikat sebagai bukti legal atas kepemilikan atau hak atas tanah yang mencakup informasi terkait luas dan batas-batas tertentu dari tanah tersebut. Sertifikat ini menunjukkan bahwa pihak yang tercatat dalam dokumen tersebut memiliki hak sah untuk memiliki, mengelola, atau menggunakan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sertifikat ini berperan penting dalam menjamin kepastian hukum terkait kepemilikan dan penggunaan tanah di wilayah tersebut.

Tabel 2.42 Kinerja Pertanahan di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	115645	-	-	-	-
2	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	100	100	100	60	66,66
3	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	100	100	100	100	-

Sumber: Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

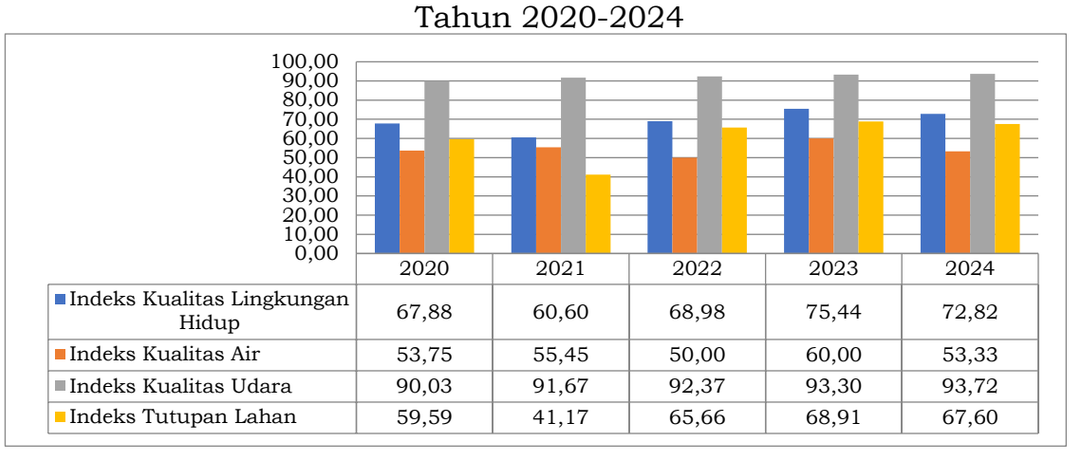
Pada rentang tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Sikka berhasil menyelesaikan seluruh kasus tanah negara yang ada. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen dan efisiensi pihak berwenang dalam menangani masalah kepemilikan tanah yang terkait dengan status hukum negara. Dengan mencapai tingkat penyelesaian 100 persen berarti semua sengketa atau

permasalahan terkait tanah negara telah di atasi dan diselesaikan dengan baik selama periode tersebut. Hal ini mencerminkan upaya keras untuk memastikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah di wilayah Sikka, yang pada gilirannya dapat berdampak positif terhadap stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. Hal ini juga selaras dengan penyelesaian izin lokasi yang keseluruhannya mencapai 100 persen.

11. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Hutan/Lahan. Adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.20 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,88	60,60	68,98	75,44	72,82
Indeks Kualitas Air	53,75	55,45	50,00	60,00	53,33
Indeks Kualitas Udara	90,03	91,67	92,37	93,30	93,72
Indeks Tutupan Lahan	59,59	41,17	65,66	68,91	67,60

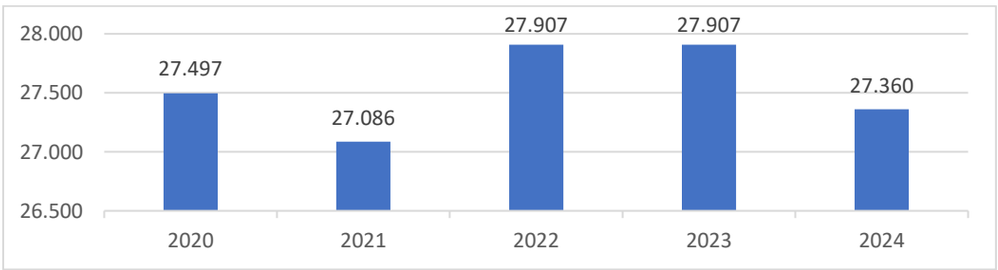
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2025.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 sebesar 67,88, pada Tahun 2021 sebesar 60,60 dan pada Tahun 2022 sebesar 68,98 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar 75,44 dan Tahun 2024 sebesar 72,82 dengan indeks kualitas air sebesar 53,33 %, Indeks Kualitas Udara sebesar 93,72 % dan Indeks Tutupan Lahan sebesar 67,60%.

Kualitas lingkungan hidup juga dapat dilihat berdasarkan jumlah volume sampah dan produksi sampah yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Indikator penanganan sampah didapatkan dari volume sampah yang terangkut ke TPA. Volume Sampah yang Terangkut ke TPA di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.21 Volume Sampah yang Terangkut ke TPA Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2025.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Volume Sampah yang Terangkut ke TPA Tahun 2020 sebesar 27.497 ton, Tahun 2021 sebesar 27.086 ton, pada Tahun 2022 27.907 ton dan Tahun 2023 sebesar 27.907 ton sedangkan Tahun 2024 sebesar 27.360 ton.

a. Jumlah Sarana Prasana Persampahan

Jumlah Sarana Prasana Persampahan yang digunakan untuk mengangkut sampah dalam wilayah Kabupaten Sikka terdiri dari :

- Dump Truck : 8 Unit
- Amroll : 4 Unit
- PickUp : 1 Unit
- Motor Roda 3 : 6 Unit
- Gerobak Sampah : 4 Unit
- Exavator : 1 Unit
- Doozer : 1 Unit
- Container : 37 Unit
- TPS : 48 Lokasi
- TPA : 1 Lokasi

Dalam konteks pelestarian lingkungan hidup, pemetaan dan pemantauan terhadap kualitas udara, air, dan tanah sangat penting untuk menilai kesehatan lingkungan suatu wilayah.

Tabel 2.43 Uji Pencemaran Air, Tanah dan Udara Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Uji pencemaran air	-	-	50,00	50,00	
2	Uji pencemaran tanah	-	-	-	-	
3	Uji pencemaran udara	90,30	91,67	92,37	92,37	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2023

Kabupaten Sikka, seperti terlihat dari tabel di atas, telah melakukan uji pencemaran udara selama periode tahun 2018-2022. Meskipun data untuk uji pencemaran air dan tanah tidak tersedia untuk tahun-tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan pentingnya pemantauan terus-menerus terhadap lingkungan hidup. Uji pencemaran udara menunjukkan nilai yang cukup konsisten dari tahun ke tahun, dengan rata-rata sekitar 90 hingga 92.37. Meskipun terjadi fluktuasi kecil dari tahun ke tahun, secara umum, tingkat pencemaran udara di Kabupaten Sikka cenderung tetap tinggi. Hal ini menandakan bahwa upaya pengendalian pencemaran udara di wilayah tersebut masih belum optimal, dan perlu dilakukan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas udara.

Meskipun data untuk uji pencemaran air hanya tersedia untuk tahun 2022, hasil uji ini memberikan indikasi bahwa ada keberlanjutan dalam pemantauan kualitas air di Kabupaten Sikka. Namun, tanpa data untuk tahun-tahun sebelumnya, sulit untuk mengevaluasi tren jangka panjang terkait pencemaran air di wilayah tersebut.

Kualitas air di Kabupaten Sikka juga dipengaruhi oleh sumber mata air yang tersedia. Mata air sering menjadi sumber utama pasokan air bersih bagi penduduk setempat, terutama di daerah pedesaan yang memiliki kemiringan ekstrim seperti Sikka. Upaya konservasi dan perlindungan sumber mata air

sudah dilakukan dan menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas air yang baik, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.44 Data Lahan-lahan yang Telah Dikonservasi di Kabupaten Sikka

Kecamatan	Jumlah Mata Air Keseluruhan	Lokasi yang telah dikonservasi				
		Desa	Luas (Ha)	Sumber Mata Air	Nama Kelompok	Tahun Konservasi
Mego	114	Wolodesa	2,4	AeSule	KPSA Evata	2015
		Napunggera	2,4	Male Wii	KPSA KemaSama	2015
		Korobera	2,31	JitaBewa	Ngalunawa	2015
		Dobo Nua Pu'u	2,4	AeSie	Mawar	2015
		Dobo	2,4	NioSasi	MuriPawe	2015
		Parabubu	2,4	LowoOja	MuriDauMbale	2015
Tanawawo	81	Renggarasi	6,45	Udu Kana	Udu Kana	2015
Magepanda	29	Reroroja	2,06	Wolokoli	WiniRoja	2019
		Done	2,06	PoaLonggo	Kamboja	2019
		Kolisia	2,05	Ae Lobo	BuguSupu	2019
Paga	113	Wolowiro	2,5	AeNira	Lestari Alam	2015
Nita	13	Tilang	2,39	WairKotit	WairKotit	2015
		Tilang	2,06	WairKotit	WairKotit	2019
		Mahebora	2,5	Horet	DaanDading	2019
Waiblama	9	Natarmage	2,39	Belan	LikongPrawung	2015
Waigete	22	Watudiran	2,4	Tutut	MekarBaru	2015
		WairTeran	2,4	WairHek	MatopoDewa	2015
		Egon	2,4	Blidit	NibonKibok	2015
		Nangatobong	3,19	Tuna Bura	Tuna Bura	2015
		Ai Bura	3,19	WairHeli	Krukut Wutun	2015
		Pogon	3,19	WairHelir	Rindu Terang	2015
Hewokloang	2	Hewokloang	2,4	Sinawair	Sudan Sogor	2015
		Baomekot	2,06	Wairpuat	MuneOrak	2019
Kangae	1	TekaIku	2,4	WairJeko	SukaTani	2015
Bola	1	Bola	2,4	WairTerang	KojaMude	2015
Lela	1	Lela	6,45	Batik Wair	Sanbela I	2015
Talibura	62					
Alok	1					
Mapitara	7					
Total Sementara	**456**		**74,42**			

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2023

Dalam rentang waktu tahun 2015-2022, data pada Tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Sikka memiliki mata air sejumlah 456 mata air. Meski demikian upaya konservasi cenderung lambat dimana secara total baru terdapat 74.42 mata air yang telah dikonservasi. Tercatat hanya ada dua tahun dimana terjadi penambahan lahan konservasi mata air, yaitu pada tahun 2015 dan 2019. Ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian mata air masih menjadi kendala utama di Kabupaten Sikka. Pada tahun 2015, sebanyak 20

lahan konservasi mata air, yang mencerminkan komitmen awal terhadap pelestarian dan upaya mendapatkan sumber mata air. Namun, kondisi ini stagnan hingga akhirnya lokasi konservasi bertambah pada tahun 2019 dan itupun hanya berjumlah 6.

Dalam keseluruhan analisis, meskipun penambahan lahan konservasi mata air terbatas pada dua tahun tertentu, upaya ini tetap penting dan berdampak positif dalam menjaga ketersediaan air bersih dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Tantangan utama adalah bagaimana menjaga kesadaran lingkungan dan berusaha untuk meningkatkan pelestarian sumber mata air di tahun-tahun mendatang agar dapat memenuhi kebutuhan air yang semakin meningkat dan menjaga lingkungan alam yang sehat. Kesulitan Kabupaten Sikka dalam memenuhi kebutuhan sumber daya air masyarakat dikarenakan kondisi daerah yang berada pada topografi kelerengan 450 dan merupakan daerah yang rentang mengalami kekeringan, sehingga tidak semua kecamatan memiliki sumber air yang memadai. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 2.45 Data Ketersediaan Air di Kabupaten Sikka Tahun 2022

No	Kecamatan	SA	2022		Keterangan
			DA	Status	
1	Paga	24687663,92	26093818,26	SA<DA	Defisit
2	Mego	30668094,91	21071890,48	SA>DA	**Surplus**
3	Tanawawo	30077412,74	14085220,07	SA>DA	**Surplus**
4	Lela	14301472,03	18937564,21	SA<DA	Defisit
5	Bola	15259541,57	17741780,19	SA<DA	Defisit
6	Doreng	13535514,33	19379767,9	SA<DA	Defisit
7	Mapitara	23343735,06	10906027,54	SA>DA	**Surplus**
8	Talibura	79209502,65	36535612,28	SA>DA	**Surplus**
9	Waigete	62148312,77	40543421,53	SA>DA	**Surplus**
10	Waiblama	34466568,31	13161166,67	SA>DA	**Surplus**
11	Kewapante	8876014,578	23599031,88	SA<DA	Defisit
12	Hewokloang	6212978,611	15201938,88	SA<DA	Defisit
13	Kangae	17182528,95	28586395,76	SA<DA	Defisit
14	Palue	11657171,59	15108334,22	SA<DA	Defisit
15	Koting	4956489,309	10461551,69	SA<DA	Defisit
16	Nelle	6727310,417	9787049,829	SA<DA	Defisit
17	Nita	32950311,93	35512882,75	SA<DA	Defisit
18	Magepanda	38429205,34	20958789,21	SA>DA	**Surplus**
19	Alok	9937552,519	51091214,98	SA<DA	Defisit
20	Alok Barat	20222791,23	34812492,28	SA<DA	Defisit
21	Alok Timur	24236024,29	51318646,97	SA<DA	Defisit
Total		**484398533,1**	**488800779,3**		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2023

Dapat dianalisis berdasarkan tabel di atas, ketersediaan air di Kabupaten Sikka pada tahun 2022 menunjukkan situasi yang perlu mendapat perhatian serius dalam pengelolaan sumber daya air. Terdapat ketidakseimbangan yang signifikan antara ketersediaan air dan kebutuhan air di kecamatan-kecamatan Kabupaten Sikka. Dari 21 kecamatan yang ada, hanya 7 kecamatan yang memiliki surplus air, sementara 14 kecamatan lainnya mengalami defisit, atau kekurangan air. Upaya untuk mengatasi defisit air di 14 kecamatan perlu difokuskan pada pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien, pemulihan sumber-sumber air yang terdegradasi, dan kebijakan yang berkelanjutan dalam penggunaan air. Kolaborasi antar kecamatan dan dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta dapat menjadi langkah

penting dalam mengatasi masalah defisit air dan memastikan bahwa ketersediaan air terpenuhi dengan baik di seluruh Kabupaten Sikka. Ketersediaan air di Kabupaten Sikka juga dipengaruhi oleh Sambungan Rumah (SR) yang masih rendah, hal ini dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 2.46 Jumlah Sambungan Rumah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Sambungan Rumah		
	Total	Aktif	Non Aktif
2020	19.569	18.497	1.072
2021	19.823	18.735	1.088
2022	20.242	19.118	1.124
2023	21.122	18.267	2.855
2024			

Sumber: Perumda Air Minum Wair, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah total sambungan air rumah di Kabupaten Sikka mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, total sambungan air adalah 16.994, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 21.122. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sambungan air. Dalam rentang waktu tersebut, jumlah sambungan air yang aktif juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, terdapat 15.975 sambungan air aktif, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 18.267. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam penggunaan sambungan air oleh masyarakat. Namun, sambungan air non-aktif dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2019, terdapat 1.019 sambungan air non-aktif, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 2.855. Hal ini dapat menjadi perhatian untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi penggunaan sambungan air di masa mendatang.

Peningkatan jumlah kendaraan di Kabupaten Sikka dapat menjadi salah satu ancaman terhadap kualitas udara di Kabupaten Sikka. Data perkembangan jumlah kendaraan bermotor dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.47 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Sikka Tahun 2020-2022

Wilayah	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit)											
	Mobil Penumpang			Bus			Truk			Sepeda Motor		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sikka	1.726	1.799	1.857	88	91	93	2.496	2.622	2.729	53.847	52.547	55.122
NTT	40.743	41.709	42.685	1.807	1.828	1.837	41.956	43.925	45.994	84.4848	79.9104	83.8397

Sumber: BPS, 2023

Jika ditilik dari data tabel di atas, adanya kenaikan jumlah kendaraan yang signifikan di Kabupaten Sikka. Jenis kendaraan mobil penumpang, naik sebanyak 58 kendaraan, kemudian untuk jenis kendaraan bus, naik sebanyak 2, jenis truk naik sebanyak 41 kendaraan, dan peningkatan yang paling kelihatan adalah jenis kendaraan sepeda motor yang naik sebanyak 2.575 kendaraan. Pertumbuhan kendaraan ini sangat berpengaruh terhadap emisi karbon yang mengancam kualitas udara di Kabupaten Sikka jika tidak diantisipasi oleh pemerintah.

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan sebagai sistem pengelolaan dan pemeliharaan data penduduk. Tentunya ini mencakup berbagai kegiatan terkait dengan identifikasi, registrasi, dan pemeliharaan catatan tentang individu yang tinggal di suatu wilayah khususnya di Kabupaten Sikka, termasuk penduduk asli, pendatang, serta mereka yang lahir atau meninggal di wilayah tersebut. Administrasi kependudukan juga meliputi pemberian dan pemeliharaan dokumen-dokumen identifikasi resmi, seperti kartu identitas, akte kelahiran, dan lain sebagainya. Capaian kinerja pelayanan kependudukan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

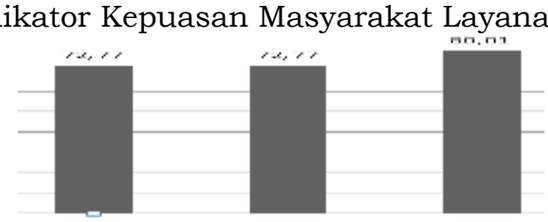
Tabel 2.48 Capaian Kinerja Pelayanan Kependudukan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Kepemilikan E-KTP	95,92	94,34	95,51	99,03	100
2.	Persentase Kepemilikan KIA	20,37	34,54	34,96	36,63	40,76
3.	Persentasi Aktivasi IKD	NA	NA	NA	0,01	0,03
4.	Persentase Akta Kematian	100	100	100	100	100
5.	Persentase Akta Kelahiran	44,48	45,35	46,33	47,17	47,69
6.	Persentase Akta Perkawinan	43,39	49,15	51,63	53,6	55,69
7.	Persentase Akta Perceraian	19,33	22,13	29,1	31,75	34,02
8.	Jumlah informasi kependudukan yang dimanfaatkan	NA	NA	6 OPD	6 OPD	9 OPD
9.	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka

Dalam kepemilikan dokumen kependudukan seperti E-KTP dan akta kematian, Disdukcapil Kab. Sikka sudah mempunyai angka yang bagus dengan pencapaian angka mendekati 100 persen untuk kepemilikan E-KTP dan 100 persen untuk angka kematian. Hal ini menunjukkan bawah pengukuran masyarakat utamanya yang sudah ada di atas batas umur sudah sangat baik. Namun, angka ini perlu dicermati kembali dengan melihat kepemilikan KIA, akta kelahiran, akta perceraian dan akta perkawinan yang angkanya masih di kisaran 50 persen atau di bawah angka tersebut. Masih diperlukannya usaha dari Disdukcapil untuk dapat meningkatkan pencatatan tersebut. Terutama dalam hal akta kelahiran dan perceraian yang jumlahnya jauh dibawah 50 persen. Akta kelahiran merupakan identitas seseorang yang didasarkan pada hukum, pada dasarnya hal ini tidak hanya berkaitan pada administrasi, tapi juga untuk keperluan pembangunan. daerah. Akta kelahiran merupakan sebuah kebutuhan untuk mendapatkan akses layanan dasar, serta pencetakan dokumen administrasi lainnya. Dengan peningkatan akta ini pun, kemudian dapat diciptakan strategi perencanaan yang tepat sasaran dengan angka yang akurat.Tidak hanya itu, semakin banyak punya jumlah informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh beragam OPD setiap tahunnya.

Grafik 2.22 Indikator Kepuasan Masyarakat Layanan Kependudukan



Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sikka, 2025

Terkait pelayanan kependudukan, Disdukcapil Kab. Sikka sudah mempunyai pelayanan yang sangat baik, terutama dengan peningkatan pesat di tahun 2024 yang awalnya ada di kisaran 70 persen, menjadi 80 persen. Sehingga dengan meningkatnya IKM ini menunjukan kualitas pelayanan yang sudah cukup bagus, serta pelayanan administrasi dijalankan tidak hanya sesuai dengan proses bisnisnya, tapi juga dengan efektif dan efisien sehingga menimbulkan rasa kepuasan dari sisi masyarakat. Namun demikian, hal ini masih memiliki kesempatan untuk lebih ditingkatkan.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu proses dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dan desa dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan perencanaan wilayah. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilakukan melalui pengukuran Indeks Desa Membangun.

Tabel 2.49 Jumlah Desa Berdasar Klasifikasi Desa Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Klasifikasi Desa	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Desa Mandiri	0	0	0	3	10
2.	Desa Maju	8	14	21	26	38
3.	Desa Berkembang	45	57	79	95	82
4.	Desa Tertinggal	73	63	45	47	46
5.	Desa Sangat Tertinggal	21	13	2	10	5
	Jumlah Desa	**147**	**147**	**147**	**181**	**181**

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Sikka, 2025

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas desa yang berada di Kabupaten Sikka adalah Desa Berkembang. Jumlah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal masih cukup banyak, tahun 2024 terdapat 46 desa tertinggal dan 5 desa sangat tertinggal. Dilihat dari trennya, Desa Tertinggal sesungguhnya terus mengalami penurunan, namun di tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 46 desa sedangkan jumlah Desa Sangat Tertinggal mengalami penurunan secara signifikan terutama di tahun 2022 tetapi mengalami peningkatan lagi di tahun 2023 sebanyak 10 desa dan di tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 5 desa. Di tahun 2024 di Kabupaten Sikka tercatat 10 Desa Mandiri.

Capaian pembangunan desa, tidak terlepas dari upaya pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sikka. Tabel berikut ini, menyajikan kinerja pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sikka.

Tabel 2.50 Capaian Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Pemberdayaan Masyarakat	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	13 dan 147	13 dan 147	13 dan 147	13 dan 147	13 dan 147
2.	Jumlah kelompok binaan PKK	3741	3741	3741	3741	3741
3.	Jumlah LSM	4	4	4	4	4
4.	LPM Berprestasi	0	0	0	0	0
5.	PKK aktif	169	169	169	169	169
6.	Posyandu aktif	628	650	650	650	591

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Sikka, 2025

Data capaian pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sikka dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan beberapa indikator yang mencerminkan perkembangan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan diri. Pertama, rata-rata jumlah kelompok binaan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) cukup stabil dalam lima tahun terakhir, namun dalam lima tahun belum terlihat LPM yang berprestasi. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap dorongan dan dukungan bagi LPM untuk mendapatkan pembinaan dan pendampingan agar dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan desa. Kedua, rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga cukup stabil dan menunjukkan adanya konsistensi dan kekuatan keterlibatan dari PKK dalam pemberdayaan keluarga dan menggerakkan kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, terdapat partisipasi aktif dari kelompok PKK serta peningkatan partisipasi dalam dua tahun terakhir dari posyandu yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam menggerakkan partisipasi aktif masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sikka.

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah serangkaian kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengelola pertumbuhan populasi dalam wilayah khususnya di Kabupaten Sikka. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara jumlah penduduk dengan sumber daya yang tersedia, sehingga dapat memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Berikut tabel Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022.

Tabel 2.51 Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,36	0,54	-	-	
2.	Total Fertility Rate (TFR)	2,62	1,90	2,60	2,60	2,55
3.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	2,81	2,49	2,6	2,6	
4.	Rasio Akseptor KB	1:0,692	1:0,712	1:0,550	1:0,550	

Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data di atas khususnya pada indikator kinerja Laju Pertumbuhan penduduk atau LPP, Pada tahun 2018, Kabupaten Sikka mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,19 persen. Angka ini menunjukkan adanya pertumbuhan populasi yang cukup tinggi pada tahun tersebut. Hal ini memicu perhatian untuk mengimplementasikan strategi pengendalian penduduk yang lebih efektif. Selanjutnya pada tahun 2019, Kabupaten Sikka berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk menjadi 0,46 persen. Tentunya hal Ini memperlihatkan bahwa upaya-upaya dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah memberikan hasil positif dengan mengurangi tingkat pertumbuhan populasi.

Setahun berikutnya pada tahun 2020, Kabupaten Sikka terus mempertahankan tren penurunan dengan LPP sebesar 0,36 persen. Capaian ini menunjukkan kesuksesan dalam penerapan program dan kebijakan

pengendalian penduduk yang efektif. lebih lanjut pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan LPP menjadi 0,54 persen. Meskipun terjadi peningkatan, tingkat pertumbuhan populasi masih berada dalam kisaran yang dapat diterima dan menunjukkan keberlanjutan upaya pengendalian penduduk yang baik. Meskipun terjadi sedikit fluktuasi, Kabupaten Sikka berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan populasi pada tingkat yang dapat diterima, menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam mengelola pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan.

15. Perhubungan

Pengembangan dan kinerja sektor perhubungan memegang peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sikka. Selama periode tahun 2020 hingga 2024, banyak indikator telah digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam bidang ini. Beberapa indikator tersebut mencakup Indeks konektivitas antar kecamatan, jumlah arus penumpang angkutan umum, izin trayek, uji KIR angkutan umum, kepemilikan KIR angkutan umum, layanan angkutan umum, tingkat ketersediaan rambu lalu lintas dan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan.

Indeks konektivitas antar kecamatan mencerminkan sejauh mana wilayah-wilayah dalam Kabupaten Sikka terhubung satu sama lain. Sementara jumlah arus penumpang angkutan umum menunjukkan sejauh mana masyarakat dapat mengakses layanan transportasi publik. Izin trayek dan uji KIR angkutan umum mencerminkan regulasi dan standar keselamatan yang diterapkan dalam sektor ini. Sementara kepemilikan KIR angkutan umum dan layanan angkutan umum mencerminkan layanan dan kualitas yang tersedia bagi penduduk. Selain itu, tingkat ketersediaan rambu lalu lintas dan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan faktor-faktor penting dalam memastikan keselamatan dan keteraturan lalu lintas di Kabupaten Sikka. Capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.52 Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks konektivitas antar-kecamatan (pulau)	100	100	100	100	100
2	Jumlah ijin trayek	67	58	58	58	58
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	1.930	2.029	2.029	2.029	2.029
4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	75,46	63,82	63,82	63,82	63,82
5	Persentase layanan angkutan umum	76,67	76,67	76,67	76,67	76,67
6	Tingkat ketersediaan rambu	4734	4734	4734	4734	4734
7	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	42,12	44,226	46,437	48,5779	48,5779

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka Tahun 2025

Jika ditilik dari data di atas, selama lima tahun terakhir, Kabupaten Sikka mencapai indeks konektivitas antarkecamatan sebesar 100%. Ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah berhasil membangun jaringan transportasi yang kuat dan terintegrasi antarkecamatan, sehingga memungkinkan mobilitas yang baik dalam wilayah. Namun, angka 100% ini hanya dilihat berdasarkan konektivitas antar dua kecamatan. Sehingga jika indeks konektivitas antarkecamatan dilihat secara luas, maka sulit untuk mencapai 100 persen.

Dalam konteks Kabupaten Sikka, dari hasil FGD bersama pemangku kepentingan, dapat disimpulkan bahwa angka 100 persen ini adalah pengecualian karena kondisi topografi daerah yang sulit untuk memberikan akses secara baik seperti daerah lain.

Jumlah izin trayek pada tahun 2020 sebanyak 67 dan menurun pada tahun 2021 sampai pada tahun 2024 hanya sebanyak 58 dengan kendaraan umum yang wajib KIR sebanyak 2.029.

Persentase layanan angkutan umum relatif stabil selama periode tersebut, dengan angka sekitar 76,67 persen pada tahun 2022. Ini menunjukkan adanya konsistensi dalam penyediaan layanan angkutan umum.

Sampai dengan tahun 2024 Kabupaten Sikka memiliki 4.734 rambu lalu lintas. Jumlah ini mencerminkan upaya yang baik dalam menyediakan tanda-tanda yang diperlukan untuk menjaga keamanan lalu lintas. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, menunjukkan peningkatan dalam kapasitas jalan yang tersedia untuk mengakomodasi jumlah kendaraan yang semakin meningkat.

Tabel 2.53 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
(Semua Angkutan Umum)

Tahun	Jumlah Arus Kedatangan di Terminal Darat		Jumlah Arus Kedatangan di Bandara Frans Seda		Jumlah Arus Kedatangan di Pelabuhan L. Say	
	Orang	Barang (Ton)	Orang	Barang (Ton)	Orang	Barang/T/M³
2020	1.449.288	7.006	72.802	990.062	79.321	62.914
2021	1.275.048	5.894	89.431	1.078.823	72.712	84.138
2022	1.269.936	5.901	97.534	1.078.511	59.925	53.132

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data tabel di atas, Jumlah arus penumpang angkutan umum (semua angkutan umum) terutama pada jumlah arus kedatangan di Pelabuhan L. Say, baik jumlah orang maupun barang mengalami penurunan. Beberapa faktor yang memengaruhi perubahan dalam arus kedatangan ini dapat meliputi perubahan dalam permintaan transportasi, kebijakan pelabuhan, kondisi ekonomi, dan bahkan dampak dari situasi darurat global seperti pandemi COVID-19. Selain itu, fluktuasi dalam jumlah arus kedatangan barang dan penumpang juga dapat mencerminkan perubahan dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan di wilayah tersebut. Upaya perencanaan dan pengelolaan yang baik diperlukan untuk mengatasi fluktuasi ini, terutama dalam konteks pemulihan pasca-pandemi dan peningkatan aktivitas perdagangan.

16. Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika adalah bidang yang mencakup pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi digital dalam suatu wilayah khususnya di Kabupaten Sikka. Hal Ini mencakup berbagai kegiatan terkait dengan pengembangan, implementasi, dan pengawasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta strategi komunikasi publik dan digital. Berikut tabel nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sikka tahun 2020-2024.

Tabel 2.54 Nilai SPBE Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai/Indeks SPBE	1,30 (Kurang)	1,11 (Kurang)	1,85 (Cukup)	1,94 (Cukup)	2,67 (Baik)

Sumber: Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE MenPAN-RB 2020-2024

Berdasarkan data di atas, Kabupaten Sikka memiliki nilai SPBE yang fluktuatif. Tentu hal ini harus menjadi perhatian untuk meningkatkan dan memperbaiki implementasi SPBE di tingkat pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan adanya tantangan atau kendala dalam implementasi SPBE di Kabupaten Sikka. Pada tahun 2024, Kabupaten Sikka mencatat peningkatan yang sangat signifikan dalam nilai SPBE mencapai 2,67 dan mendapat penilaian **baik**. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan yang luar biasa dalam implementasi SPBE di tingkat pemerintahan daerah. Hal ini sebagai hasil dari upaya intensif dan strategi yang lebih efektif dalam mengadopsi teknologi informasi dan elektronik dalam proses pemerintahan.

Capaian Kinerja Telekomunikasi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.55 Capaian Kinerja Telekomunikasi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan	100	-	-	-	-
2.	Cakupan layanan telekomunikasi	68,71	76,87	96,60	96,60	96,60
3.	Persentase penduduk yang menggunakan telepon/HP	45,92	52,46	50,76	50,76	50,76
4.	Persentase rumah tangga dengan akses internet (Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet)	35,60	44,30	49,32	49,32	49,32
5.	Persentase rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	-	-	-	-	-
6.	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan computer	14,14	14,22	12,27	12,27	12,27

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, 2025; BPS Provinsi NTT, 2025

Berdasarkan data di atas, cakupan layanan telekomunikasi mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 68,71 menjadi 96,60 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang cukup besar dalam memperluas jangkauan dan aksesibilitas layanan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sikka.

Selanjutnya pada indikator persentase penduduk yang menggunakan telepon menjadi peranan penting dalam telekomunikasi dan memfasilitasi komunikasi serta konektivitas, sebagai aspek kunci dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya suatu daerah khususnya Kabupaten Sikka. Pada tahun 2020 sebesar 45,92 meningkat menjadi 50,76 pada tahun 2024.

Persentase rumah tangga dengan akses internet mencerminkan sejauh mana komunitas dapat memanfaatkan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2020 sebesar 35,60 meningkat menjadi 49,32 pada tahun 2024.

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan. Pada tahun 2020 sebesar 14,14 meningkat menjadi 12,27 pada tahun 2024.

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah sebuah badan usaha yang didirikan oleh sekelompok orang untuk mencapai kepentingan bersama dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Koperasi beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keanggotaan sukarela, pengendalian demokratis oleh anggota, partisipasi ekonomi anggota secara adil, otonomi dan independensi, pendidikan, pelatihan, dan informasi, serta kerja sama antarkoperasi.

Salah satu indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja koperasi adalah Indeks Pembangunan Koperasi (IPK). IPK merupakan indikator yang mengukur tingkat perkembangan dan kinerja koperasi dalam mendukung pembangunan di suatu daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi, omset koperasi, kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Sikka saat ini mencapai 130 pada tahun 2022. Dalam hal koperasi, Kabupaten Sikka dikenal sebagai kabupaten yang sangat berprestasi.

Berdasarkan jenis usahanya Koperasi di Kabupaten Sikka 80% merupakan koperasi simpan pinjam. Dalam koperasi non-simpan pinjam tercatat koperasi pertanian, koperasi jasa, koperasi pemasaran, dan lainnya. Namun demikian dukungan data lain terkait koperasi non-kredit hingga saat ini belum ditemukan.

Tabel 2.56 Jenis Koperasi di Kabupaten Sikka

No	Jenis Koperasi	Jumlah
1	Koperasi Simpan Pinjam	70
2	Koperasi Non Simpan Pinjam	71
3	Koperasi Serba Usaha	46
4	Koperasi Jasa	5
5	Koperasi Pemasaran	2
6	Koperasi Produsen	6
7	Koperasi Konsumen	3

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, 2025

Tabel 2.57 Koperasi di Kabupaten Sikka Berdasarkan Status

No	Koperasi Berdasarkan Status	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Koperasi Aktif	124	126	130	130	130
2	Koperasi Berbadan Hukum	181	183	187	187	187
3	Koperasi Sehat	10	5	9	7	11

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM Tahun 2024-2026

Berdasar analisis yang dilakukan kelembagaan koperasi yang telah dikenal sangat baik, masih menyimpan cukup banyak permasalahan. Dari sisi koperasinya pengelolaan yang kurang baik dan jenis usaha yang hanya pada sektor simpan pinjam kurang mampu menjadi fasilitator perkembangan usaha. Pada sisi anggota, pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab anggota koperasi, manajemen keuangan juga belum baik. Dua sisi koperasi ini menjadi penyebab belum berdayanya koperasi menjadi lembaga ekonomi lokal yang tangguh.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil,

maupun rumah tangga. Beberapa indikator yang umumnya digunakan untuk menilai kinerja UMKM meliputi pertumbuhan jumlah UMKM, kontribusi UMKM terhadap PDB daerah, tingkat ketersediaan akses finansial bagi UMKM, peningkatan daya saing UMKM, tingkat inovasi dan teknologi yang digunakan oleh UMKM, serta tingkat pemberdayaan masyarakat melalui UMKM.

Sejalan dengan data koperasi yang sangat minim, demikian pula data mengenai UMKM. Hingga naskah ini disusun tercatat data jumlah UMKM di Kabupaten Sikka mencapai 5.547 unit. Unit usaha tersebut bergerak dalam 6 bidang usaha industri pengolahan, perdagangan, jasa, pertanian dan perikanan serta peternakan. Dari jumlah tersebut UMKM yang telah memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) baru sebanyak 2.022. Belum adanya NIB berkaitan dengan ketidakpahaman pelaku usaha akibat dari kurangnya upaya yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah pengampunya. Ketiadaan NIB ini menjadi penghalang bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan, karena pada umumnya dasar pembinaan adalah adanya formalitas usaha.

Tabel 2.58 Jenis UMKM Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten Sikka Tahun 2023

No	Jenis UMKM	Jumlah
1	Industri Pengolahan	508
2	Perdagangan	3.573
3	Jasa	594
4	Peternakan	665
5	Perikanan	62
6	Pertanian	145
7	Perkebunan	0
Total		**5.547**

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, 2025

Tabel 2.59 Capaian Pelaksanaan Urusan UMKM di Kabupaten Sikka

No	Jumlah UMKM	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	UMKM	6.288	5.994	5.547	8.005	8.500
2	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	18	-4	12,56	30,7	5,8
3	Jumlah Daya Saing UMKM	80	80	385	80	190
4	Indeks Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan	75	100	125	139	237

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, 2025

Tabel 2.60 Perkembangan UMKM di Kabupaten Sikka

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah UMKM	508
2	Perdagangan	3.573
3	Jasa	594
4	Peternakan	665
5	Perikanan	62
6	Pertanian	145
7	Perkebunan	0
Total		**5.547**

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, 2025

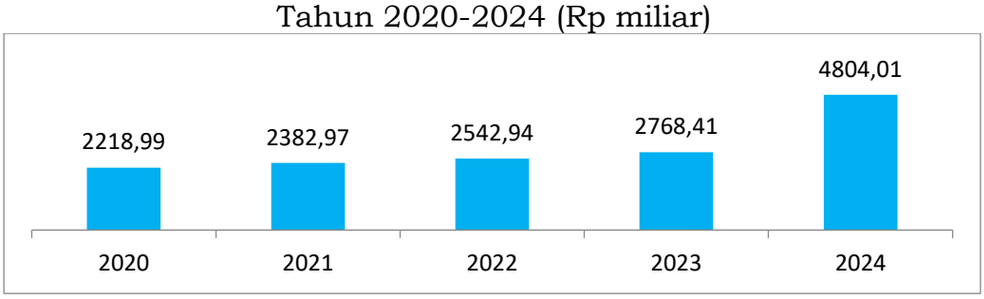
Dilihat dari jenis usahanya, UMKM yang bergerak di bidang perdagangan mendominasi, sedangkan perikanan paling sedikit. Jenis usaha koperasi ini cukup merepresentasikan kurangnya usaha pengolahan produk.

Dilihat dari kemajuan usahanya, masih sangat banyak UMKM di Kabupaten Sikka yang masih sangat lemah. Kondisi ini ditunjukkan dari informasi bahwa secara periodik pemerintah Kabupaten Sikka masih memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pelaku usaha UMKM. Pelaku usaha yang menerima BLT adalah pelaku usaha dengan omset di bawah Rp 2 juta per bulan. Tahun 2022 sebagai contoh, terdapat 1.000 UMKM yang menerima BLT ini (Jehadu & Agriesta, 2022). Analisis ini secara singkat menyatakan bahwa kelembagaan ekonomi lokal Kabupaten Sikka masih sangat lemah untuk menjadi pendorong pengembangan ekonomi lokal yang tangguh.

18. Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan pengeluaran sektor swasta untuk menciptakan nilai tambah melalui berbagai kegiatan, baik produksi maupun jasa. Indikator paling makro dari investasi sebuah wilayah dapat dilihat dari nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang mencerminkan seluruh nilai investasi yang dilakukan oleh masyarakat. Tahun 2024 nilai PMTB Kabupaten Sikka mencapai angka hampir Rp 5 triliun.

Grafik 2.23 Nilai Penanaman Modal Tetap Bruto Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 (Rp miliar)



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

PMTB dilakukan oleh investasi asing, nasional maupun investasi masyarakat. Dalam dokumen Badan Penanaman Modal tercatat jumlah investor nasional menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sampai 2024. sedangkan jumlah investor asing mengalami penurunan dari tahun 2020 sebanyak 11 dan berkurang pada tahun 2024 menjadi 10.

Tabel 2.61 Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)	1.478	1.478	2.887	2.887	2.887
2.	Jumlah Investor Berskala Internasional (PMA)	11	10	10	10	10

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sikka, 2025

Nilai investasi di Kabupaten Sikka ditentukan dari 21 sektor yang didominasi oleh transportasi, gudang dan komunikasi, pertambangan, perumahan dan kawasan perkantoran, industri makanan dan pertanian. Investasi yang tinggi pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi

erat berhubungan dengan tingginya peran perdagangan antar daerah yang sangat tinggi.

Sektor pertambangan menjadi sektor kedua yang juga paling diminati yang merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan. Adalah pasir besi dan emas yang menjadi sasaran investasi selain pertambangan Galian C. Namun demikian pertambangan yang izin usahanya telah berpindah ke provinsi ini lebih banyak menciptakan kerusakan lingkungan bagi Kabupaten Sikka dibandingkan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Bencana akibat tambang sudah sangat sering terjadi, banjir dan longsor adalah salah satu bencana yang kerap terjadi akibat dari aktivitas pertambangan ini.

Investasi bidang perumahan dan kawasan industri juga perkantoran, berhubungan erat dengan masih berkembangnya kawasan Kabupaten Sikka. Perkembangan jumlah penduduk dengan berbagai aktivitasnya membutuhkan sarana dan prasarana. Permintaan atas kebutuhan penduduk inilah yang menjadi pendorong berkembangnya investasi bidang ini. Namun memang disayangkan bahwa *multiplier effect* untuk sektor ini cukup terbatas. Karakter pembangunan, apalagi jika *input* untuk pembangunan itu didatangkan dari luar daerah maka uang yang telah digunakan untuk pembangunan akan mengalir ke luar daerah. Itulah mengapa *multiplier* yang tercipta menjadi rendah.

Sektor pertanian juga merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Lahan yang masih sangat luas merupakan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Investasi bidang pertanian memang bukan investasi yang sangat besar, namun investasi itu banyak dilakukan oleh kelompok kelompok masyarakat. Pada sektor perkebunan difokuskan pada pengolahan biji kakao.

Pada sektor perikanan, investasi yang relatif kecil cukup kontradiktif mengingat banyaknya informasi mengenai peran besar perikanan di Sikka. Saat ini investasi di sektor perikanan di Kabupaten Sikka tercatat PMA 1 unit, PMDN 6 unit dan pengusaha perorangan 43 unit usaha.

Tabel 2.62 Nilai Investasi Berdasar Sektor Kabupaten Sikka Tahun 2020-2022

No	Sektor	Nilai				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanaman pangan,perkebunan dan peternakan /food crops, plantation and livestock	32096469.9	29374643.4	38.878.502.6		
2	Kehutanan/Forestry	1163573.9	6862701.7	8.603.095.3		
3	Perikanan/Fishery	564859.8	1012170.6	1.214.048.8		
4	Pertambangan/Mining	13755070.4	25517127.3	62.521.629.4		
5	Industri makanan/Food Industry	27872683.1	26517505.8	54.936.992.9	6.266.800.000,00	39.139.700.000,00
6	Industri textile/Textile Industry	2103213.6	1972432.1	5.614.713.3		
7	Industri Kayu/Wood Industry	1263401.1	1143672.6	3.587.894.5		
8	Ind. Kertas dan Percetakan/Paper and Printing Industry	3745918.4	7833499	9.508.171		
9	Ind. Kimia dan farmasi/Chemical and Pharmaceutical Industry	22526107.2	23363669	2.890.5292.9		
10	Ind. Karet dan plastik/Rubber and Plastic Industry	4428666.5	7803026.5	7.369.750.2		
11	Ind. Mineral Non Logam/Non Metallic Mineral Industry	5861895.1	6522138.4	6.367.888.9		
12	Ind. Logam Dasar,Barang Logam,Bukan Mesin dan Peralatannya	8857599.3	15655780	13.950.460.6		
13	Ind. Mesin ,elektronik,instru.Kedokteran,Presisi dan Optik dan jam	1155964.6	535046.5	3693213.6		
14	Ind. Kendaran Bermotor dan alat Transportasi lain	2556491.9	1459308.2	2425202.5		
15	Listrik,Gas dan Air	35518798.8	38727709.6	32107483	346.800.000,00	950.700.000,00
16	Konstruksi	68289297.4	39569360.8	33846519.6	8.083.300.000,00	789.800.000,00
17	Perdagangan dan Reparasi	16748391.3	22432369.7	31051264.2	9.068.300.000,00	19.713.100.000,00
18	Hotel dan Restoran	10203124.3	17819336.4	21579087.4	-	280.000.000,00

No	Sektor	Nilai				
		2020	2021	2022	2023	2024
19	Transportasi,Gudang dan Komunikasi	93282772.9	61241519.3	75.138.386.7	5.000.000,00	270.000.000,00
20	Perumahan,Kawasan Ind dan Perkantoran	44852761.4	85497814.8	66.167.810.5	-	75.000.000,0
21	Jasa lainnya	14242672.3	24310388.9	38096745.7	469.100.000,00	211.400.000,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sikka, 2025

19. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan generasi muda juga menjadi salah satu bagian dari pembangunan masyarakat dan kemajuan suatu daerah sehingga untuk mencapai hal itu generasi muda memiliki peran untuk meningkatkan pendidikan, keahlian dan keterampilan diri mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Selain itu, pentingnya dimensi kepemudaan ini didasarkan pada premis bahwa pemuda adalah "sumber daya yang harus dikembangkan, bukan masalah yang harus dipecahkan". Dengan demikian untuk mengembangkan kepemudaan dibutuhkan suatu proses yang disengaja melalui pemberian dukungan, hubungan, pengalaman, sumber daya, dan peluang kepada pemuda yang diperlukan untuk menjadi orang dewasa yang sukses dan kompeten. Upaya peningkatan kualitas pemuda di Indonesia telah menjadi salah satu agenda strategis untuk mendapatkan manfaat bonus demografi. Namun, pengembangan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sikka tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dalam lima tahun terakhir (2020-2024), presentasi organisasi pemuda yang aktif stagnan. Sedangkan data terkait wirausaha muda tidak tersedia.

Tabel 2.63 Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	15	15	15	15	15
2.	Persentase wirausaha muda terhadap total wirausaha	-	-	-	-	-
3.	Jumlah organisasi olahraga	8	8	8	8	18
4.	Jumlah prestasi olahraga	0	2	6	6	6
5.	Jumlah atlet berprestasi	0	7	28	28	28

Sumber: Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2023

20. Statistik

Statistik berupa pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Tujuan dari statistik adalah untuk menyediakan metode dan alat yang dapat digunakan untuk mengorganisir dan menyajikan informasi numerik secara sistematis. Berikut tabel Kinerja Statistik Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024.

Tabel 2.64 Indeks Kinerja Statistik Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Dokumen Statistik yang telah diterbitkan	-	29	29	29	29

Sumber: Bapperida Kabupaten Sikka, 2025

Pada tahun 2020 data tidak tersedia yang menunjukkan keterbatasan dalam penyediaan dan publikasi informasi statistik selama periode tersebut. Tetapi pada tahun 2021 sampai dengan 2024, terjadi lonjakan yang signifikan

dalam publikasi dokumen statistik, dengan terbitnya 29 dokumen. Hal ini menunjukkan komitmen dan peningkatan aktivitas dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mempublikasikan data statistik terkait Kabupaten Sikka.

21. Persandian

Persandian adalah sistem pengelolaan dan pertukaran informasi rahasia atau terbatas antara pemerintah atau organisasi dengan tujuan untuk memastikan keamanan, kerahasiaan, dan integritas data atau informasi yang bersifat sensitif atau strategis. Kinerja persandian mengacu pada efisiensi dan efektivitas dari sistem persandian yang diimplementasikan dalam suatu organisasi atau entitas, termasuk pemerintahan daerah seperti Kabupaten Sikka.

Tabel 2.65 Kinerja Persandian Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	23,73%	23,73%	27,87%	28,02%	59,60%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan tabel di atas pada Tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan kestabilan dalam penggunaan sandi dalam komunikasi, dengan persentase perangkat daerah yang menggunakan sandi secara konsisten meningkat hingga 28,02% di 2023. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam praktik Persandian di wilayah yang kemudian diikuti dengan adanya peningkatan kesadaran dan penerapan kebijakan Persandian di Kabupaten Sikka. Nilai ini kemudian meningkat pesat pada tahun 2024 dengan angka mencapai 59,60% menunjukan hasil dari upaya Kab. Sikka yang tinggi dalam menerapkan keamanan pada sistem digital pemerintahan yang merata pada setiap perangkat daerah. Ini menunjukkan adanya komitmen berkelanjutan dalam menguatkan praktik Persandian di tingkat perangkat daerah.

22. Kebudayaan

Berdasarkan Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa Sub Urusan Budaya menjadi urusan konkuren pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Oleh karena itu Pemerintah daerah Kabupaten Sikka melaksanakan amanat UU ini. Untuk indikator Fokus seni dan budaya Kabupaten Sikka pada tahun 2018-2022, dimana pada tahun 2019 sebanyak 3 festival yang dilaksanakan, sedangkan untuk tahun 2020 tidak dilaksanakan, hal ini disebabkan kondisi pandemi COVID-19 yang melarang diadakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan di tahun 2021 sebanyak 1 festival, sedangkan untuk tahun 2022 kembali tidak dilaksanakannya festival kebudayaan.

Keberagaman budaya Indonesia adalah modal dasar yang kuat dalam pembangunan. Pemerintah telah menyadari bahwa khazanah kebudayaan di Indonesia merupakan aset yang sangat berharga. Pembangunan kebudayaan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia di Indonesia. Budaya mempunyai peranan dalam pembangunan manusia Indonesia. Indonesia dapat membangun bangsa sesuai dengan karakteristik budaya masing-masing. Kabupaten Sikka memiliki budaya dan seni tradisional begitu beragam, salah satunya adalah tarian dan musik Sikka. Seni tari dan musik dalam tataran budaya tak bisa dipisahkan. Tari

musik dan doa, dipadukan dan dijalankan dalam berbagai ritus tahunan daerah. Berbagai tarian di Sikka dengan gerak improvisasi beragam, uniknya tak membutuhkan garapan seorang seniman khusus, kecuali tarian tersebut telah dipadu dengan berbagai unsur-unsur gerak modern.

Tabel 2.66 Kinerja Fokus Seni dan Budaya Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	0	1	0	1	1
2.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	65,38	69,23	44,44	44,44	72,41
3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	2	0	2	3
4.	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	18	19	20	20	21

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2025

23. Perpustakaan

Kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kecerdasan dan pengetahuannya, sedangkan kecerdasan dan pengetahuan dihasilkan oleh seberapa ilmu pengetahuan yang didapat, sedangkan ilmu pengetahuan didapat dari informasi yang diperoleh dari lisan maupun tulisan. Indonesia menjadi negara pada urutan kedua terbawah pada ruang lingkup literasi yang ada di dunia, kondisi ini menggambarkan kondisi minat baca masyarakat di Indonesia sangat rendah yakni sebesar 0,001 persen. Angka tersebut bermakna dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Badan Pusat Statistik memberikan laporan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia secara keseluruhan berada di angka 59,52, dengan durasi membaca 4-5 jam per minggu dan 4-5 buku per triwulan. Semakin banyak penduduk suatu wilayah yang semangat mencari ilmu pengetahuan, maka akan semakin tinggi peradabannya. Budaya suatu bangsa biasanya berjalan seiring dengan budaya literasi, faktor kebudayaan dan peradaban dipengaruhi oleh membaca yang dihasilkan dari temuan temuan kaum cendekia yang diabadikan dalam tulisan yang menjadikan warisan literasi informasi yang sangat berguna bagi proses kehidupan sosial yang dinamis.

Perpustakaan merupakan tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut ataupun tidak. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dalam perpustakaan modern dewasa ini selain tersedia buku-buku tercetak, juga tersedia buku-buku dalam perpustakaan digital. Perpustakaan bertujuan untuk menumbuhkembangkan minat baca dan tulis, mengenalkan teknologi informasi, sebagai akses informasi secara mandiri, dan memupuk bakat dan minat baca.

Di Kabupaten Sikka, data perkembangan perpustakaan umum Kabupaten Sikka selama lima tahun terakhir (2018-2022) dilihat dari jumlah pengunjung, rasio perpustakaan per satuan penduduk, jumlah koleksi buku perpustakaan, dan persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.67 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	25.786	15.384	3.820	3.480	6.510
2.	Rasio Perpustakaan persatuan penduduk	0,16	0,18	0,18	0,05	0,045
3.	Jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah	5909	12336	10245	18246	18.247
4.	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2025

Tingkat kunjungan pada perpustakaan yang ada di Kabupaten Sikka selama tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 tercatat jumlah pengunjung sebanyak 15.384 orang, terus mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 yakni sebesar 3820 orang dan 3.480 orang. Kemudian, meningkat kembali pada tahun 2023 sebanyak 3.824. Berdasarkan data kunjungan pemustaka atau semua jenis layanan perpustakaan, ketika dilakukan perbandingan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sikka sebagai pengguna potensi perpustakaan, diketahui hanya sekitar 4,9 persen penduduk Kabupaten Sikka yang mengunjungi perpustakaan. Hal tersebut menunjukkan kondisi dimana rendahnya minat baca masyarakat di Kabupaten Sikka. Rendahnya tingkat kunjungan dari masyarakat pada perpustakaan juga disertai dengan belum tersedianya tenaga pustakawan.

24. Kearsipan

Kearsipan sebagai proses pengelolaan dan penyimpanan dokumen, rekaman, atau informasi penting secara teratur dan teratur untuk memastikan aksesibilitas, keamanan, dan integritasnya. Tujuan dari kearsipan adalah untuk memudahkan pencarian dan memastikan bahwa dokumen atau informasi tersebut dapat diakses dengan mudah saat diperlukan.

Tabel 2.68 Kinerja Pengelolaan Arsip Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	23,73	27,87	28,02	32,20	41,18

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018, sekitar 20,34 persen perangkat daerah di Kabupaten Sikka melaporkan bahwa mereka mengelola arsip secara baku. Ini menunjukkan bahwa sebagian sudah mengadopsi praktik pengelolaan arsip yang sesuai dengan standar atau prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan kestabilan dalam persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, yaitu sebesar 23,73 persen. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam praktik pengelolaan arsip di wilayah tersebut selama dua tahun berturut-turut. Kemudian di tahun 2021 mencatat peningkatan yang signifikan dalam persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, mencapai 27,87 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan penerapan praktik pengelolaan arsip yang sesuai dengan standar atau prosedur. Pada tahun 2022, Kabupaten Sikka terus memperbaiki kinerja pengelolaan arsip,

dengan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mencapai 28,02 persen. Terakhir Pada tahun 2023 persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sebesar 32,20 persen. Selama periode tahun 2018 hingga 2023, Kabupaten Sikka berhasil mencatat peningkatan yang positif dalam persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Peningkatan ini mencerminkan komitmen dan upaya dalam memperkuat sistem pengelolaan arsip, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akurasi, aksesibilitas, dan keamanan informasi yang terdokumentasi.

b. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

1. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor ekonomi dan aktivitas sosial yang melibatkan perjalanan orang dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan rekreasi, liburan, berwisata, dan mengenal budaya serta alam suatu daerah. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang perlu diperhatikan dan dikembangkan untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah sekaligus memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Sikka agar dapat lestari dan berkelanjutan.

Kabupaten Sikka memiliki berbagai potensi destinasi wisata yang beragam mulai dari wisata alam hingga wisata keagamaan. Dari data dapat dilihat bahwa terdapat lebih dari 40 destinasi wisata di Kabupaten Sikka. Pantai Koka, Gereja Tua Sikka, Museum Bikon Blewut, Bukit Nilo, Tanjung Kajuwulu, Air Terjun Murusobe, Nusa Kutu, Sanggar Bliran Sina, Kawasan Wisata Alam Egon Blindit, Kojadoi, Taman Wisata Alam Teluk Maumere, Pulau Pemana, Pulau Amano Sikka, Patung Bunda Maria Bunda Segala Bangsa di Bukit Nilo, Replika Kota Betlehem Nelle, Gereja Tua, Patung Kristus Raja, Watu Kruz, Wisung Fatima Lela adalah destinasi destinasi wisata yang direkomendasikan oleh penggiat pariwisata. Potensi Sikka yang juga sudah menarik mata dunia adalah kain tenun. Di Sikka telah terdapat desa yang menjadi Desa Devisa Klaster Tenun NTT rintisan ASEAN Foundation. Ada 22 desa di Sikka yang didampingi sebagai Desa Devisa. Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Ritapiret, juga menjadi tempat bersejarah yang menjadi tempat kunjungan umat Nasrani.

Potensi wisata yang demikian besar hingga hari ini belum sepenuhnya dimanfaatkan, hal ini dapat dilihat melalui data yang disajikan pada tabel berikut. Dari data jumlah kunjungan wisata, tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Sikka selalu mengalami fluktuatif sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 36.041 orang.

Tabel 2.69. Kinerja Pariwisata Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kunjungan wisata (orang)	20.986	25.933	36.041	36.041	41.861
2.	Lama Kunjungan Wisata (hari)	1,27	1,49	1,82	1,82	1,88
3.	Jumlah destinasi wisata	87	87	87	87	126
4	Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola objek wisata	9	9	10	10	10

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2025

Jumlah kunjungan wisata Kabupaten Sikka ini dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di NTT, berada pada urutan ke tiga. Di Provinsi NTT, tercatat jumlah tamu yang menginap di hotel tahun 2022 paling tinggi adalah Kota Kupang dengan jumlah 313.357 orang, selanjutnya Kabupaten Manggarai Barat dengan jumlah 259.574 orang.

Lama kunjungan wisata sebagai indikator pariwisata juga menunjukkan fluktuasi meskipun terjadi peningkatan sejak tahun 2020 namun belum mampu mendekati lama kunjungan pada tahun 2020-2024. Penurunan kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Sikka ini tidak lepas dari adanya pandemi COVID-19 yang memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan dan rata-rata lama menginap menentukan besaran belanja yang dilakukan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka menyatakan bahwa belanja wisatawan, pada 2021 mencapai Rp 27 miliar, sementara pada 2020 mencapai Rp 80 miliar.

Kinerja sektor pariwisata menurut Kemenparekraf bergantung pada upaya dan kinerja 4 pilar pariwisata. Pilar pertama adalah pilar destinasi. Pilar destinasi termasuk di dalamnya adalah atraksi, di Kabupaten Sikka teridentifikasi destinasi yang sangat banyak dan beragam. Dalam hal atraksi, pemerintah Kabupaten Sikka telah berupaya menyelenggarakan atraksi atraksi wisata untuk menarik wisatawan. Bahkan tanpa atraksi wisata, destinasi wisata religi sudah merupakan daya tarik tersendiri. Namun demikian atraksi saja tidak cukup untuk menarik minat wisatawan jika aksesibilitas dan juga fasilitas destinasi tidak tersedia secara memadai. Cukup banyak destinasi wisata yang sangat baik namun ketersediaan sarana dan prasarana sangat terbatas. Demikian juga dengan akses menuju tempat wisata yang sebagian besar masih harus menggunakan kendaraan pribadi, karena belum tersedianya fasilitas transportasi publik ke destinasi wisata.

Aspek kedua adalah pilar promosi. Pilar promosi adalah upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan potensi wisata kepada calon wisatawan. Berkaitan dengan pilar promosi, sesungguhnya Kabupaten Sikka diuntungkan dengan potensi yang dimiliki. Tanpa upaya promosi yang berat, destinasi wisata religi telah terpromosikan dengan sendirinya. Pada aspek wisata budaya, masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat telah melakukan berbagai gerakan untuk mempromosikan budaya Sikka yang luar biasa, mulai dari kerajinan, musik, maupun budaya lainnya. Berbagai upaya promosi ini tidak dapat membuahkan hasil jika tidak didukung oleh pilar pilar yang lain.

Pilar selanjutnya adalah pilar industri pariwisata. Industri pariwisata meliputi semua jasa pendukung pariwisata, mulai dari hotel, restoran, agen perjalanan wisata hingga jasa perbankan. Saat ini jumlah hotel di Kabupaten Sikka sudah cukup banyak, walaupun dari data terlihat fluktuatif. Dibandingkan dengan Kota Kupang yang memiliki jumlah kunjungan wisata yang sangat tinggi tentu jumlah hotel di Kabupaten Sikka jauh lebih sedikit.

Tabel 2.70 Jumlah Hotel Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sikka	40	40	42	44	42
Kota Kupang	71	76	57	57	57
Provinsi NTT	505	487	489	489	489

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025

Memenuhi kebutuhan wisatawan dibutuhkan rumah makan dan restoran. Dari data yang tersedia tidak terdapat perubahan jumlah rumah makan di Kabupaten Sikka sejak tahun 2020. Dalam hal biro perjalanan wisata tercatat 3 biro perjalanan wisata yang dapat dideteksi dari situs *web* tentang pariwisata. Kondisi hotel, restoran dan biro perjalanan ini menunjukkan bahwa industri pariwisata di Sikka memang belum cukup berkembang.

Tabel 2.71 Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Paga	1	2	2	2	2
2.	Kewapante	0	35	35	20	18
3.	Kangae	5	11	11	18	20
4.	Nita	1	1	1	1	2
5.	Alok	50	73	73	78	73
6.	Alok Barat	0	9	9	8	36
7.	Alok Timur	5	63	63	69	62
Jumlah		**62**	**194**	**194**	**196**	**213**

Sumber: BPS, Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Pilar terakhir dari pariwisata adalah kelembagaan pariwisata yang mencerminkan kesiapan masyarakat untuk menjadi masyarakat pariwisata. Kinerja pilar ini dapat dilihat dari jumlah kelompok masyarakat pengelola wisata atau bisa dikenal dengan pokdarwis. Hingga tahun 2021 jumlah pokdarwis tercatat 9, yang di tahun 2022 meningkat menjadi 10 pokdarwis. Jumlah ini jika dibandingkan dengan destinasi wisata yang mencapai 43 sangat jauh dari cukup. Artinya secara umum kesiapan masyarakat untuk menjadi masyarakat pariwisata juga belum cukup. Namun demikian tingkat kesiapan masyarakat itu sangat beragam, ada pokdarwis yang sudah sangat maju dan menjadi masyarakat pariwisata yang sesungguhnya, namun ada masyarakat yang bahkan belum tau mengenai pariwisata.

Pariwisata merupakan sektor ekonomi dan aktivitas sosial yang melibatkan perjalanan orang dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan rekreasi, liburan, berwisata, dan mengenal budaya serta alam suatu daerah. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang perlu diperhatikan dan dikembangkan untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah sekaligus memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Sikka agar dapat lestari dan berkelanjutan.

Kabupaten Sikka memiliki berbagai potensi destinasi wisata yang beragam mulai dari wisata alam hingga wisata keagamaan. Dari data dapat dilihat bahwa terdapat lebih dari 40 destinasi wisata di Kabupaten Sikka. Pantai Koka, Gereja Tua Sikka, Museum Bikon Blewut, Bukit Nilo, Tanjung Kajuwulu, Air Terjun Murusobe, Nusa Kutu, Sanggar Bliran Sina, Kawasan Wisata Alam Egon Blindit, Kojadoi, Taman Wisata Alam Teluk Maumere, Pulau Pemana, Pulau Amano Sikka, Patung Bunda Maria Bunda Segala Bangsa di Bukit Nilo, Replika Kota Betlehem Nelle, Gereja Tua, Patung Kristus Raja, Watu Kruz, Wisung Fatima Lela adalah destinasi destinasi wisata yang direkomendasikan oleh penggiat pariwisata. Potensi Sikka yang juga sudah menarik mata dunia adalah kain tenun. Di Sikka telah terdapat desa yang menjadi Desa Devisa Klaster Tenun NTT rintisan ASEAN Foundation. Ada 22 desa di Sikka yang didampingi sebagai Desa Devisa. Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Ritapiret, juga menjadi tempat bersejarah yang menjadi tempat kunjungan umat Nasrani.

Potensi wisata yang demikian besar hingga hari ini belum sepenuhnya dimanfaatkan, hal ini dapat dilihat melalui data yang disajikan pada tabel berikut. Dari data jumlah kunjungan wisata, tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Sikka selalu mengalami penurunan sejak tahun 2018. Namun angka ini perlu dikonfirmasi, karena data dari BPS Provinsi NTT menunjukkan bahwa data jumlah tamu yang menginap di hotel untuk Sikka mencapai angka 41.473 (Provinsi NTT Dalam Angka 2023). Jumlah kunjungan wisata Kabupaten Sikka ini dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di NTT, berada pada urutan

ke tiga. Di Provinsi NTT, tercatat jumlah tamu yang menginap di hotel tahun 2022 paling tinggi adalah Kota Kupang dengan jumlah 313.357 orang, selanjutnya Kabupaten Manggarai Barat dengan jumlah 259.574 orang.

Lama kunjungan wisata sebagai indikator pariwisata juga menunjukkan fluktuasi meskipun terjadi peningkatan sejak tahun 2020 namun belum mampu mendekati lama kunjungan pada tahun 2018-2019. Penurunan kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Sikka ini tidak lepas dari adanya pandemi COVID-19 yang memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan dan rata-rata lama menginap menentukan besaran belanja yang dilakukan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka menyatakan bahwa belanja wisatawan, pada 2021 mencapai Rp 27 miliar, sementara pada 2020 mencapai Rp 80 miliar. Sebelum pandemi COVID-19, pada 2017, 2018, dan 2019, belanja wisatawan mencapai Rp 90 miliar.

2. Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Kabupaten Sikka. Melalui pengembangan pertanian yang berkelanjutan, tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan, pembangunan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan.

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sektor pertanian daerah meliputi produksi pertanian, luas lahan, produktivitas pertanian, pendapatan petani, serta berbagai indikator lainnya. Indikator tersebut memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan sektor pertanian, serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat secara keseluruhan. Berbagai indikator tersebut dirangkum oleh capaian kinerja pertanian seperti disajikan dalam Tabel berikut ini. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, kinerja makro sektor pertanian cukup fluktuatif.

Tabel 2.72 Kinerja Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	36,41	37,43	38,16	38,53	38,51
2	Pertumbuhan Sektor Pertanian	0,8	3,58	4,24	4,32	3,25

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan dan peternakan. Sejalan dengan kontribusi sektor terhadap PDRB, produksi masing masing subsektor juga menunjukkan fluktuasi. Berikut diuraikan kinerja masing masing subsektor.

Subsektor tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar. Produksi tanaman pangan tertinggi adalah ubi kayu, diikuti dengan padi dan jagung (lihat Tabel dibawah ini). Hal ini sesuai dengan kondisi iklim di kawasan NTT.

Tabel 2.73 Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi	17.235,22	11.398,9	11.345,98	12.456,79	12.710,01
2.	Jagung	19.488,64	30.344,36	29.416	17.202	15.800,2*
3.	Kedelai	-	353,4	-	-	-
4.	Kacang Tanah	1.148,56	1.191,15	1.218	946	640,6*
5.	Kacang Hijau	1.372,9	1.614	1.496	781	597,7*

No	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
6.	Ubi Kayu	76.626,82	10.7902,04	67.922	72.545	48.778*
7.	Ubi Jalar	3.160,82	3.758	3.525	4.401	2.399,4*

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2025

Kabupaten Sikka memiliki jumlah produksi ubi kayu tertinggi jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi NTT. Pada tahun 2022, produksi ubi kayu Kabupaten Sikka adalah 67.922 ton, angka ini adalah 12 persen dari total produksi ubi kayu di seluruh NTT. Namun demikian, jumlah produksi ubi kayu di Kabupaten Sikka cenderung fluktuatif. Pada komoditas padi, jika dibandingkan dengan NTT secara keseluruhan, produksi padi Kabupaten Sikka relatif rendah. Pada tahun 2022, produksi padi Kabupaten Sikka hanya 1,5 persen dari total produksi padi NTT. Jika dilihat dari trennya, produksi padi Kabupaten Sikka juga fluktuatif. Produksi jagung di Kabupaten Sikka juga relatif fluktuatif dari tahun ke tahun (lihat Tabel diatas). Produksi jagung di Sikka pada tahun 2022 sebanyak 29.415 ton, angka ini merupakan 4,21 persen dari total produksi jagung yang ada di seluruh Provinsi NTT.

Kecenderungan fluktuasi produksi tanaman pangan ini berkaitan dengan beberapa aspek. Pertama, luas areal tanaman pangan yang mengalami tren penurunan setiap tahun. Kedua, hal tersebut berkaitan dengan produktivitas lahan yang fluktuatif. Sebagai contoh, dari data BPS Provinsi NTT, produktivitas padi di Kabupaten Sikka secara berturut-turut sejak tahun 2020, 2021, 2022 adalah 4,13 ton/ha, 3,50 ton/ha, dan 3,90 ton/ha. Ketiga, faktor seperti perubahan iklim dan serangan hama tikus juga berdampak signifikan terhadap penurunan hasil produksi tanaman pangan dan ketahanan pangan di Kabupaten Sikka. Keempat, diketahui bahwa lahan pertanian di Kabupaten Sikka seluas 173 ribu hektar dan baru dimanfaatkan 150 ribu hektar sementara 23 ribu hektar menjadi lahan tidur.

Tabel 2.74 Luas Panen Tanaman Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Sektor/Subsektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tanaman pangan (Ha)	34.935,9	34.768,2	20.593,7	20.593,7	20.593,7
2	Tanaman perkebunan (Ha)	40.689,5	40.590	40.662	40.662	40.662
3.	Tanaman hortikultura (Tanaman Sayuran Semusim dan Biofarmaka) Ha	923,35	859,29	764,35	764,35	764,35
4.	Tanaman Buah (Ton)	151.940,43	64067,5	16.788,028	16.788,028	16.788,028

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2025

Fluktuasi produksi tanaman pangan dengan berbagai penyebab itu mengirimkan pesan bahwa pengelolaan pertanian tanaman pangan masih bersifat tradisional/seadanya. Karakter tradisional di satu sisi berkaitan dengan pengetahuan petani yang masih rendah. Pada sisi lain harga produk pertanian tanaman pangan tidak memiliki cukup insentif bagi petani untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari harga produk pertanian tanaman pangan yang dari tahun ke tahun tidak mengalami perbaikan yang berarti, bahkan cenderung tetap.

Tabel 2.75 Harga Produk Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Jenis Komoditi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Beras - Premium - Medium	 12.000 10.000	 12.000 10.000	 12.000 10.000	 12.000 10.000	 12.000 10.000
2	Jagung - Pipilan Kuning - Giling Kuning	 7.000 9.000	 7.000 9.000	 7.000 9.000	 7.000 9.000	 7.000 9.000
3	Ubi - Ubi Kayu	 10.000	 10.000	 10.000	 10.000	 10.000

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2025

Subsektor kedua adalah tanaman perkebunan. Subsektor ini terdiri banyak tanaman, namun yang tercatat sebagai produk utama adalah tanaman kelapa, jambu mete, kopi, kakao, kemiri, dan cengkeh. Komoditi Kelapa menjadi komoditas unggulan dengan tingkat produksi tertinggi di Kabupaten Sikka dan mengalami tren peningkatan produksi dari tahun ke tahun (lihat Tabel di atas). Pada tahun 2022 misalnya, produksi kelapa yaitu 10.574,5 ton atau 37,3 persen dari total keseluruhan produksi perkebunan di Kabupaten Sikka. Jumlah produksi ini termasuk yang tertinggi kedua di Provinsi NTT setelah Flores Timur. Produk kelapa ini selanjutnya diolah menjadi kopra oleh petani. Setiap tahun setidaknya petani kelapa Sikka menghasilkan 2,5 ton kopra. Cara pengolahan kelapa menjadi kopra hingga saat ini masih banyak dilakukan secara tradisional. Cara pengolahan yang sederhana ini menjadi salah satu penyebab dari relatif rendahnya harga kopra yang dihasilkan. Itulah mengapa potensi pertanian yang demikian tinggi belum mampu menjadi sumber kesejahteraan petani.

Hasil perkebunan berikutnya adalah mete. Meski mengalami fluktuasi produksi setiap tahunnya, mete menjadi komoditas unggulan selanjutnya dengan total produksi pada tahun 2022 mencapai 8.913 ton atau 31,5 persen dari total produksi perkebunan. Sikka merupakan produsen mete kedua tertinggi di NTT. Pada tahun 2020 produksi mete di Provinsi NTT banyak disuplai dari Kabupaten Flores Timur sebesar 14 ribu ton atau 26,92 persen, Kabupaten Sikka 17,73 persen (9 ribu ton), Kabupaten Sumba Barat Daya 11,62 persen (6 ribu ton), Kabupaten Ende 7,83 persen (4 ribu ton), Kabupaten Sumba Timur 6,76 persen (3 ribu ton), dan Kabupaten Alor 5,11 persen (2,6 ribu ton), sisanya sebesar 24,04 persen merupakan kontribusi dari kabupaten lainnya (Pusdatin Kementerian Pertanian, 2022). Dengan potensi yang ada sesungguhnya mete dapat menjadi sumber kesejahteraan petani, namun demikian minimnya hilirisasi, membuat sebagian besar mete masih dijual dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah yang dihasilkan relatif terbatas. Sebagai produk pertanian yang relatif cepat rusak, pada masa panen raya harga mete menjadi rendah.

Kakao adalah komoditas unggulan selanjutnya dengan total produksi kakao pada tahun 2022 mencapai 8.015 ton atau 28,3 persen dari total produksi perkebunan di Kabupaten Sikka. Akan tetapi, sama dengan dua komoditas unggulan sebelumnya, produksi Kakao juga masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Kakao di Sikka sudah menarik minat banyak investor, sejak tahun 2013 PT Cargill telah bekerja sama dengan petani untuk menghasilkan kakao yang baik. Kerja sama ini telah menghasilkan kesejahteraan bagi petani yang bekerja sama. Namun demikian belum seluruh petani kakao menikmati kerja sama tersebut dan tetap dalam kondisi petani tradisional. Upaya pemerintah

daerah telah dilakukan, namun masih dibutuhkan upaya yang lebih baik lagi agar kakao mampu menjadi sumber kesejahteraan petani.

Penurunan produksi beberapa komoditi perkebunan dapat diakibatkan oleh berbagai faktor seperti cuaca yang tidak pasti dan harga jual komoditi yang terus menurun. Hal ini juga berakibat pada berpindahnya profesi pekebun di Kabupaten Sikka ke berbagai sektor lain misalnya pekerja migran.

Tabel 2.76 Produksi Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kelapa	10.568,56	10.557,54	10.574,5	10.585,27	10.590,4*
2.	Jambu Mete	8.978,30	8.910,10	8.913,85	8.922,1	8.923,8*
3	Kopi	137,6	129,6	129.63		131,2*
	- Arabika	-	-	-	-	-
	- Robusta	137,6	129,6	129,6	130,2	131,2*
4	Kakao	8.058,7	8.056,4	8.015,57	8.023,4	7.026,9*
5	Kemiri	221,3	193,8	194,3	200,40	211,1*
6	Tembakau	60,70	37,49	37,81	40,10	40,20*
7	Cengkeh	471,99	473,85	461,94	472,2	475,20*
8	Pala	89,1	89,70	94,6	102	103,9*
9	Vanili	111,3	112,2	113,79	123,6	128,1*
10	Lada	37,75	37,75	37,75	43,05	44,05*

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Di urutan kedua ada jambu mete. Meski mengalami fluktuasi produksi setiap tahunnya, mete menjadi komoditas unggulan selanjutnya dengan total produksi pada tahun 2024 mencapai 8.923,80 ton atau 31,88% dari total produksi perkebunan Kabupaten Sikka tahun 2024. Sikka merupakan produsen mete kedua tertinggi di NTT. Produksi jambu mete di Provinsi NTT banyak disuplai dari Kabupaten Flores Timur sebesar 14 ribu ton atau 26,92 persen, Kabupaten Sikka 17,73 persen (9 ribu ton), Kabupaten Sumba Barat Daya 11,62 persen (6 ribu ton), Kabupaten Ende 7,83 persen (4 ribu ton), Kabupaten Sumba Timur 6,76 persen (3 ribu ton), dan Kabupaten Alor 5,11 persen (2,6 ribu ton), sisanya sebesar 24,04 persen merupakan kontribusi dari kabupaten lainnya (Pusdatin Kementerian Pertanian, 2022). Dengan potensi yang ada sesungguhnya jambu mete dapat menjadi sumber kesejahteraan petani, namun demikian minimnya hilirisasi, membuat sebagian besar jambu mete masih dijual dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah yang dihasilkan relatif terbatas.

Kakao adalah komoditas unggulan ketiga dengan total produksi kakao pada tahun 2024 mencapai 7.026,90 ton atau 25,10% dari total produksi perkebunan di Kabupaten Sikka tahun 2024. Akan tetapi, sama dengan dua komoditas unggulan sebelumnya, produksi Kakao juga masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Kakao di Sikka sudah menarik minat banyak investor. Sejak tahun 2013, PT Cargill Indonesia telah bekerja sama dengan petani kakao untuk menghasilkan produk kakao yang baik. Kerja sama ini telah menghasilkan kesejahteraan bagi petani. Namun demikian belum semua petani kakao mendapatkan manfaat dari hasil kerjasama tersebut. Upaya pemerintah daerah yang telah dilakukan adalah dengan mengadakan kerjasama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) di Jember, Jawa Timur. Kerjasama meliputi pendampingan dan mendatangkan bibit kakao bersertifikat. Namun

masih dibutuhkan upaya yang lebih baik lagi agar kakao mampu menjadi komoditas andalan sumber kesejahteraan petani.

Selanjutnya adalah produksi buah-buahan tahunan. Sub sektor ini terdiri dari beragam komoditas meliputi alpukat, durian, mangga, nangka, nanas, pepaya, pisang, rambutan, dan salak. Komoditas pisang merupakan komoditas unggulan pertama dengan total produksi selama 5 (lima) tahun mencapai 132.767,49 ton. Kemudian disusul dengan komoditas nenas mencapai 36.345,80 ton dan mangga mencapai 18.492,30 ton. Sejak 2 (dua) tahun terakhir ini, tanaman pisang di hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Sikka terkena penyakit layu bakteri atau penyakit darah pisang/moko yang disebabkan oleh bakteri Raistonia solanecearum atau dikenal dengan nama Blood Disease Bacterium (BDB) sehingga menyebabkan terjadi penurunan produksi pisang secara signifikan di wilayah Kabupaten Sikka.

Tabel 2.77 Produksi Buah dan Sayuran Tahunan Tahun 2020-2024

No	Komoditas	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Alpukat	3.627,08	2.455,62	2.638,3	1.119,6	974,79
2	Durian	178,6	855,21	1.491,04	486,45	131,15
3	Mangga	8.064	4.211,5	1.941,6	1.336,4	2.938,8
4	Nangka	6.621,3	1.802,4	920,2	748,4	811,86
5	Nenas	29.079,7	2.644,6	3.606,4	675,5	339,6
6	Pepaya	9.447,9	7.394.03	3.518,1	1.738,23	1.314,9
7	Pisang	82.313,17	28.495,2	15.067,3	5.632,92	1.258,9
8	Rambutan	419,59	394,02	256,5	246,6	126,8
9	Salak	1.517,6	541,9	748,1	224,01	78,2

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2020-2024

Tanaman biofarmaka menjadi subsektor ketiga pada sektor pertanian. Kabupaten Sikka sendiri memiliki beragam jenis komoditi tanaman biofarmaka seperti jahe, laos, kencur, kunyit yang menjadi komoditas unggulan dengan tingkat produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan komoditi lainnya. Komoditas jahe menjadi komoditi unggulan pertama dengan total produksi pada tahun 2022 mencapai 296.528 kg. Angka ini setara dengan 20,26% dari total produksi komoditi jahe di Provinsi NTT dan menjadi daerah penghasil komoditi jahe terbesar kedua setelah Kabupaten Manggarai Barat. Akan tetapi, produksi jahe di Kabupaten Sikka masih cenderung fluktuatif setiap tahunnya.

Selanjutnya, komoditi laos menjadi komoditas unggulan kedua di Kabupaten Sikka dengan total produksi 233.469 kg pada tahun 2022 dan berkontribusi sebanyak 24,47% dari total produksi laos di Provinsi NTT. Sama halnya dengan jahe, produksi laos di Kabupaten Sikka masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Terakhir, kunyit menjadi komoditi unggulan selanjutnya di Kabupaten Sikka dengan total produksi pada tahun 2022 mencapai 227.293 kg. Dengan total produksi kunyit ini, Kabupaten Sikka menjadi kabupaten penghasil kunyit pertama di Provinsi NTT dengan kontribusi mencapai 21,18 persen dari total produksi pada tahun 2022.

Kondisi produksi yang fluktuatif di satu sisi berkaitan dengan pengelolaan produksi yang sebagian besar masih bersifat tradisional. Pada sisi lain harga produk cenderung fluktuatif karena masih dipasarkan dalam bentuk mentah. Kembali lagi pengolahan produk atau hilirisasai yang belum terjadi menjadi penyebabnya.

Tabel 2.78 Produksi Tanaman Biofarmaka Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Komoditi	Produksi (kg)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jahe	145.630,10	65.273,00	296.528,00	171.025	309.831
2	Laos	63.453,59	67.621,00	233.469,00	102.245	350.118
3	Kencur	28.914,10	15.635,00	23.266,00	29.478	59.554
4	Kunyit	105.245,55	67.810,00	227.293,00	122.616	237.598
5	Temulawak	19.125,00	12.661,00	953,00	7.862	722

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Subsektor pertanian berikutnya yaitu Tanaman Sayuran Buah Semusim. Kabupaten Sikka memiliki berbagai jenis komoditi sayuran buah semusim yang bervariasi. Pertama, pada tahun 2022 adalah tomat menjadi salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Sikka. Tercatat total produksi komoditi ini mencapai 9.312 kuintal. Produksi tomat di Kabupaten Sikka sendiri telah menyumbangkan 8,29 persen kontribusi dari seluruh produksi Tomat di Provinsi NTT.

Selanjutnya terdapat komoditi kangkung dengan jumlah produksi pada tahun 2022 mencapai 4.580 kuintal. Angka ini membuat komoditi kangkung menjadi salah satu komoditi unggulan yang ada di Kabupaten Sikka. Komoditi unggulan yang lain adalah petsai. Pada tahun 2022, total produksi komoditi ini mencapai 3.267,22 kuintal. Produksi ini memiliki kontribusi sebanyak 2,68 persen dari total produksi petsai di Provinsi NTT.

Selain dua komoditi di atas, masih terdapat komoditi lain seperti wortel, terung, bayam, dan sebagainya. Akan tetapi, jika dilihat dari Tabel diatas, produksi tanaman sayuran buah semusim di Kabupaten Sikka ini cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti harga jual komoditi yang stagnan dan perubahan iklim cuaca di Kabupaten Sikka.

Tabel 2.79 Produksi Tanaman Sayuran Buah Semusim Tahun 2020-2024

No	Komoditas	Produksi (Kuintal)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bawang Merah	211,24	37,82	80,45	49,00	116,91
2	Petsai/Sawi	744,1	1.034,7	326,77	313,63	257,78
3	Wortel	550,25	627,44	373,55	220,05	102,65
4	Tomat	865,74	267,10	457,57	377,36	378,90
5	Terung	981,43	142,30	177,64	59,82	143,50
6	Ketimun	116,04	30,31	40,71	40,27	25,34
7	Labu siam	5.121,39	350,65	183,13	200,05	359,44
8	Kangkung	868,98	226,42	458,09	347,90	392,63
9	Bayam	450,21	128,82	207,69	220,31	162,44
10	Cabe keriting	1.053,07	113.84	200,45	157,85	248,42

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2025

Subsektor pertanian selanjutnya adalah Buah dan Sayuran Tahunan. Subsektor ini terdiri dari beragam komoditas meliputi jeruk siam, mangga, nangka, nanas, pepaya, dan pisang. Komoditas pisang merupakan komoditas unggulan pertama dengan total produksi 14.997 ton dan memiliki kontribusi mencapai 59 persen dari total produksi buah dan sayuran di Kabupaten Sikka pada tahun 2022. Selanjutnya, komoditas nanas dan pepaya menjadi komoditas unggulan pada tahun 2022 dengan total produksi sebanyak 3.561 ton dan 3.495 ton. Masing-masing kontribusi pada total produksi buah dan sayuran pada

kedua komoditas tersebut yaitu 14 persen untuk nanas dan 13 persen untuk pepaya pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.80 Produksi Buah dan Sayuran Tahunan Tahun 2020-2024

No	Komoditas	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jeruk Siam/Keprok	34.228,60	12.626,40	411,66	411,66	411,66
2	Mangga	8.064,00	4.211,60	1.887,65	1.887,65	1.887,65
3	Nangka/Cempedak	6.621,30	1.802,50	911,77	911,77	911,77
4	Nenas*)	2.907,97	2.644,70	3.561,44	3.561,44	3.561,44
5	Pepaya	9.447,96	7.394,00	3.495,55	3.495,55	3.495,55
6	Pisang*)	82.313,17	28.495,20	14.997,83	14.997,83	14.997,83
Jumlah		**62.870,60**	**143.583**	**57.174,40**	**57.174,40**	**57.174,40**

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Secara keseluruhan, Kabupaten Sikka memiliki sektor pertanian yang beragam, mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, tanaman biofarmaka, serta sayuran buah semusim dan tahunan. Meskipun beberapa komoditas seperti ubi kayu, kelapa, dan pisang menunjukkan produksi yang cukup tinggi dan konsisten, sebagian besar produksi pertanian di daerah tersebut mengalami fluktuasi tahunan yang signifikan. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti luas lahan yang dimanfaatkan, produktivitas tanaman, perubahan iklim, dan kondisi pasar yang tidak stabil. Selain itu, harga produk pertanian cenderung stagnan dari tahun ke tahun, yang dapat mengurangi insentif bagi petani untuk meningkatkan pengelolaan pertanian mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih besar dalam pengelolaan pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta dukungan kebijakan yang memperhatikan kondisi pasar dan faktor-faktor lingkungan.

a. Produksi perkebunan

Tabel 2.81 Produksi Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kelapa	10.568,56	10.557,54	10.574,5	10.585,27	10.590,4*
2.	Jambu Mete	8.978,30	8.910,10	8.913,85	8.922,1	8.923,8*
3	Kopi	137,6	129,6	129.63		131,2*
	- Arabika	-	-	-	-	-
	- Robusta	137,6	129,6	129,6	130,2	131,2*
4	Kakao	8.058,7	8.056,4	8.015,57	8.023,4	7.026,9*
5	Kemiri	221,3	193,8	194,3	200,40	211,1*
6	Tembakau	60,70	37,49	37,81	40,10	40,20*
7	Cengkeh	471,99	473,85	461,94	472,2	475,20*
8	Pala	89,1	89,70	94,6	102	103,9*
9	Vanili	111,3	112,2	113,79	123,6	128,1*
10	Lada	37,75	37,75	37,75	43,05	44,05*

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2020-2024

Sub sektor ketiga adalah tanaman perkebunan. Sub sektor ini terdiri dari banyak komoditas, namun yang tercatat sebagai produk utama adalah tanaman kelapa, jambu mete, kopi, kakao, kemiri, dan cengkeh. Komoditi Kelapa menjadi komoditas unggulan dengan tingkat produksi tertinggi di Kabupaten Sikka dan mengalami tren peningkatan produksi dari tahun ke tahun (lihat Tabel di atas). Pada tahun 2022 misalnya, produksi kelapa yaitu 10.574,5 ton atau 37,3 persen dari total keseluruhan produksi perkebunan di Kabupaten Sikka. Jumlah produksi ini termasuk yang tertinggi kedua di Provinsi NTT setelah Flores Timur. Produk kelapa ini selanjutnya diolah menjadi kopra oleh petani. Setiap tahun setidaknya petani kelapa Sikka menghasilkan 2,5 ton kopra. Cara pengolahan kelapa menjadi kopra hingga saat ini masih banyak dilakukan secara tradisional. Cara pengolahan yang sederhana ini menjadi salah satu penyebab dari relatif rendahnya harga kopra yang dihasilkan. Itulah mengapa potensi pertanian yang demikian tinggi belum mampu menjadi sumber kesejahteraan petani.

Hasil perkebunan berikutnya adalah jambu mete. Meski mengalami fluktuasi produksi setiap tahunnya, mete menjadi komoditas unggulan selanjutnya dengan total produksi pada tahun 2022 mencapai 8.914 ton atau 31,5 persen dari total produksi perkebunan. Sikka merupakan produsen jambu mete kedua tertinggi di NTT.

Pada tahun 2020 produksi mete di Provinsi NTT banyak disuplai dari Kabupaten Flores Timur sebesar 14 ribu ton atau 26,92 persen, Kabupaten Sikka 17,73 persen (9 ribu ton), Kabupaten Sumba Barat Daya 11,62 persen (6 ribu ton), Kabupaten Ende 7,83 persen (4 ribu ton), Kabupaten Sumba Timur 6,76 persen (3 ribu ton), dan Kabupaten Alor 5,11 persen (2,6 ribu ton), sisanya sebesar 24,04 persen merupakan kontribusi dari kabupaten lainnya (Pusdatin Kementerian Pertanian, 2022). Dengan potensi yang ada sesungguhnya jambu mete dapat menjadi sumber kesejahteraan petani, namun demikian minimnya hilirisasi, membuat sebagian besar jambu mete masih dijual dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah yang dihasilkan relatif terbatas. Sebagai produk pertanian yang relatif cepat rusak, pada masa panen raya harga jambu mete menjadi rendah.

Kakao adalah komoditas unggulan selanjutnya dengan total produksi kakao pada tahun 2022 mencapai 8.016 ton atau 28,3 persen dari total produksi perkebunan di Kabupaten Sikka. Akan tetapi, sama dengan dua komoditas unggulan sebelumnya, produksi kakao juga masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Kakao di Sikka sudah menarik minat banyak investor. Sejak tahun 2013 PT Cargill Indonesia telah bekerja sama dengan petani untuk menghasilkan kakao yang lebih baik. Kerjasama ini memberi dampak bagi kesejahteraan petani. Meski demikian belum seluruh petani kakao menikmati hasil kerjasama tersebut dan masih belum memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan hidup petani. Upaya pemerintah daerah telah dilakukan, namun masih dibutuhkan upaya yang lebih baik lagi agar kakao mampu menjadi sumber kesejahteraan petani. Penurunan produksi beberapa komoditi perkebunan diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kondisi cuaca yang tidak menentu dan harga jual komoditi yang berfluktuatif. Kondisi ini mengakibatkan petani mencari alternatif pendapatan lain selain sub sektor perkebunan misalnya menjadi pekerja migran.

b. Produksi peternakan

Secara umum kondisi peternakan di Kabupaten Sikka diklasifikasikan berdasarkan jenis yaitu ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Ternak

besar terdiri atas ternak sapi, kerbau, dan kuda. Ternak kecil terdiri atas kambing dan babi. Ternak unggas terdiri atas ayam buras, ayam potong, ayam petelur, itik, dan aneka unggas. Dari tabel dibawah ini terlihat adanya kecenderungan kenaikan jumlah populasi ternak besar dari tahun 2020 sampai 2024.

Tabel 2.82 Data Populasi Ternak Besar Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Ternak Besar	Jumlah Populasi (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi potong	15.895	16.277	19.531	20.477	24.222
2	Kerbau	1.884	1.843	1.898	1.815	2.050
3	Kuda	2.731	2.792	2.935	3.507	3.544

Sumber data : Dinas Pertanian, 2025

Dari tabel diatas, komoditas sapi potong mengalami peningkatan jumlah populasi sejak tahun 2020 sampai 2024. Hal ini disebabkan karena ketersediaan pakan dan luasan padang penggembalaan yang cukup mendukung kebutuhan ternak. Selain itu adanya peningkatan permintaan daging sebagai salah satu sumber protein hewani menjadi penyebab budidaya ternak sapi berkembang baik. Hal lainnya juga adalah adanya permintaan ternak sapi dari luar wilayah Kabupaten Sikka cukup tinggi sehingga mendorong masyarakat untuk memelihara ternak sapi lebih intensif. Kondisi ini menyebabkan kenaikan jumlah populasi. Untuk ternak kerbau, perkembangan jumlah populasi mengalami fluktuasi. Kerbau di Kabupaten Sikka lebih banyak diarahkan kepada tenaga kerja daripada melakukan budidaya secara intensif. Tenaga kerja disini adalah untuk membajak areal persawahan. Untuk perkembangan populasi kuda di Kabupaten Sikka mengalami perkembangan peningkatan jumlah populasi dari tahun 2020 s/d 2024. Hal ini disebabkan karena ternak kuda memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain sebagai ternak potong dan komoditas antar pulau, ternak kuda juga sebagai ternak untuk keperluan adat-istiadat masyarakat Kabupaten Sikka baik peristiwa perkawinan, kematian, dan urusan adat lainnya.

Tabel 2.83 Data Populasi Ternak Kecil Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Ternak Kecil	Jumlah Populasi (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kambing	116.439	118.209	124.117	129.042	151.443
2	Babi	14.481	9.680	9.487	9.933	11.773

Sumber data : Dinas Pertanian, 2025

Dari tabel diatas menunjukkan ternak kambing mengalami peningkatan populasi sejak tahun 2020 s/d 2024. Hal ini karena adanya dukungan lahan padang penggembalaan dan ketersediaan Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang memadai yang mendukung proses tumbuh dan berkembangnya populasi ternak kambing. Faktor lain yang menyebabkan kenaikan jumlah populasi adalah naiknya permintaan ternak kambing dari luar wilayah Kabupaten Sikka serta konsumsi daging kambing dalam wilayah Kabupaten Sikka yang meningkat sehingga menyebabkan petani ternak bersemangat memelihara intensif ternak kambing.

Untuk ternak babi, terjadi fluktuasi terhadap jumlah populasi. Penurunan yang signifikan terjadi dari tahun 2020 ke 2021 karena masuknya wabah penyakit flu babi African Swine Fever (ASF) yang menyerang ternak babi dalam jumlah besar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sikka. Penyakit ini menimbulkan dampak ekonomi yang besar terhadap pendapatan masyarakat. Pendapatan mengalami penurunan dan tidak sedikit yang mengalami kerugian. Dampak negatif adalah masyarakat menjadi takut mengkonsumsi daging babi karena mengandung penyakit. Akibatnya harga jual ternak babi menurun drastis.

Tabel 2.84 Data Populasi Ternak Unggas Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Ternak Kecil	Jumlah Populasi (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ayam buras	291.772	295.011	309.763	298.284	348.334
2	Ayam ras petelur	6.610	4.836	22.616	27.365	27.434
3	Ayam pedaging	104.987	71.066	301.000	10.154	11.427
4	Itik	879	900	839	881	2.043

Sumber data : Dinas Pertanian, 2025

Dari tabel diatas, komoditas ayam buras (bukan ras) atau lebih dikenal dengan istilah ayam kampung mengalami fluktuasi peningkatan populasi dari tahun 2020 s/d 2024 karena karena ditunjang oleh naiknya permintaan akan konsumsi daging ayam buras sebagai daging sehat dan memiliki cita rasa nikmat. Karakteristik ayam buras sebagai ternak unggas yang tahan terhadap wabah penyakit, turut memberi andil terhadap naiknya jumlah populasi. Selain itu, kebanyakan masyarakat memelihara ayam buras hanya dilepas begitu saja dan membiarkan ayam mencari makan sendiri di lingkungan sekitar.

Ayam pedaging atau ayam potong mengalami penurunan jumlah populasi yang sangat signifikan dari tahun 2020 ke 2021. Hal ini disebabkan karena timbulnya wabah covid-19 berpengaruh terhadap akses transportasi yang membawa Day Old Chick (DOC)/bibit ayam pedaging baik melalui darat, laut, maupun udara ditutup atau tidak beroperasi sama sekali. Semua bibit didatangkan dari luar pulau sehingga sempat terjadi kelangkaan luar biasa terhadap persediaan bibit ayam pedaging saat itu. Lonjakan signifikan terjadi di tahun 2022 karena iklim usaha peternakan sudah pulih kembali pasca wabah covid-19. Namun kemudian turun di tahun 2023. Hal ini karena beberapa pengusaha peternakan ayam pedaging tidak memberikan akses data terkait jumlah populasi sehingga sedikit sekali data yang didapat.

Untuk ayam petelur terjadi penurunan jumlah populasi dari tahun 2020 ke 2021. Alasannya karena pandemi covid-19 yang terjadi saat itu. Seiring berjalannya waktu, perlahan jumlah populasi ayam petelur mengalami peningkatan populasi sejak tahun 2022 sampai 2024. Hal ini karena masyarakat sadar akan pentingnya nilai gizi telur dan perlindungan tubuh pasca wabah covid-19.

Ternak itik di Kabupaten Sikka dipelihara lebih kepada kegemaran atau hobi dan untuk konsumsi sendiri sehingga populasinya tidak begitu banyak.

Tabel 2.85 Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Jenis Penyakit Hewan Menular	Jumlah Kasus				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rabies*	4	1	5	66	42
2	ASF	3.128	60.000	1.000	1.500	2.000
3	SE	-	-	-	-	65
4	PMK	-	-	-	-	-
5	Hoq Cholera	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Antraks	-	-	-	-	-
7	Brucelosis	-	-	-	-	-

sumber data : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2025

*)kasus rabies pada hewan

Bahwa kasus rabies sangat dipengaruhi langsung oleh cakupan vaksinasi terhadap Hewan Penular Rabies (HPR) khususnya anjing dengan rata-rata cakupan per tahun yang masih dibawah 50%, masih jauh dari rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia yakni minimal cakupan 70% untuk dapat menekan kasus pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk Penyakit Hewan Menular (PHM) strategis lainnya baik yang zoonosis maupun non zoonosis, dukungan ketersediaan logistik kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (vaksin, obat hewan dan vitamin, desinfektan, alat dan bahan) untuk pengujian laboratorium di laboratorium veteriner dan logistik lainnya ikut berpengaruh secara langsung. Sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 dukungan terhadap hal ini masih sangat terbatas dari segi pembiayaan sehingga belum bisa berdampak kepada penekanan kasus PHM strategis secara signifikan.

Tabel 2.77 Data Populasi Hewan Penular Rabies Anjing dan Realisasi Vaksinasi Hewan Penular Rabies Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Tahun	Populasi HPR (ekor)	Realisasi Vaksinasi HPR (ekor)
1	2020	55.000	20.000
2	2021	50.000	-
3	2022	45.000	10.850
4	2023	45.000	11.500
5	2024	40.000	10.700

Sumber data : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan tabel diatas maka realisasi tertinggi vaksinasi pada anjing terjadi pada tahun 2020 sebanyak 20.000 ekor. Itupun belum mencapai 50% dari total keseluruhan populasi anjing di Kabupaten Sikka. Tahun 2021 tidak terjadi pelaksanaan vaksinasi karena pemerintah fokus menyelesaikan dan mengatasi dampak wabah penyakit covid-19. Vaksinasi dilanjutkan kembali pada tahun 2022 sampai 2024 namun dengan tingkat realisasi yang masih juga tidak mencapai 50%. Hal ini berkaitan dengan penyediaan vaksin HPR yang masih terbatas di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

3. Perikanan

Sektor perikanan memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi dan sosial Kabupaten Sikka. Sebagai salah satu kabupaten yang kaya akan sumber

daya laut, potensi perikanan Sikka menawarkan peluang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Sikka memiliki kawasan dengan potensi ketersediaan ikan di perairan laut, di bagian utara Laut Flores di pesisir pantai bagian utara, yakni kecamatan Alok, Alok Barat, Alok Timur, Kangae, Kewapante, Waigete, Talibura, Magepanda, Palue dan di pesisir pantai bagian selatan Laut Sawu, yakni kecamatan Waiblama, Waigete, Mapitara, Doreng, Bola, Lela, Mego dan Paga. Untuk mengukur dan memantau kemajuan sektor perikanan, sejumlah indikator kinerja yang digunakan adalah produksi perikanan tahunan dalam ton dan jumlah kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Sikka.

a. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan adalah semua hasil produksi penangkapan, budidaya ikan yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi perikanan di Kabupaten Sikka tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.24 Produksi Perikanan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



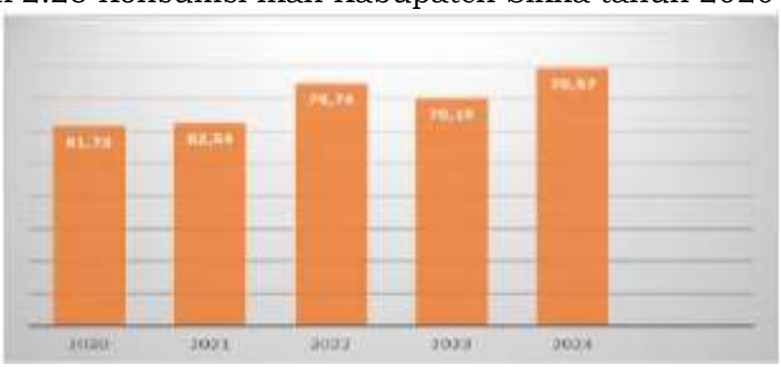
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa produksi perikanan Kabupaten Sikka tahun 2020 sebesar 20.924,93 ton. tahun 2021 sebesar 21.450,31 ton, tahun 2022 menjadi 25.514,09 ton, tahun 2023 sebesar 23.970,48 dan pada tahun 2024 sebesar 27.625,41 ton.

b. Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kapita/tahun. Konsumsi ikan di Kabupaten Sikka selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.25 Konsumsi Ikan Kabupaten Sikka tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa konsumsi ikan di Kabupaten Sikka tahun 2020 sebesar 61,73 kg/kapita/tahun. tahun 2021 sebesar 62,54 kg/kapita/tahun, tahun 2022 menjadi 74,74 kg/kapita/tahun dantahun 2023 sebesar 70,15 kg/kapita/tahun sedangkan tahun 2024 sebesar 79,57 kg/kapita/tahun.

c. Pendapatan Per Kapita Nelayan

Pendapatan nelayan adalah adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya yang dikeluarkan. Penerimaan nelayan adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. Pendapatan nelayan pada tahun 2019 sebesar Rp 14.790.000, pada tahun 2020 sebesar Rp 14.749.000, tahun 2021 sebesar Rp 14.775.744 pada tahun 2022 sebesar Rp 19.083.980. dan pada tahun 2023 sebesar Rp 14.157.940.

Selain itu, jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi NTT pada tahun 2019, produksi perikanan tangkap Sikka memiliki kontribusi 15,24 persen terhadap total produksi perikanan tangkap di Provinsi NTT. Angka ini terus naik dari tahun ke tahun dan menjadikan Kabupaten Sikka sebagai salah satu daerah dengan produksi perikanan tangkap terbesar di Provinsi NTT.

Sejak tahun 2019, nelayan Kabupaten Sikka telah berhasil mengekspor komoditas perikanan tangkap hingga ke pasar mancanegara seperti Jepang, Malaysia, Korea Selatan, dan Singapura serta ke daerah-daerah lain di Indonesia. Komoditas utama perikanan tangkap untuk Kabupaten Sikka adalah cakalang, tongkol, dan tuna. Nilai produksi perikanan tangkap Kabupaten Sikka termasuk salah satu yang tertinggi di Provinsi NTT. Sebagai contoh, pada tahun 2020, komoditas cakalang dengan nilai Rp 506.220.587 memiliki kontribusi nilai tertinggi yaitu 12,06 persen dari total nilai produksi Provinsi NTT. Produksi ikan yang tinggi tersebut sebagian besar dihasilkan oleh kelompok-kelompok nelayan.

Tabel 2.87 Nilai Produksi dan Komoditas Utama Perikanan Tangkap di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 (Rupiah)

No	Komoditas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakalang	506.220.587	36.933.385	36.933.385	36.933.385	36.933.385
2	Tongkol	506.220.587	47.126.360	47.126.360	47.126.360	47.126.360
3	Tuna	36.933.385	15.360.060	15.360.060	15.360.060	15.360.060

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Database Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan, 2025

d. Armada Perikanan

Armada Perikanan yang beroperasi di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.88 Armada perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2024

No	Jenis Armada Perikanan	Jumlah Unit				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perahu papan kecil sampan fibre glass < 5 M	50	50	50	50	332
2.	Perahu Papan Sedang/sampan fiberglass >5 M	228	228	245	255	276
3.	Motor Tempel < 5 GT	30	55	88	88	88
4.	Motor Tempel 5-10 GT	-	-	-	-	-
5.	Motor Tempel 10-20 GT	-	-	-	-	-
6.	Kapal Motor < 5 GT	432	444	444	452	454
7.	Kapal Motor 5-10 GT	101	101	102	102	104
8.	Kapal Motor 10-20 GT	7	8	8	8	8
9.	Kapal Motor 20-30 GT	67	67	67	67	67

No	Jenis Armada Perikanan	Jumlah Unit				
		2020	2021	2022	2023	2024
10.	Kapal Motor 30-50 GT	1	1	1	1	1
	JUMLAH	1.191	1.229	1.296	1.323	1.330

Sumber : Olahan Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2024

e. Alat Tangkap

Jenis Alat tangkap yang digunakan Nelayan di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel .2.89. Jenis alat tangkap di Kabupaten Sikka

No	Jenis alat tangkap	Jumlah unit				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pukat Pantai	644	644	644	644	107
2.	Pukat Cincing/Purse seine	131	132	149	171	246
3.	Jaring Insang Tetap	463	471	466	466	983
4.	Jaring Insang Hanyut	990	990	990	991	991
5.	Bagan	153	153	169	174	230
6.	Longline	3	3	3	3	3
7.	Rawai Dasar	92	92	92	92	92
8.	Huhate / Pole and Line	75	75	75	75	75
9.	Pancing / Hand Line	9.011	9.036	9.118	9.423	9.771
10.	Bubu	179	179	179	179	21
11.	Panah	913	913	913	913	65
12.	Jala Tebar	166	166	166	166	180
	JUMLAH	12.820	12.854	12.964	13.297	12.764

Sumber : Olahan Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2024

Pada perikanan budidaya, Jumlah kelompok nelayan pembudidaya digunakan untuk melihat kondisi perikanan budidaya yang ada di Kabupaten Sikka. Jumlah kelompok nelayan pembudidaya yang cukup banyak menunjukkan minat yang kuat dari masyarakat lokal untuk terlibat dalam kegiatan budidaya perikanan, yang dapat dianggap sebagai potensi besar untuk pengembangan sektor perikanan di wilayah tersebut. Tabel diatas menampilkan jumlah kelompok nelayan pembudidaya yang bergerak di bidang usaha budidaya lele di Kabupaten Sikka. Hingga saat ini terdapat 54 kelompok nelayan pembudidaya yang tersebar di 26 desa di Kabupaten Sikka pada tahun 2022.

Tabel 2.90 Jumlah Kelompok Nelayan Pembudidaya Ikan Lele
di Kabupaten Sikka Tahun 2022

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Kelompok	Jumlah
1	Magepanda	Magepanda	6	15
		Reroroja	3	
		Kolisia B	5	
		Done	1	
2	Alok Barat	Wolomarang	6	7
		Wailiti	1	
3	Alok Timur	Nangameting	4	6
		Waioti	1	
		Kojadoi	1	
4	Mego	Bhera	1	6
		Gera	3	
		Bhera	2	
5	Waigete	Nangatobong	1	4
		Wairterang	1	
		Runut	1	
		Wairterang	1	

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Kelompok	Jumlah
6	Kangae	Langir	3	3
7	Tanawawo	Renggarasi	3	3
8	Alok	Madawat	2	3
		Gunung Sari	1	
9	Talibura	Nebe	2	2
10	Paga	Masabewa	1	1
11	Nita	Wuliwutik	2	2
12	Bola	Umauta	1	1
13	Waiblama	Tanarawa	1	1
	Total	**26 Desa**		**54**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka, 2025

Penyebaran kelompok nelayan pembudidaya di 26 desa menunjukkan partisipasi yang merata dari berbagai komunitas di Kabupaten Sikka, yang dapat membawa dampak positif terhadap distribusi pendapatan dan pembangunan sosial ekonomi di seluruh wilayah. Selain itu, fokus budidaya pada jenis ikan lele menunjukkan adanya preferensi atau keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Kabupaten Sikka dalam hal infrastruktur atau pengetahuan terkait budidaya ikan ini. Sebagai daerah yang kering, pilihan budidaya lele adalah pilihan yang cukup beralasan, mengingat budidaya lele tidak membutuhkan kualitas air yang sangat terjaga.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja urusan energi dan sumber daya mineral merupakan faktor penting dalam mengukur kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Hal ini sangat relevan ketika kita mengamati Kabupaten Sikka yang terletak di Provinsi NTT. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Sikka telah mengalami perubahan yang signifikan dalam hal akses dan pemanfaatan sumber energi serta sumber daya mineral. Data dan statistik yang terkait dengan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, rasio ketersediaan daya listrik, jumlah keluarga yang mengandalkan listrik PLN maupun sumber listrik non-PLN, dan jumlah keluarga yang masih belum memiliki akses listrik memberikan pandangan yang jelas tentang perjalanan Kabupaten Sikka dalam menghadapi tantangan energi dan sumber daya mineral.

Tabel 2.91 Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	71,98	90,26	94,77	94,77	94,77
2.	Rasio ketersediaan daya listrik	-	97,25%	97,25%	97,25%	97,25%
3.	Jumlah keluarga yang menggunakan listrik PLN	43.879	52.387	58.899	58.899	58.899
4.	Jumlah keluarga yang menggunakan listrik Non PLN	2.446	5.425	3.080	3.080	3.080
5.	Jumlah keluarga belum Berlistrik	18.033	6.239	3.420	3.420	3.420
6.	Desa yang menggunakan PLN	100	103	141	141	141
7.	Desa yang menggunakan Non PLN	43	40	40	40	40
8.	Desa Belum Berlistrik	43	40	40	40	40
9.	Persentase pertambangan tanpa izin	-	-	10	10	10

Sumber: RKPD Kabupaten Sikka, 2025

Jika ditilik pada tabel di atas, menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Sikka dari tahun 2018 hingga 2022. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2021 dan 2022, dengan persentase yang hampir mencapai 95 persen. Ini mengindikasikan upaya yang berhasil dalam meningkatkan akses listrik bagi rumah tangga di daerah tersebut. Rasio ketersediaan daya listrik tetap stabil pada 97.25 persen pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini tidak mendukung adanya peningkatan dalam jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Kemudian adanya peningkatan yang konsisten dalam jumlah keluarga yang menggunakan listrik dari PLN selama periode 2018-2022. Ini mencerminkan peningkatan distribusi listrik yang efisien di Kabupaten Sikka. Pada indikator jumlah keluarga yang menggunakan listrik non-PLN mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2019, jumlah tersebut menurun pada tahun 2020 dan 2022. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan preferensi atau perubahan dalam penyediaan listrik non-PLN. Sementara itu, terjadi penurunan yang signifikan dalam indikator jumlah keluarga yang belum memiliki akses listrik selama periode tersebut. Hal ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam menyediakan akses listrik kepada lebih banyak rumah tangga di Kabupaten Sikka. Kemudian, dapat dilihat pada indikator desa yang menggunakan listrik non-PLN dan desa belum berlistrik belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini mengakibatkan ketimpangan wilayah yang cukup tinggi.

5. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan ekonomi suatu daerah, yang memegang peran strategis dalam menggerakkan aktivitas ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja sektor perdagangan dapat dilihat melalui berbagai indikator seperti kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB, Pertumbuhan sektor perdagangan, jumlah pedagang dan kelompok pedagang, dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Sikka cukup tinggi, dengan tingkat pertumbuhan yang juga tinggi. Pertumbuhan yang rendah di masa pandemi COVID-19, merupakan anomali yang terjadi pada semua sektor. Aktivitas ini melibatkan lebih dari 6.000 pedagang yang tergabung dalam 80-an kelompok pedagang, yang dari tahun ke tahun angkanya menunjukkan peningkatan.

Tabel 2.92 Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB	10,84	10,36	10,79	11,12	11,41
2.	Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	-5,18	1,42	7,03	5,71	9,20
3.	Jumlah Pedagang	6.088	6.088	6.088	1.000	1.000
4.	Jumlah kelompok pedagang	77	82	87	1.505	1.505

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Fluktuasi kinerja sektor perdagangan di Kabupaten Sikka dipengaruhi oleh aliran barang yang masuk dan barang yang keluar. Data PDRB berdasar pengeluaran tercatat nilai ekspor bersih Kabupaten Sikka selalu dalam keadaan negatif, dengan nilai yang cukup besar. Sebagai contoh tahun 2023 tercatat net ekspor Kabupaten Sikka mencapai angka minus Rp 2,7 triliun atau sekitar 45 persen dari PDRB. Angka ini memberikan pesan bahwa sekalipun Kabupaten Sikka banyak menghasilkan uang dari ekspornya, namun uang tersebut kembali keluar untuk membeli barang barang dari luar daerah. Ini menjadi kata kunci penting mengapa potensi dan produksi yang dihasilkan belum mampu menciptakan kesejahteraan penduduk Kabupaten Sikka.

Komoditas yang masuk ke Kabupaten Sikka mulai dari kebutuhan pangan hingga bahan bangunan. Selain beras, komoditi pangan lain yang diimpor ke Kabupaten Sikka adalah Jagung yang pada tahun 2022 bahkan mencapai 66 ton. Selain itu, masih terdapat komoditi lain yang masuk ke Kabupaten Sikka pada tahun 2022 seperti tepung sebanyak 14.038 ton, sayuran sebanyak 11.205 ton, dan sebagainya. Hal ini menandakan adanya permintaan yang tinggi terhadap komoditi-komoditi ini sehingga Kabupaten Sikka masih memerlukan pasokan dari daerah lain untuk memenuhi permintaan tersebut.

Untuk produk selain pangan tidak tersedia data secara memadai, namun demikian dari hasil FGD didapatkan informasi bahwa sebagian besar produk bahan bangunan juga didatangkan dari luar daerah. Setara dengan itu bahan pakaian maupun berbagai peralatan rumah tangga yang tidak dapat diproduksi oleh penduduk Sikka juga didatangkan dari luar daerah.

Pada sisi lain perdagangan yakni ekspor, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, hampir seluruh produk pertanian dan perikanan Kabupaten Sikka merupakan produk produk yang dijual keluar daerah, baik dalam bentuk mentah maupuan telah dilakukan pengolahan, baik ke daerah lain di Indonesia atau ekspor ke negara lain. Beberapa barang yang dijual keluar daerah di antaranya meliputi hewan ternak, komoditi tanaman hortikultura, buah dan sayuran, ikan, hingga produk perkebunan.

Pada tahun 2022, kelapa kupas menjadi barang yang paling banyak dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka yaitu sebanyak 2.648 ton. Masih dari produk perkebunan komoditas keluar terbanyak adalah Kakao sebanyak 779 ton. Untuk hewan ternak, sebanyak 1.508 ekor kambing menjadi barang yang paling banyak keluar dari Kabupaten Sikka, disusul oleh kuda (53 ekor), sapi (51 ekor) dan kerbau (46 ekor). Untuk komoditas perikanan telah dijelaskan dalam analisis urusan perikanan.

Analisis atas jenis barang yang dibeli dan yang dijual dari Kabupaten Sikka memberikan informasi yang cukup jelas mengapa net ekspor Kabupaten Sikka memiliki angka negatif. Produk yang dijual dari Sikka seluruhnya merupakan produk pertanian yang sebagian besar dijual dalam bentuk mentah. Secara alamiah produk pertanian yang belum diolah merupakan produk yang cepat rusak. Dalam kondisi produk cepat rusak maka petani sebagai produsen tidak memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Itulah sebabnya produksi yang tinggi belum mampu mendatangkan kesejahteraan atau menghasilkan uang yang cukup untuk membeli barang dari luar daerah. Pada sisi lain produk yang dibeli dari luar daerah adalah produk makanan dan produk hasil industri. Produk makanan, merupakan produk kebutuhan pokok yang pasti akan dibeli dengan harga berapapun selama penduduk masih memiliki kemampuan untuk membelinya. Sementara itu produk industri secara alamiah memiliki daya tawar yang cukup tinggi, sebab selain produknya tidak mudah rusak, pada umumnya produk tersebut juga merupakan barang yang

dibutuhkan sekalipun untuk memenuhi kebutuhan sekunder, misalnya peralatan rumah tangga.

Berkaitan dengan perdagangan, penting juga untuk mendiskusikan perdagangan di dalam daerah. Aktivitas perdagangan membutuhkan sarana dan prasarana yang dapat dicermati dari jumlah sarana dan prasarana perdagangan. Jumlah pasar tradisional dan modern dapat memberikan gambaran ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan. Jumlah pasar tradisional dan modern mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Semakin banyak pasar, baik tradisional maupun modern, umumnya menandakan tingkat kegiatan jual beli yang aktif di tingkat lokal. Selain itu, jenis pasar juga bisa memberikan gambaran terkait karakteristik konsumen hingga aksesibilitas dan distribusi barang di Kabupaten Sikka. Berikut data terkait jumlah pasar berdasarkan jenisnya yang ada di Kabupaten Sikka yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.93 Jumlah Pasar di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Jenis Pasar	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pasar Tradisional	39	40	40	40	40
2.	Pasar Modern	178	178	178	178	178

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, kondisi pasar yang ada di Kabupaten Sikka pada tahun 2023 telah didominasi oleh pasar modern sebanyak 178 pasar, sedangkan jumlah pasar tradisional pada tahun 2023 hanya ada 40 pasar. Dominasi pasar modern di Kabupaten Sikka yang dimulai sejak tahun 2020 yang menunjukkan adanya potensi peningkatan permintaan terhadap jenis barang yang lebih spesifik dan kemampuan daya beli yang lebih tinggi.

Dilihat dari persebarannya, berdasar data dari Dinas perdagangan Koperasi dan UMKM, pasar tradisional tersedia hampir di setiap kecamatan dengan jumlah pasar yang bervariasi. Dari 21 kecamatan, terdapat 2 kecamatan yang tidak memiliki pasar yakni Kecamatan Koting dan Kecamatan Kangae. Sementara kecamatan dengan pasar tradisional terbanyak adalah Kecamatan Nita sebanyak 7 pasar dan Kecamatan Talibura sebanyak 5 pasar, sedangkan kecamatan lain bervariasi antara 1 sampai 3 pasar.

Untuk pasar modern hanya ada di 4 kecamatan yakni Kewapante, Kangae, Alok dan Alok Timur dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Alok (8 pasar) dan Kecamatan Alok Timur (11 pasar). Dua kecamatan ini memiliki pasar modern yang cukup banyak karena secara ekonomi memang di kedua kecamatan inilah aktivitas perekonomian masyarakat tumbuh dengan pesat. Posisinya sebagai pusat pemerintahan menjadikan kedua kecamatan ini berkembang lebih pesat dibandingkan kecamatan lainnya. Data tersebut menyiratkan bahwa kegiatan perekonomian di Sikka khususnya terkait dengan sektor perdagangan masih terpusat di wilayah tertentu. Hal tersebut bisa saja menimbulkan permasalahan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di Kabupaten Sikka.

6. Perindustrian

Sektor perindustrian merujuk pada bagian ekonomi yang terlibat dalam produksi barang-barang secara massal melalui pengolahan bahan mentah atau bahan baku menjadi produk jadi. Ini mencakup berbagai industri seperti manufaktur dan industri lainnya. Beberapa indikator yang umumnya digunakan termasuk pertumbuhan nilai tambah industri, kontribusi sektor perindustrian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kontribusi industri rumah tangga

terhadap PDRB sektor Industri, hingga cakupan bina kelompok pengrajin. Data terkait indikator-indikator tersebut disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.94 Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Industri Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	1,72	1,74	1,71	1,84	1,84
2	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	-3,26	0,95	6,54	7,53	7,53

Sumber:; Kabupaten Sikka Dalam Angka, Provinsi NTT Dalam Angka, 2025

Pada tabel di atas, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Sikka menunjukkan tren yang relatif stabil dari tahun 2018 hingga 2023, dengan angka sekitar 1,71 hingga 1,84. Indikator ini menunjukkan betapa lemahnya kegiatan peningkatan nilai tambah di Kabupaten Sikka. Namun, pertumbuhan sektor industri pengolahan menunjukkan kinerja yang cukup bagus.

Membaiknya kondisi perindustrian itu didukung oleh terus berkembangnya perusahaan industri baik industri besar maupun industri kecil. Tercatat industri besar dan sedang yang beroperasi di Kabupaten Sikka pada tahun 2022 sebanyak 3 perusahaan, meningkat dari tahun tahun sebelumnya yang hanya 2. Untuk industri kecil dan mikro jumlahnya jauh lebih banyak dan terus mengalami peningkatan (lihat Tabel diatas). Sebagaimana karakter usaha maka usaha kecil secara makro memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan usaha besar, namun demikian jika dilihat per perusahaan penyerapan tenaga kerja usaha besar tentu lebih tinggi dibandingkan usaha mikro dan kecil.

Tabel 2.95 Kinerja Industri Pengolahan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah industri mikro dan kecil	702	830	923	1.101	1.901
2	Jumlah tenaga kerja industri mikro dan kecil (orang)	24.767	40.283	-	6.687	6.730
3	Nilai pendapatan industri kecil dan mikro (Rp Miliar)	335,05	598,64	-	-	
4	Pendapatan per usaha industri kecil dan mikro (Rp juta)	21,03	25,6	-	-	
5	Jumlah industri besar dan sedang	3	3	-	-	-
6	Jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang (orang)	-	-	-	-	2
7	Cakupan bina kelompok pengrajin					<2
		29	9	76	7	7

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, Provinsi NTT Dalam Angka, 2025

Pada usaha mikro dan kecil terdapat data yang cukup baik untuk dilakukan analisis yakni pendapatan usaha. Rata rata usaha mikro dan kecil menghasilkan pendapatan/omset sekitar Rp 25 juta per tahun, artinya sekitar Rp 2 juta per bulan. Jika diasumsikan bahwa keuntungan yang didapat adalah 10 persen dari usaha, maka keuntungan yang didapat usaha usaha ini hanyalah Rp 200.000 per bulan, sebuah angka yang sangat kecil. Analisis ini sejalan

dengan analisis pada urusan koperasi dan UMKM yang menunjukkan masih sangat lemahnya pelaku usaha UMKM ini.

Lemahnya usaha industri ini secara langsung berkaitan dengan kapasitas pengusaha. Dari data BPS Provinsi diperoleh informasi bahwa rata rata pelaku usaha mikro dan kecil hanya berpendidikan SD atau tidak tamat SD (73,85 persen), dan hanya sekitar 3 persen yang memiliki pendidikan perguruan tinggi. Lemahnya kapasitas pelaku usaha ini berdampak pada lemahnya jiwa kewirausahaan yang merupakan motor bagi pengembangan usaha.

Dilihat dari lapangan usahanya, industri besar dan sedang yang ada di Kabupaten Sikka bergerak di bidang pengolahan produk pertanian dan perikanan. Sementara itu usaha industri kecil dan mikro secara umum bergerak di bidang industri kreatif. Dari berbagai industri kreatif, maka seni dan budaya lokal termasuk kerajinan adalah subsektor yang sangat diunggulkan dan diakui keunggulannya, disusul oleh kuliner, pariwisata dan desain grafis. Kerajinan tenun, seni musik Kabupaten Sikka tidak diragukan lagi memang merupakan unggulan yang telah diakui di tingkat internasional. Banyak desainer dan musisi hebat lahir dari kerajinan dan musik dari kawasan ini.

Upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga lain termasuk pemerintah daerah hingga saat ini telah membuahkan hasil. Namun demikian sejumlah permasalahan masih menghadang sehingga kesejahteraan pelaku usaha bidang ini masih belum kunjung membaik. Dari kajian yang dilakukan Tjeme (2022), industri kerajinan secara khusus dan industri kreatif Kabupaten Sikka secara umum berhadapan dengan permasalahan-permasalahan berikut. 1) Keterbatasan kepada akses permodalan. Dari analisis bidang koperasi, pada dasarnya permodalan tersedia di lembaga lembaga keuangan maupun koperasi kredit yang banyak tersebar di wilayah Kabupaten Sikka, namun demikian kapasitas yang terbatas dari pelaku usaha membatasi akses untuk mendapatkan modal tersebut. 2) Kurangnya kapasitas pelaku usaha. Kapasitas pelaku usaha atau secara umum dikenal dengan jiwa kewirausahaan adalah sebuah jiwa yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha. Melalui jiwa kewirausahaan, pelaku usaha memiliki pengetahuan dan informasi, keterampilan/ inovasi dalam berproduksi sampai pada memasarkan produknya. 3) Dukungan pemerintah yang kurang tepat. Telah banyak program pemerintah diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil, namun demikian tidak semua program itu sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Permasalahan besar yang dihadapi pelaku usaha adalah pemasaran, namun demikian secara umum program yang dilakukan berada di seputar proses produksi.

Sementara itu bagi usaha industri besar, teridentifikasi permasalahan utama yang dihadapi adalah ketersediaan sarana dan prasarana, baik pada level produksi maupun angkutan. Pada tingkat produksi, apapun usaha yang hendak dilakukan dibutuhkan sejumlah input pendukung, misalnya air dan listrik. Keterbatasan air dan listrik ini menjadi penghambat utama bagi perusahaan besar maupun menengah untuk menjalankan usaha. Ketika produk sudah dihasilkan, dibutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Hal ini masih menjadi kendala yang cukup besar dalam rangka meningkatkan investasi usaha industri besar di Kabupaten Sikka. Sarana dan prasarana usaha sesungguhnya tidak hanya dibutuhkan oleh usaha besar, usaha mikro juga secara tidak langsung membutuhkan hal tersebut. Sarana transportasi yang terbatas berdampak pada biaya angkut yang mahal, ini akan berdampak pada produksi maupun pemasaran.

7. Transmigrasi

Pelaksanaan urusan transmigrasi diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi lokal. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sikka mengirimkan warga Kabupaten Sikka ke Kabupaten Mamasaha Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 4 KK. Pada tahun 2023 tidak ada pengiriman warga transmigrasi.

Tabel 2.96 Kinerja Transmigrasi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase kawasan transmigrasi yang berkembang	25,42%	25,42%	25,42%	25,42%	25,42%
2.	Persentase KK trasmigran yang dibina dan diberdayakan	64%	50%	34%	34%	34%

Pada tahun 2020, terdapat luas lahan total sebesar 1180 hektar yang diperuntukan untuk kebutuhan transmigrasi, pada tahun 2020 sudah di kembangkan sekitar 300 hektar dari total lahan tersebut sehingga dicapai angka sekitar 25,4%. Namun demikian, belum terdapat perkembangan terkait dengan pengembangan lahan dimaksud. Pada tahun 2020 juga terdapat persentase yang tinggi pada KK transmigran yang dibina dan diberdayakan, sayangnya angka tersebut kerap menurun dan mencapai titik terendah di tahun 2022, yang kemudian stagnan di angka 34% hingga 2024. Kab. Sikka masih perlu meningkatkan upaya dalam membina transmigran, serta mengembangkan lahan transmigrasi yang sudah dialokasikan.

c. Penunjang Urusan Pemerintahan

Pada bagian ini dijelaskan bagaimana kinerja tata kelola pemerintahan dan berbagai urusan yang menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sikka. Analisis diawali dengan indikator kinerja yang dapat menggambarkan kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sikka seperti Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK, Nilai AKIP, Nilai LPPD dan IKM.

Tabel 2.97 Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	CC Cukup	CC Cukup	C Nilai :48,03 Kurang	C Nilai :48,03 Kurang	CC Nilai :55,92 Kurang
2.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	*
3.	Nilai AKIP	CC Nilai :58,93 Cukup (memadai)	CC Nilai :59,06 Cukup (memadai)	B Nilai: 61,91 Baik	B Nilai: 61,91 Baik	
4.	Nilai LPPD	29,745	-	31,395	31,395	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	2,2	2,34	2,8	2,8	3,33

Sumber: DPPMD Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data di atas, pada Indikator IRB pada tahun 2020 hingga 2021, Kabupaten Sikka mendapat penilaian kategori (CC) dengan predikat cukup. Hal ini menunjukkan bahwa perlu meningkatkan serta memperbaiki dan memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Berikutnya, yaitu

tahun 2022 hingga 20223, Kabupaten Sikka berhasil memperoleh penilaian kategori (C) dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Hal ini menandakan adanya kemajuan dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di wilayah Sikka. Namun pada tahun 2024, Kabupaten Sikka kembali mendapat penilaian kategori Kurang (CC) dengan nilai sebesar 55,92.

Kemudian pada Indikator Opini BPK mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut adalah pencapaian luar biasa bagi suatu daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sikka telah berhasil mempertahankan dan memenuhi standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang tinggi, serta menjalankan tata kelola keuangan yang baik.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau AKIP Selama empat tahun pertama, yaitu dari tahun 2018 hingga 2021, Kabupaten Sikka mempertahankan penilaian kategori Cukup Memadai (CC) dalam Nilai AKIP. Terdapat peningkatan progresif dari nilai 55,14 pada tahun 2018 hingga mencapai 59,06 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di wilayah tersebut. Pada tahun 2022, Kabupaten Sikka mencatat perkembangan signifikan dengan mendapatkan penilaian kategori Baik (B) dalam Nilai AKIP penilaian kategori Baik menunjukkan kemajuan besar dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sikka. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan fokus dan strategi dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan. Selama periode tahun 2018 hingga 2022, Kabupaten Sikka mengalami peningkatan yang positif dalam kinerja tata kelola pemerintahan, sebagaimana tercermin dalam peningkatan nilai AKIP dari tahun ke tahun. Khususnya, pencapaian kategori Baik pada tahun 2022 menandakan kesuksesan besar dalam upaya memperbaiki dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan adalah proses sistematis untuk menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi dalam rangka mengatur dan memanfaatkan sumber daya secara optimal guna mencapai pertumbuhan dan kemajuan di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Berikut data Kinerja Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sikka tahun 2018-2022.

Tabel 2.98 Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	100	100
2.	Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	93,98	-	-	-	-
3.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data tersebut, pada indikator Persentase Konsistensi Program Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2020, Kabupaten Sikka mencapai tingkat konsistensi program RKPD ke dalam APBD sebesar 96,26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 95 persen dari program yang direncanakan dalam

RKPD berhasil diakomodasi dalam APBD, mencerminkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Kemudian pada tahun 2021, Kabupaten Sikka mencatat tingkat konsistensi program RKPD ke dalam APBD sebesar 93,98 persen. Meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini masih menunjukkan upaya yang kuat dalam memastikan bahwa program-program yang direncanakan terwujud dalam alokasi anggaran.

Konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk mengukur sejauh mana visi, misi, serta program dan kegiatan strategis dalam RPJMD direalisasikan dalam RKPD. Persentase yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara rencana jangka menengah dengan program kerja tahunan, yang berarti pemerintah daerah sikka konsisten dalam melaksanakan rencana pembangunan. Hal ini ditunjukan dengan pencapaian persentase 100% selama periode 2019-2023, Kabupaten Sikka menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RPJMD direalisasikan dalam RKPD.

2. Keuangan

Kinerja Keuangan Kabupaten Sikka menunjukkan seberapa baik pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan daerah. Kinerja keuangan Kabupaten Sikka dapat diukur dengan berbagai indikator keuangan antara lain Persentase Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap APBD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dan Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 2.99 Kinerja Keuangan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase SILPA terhadap APBD	0,03	0,02	0,04	0,04	0,04
2.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	5,66	5,11	5,28	5,29	5,29
3.	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	84,87	127,33	130,28	130,28	130,28
4.	Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	1,01	0,95	0,92	0,92	0,92
5.	Persentase Peningkatan PAD	15,08	-10,94	1,67	11,35	11,35

Sumber: BPKAD Kabupaten Sikka, 2025

Pada tahun 2020 menunjukkan penurunan sebesar 15,08 persen dalam PAD. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti situasi ekonomi global atau dampak dari pandemi COVID-19. Lebih lanjut Pada tahun 2022, Kabupaten Sikka mencatat peningkatan sebesar 1,67 persen dalam PAD. Meskipun angka ini lebih rendah dari peningkatan pada tahun 2020, masih menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki sumber pendapatan lokal. Pada tahun 2023 dan 2024, Kabupaten Sikka mengalami peningkatan sebesar 11,35 persen dalam PAD. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif dalam sumber pendapatan lokal di wilayah tersebut.

Selanjutnya dalam Persentase SiLPA terhadap APBD ini sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Persentase SiLPA terhadap APBD memberikan gambaran tentang seberapa baik keuangan daerah dikelola dan efisiensi dalam penggunaan

anggaran yang disediakan. Jika dilihat dari data 2020, Kabupaten Sikka menunjukkan stabilitas dalam persentase SiLPA terhadap APBD, berada di sekitar 0,03 persen dan menurun menjadi 0,02 persen. Selanjutnya tiga tahun setelahnya pada 2021, 2022, 2023 dan 2024 menunjukkan peningkatan kecil dalam persentase SiLPA menjadi 0,04 persen. Meskipun peningkatan ini relatif kecil, hal ini menunjukkan adanya surplus anggaran yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Rasio kemandirian keuangan daerah sebagai salah satu indikator kinerja keuangan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dari sumber pendapatan sendiri, tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Selama periode 2020-2024, Kabupaten Sikka menunjukkan stabilitas dalam Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan angka yang relatif turun dari tahun ke tahun. Angkanya berada di kisaran 5 persen, yang menunjukkan penurunan dalam kemampuan Kabupaten Sikka untuk membiayai sebagian besar kegiatannya sendiri. Meskipun ada variasi kecil dari tahun ke tahun, rasio kemandirian yang berada di atas 5 persen menunjukkan Kabupaten Sikka memiliki tingkat kemandirian yang cukup stabil. Menandakan bahwa Kabupaten Sikka memiliki sumber pendapatan yang cukup kuat dari sumber-sumber internal, memungkinkan untuk pelaksanaan program dan proyek pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer.

Lebih lanjut dalam rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio ini mencerminkan bagaimana alokasi dan penggunaan anggaran daerah dapat mendukung pelaksanaan program dan proyek pembangunan dengan optimal. Tahun 2020 Kabupaten Sikka mengalami penurunan dalam Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dengan angkanya turun dari 86,34. Penurunan ini menunjukkan potensi masalah dalam pengelolaan dan efisiensi anggaran di Kabupaten Sikka selama periode tersebut. Namun setelahnya, terjadi perubahan drastis pada tahun 2021 dan 2022, angka efisiensi keuangan daerah melonjak tajam dari 84,87 pada tahun 2020 menjadi 127,33 pada tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi 130.28 pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan adanya perbaikan atau penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka dalam pengelolaan sumber daya keuangannya.

Terakhir dalam indikator Rasio Efisiensi Keuangan daerah menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dari tahun 2019 hingga 2020, Kabupaten Sikka menunjukkan kenaikan yang cukup dalam Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, dengan angkanya berkisar antara 0.99 hingga 1.01. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sikka berhasil mempertahankan efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai hasil yang diharapkan selama periode tersebut. Terjadi penurunan pada tahun 2021 dan 2022, dengan rasio masing-masing 0.95 dan 0.92. Penurunan ini menandakan adanya potensi ketidakmampuan dalam memanfaatkan anggaran secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3. Pengawasan

Pengawasan pada pemerintah dengan kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengacu pada proses sistematis untuk memantau dan menilai kinerja serta

kepatuhan pemerintah terhadap standar, aturan, dan prosedur yang berlaku. SPIP adalah rangkaian kebijakan, prosedur, dan tindakan yang bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam pengelolaan sumber daya pemerintah. Sementara APIP adalah unit organisasi yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan intern di lingkungan pemerintah.

Tabel 2.100 Kinerja Pengawasan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 2 Nilai: 2,365	Level 2 Nilai: 2,365	Level 2 Nilai: 2,365
2.	Persentase tindak lanjut temuan	63,55	54,39	50,85	50,85	36,43
3.	Jumlah temuan BPK	-	Rp.147.770.619	-	-	-
4.	Nilai Level APIP	Level 3	Level 3 DC	Level 2 Nilai : 2,40 (Structured)	Level 2 Nilai : 2,40 (Structured)	Level 2 Nilai : 2,38 (Structured)

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data tersebut maka pada indikator Nilai maturitas SPIP, berhasil mempertahankan Level 3 dalam maturitas SPIP. pada tahun 2020-2021 Hal Ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pengawasan internal di pemerintah daerah, menandakan bahwa sistem pengendalian intern berjalan dengan baik. Selanjutnya pada tahun 2022 hingga 2024, Kabupaten Sikka kembali ke Level 2 dalam maturitas SPIP. Hal ini menunjukkan adanya tantangan atau perubahan dalam pengawasan internal di tahun tersebut. Adapun Pengawasan berdasarkan indikator Nilai Level APIP pada tahun 2020, dan 2021 berhasil mempertahankan Level 3 dalam kategori Structured pada APIP. Hal ini menunjukkan bahwa APIP di Kabupaten Sikka telah mencapai tingkat kematangan yang tinggi dan terstruktur. Meskipun perubahan pada 3 tahun terakhir Ini menunjukkan adanya penyesuaian atau perubahan dalam kinerja pengawasan internal di tahun 2022 hingga 2024. Pengawasan yang efektif adalah salah satu pilar utama dalam menjaga integritas dan transparansi pemerintahan daerah. Salah satu mengukur efektivitas pengawasan adalah dari persentase tindak lanjut terhadap temuan yang telah dilakukan.

Pada tahun 2020 dilakukan tindak lanjut temuan BPK yang cukup signifikan di angka 63,55%. Menunjukkan upaya yang tinggi dalam menjalankan tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan, mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam menanggapi masalah yang diidentifikasi. Selanjutnya pada 2021 terjadi penurunan menjadi 54,39%, hal ini mengindikasikan adanya tantangan atau hambatan tertentu yang mengurangi efektivitas pengawasan selama tahun tersebut. Terakhir di tahun 2022 dan 2023 menunjukkan angka 50,85%, yang sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk angka tindak lanjut terakhir sekaligus terendah ada di tahun 2024 dengan angka 36,43%. Menunjukan turunnya upaya pemerintah dalam menindaklanjuti temuan BPK. Hal ini kemudian menunjukan menurunnya kinerja pengawasan inspektorat daerah Kab. Sikka, sehingga menjadi catatan bahwa diperlukan upaya yang lebih tinggi untuk meningkatkan pengawasan di Kab. Sikka.

4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Berbicara terkait sumber daya manusia dalam konteks pemerintahan, Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan menjadi aspek kunci dalam memastikan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh entitas pemerintah adalah kompeten, terampil, dan dapat mengemban tugas dan tanggung jawab mereka dengan efektif. Ini adalah faktor penting dalam mencapai tujuan dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Tabel 2.101 Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	30,09 (Sangat Rendah)	32 (Sangat Rendah)	33,4 (Sangat Rendah)	76,36	76,35
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,008	0,013	0,013		
3.	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	25,448	44,955	31,726	31,726	
4.	Jumlah pelanggaran pegawai	0	1	5	5	

Sumber: Data olahan BKPSDM Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data tersebut maka pada indikator Indeks Profesionalitas ASN Pada tahun 2020, mencatat skor Indeks Profesionalitas sebesar 30,09 dengan kategori "Sangat Rendah". Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam meningkatkan profesionalitas ASN di Kabupaten Sikka pada tahun tersebut. Selama periode tahun 2020 hingga 2022, Kabupaten Sikka mengalami tantangan dalam meningkatkan profesionalitas ASN. Meskipun terdapat peningkatan pada tahun- tahun terakhir, kategori tetap berada pada tingkat "Sangat Rendah". Adapun dalam penilaian Profesionalitas ASN terdapat beberapa komponen ataupun dimensi penilaian seperti kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Peningkatan profesionalitas ASN adalah hal yang penting untuk memastikan bahwa pemerintahan dapat beroperasi dengan efisien, efektif, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Meskipun demikian, Kab. Sikka dapat meningkatkan nilai indeks ini pada tahun 2023 dan 2024 dengan skor masing-masing sebesar 76,36 dan 76,35. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 terdapat perubahan bobot penilaian pada surat yang diberikan oleh BKN untuk masing-masing Kabupaten. Perubahan bobot tersebut kemudian menghasilkan perubahan yang signifikan. Selain itu, pada tahun ini Kab. Sikka juga berkomitmen untuk mengejar nilai BKD dengan memperbaharui data kompetensi dan e-kinerja (SKP), sehingga dapat dicapai hasil yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

5. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (Litbang) pemerintahan merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pemerintahan untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi, dan mengembangkan solusi atau inovasi terhadap berbagai tantangan dan isu yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktivitas ini melibatkan proses penelitian untuk memahami masalah, menganalisis data, dan mencari solusi atau perbaikan dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan.

Tabel 2.102 Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	-	100%	100%	99%	72,73%
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	-	-	-	
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	3,33%	23,33%	33%	33%	
4.	Indeks Inovasi Daerah	46 (Kurang Inovatif)	23,29 (Kurang Inovatif)	43,36 (Inovatif)	43,36 (Inovatif)	34,73

Sumber: Bapperida Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data tersebut maka pada indikator Indeks Inovasi Daerah Selama periode tahun 2020 hingga 2022, Kabupaten Sikka mengalami perkembangan dalam Indeks Inovasi Daerah. Pada tahun 2020, Kabupaten Sikka memulai perjalanan inovasinya dengan mencapai skor 46, yang dikategorikan sebagai Kurang Inovatif. Meskipun masih memiliki ruang untuk peningkatan, langkah awal ini menunjukkan upaya untuk menggalakkan inovasi di daerah Sikka. Tahun 2021 mengalami penurunan signifikan dalam Indeks Inovasi Daerah, mencapai skor 23,29 dengan kategori Kurang Inovatif. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti dampak dari pandemi COVID-19 atau perubahan dalam strategi inovasi. Terakhir pada pada tahun 2022, Kabupaten Sikka mengalami lonjakan signifikan dalam Indeks Inovasi Daerah, mencapai skor 43,36 yang menandakan kategori Inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mendorong inovasi telah memberikan hasil positif dan daerah tersebut berhasil meningkatkan tingkat inovasinya. Ada catatan bahwa terdapat perbedaan bobot poin penilaian pada tahun 2020 ke tahun selanjutnya yang menyebabkan penilaian dan kategori penilaian mengalami penyesuaian.

Kemudian pada indikator persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Pada tahun 2018 dan 2019 data yang disajikan menunjukkan 0 persen untuk kedua tahun ini yang menandakan bahwa bahwa belum ada upaya atau fasilitasi yang dilakukan untuk menerapkan inovasi di perangkat daerah Kabupaten Sikka selama periode ini. setelahnya di tahun 2020 terjadi peningkatan signifikan dengan persentase 3,33 persen. Meskipun angka ini masih relatif rendah, namun terdapat upaya awal dalam mendorong penerapan inovasi di tingkat perangkat daerah. Tahun berikutnya di 2021 terjadi lonjakan yang signifikan dengan persentase mencapai 23,33 persen yang menunjukkan komitmen dan upaya yang lebih besar dari pihak berwenang dalam memfasilitasi penerapan inovasi di perangkat daerah. Terakhir tahun 2022 pencapaian meningkat lagi menjadi 33 persen, menandakan bahwa inisiatif dan strategi yang diterapkan dalam penerapan inovasi terus membuahkan hasil positif.

6. Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan adalah unit atau lembaga yang bertanggung jawab atas penyediaan dukungan administratif, teknis, dan logistik untuk kegiatan dan fungsi Dewan dalam suatu pemerintahan. Fungsi utama dari Sekretariat Dewan adalah memfasilitasi proses legislasi dan mendukung tugas-tugas anggota Dewan.

Tabel 2.103 Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ketetapan penetapan perda APBD Tahun N	3	3	3	3	3
2.	Persentase penetapan ranperda tahun N	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka, 2025

Jika dilihat data tersebut maka Sekretariat Dewan di Kabupaten Sikka telah menunjukkan kinerja yang sangat baik selama periode tahun 2020-2024 dengan persentase penerapan ranperda dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan yang sempurna. Tingkat konsistensi dan kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan proses legislatif adalah hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan maka ditarik kesimpulannya, kinerja Sekretariat Dewan di Kabupaten Sikka selama periode tersebut mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap efisiensi dan kedisiplinan dalam menjalankan fungsi legislatif. Hal ini merupakan aset penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

2.4. ASPEK DAYA SAING

A. Daya Saing Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita, Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Per Kapita, Produktivitas Total Daerah, dan Nilai Tukar Petani.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita adalah ukuran yang menggambarkan jumlah rata-rata yang dihabiskan oleh rumah tangga dalam suatu wilayah atau negara untuk membeli barang dan jasa dalam suatu periode tertentu, biasanya dinyatakan dalam mata uang lokal dan sering kali dibagi dengan jumlah penduduk untuk mendapatkan nilai per kapita. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai kebutuhan dan keinginan, seperti makanan, pakaian, transportasi, pendidikan, dan hiburan. Tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sering dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu masyarakat. Semakin tinggi nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, semakin tinggi tingkat konsumsi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 2.104 Angka Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rata rata Pengeluaran Rumah Tangga per bulan	747.178	736.632	839.377	996.160	996.160
Persentase pengeluaran makanan	52,49%	52,51%	50,16%	50,16%	52,81%

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2020-2024

Berdasarkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per bulan di Kabupaten Sikka dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan berada pada angka Rp 747.178, dan meningkat secara bertahap menjadi Rp 839.377 pada tahun 2023. Ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan beli masyarakat dalam kurun waktu tersebut, yang bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, dan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya, dari data tersebut juga terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk makanan cenderung mengalami fluktuasi dalam periode yang sama. Meskipun terdapat variasi, namun secara umum persentase pengeluaran untuk makanan cenderung relatif stabil, dengan nilai tertinggi pada tahun 2019 sebesar 55,24 persen dan nilai terendah pada tahun 2022 sebesar 50,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam pengeluaran total rumah tangga, proporsi pengeluaran untuk makanan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ini bisa mengindikasikan bahwa meskipun pendapatan meningkat, masyarakat masih memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan makanan, atau mungkin adanya faktor-faktor lain seperti perubahan pola konsumsi atau harga-harga barang kebutuhan pokok yang cenderung stabil.

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara harga-harga produk pertanian yang diterima oleh petani dengan harga-harga barang dan jasa yang harus dibayar oleh petani untuk memperoleh *input-input* produksi yang mereka butuhkan. Dalam konteks ekonomi pertanian, Nilai Tukar Petani menggambarkan seberapa banyak produk pertanian yang dapat ditukar dengan *input-input* produksi atau barang konsumsi lainnya. Ini sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani dan juga dapat memberikan wawasan tentang efisiensi produksi pertanian. Semakin tinggi NTP, semakin baik kondisi ekonomi petani tersebut, karena mereka bisa mendapatkan lebih banyak produk pertanian dalam pertukaran dengan input atau barang lainnya. Data Nilai Tukar Petani dan Nelayan di Kabupaten Sikka tidak tersedia secara memadai, hanya tersedia data Nilai Tukar Petani tahun 2019 dan 2020 yang masing masing sebesar 105,1 dan 106,26 atau meningkat sebesar 1,1 satuan. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi kesejahteraan petani di Kabupaten Sikka sudah cukup baik. Akan tetapi, angka ini tidak sepenuhnya dapat menggambarkan kondisi petani yang ada di Kabupaten Sikka, karena jumlah data yang sangat minim. Dari data ini juga tidak dapat dilakukan analisis, capaian NTP itu karena harga yang dibayar rendah atau harga yang diterima yang tinggi.

Data Nilai Tukar Petani dan Nelayan di Provinsi NTT tahun 2023 dan 2024 yang masing masing sebesar 98,46 dan 100,96 atau meningkat sebesar 2,5 satuan.

3. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif.

a. **Pilar Pertama** yaitu **pertumbuhan dan perkembangan ekonomi** dengan **sub pilar pertama pertumbuhan ekonomi.** Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat dengan indikator pertumbuhan PDRB riil perkapita, share manufaktur terhadap PDRB, rasio kredit perbankan terhadap PDRB nominal. **Sub pilar kedua Kesempatan kerja**. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat. Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi dengan indikator tingkat kesempatan kerja, persentase penduduk bekerja penuh, persentase tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah keatas. **Sub pilar ketiga Infrastruktur ekonomi.** Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat dukungan yang dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi dengan indikator persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/ PLN, persentase penduduk yang memiliki telepon genggam, persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang

b. **Pilar Kedua** yaitu **pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan** dengan **sub pilar pertama ketimpangan.** Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan dengan indikator rasio pendapatan gini, sumbangan pendapatan perempuan, rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa dan kota. **Sub pilar kedua kemiskinan.** Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan dengan indikator persentase penduduk miskin, rata-rata konsumsi protein perkapita per hari.

c. **Pilar ketiga** yaitu **perluasan akses dan kesempatan** dengan **sub pilar pertama kapabilitas manusia.** Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif dengan indikator angka harapan lama sekolah, persentase

balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. **Sub pilar kedua infrastruktur dasar.** Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan dengan indikator persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak, persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air sendiri. **Sub pilar ketiga keuangan inklusif.** Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan indikator rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk usia produktif, rasio kredit perbankan UMKM.

Tabel 2.105 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Kabupaten Sikka Tahun 2017-2021

No.	WILAYAH	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kab. Sikka	4.93	5.02	5.12	5.04	5.22
2.	Provinsi NTT	4.80	4.82	4.97	4.95	5.24
3.	Nasional	5.76	5.77	5.97	5.54	6.00

sumber : Bappenas, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Sikka dari tahun 2017-2021 fluktuatif dan berada di skala memuaskan. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Sikka pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan Provinsi NTT dan lebih rendah dibandingkan Nasional. Data Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di tahun 2022 dan 2023 belum dilakukan perhitungan oleh Bappenas baik secara Nasional, Provinsi maupun Kab/ Kota.

B. Daya Saing SDM

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Sumber Daya Manusia yang berkualitas memiliki peran signifikan dalam mengurangi disparitas kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Arsitektur persebaran jumlah pekerja di suatu daerah menjadi indikator utama terkait lapangan pekerjaan yang menjadi fokus pergerakan ekonomi di wilayah tersebut. Secara umum, status pekerjaan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pekerja formal dan informal. Pekerja formal mencakup berbagai status, seperti pekerja berusaha dengan dukungan buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sementara pekerjaan informal mencakup aspek lain. kategori pekerjaaan penduduk ini sangat dipengaruhi oleh rasio lulusan penduduk pada jenjang S1/S2/S3. Namun, Kabupaten Sikka tidak memiliki data terkait rasio lulusan S1/S2/S3 dari tahun 2018 hingga 2022, sehingga bagian ini tidak memiliki penjelasan khusus.

2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Pengelompokkan penduduk menurut umur juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk di suatu wilayah termasuk berstruktur umur muda atau tua. Penduduk suatu wilayah dianggap penduduk muda apabila penduduk usia di bawah 15 tahun mencapai sebesar 40 persen atau lebih dari jumlah seluruh penduduk. Sebaliknya, penduduk disebut penduduk tua apabila jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas di atas 10 persen dari total penduduk.

Suatu wilayah yang mempunyai karakteristik penduduk muda akan mempunyai beban besar dalam investasi sosial untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi anak-anak di bawah 15 tahun ini. Dalam hal ini pemerintah harus membangun sarana dan prasarana pelayanan dasar mulai dari perawatan ibu hamil dan kelahiran bayi, bidan dan tenaga kesehatan lainnya, sarana tumbuh kembang anak termasuk penyediaan imunisasi, penyediaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar termasuk guru-guru dan sarana sekolah yang lain. Sebaliknya, suatu wilayah dengan ciri penduduk tua akan mengalami beban yang cukup besar dalam pembayaran pensiun, perawatan kesehatan fisik dan kejiwaan lanjut usia (lansia), pengaturan tempat tinggal dan lain-lain. Penduduk Indonesia termasuk Kabupaten Sikka belum dianggap penduduk tua karena persentase penduduk usia di atas 65 tahun masih kecil, namun karena jumlah penduduk yang besar, maka jumlah orang tua juga cukup besar untuk memperoleh perhatian dari pemerintah.

Dilihat dari komposisi umur, persentase penduduk berumur kurang dari 15 tahun (0-14 tahun) Kabupaten Sikka cenderung mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir, dari 30,76 persen pada tahun 2018 menjadi 29,70 dan pada tahun 2027. Sementara itu, penduduk usia 65 ke atas cenderung meningkat dari 6,41 persen di tahun 2018, terus meningkat setiap tahunnya hingga 8,67 persen di tahun 2022. Dilihat dari komposisi penduduk menurut umur di atas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sikka dapat dikategorikan mengarah pada penduduk muda. Penduduk yang tergolong usia produktif (15-64 tahun) mengalami peningkatan dari 62,83 persen pada tahun 2018, kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 62,63 persen dan menjadi 61,63 persen pada tahun 2023. Jumlah proporsi penduduk usia produktif tersebut akan berdampak pada kesempatan kerja. Tentu kesemuanya ini berkaitan dengan program bagaimana menyiapkan calon pekerja agar mempunyai kualitas tinggi, dengan keterampilan yang memadai.

Tabel 2.106 Struktur Umur dan Umur Median Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Tahun	Struktur Umur (%)		
	0-14	15-64	65+
2020	30,19	63,23	6,57
2021	30,00	62,63	7,37
2022	29,70	61,63	8,67
2023	25,44	64,7	7,25
2024	24,54	66,74	8,71

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, 2025

Isu mengenai population ageing (penuaan penduduk) telah menjadi suatu isu global. Proses terjadinya “penduduk tua” pada dasarnya karena adanya pergeseran komposisi umur penduduk. Penurunan fertilitas dan mortalitas di satu sisi dan meningkatnya angka harapan hidup (*life expectancy*) di sisi lain menyebabkan terjadinya proses penuaan penduduk, yang ditandai dengan penurunan jumlah penduduk muda dan balita, dan terjadinya peningkatan jumlah penduduk tua (lansia).

Perubahan komposisi penduduk menurut umur di atas memberi dampak pada angka beban ketergantungan yang menggambarkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif (65 tahun ke atas dan kurang dari 15 tahun) untuk suatu periode waktu tertentu. Menurut konsep, penduduk muda di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomi masih

tergantung pada orangtua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografis.

Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong wilayah maju atau wilayah yang sedang berkembang. Angka beban ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Selama 2020, angka beban ketergantungan di Kabupaten Sikka sebesar 58,30 dan pada tahun 2021 menurun menjadi 51,19 namun pada tahun 2022 sampai dengan 2024 meningkat menjadi 59,12. Berdasarkan data tersebut maka tampak bahwa beban tanggungan penduduk usia produktif di Kabupaten Sikka masih didominasi oleh penduduk muda.

Tabel 2.107 Rasio Ketergantungan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Usia <15 thn	97.106	97.267	97.106	97.106	85.071
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	23.290	23.890	28.336	28.336	30.209
3	Jumlah Penduduk usia tidak produktif (1 & 2)	120.396	121.157	135.442	135.442	115.280
4	Jumlah Penduduk Usia 15 s/d 64	201.557	203.095	201.557	201.557	221.334
5	Rasio Ketergantungan	58,30	51,19	59,12	59,12	59,12

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

C. Daya Saing Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator Rata-Rata Lama Perijinan dan Jumlah Demonstrasi.

1. Rata-rata Lama Perizinan

Pelayanan publik terkait perizinan di pemerintah daerah adalah proses administratif yang memungkinkan warga atau pihak terkait untuk memperoleh izin atau otorisasi untuk melakukan kegiatan atau proyek tertentu. Rata-rata lama perijinan mengacu pada jumlah waktu yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk memproses dan mengeluarkan izin tersebut kepada pemohon. Berikut rata-rata lama perizinan di Kabupaten Sikka.

Tabel 2.108 Rata-rata Lama Perizinan di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Jenis Perizinan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	11,69 Jam	11,63 Jam	8 Jam	8 Jam	8 Jam

No	Jenis Perizinan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	0	0	2 Jam	2 Jam	2 Jam
3.	Surat izin Tempat Usaha (SITU)	0	0	0	0	0
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	0	0	0	0	0
5.	Surat Izin Tempat Penjualan Beralkohol (SITP-MB)	0	2 Jam	4 Jam	4 Jam	4 Jam
6.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	13,25 Jam	6,75 Jam	0	0	0
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	0	0	0	0	0
8.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	0	0	0	0	0
9.	Tanda Daftar Gedung (TDG)	0	0	5,16 Jam	1 Jam	1 Jam
10.	Tanda Daftar Industri (TDI)	0	0	0	0	0
11.	Izin Usaha Industri (IUI)	0	0	0	0	0
12.	Izin Pemasangan Reklame	5 Jam	6 Jam	7 Jam	7 Jam	7 Jam
13.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	0	0	0	0	0
14.	Izin Trayek (ITR)	5,26 Jam	6 Jam	5 Jam	5 Jam	5 Jam
15.	Izin Usaha Angkutan (IUA)	5,26 Jam	6 Jam	5 Jam	5 Jam	5 Jam
16.	Izin Prinsip Penanaman Modal Bagi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)	0	0	0	0	0
17.	Izin Sarana Kesehatan	13,85 Jam	7 Jam	5 Jam	5 Jam	5 Jam
18.	Izin Praktek Tenaga Kesehatan	1,5 Jam	1,47 Jam	7 Jam	7 Jam	7 Jam
19.	Izin Penelitian	0	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam
20.	One Singel Submission (OSS)	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam
21.	Izin Operasional Organisasi Sosial	0	0	1 Jam	1 Jam	1 Jam
22.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha (PKKPR Non Berusaha)	0	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam
23.	Izin Operasional Puskesmas	0	0	4 Jam	4 Jam	4 Jam
24.	Sertifikat/ Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	0	0	1 Jam	1 Jam	1 Jam

Sumber: DPMTS Kabupaten Sikka

Berdasarkan data tersebut maka pada indikator Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Rata-rata lama proses perizinan di Kabupaten Sikka selama lima tahun terakhir menunjukkan variasi yang menarik. Pada tahun 2019, rata-rata waktu proses perizinan IMB menjadi 12,8 jam. Terdapat peningkatan waktu yang diperlukan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan kebijakan atau peningkatan kompleksitas dalam proses perizinan. kemudian tahun 2020 mencatat rata-rata waktu proses IMB sekitar 11,69 jam. Meskipun mengalami penurunan sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, tetap menunjukkan

adanya upaya untuk mempertahankan efisiensi dalam pelayanan perizinan. Lanjut pada tahun 2021, rata-rata waktu proses IMB hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 11,63 jam. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam waktu yang diperlukan untuk memproses IMB. Terakhir tahun 2022 mencatat penurunan yang cukup signifikan dalam rata-rata waktu proses IMB menjadi 8 jam. Ini menandakan adanya upaya dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan proses perizinan. Selain itu adapun beberapa jenis perizinan dengan berbagai waktu yang diperoleh selama lima tahun terakhir dalam periode 2018 hingga 2022 seperti yang ditunjukkan pada Tabel berikut ini

2. Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi adalah bentuk ekspresi publik dimana sekelompok orang berkumpul untuk menyuarakan pendapat, kekhawatiran, atau tuntutan mereka terkait suatu isu atau peristiwa tertentu. Demonstrasi dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, termasuk aksi protes, rapat umum, pertemuan massa, dan berbagai bentuk kegiatan publik lainnya. Tujuannya dapat bervariasi, seperti menuntut perubahan kebijakan atau undang-undang. Berikut data jumlah demonstrasi di Kabupaten Sikka tahun 2019-2023.

Tabel 2.109 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bidang Politik	-	-	-	-	-
2	Ekonomi	-	-	-	-	-
3	Kasus Pemogokan Kerja	-	-	-	-	-
4	Jumlah Unjuk Rasa	-	-	-	-	-
5.	Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ditangani Pemerintah	42	56	33	33	33

Sumber: Satpol PP Kabupaten Sikka

Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Sikka telah menghadapi berbagai kasus PHK yang memerlukan penanganan serius. Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sikka menghadapi 46 kasus PHK. Tahun 2019 merupakan awal dari rentang lima tahun dimana kasus PHK menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Pada tahun 2020, terdapat 42 kasus PHK yang harus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Sikka. Meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kasus-kasus ini masih memerlukan upaya serius dalam menanggapi dan memberikan solusi bagi para pekerja yang terkena dampak PHK. Tahun 2021 mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah kasus PHK, dengan mencapai angka 56. Faktor-faktor seperti perubahan ekonomi global, dampak pandemi, atau kebijakan-kebijakan tertentu mungkin telah berkontribusi terhadap kenaikan ini. Pada tahun 2022, terjadi penurunan yang cukup tajam dalam jumlah kasus PHK, dengan hanya 33 kasus yang memerlukan penanganan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka. Meskipun masih merupakan tantangan serius, penurunan ini dapat mengindikasikan adanya pemulihan atau perubahan keadaan ekonomi di tingkat lokal.

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2024 dan Realisasi RPJMD

2.5.1. Evaluasi Pelaksanaan SPM

Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sikka Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

1. Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang mendapatkan pelayanan pendidikan Anak Usia Dini	100%	85,76%
2.	Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama	Persentase Anak usia 7-12 tahun yang mendapatkan pelayanan pendidikan Dasar	100%	96,12%
		Persentase Anak Usia 12–15 tahun yang mendapatkan pelayanan pendidikan Menengah Pertama	100%	76,25%
3.	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Anak Usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar atau Menengah yang mendapatkan pelayanan Pendidikan Kesetaraan	100%	10,68

2. Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1.	Pelayanan kesehatan Ibu hamil	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.086 orang	3.652 orang atau 89,38%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin	4.086 orang	4.086 orang atau 100%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.133 orang	4.031 orang atau 97,53 %
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Pelayanan kesehatan Balita	22.089 orang	18.086 orang atau 81,88 %
5.	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	58.922 orang	59.048 orang atau 100 %
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Usia Prodktif	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Usia Produktif	209.116 orang	99.352 orang atau 47,51 %
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Usia Lanjut	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Usia Lanjut	22.190 orang	23.269 orang atau 100 %

8.	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	18.954 orang	16.131 orang atau 85,11 %
9.	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melytus	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melytus	913 orang	869 orang atau 95,18 %
10.	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat	1.301 orang	574 orang atau 44,12 %
11.	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Terduga Tuberculosis	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Orang Terduga Tuber Culosis	4.075 orang	4.345 orang atau 100%
12.	Pelayanan kesehatan pada orangn dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Manusia	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	6.338 orang	6.232 orang atau 98,33%

3. Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Penyediaan kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – Hari	Persentase Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – Hari	5.248 orang	5.248 orang a atau 100 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	208 orang	208 orang atau 100%

4. Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persentase Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	32 orang	32 orang atau 100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemda.	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemda.	Tidak ada relokasi program pemerintah	

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1.	Pelayanan ketentraman Dan Ketertiban umum	Persentase Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	6.251 orang	6.251 orang atau 100%
3.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiasiagaan terhadap Bencana	38 orang	38 orang atau 100%
4.	Pelayanan penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3.508 orang	3.508 orang atau 100%
5.	Pelayanan penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 orang	10 orang atau 100%

6. Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti	395	335 atau 84,81%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	457	425 atau 93%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	246	233 atau 94,72%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Terlantar Di Luar Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Terlantar Di Luar Panti	3772	3670 atau 97,30

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat Dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Daerah	Persentase Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat Dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Daerah	100 %	100 %

2.5.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun 2024

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	
	MENINGKATKAN KUALITAS DAYA SAING SDM		IPM	Indeks	68							
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat		RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Tahun	9							
			HLS (Harapan Lama Sekolah)	Tahun	16							
	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik											
	Meningkatnya profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN									
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pengelolaan PAD		Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan									
	DPKO	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			61	824.253.561.170	69	363.566.397.004	69	363.566.397.004	112,75	44,11
	Meningkatnya Mutu dan Layanan Pendidikan Dasar		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	%	99.53							
			Angka Partisipasi Kasar (APK SD/MI)	%	110.27							
			Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI)	%	96.89							
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI	%	0.23							
			Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	%	34.20							
			Persentase SD Terakreditasi	%	98.23							
			Persentase Kelulusan SD /MI	%	100							
			Angka Kelulusan (AL) SD /MI	%	99.61							
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts	%	99.99							
			Ratio Guru siswa SD/MI	%	0.06							
			Rata-Rata Kemampuan Literasi SD	%	2.49							
			Rata-RataKemampuan Numerasi SD	%	2.35							
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus)	%	97.91							
			Angka Partisipasi Kasar (APK SMP/MTs)	%	109.47							
			Angka Partisipasi Murni (APM SMP/MTs)	%	85.44							
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0.42							
			Persentase pendidik pada jenjang sekolah Menegah Pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	%	32.15							
			Persentase SMP/MTs Terakreditasi	%	93.55							
			Persentase Kelulusan SMP/MTs	%	100.00							
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99.00							
			Ratio Guru siswa SMP/MTs	%	1 : 28							
			Rata-Rata Kemampuan Literasi SMP	%	2.55							
			Rata-RataKemampuan Numerasi SMP	%	2.49							
	Meningkatnya Mutu dan Layanan Pendidikan Usia Dini		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	48.07							
			Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	%	30.68							
			Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	%	33.63							

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Program Pengelolaan Pendidikan			100	192.640.316.000	98	112.615.426.495,00	98	112.615.426.495	98,1	58,5
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			100	102.834.907.500	95	64.572.225.040,00	95	64.572.225.040	95,5	62,8
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun		10	1.960.000.000	4	872.172.500,00	4	872.172.500	40,0	44,5
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun		12	1.008.000.000	4	560.016.100,00	4	560.016.100	35,6	55,6
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Dibangun		18	6.048.000.000	4	944.208.000,00	4	944.208.000	22,2	15,6
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun		16	1.920.000.000	32	5.401.366.200,00	32	5.401.366.200	200,0	281,3
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah di bangun		3	588.000.000	4	556.067.000,00	4	556.067.000	133,3	94,6
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Direhabilitasi Sedang/Berat		19	1.615.000.000	8	758.227.500,00	8	758.227.500	42,1	46,9
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat		24	2.040.000.000	9	988.549.000,00	9	988.549.000	37,5	48,5
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi		6	232.400.000	-	-	-	-	0,0	0,0
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang disediakan		192	1.920.000.000	840	1.266.260.250,00	840	1.266.260.250	437,5	66,0
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Siswa yang disediakan				53	619.293.500,00	53	619.293.500	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang disediakan		95	11.875.000.000	32	2.160.619.500,00	32	2.160.619.500	33,7	18,2
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang menikuti ajang Kompetisi/ Lomba akademik dan Non Akademik		450	450.000.000	24	21.830.000,00	24	21.830.000	5,3	4,9
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		35.676	23.252.688.890	6.384	4.214.149.410,00	6.384	4.214.149.410	17,9	18,1
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		360	216.000.000	80	30.436.160,00	80	30.436.160	22,2	14,1
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah dasya yang memperoleh Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		1.098	225.000.000	336	50.000.000,00	336	50.000.000	30,6	22,2
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		2.016	67.417.687.218	672	34.299.698.840,00	672	34.299.698.840	33,3	50,9
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitas dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah dasar		1.008	240.000.000	-	-	-	-	0,0	0,0
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				150	74.261.370,00	150	74.261.370	#DIV/0!	#DIV/0!
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan , Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan				12	154.924.330,00	12	154.924.330	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		12	2.352.000.000	9	3.324.509.790,00	9	3.324.509.790	75,0	141,3

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasaranan dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/Berat		30	2.352.000.000	15	980.657.000,00	15	980.657.000	50,0	41,7
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbungan Teknis, Pelatihan dan/ atau Magang /PKL untuk Peningkatan kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				165	73.500.000,00	165	73.500.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar		1.008	525.000.000	336	43.730.000,00	336	43.730.000	33,3	8,3
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat		60	5.325.000.000	89	7.177.748.590,00	89	7.177.748.590	148,3	134,8
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			100	67.997.208.500	98	37.807.593.605,00	98	37.807.593.605	98,4	55,6
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah baru yang dibangun		3	4.536.000.000	1	938.672.000,00	1	938.672.000	20,6	20,7
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun		18	6.912.000.000	3	688.216.900,00	3	688.216.900	16,7	10,0
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang uks yang dibangun		18	2.160.000.000	-	-	-	-	0,0	0,0
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Dibangun		18	6.048.000.000	3	957.145.000,00	3	957.145.000	16,7	15,8
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Dibangun		18	7.560.000.000	5	1.309.656.800,00	5	1.309.656.800	27,8	17,3
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun		9	756.000.000	7	830.620.000,00	7	830.620.000	77,8	109,9
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat		27	4.140.600.000	45	4.559.149.750,00	45	4.559.149.750	166,7	110,1
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Keseharan Sekolah yang direhabilitasi sedang/ Berat		5	168.000.000	1	83.207.000,00	1	83.207.000	20,0	49,5
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi sedang/ Berat		6	806.400.000	4	771.240.100,00	4	771.240.100	66,7	95,6
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah yang direhabilitasi sedang/ Berat		3	504.000.000	2	599.680.400,00	2	599.680.400	66,7	119,0
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi		6	302.400.000	4	307.204.900,00	4	307.204.900	66,7	101,6
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang disediakan		288	288.000.000	817	278.023.000,00	817	278.023.000	283,7	96,5
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Siswa yang disediakan		0	-	17	173.860.000,00	17	173.860.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Utilitas Sekolah terpelihara				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang disediakan		18	2.250.000.000	18	1.373.562.000,00	18	1.373.562.000	100,0	61,0
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang menikuti ajang Kompetisi/ Lomba akademik dan Non Akademik		120	225.000.000	12	2.930.000,00	12	2.930.000	10,0	1,3
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		17.712	11.883.000.000	3.480	2.136.247.200,00	3.480	2.136.247.200	19,6	18,0
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		270	162.000.000	30	17.497.250,00	30	17.497.250	11,1	10,8
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SekolahMenegah Pertama yang memperoleh Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		264	39.600.000	88	34.238.120,00	88	34.238.120	33,3	86,5

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menegah Pertama Mengelola Dana BOS		264	36.810.352.416	176	19.543.073.390,00	176	19.543.073.390	66,7	53,1
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitas dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah dasar				88	23.785.360,00	88	23.785.360	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				83	50.000.000,00	83	50.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan , Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan		88	315.000.000	88	57.725.700,00	88	57.725.700	100,0	18,3
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar		88	360.000.000	88	25.000.000,00	88	25.000.000	100,0	6,9
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Tambahan Ruang Kelas baru yang di bangun		18	4.536.000.000	17	1.610.424.000,00	17	1.610.424.000	95,3	35,5
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbungan Teknis, Pelatihan dan/ atau Magang /PKL untuk Peningkatan kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				83	50.000.000,00	83	50.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah yang direhabilitasi sedang/ Berat		6	907.200.000	12	1.386.434.735,00	12	1.386.434.735	200,0	152,8
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			100	18.283.200.000	99	9.197.944.170,00	99	9.197.944.170	98,7	50,3
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun		8	988.000.000	8	1.601.129.750,00	8	1.601.129.750	100,0	162,1
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas /Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Direhabilitasi Sedang/Berat		12	2.040.000.000	8	1.099.059.700,00	8	1.099.059.700	66,7	53,9
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana dan Prasarana Utilitas PAUD yang Direhabilitasi Sedang/Berat		6	940.800.000	7	390.705.000,00	7	390.705.000	116,7	41,5
		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebel sekolah yang disediakan		30	27.000.000	54	35.623.250,00	54	35.623.250	180,0	131,9
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang disediakan		8	200.000.000	125	407.128.300,00	125	407.128.300	1562,5	203,6
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang disediakan		24	1.200.000.000	41	830.328.000,00	41	830.328.000	170,8	69,2
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		810	45.000.000	270	27.443.390,00	270	27.443.390	33,3	61,0
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidian yang tersedia pada PAUD		1.440	288.000.000	468	234.000.000,00	468	234.000.000	32,5	81,3
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		90	54.000.000	30	18.000.000,00	30	18.000.000	33,3	33,3
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		810	151.200.000	270	45.664.800,00	270	45.664.800	33,3	30,2
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		810	19.054.200.000	520	4.433.741.500,00	520	4.433.741.500	64,2	23,3
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitas dalam pengelolaan Dana BOP PAUD		810	145.000.000	270	43.125.520,00	270	43.125.520	33,3	29,7

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, Perencanaan , supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan		36	150.000.000	12	31.994.960,00	12	31.994.960	33,3	21,3
	Meningkatnya Mutu dan Layanan Pendidikan Non Formal	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			100	3.252.500.000	100	1.037.663.680,00	100	1.037.663.680	100,0	31,9
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia bagi satuan pendidikan Non Formal/ Kesetaraan		540	270.000.000	180	76.500.000,00	180	76.500.000	33,3	28,3
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan mengelola Dana BOP Kesataraan		24	2.550.000.000	8	727.650.000,00	8	727.650.000	33,3	28,5
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, Perencanaan , supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan		12	150.000.000	4	4.954.630,00	4	4.954.630	33,3	3,3
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	JumlahPeserta n Pendidikan yang mengikuti Proses Belajar		24	450.000.000	4	228.559.050,00	4	228.559.050	16,7	50,8
	Meningkatnya Mutu dan Layanan Pendidikan Dasar		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	15.67							
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			100	315.000.000	100	137.875.000,00	100	137.875.000	100,0	43,8
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			100	315.000.000	100	137.875.000,00	100	137.875.000	100,0	43,8
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya		420	315.000.000	120	137.875.000,00	120	137.875.000	28,6	43,8
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			8	210.000.000	55	62.276.600,00	55	62.276.600	642,4	29,7
		Pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan non formal/kesetaraan			8	210.000.000	55	62.276.600,00	55	62.276.600	642,4	29,7
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		12	75.000.000	3	24.973.400,00	3	24.973.400	25,0	33,3
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		24	135.000.000	3	37.303.200,00	3	37.303.200	12,5	27,6
	Meningkatnya Mutu dan Layanan Pendidikan Usia Dini											
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			65	255.000.000	25	3.420.000,00	25	3.420.000	38,5	1,3
		Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat			100	-	-	-	-	-	0,0	#DIV/0!
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah SD dan SMP yang diselenggarakan masyarakat memenuhi kelayakan operasional				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			30	180.000.000	50	3.420.000,00	50	3.420.000	168,0	1,9
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100	161.823.087	1	3.420.000,00	1	3.420.000	1,0	2,1
	Meningkatnya Prestasi dibidang Olahraga		Presentase pemuda pelopor		75							
			Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi		6							

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
			Perolehan Jumlah Penghargaan Prestasi di Bidang Olahraga		28							
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemuda Pelopor Pembangunan		Jumlah Pemuda Pelopor Pembangunan		2							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			100	4.583.705.170	65	2.035.046.559,00	65	2.035.046.559	65,3	44,4
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			50	3.413.705.170	46	1.821.844.809,00	46	1.821.844.809	91,8	53,4
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			3	350.000.000	100	230.708.000,00	100	230.708.000	3333,3	65,9
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		3	350.000.000	3	230.708.000,00	3	230.708.000	100,0	65,9
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			47	2.787.705.170	38	1.591.136.809,00	38	1.591.136.809	80,3	57,1
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	umlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		24	148.337.650	10	1.280.000.000,00	10	1.280.000.000	41,7	862,9
		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		3	519.312.520	1	100.600.000,00	1	100.600.000	33,3	19,4
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		144	2.120.055.000	12	210.536.809,00	12	210.536.809	8,3	9,9
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			100	276.000.000	-	-	-	-	0,0	0,0
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan		84	126.000.000	-	-	-	-	0,0	0,0
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			40	720.000.000	50	63.201.750	50	63.201.750	125,00	8,78
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat daerah kabupaten /Kota			40	450.000.000	50	63.201.750	50	63.201.750	125,00	14,04
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan kapasitas Organisas Kepemudaan		12	450.000.000	2	63.201.750	2	63.201.750	16,67	14,04
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			25	450.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	400,00	33,33
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			25	450.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	400,00	33,33
		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		3	450.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	33,33	33,33
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		UHH (Usia Harapan Hidup)	Tahun	68							
	Menurunya Angka Kematian Ibu		Jumlah kematian ibu	Orang	2							
	Menurunnya Angka Kematian Bayi		Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	3							
	Menurunnya Angka Kesakitan		Insidensi HIV	per 1000 penduduk	0							
			Annual Paracite Incidence (API)	per 1.000 penduduk	-							
			Succes Rate TB (BTA +)	Persen	96							
			Incidence Rate (IR) DBD	per 100.000 penduduk	50							
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	Persen	20							
			Persentase penyandang hipertensi yang tekanan darahnya terkendali di puskesmas/FKTP	Persen	90							
			Persentase penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di puskesmas/FKTP	Persen	90							
	Meningkatnya Status Gizi Balita		Prevalensi Wasting	Persen	6							
	Menurunnya Prevalensi Stunting		Prevalensi Stunting	Persen	2							
		DINAS KESEHATAN				222.905.355.518	255	199.681.410.418	324	896.819.790.372	#DIV/0!	402,3
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			100	115.696.600.000	167	86.258.218.022	267	676.470.387.695	267	584,7

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
			Indeks Keluarga Sehat		1		0	-	-	-	-	#DIV/0!
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM		100		0	-	-	-	-	#DIV/0!
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			100	37.437.000.000	64	17.677.357.086	164	534.426.499.167	164	1427,5
	Porsentase Rumah sakit yang melakukan pembangunan serta sarana dan prasara pendukung	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukung	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit			1	3.770.593.500	70	88.768.135.583	#DIV/0!	#DIV/0!
	Porsentase puskesmas yang melakukan pembangunan fasilitas kesehatan	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	2	12.000.000.000	0	-	68	2.154.619.850	3.400	18,0
	Porsentase sarana kesehatan yang melakukan pembangunan fasilitas kesehatan	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	4	1.296.000.000	3	648.655.400	64	3.940.439.742	1.600	304,0
	Porsentase puskesmas yang melakukan penegembangan fasilitas kesehatan	Pengembangan Puskesmas	Terlaksananya Pengembangan Puskesmas	Unit		5.000.000.000	24	3.329.067.200	24	3.329.067.200	#DIV/0!	66,6
	Porsentase sarana kesehatan yang melakukan penegembangan fasilitas kesehatan	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	4	1.296.000.000	1	8.916.611	1	8.916.611	25	0,7
	Posentase puskesmas yang melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	25	400.000.000	9	44.609.450	96	435.387.550	384	108,8
	Posentase puskesmas dengan sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		75	7.000.000.000	0	-	-	-	-	0,0
	Posentase sarana kesehatan yang melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	2	350.000.000	1	85.898.350	1	85.898.350	50	24,5
	Porsentase puskesmas memiliki alat kesehatan/ alat penunjang medik pelayanan kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	500	8.000.000.000	77	636.085.636	168	419.923.614.454	34	5249,0
	Posentase puskesmas yang memiliki alat kalibrasi	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Tersedianya Alat Kalibrasi dan terpeliharanya alat kalibrasiAlat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	Persentasi sarana kesehatan yang melakukan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	100	200.000.000	100	101.689.500	189	279.845.725	189	139,9
	Porsentase sarana kesehatan yang memiliki Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	250	195.000.000	250	197.163.084	345	302.084.059	138	154,9
	Persentase sarana kesehatan yang memiliki Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman difasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat dan Vaksin	Paket		1.700.000.000	1415	8.854.678.355	1.490	15.198.490.043	#DIV/0!	894,0
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100	78.224.600.000	403	67.902.252.323	503	141.365.279.915	503	180,7
	Menurunnya Ibu dengan Resiko Tigggi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		5.505	1.125.000.000	3834	687.824.020	3.834	4.204.751.404	70	373,8
	Meningkatkan akses dan kulaitas layanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		5.255	1.350.000.000	4035	981.575.126	4.035	1.182.571.126	77	87,6
	Menurunkan bayi resiko tinggi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		5.005	300.000.000	4001	25.180.200	4.001	55.380.200	80	18,5
	Meningkatkan asupan gizi dan menurunya penyakit infeksi pada balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		26.469	3.150.000.000	0	-	82	737.795.000	0	23,4

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
	Porsentase Anak usia pendidkan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		61.632	895.000.000	52809	1.199.126.788	52.901	1.797.885.730	86	200,9
	Porsentase penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatskrining kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		213.260	365.000.000	305103	4.620.000	305.170	4.418.529.400	143	1210,6
	Porsentase warga negara 60 tahun keatas yang mendapatskrining kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		22.631	900.000.000	24000	19.630.800	24.097	1.146.872.200	106	127,4
	Porsentase orang hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		85.977	245.000.000	0	-	45	13.900.000	0	5,7
	Porsentase orang DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2.579	165.000.000	6092	520.246.600	6.137	534.146.600	238	323,7
	PorsentaseODGJ Berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		1.126	565.000.000	0	-	89	438.075.000	8	77,5
	Porsentase Orang Terduga TBCt yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		4.156	720.000.000	4345	1.230.170.856	4.428	1.854.064.856	107	257,5
	Porsentase Orang dengan TBCt yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis					0	-	94	18.375.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	Porsentase orang dengan resiko HIV yang mendapatskrining kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		6.464	395.000.000	5893	197.453.763	5.980	512.168.531	93	129,7
	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		12	800.000.000	0	-	84	343.450.000	700	42,9
	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis akibat Bencana dan/atau Berpetensi Bencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis akibat Bencana dan/atau Berpetensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		12	200.000.000	0	-	-	-	-	0,0
	Porsentase balita Gisi Kurang, Balita stunting dan balita kurus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12	4.250.000.000	312	6.644.704.057	398	13.636.505.919	3.317	320,9
	Porsentase kelompok dan masyarakt yang menerapkan kesehatan kerja dan olah raga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olah Raga		12	120.000.000	0	-	84	72.755.896	700	60,6
	Persentase Desa/ kelurahan yang melaksanakan STBM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12	975.000.000	312	996.299.752	400	1.756.677.360	3.333	180,2
	Porsentase KK dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		12	350.000.000	12	565.204.300	98	897.347.932	817	256,4
	meningkatnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12	1.000.000.000	312	1.769.506.540	382	2.548.784.132	3.183	254,9
	Meningkatkan penjaringan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		250	250.000.000	0	-	-	438.075.000	-	175,2
	meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		20		123	40.380.000	223	50.705.000	1.115	#DIV/0!
	Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12	5.650.000.000	312	4.245.878.036	393	7.663.782.850	3.275	135,6
	Meningkatnya Pengambilan dan pengiriman Spesimen penyakit potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Pengambilan dan pengiriman Spesimen penyakit potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		12	25.000.000	20	30.292.160	50	40.142.160	417	160,6
	Porsentase cakupan JKN	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		12	45.000.000.000	12	36.257.493.988	78	65.911.407.720	650	146,5

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
	Porsentase alokasi opearsional fasilitas kesehatan lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		12	1.000.000.000	36	654.458.845	78	1.057.881.244	650	105,8
	Porsentase sarana kesehatan yang terakreditasi	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		12	400.000.000	4	159.585.519	4	159.585.519	33	39,9
	Porsentase alokasi operasional pelayanan puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		25	7.000.000.000	300	8.440.210.813	374	15.713.718.046	1.496	224,5
	Porsentase alokasi operasional pelayanan rumah sakit	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		12	1.000.000.000	0	-	14	10.899.785.930	117	1090,0
	Porsentase kejadian tidak diharapkan yang dilakuka investigasi	Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		12	14.800.000	900 225	62.530.000	900.325	66.130.000	7.502.708	446,8
	Porsentase kejadian tidak diharapkan yang dilakuka investigasi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatansesuai standar		12	14.800.000	897	102.789.640	997	106.389.640	8.308	718,8
	Cakupan pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		12		0	-	92	9.150.000	767	#DIV/0!
	Porsentase Pelayanan Kesehatan Malaria	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria sesuai standar		-		362	151.466.348	440	162.866.348	#DIV/0!	#DIV/0!
	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan Orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		81		956	78.289.956	956	78.289.956	1.180	#DIV/0!
	Cakupan Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				300	428.344.624	300	428.344.624	#DIV/0!	#DIV/0!
	Cakupan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				312	2.408.989.592	312	2.408.989.592	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terpadu	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		100	-	100	6.400.800	200	6.400.800	200	#DIV/0!
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		12		66	6.400.800	151	6.400.800	1.258	#DIV/0!
		Penrbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah			100	35.000.000	100	672.207.813	200	672.207.813	200	1920,6
	Porsentase Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		25	35.000.000	25	672.207.813	25	672.207.813	100	1920,6
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			100	3.625.000.000	710	6.609.129.030	810	12.957.190.287	810	357,4
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar		100	3.500.000.000	1211	5.162.774.480	1.311	10.148.131.500	1.311	289,9
	cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		342	3.500.000.000	1472	5.029.945.180	1.566	10.015.302.200	458	286,2
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		12	30.000.000	12	132.829.300	106	5.118.186.320	883	17060,6
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Persentase Fasilitas Keseatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya		100	125.000.000	209	1.446.354.550	309	2.809.058.787	309	2247,2
	Meningkatka profesional Sumber Daya Manusia Kesehata Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehata Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		25	125.000.000	574	1.446.354.550	637	2.809.058.787	2.548	2247,2

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			100	862.165.256	222	319.479.750	322	606.703.975	322	70,4
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi untuk produk makan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga		100	250.000.000	336	88.199.600	436	171.652.450	436	68,7
	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin roduksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		70	250.000.000	235	88.199.600	331	171.652.450	473	68,7
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		100	250.000.000	58	91.511.600	158	197.566.200	158	79,0
	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		12	250.000.000	106	91.511.600	197	197.566.200	1.642	79,0
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga		100	362.165.256	273	139.768.550	373	237.485.325	373	65,6
	Cakupan pelayanan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		142	362.165.256	360	139.768.550	425	237.485.325	299	65,6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			100	1.517.530.249	87	1.293.070.000	132	11.941.569.156	132	786,9
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100	1.497.530.249	400	1.099.340.400	500	11.743.839.556	500	784,2
	Cakupan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		12	1.497.530.249	12	1.099.340.400	56	11.743.839.556	467	784,2
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia	Persentase Posyandu Aktif		100	20.000.000	100	193.729.600	200	197.729.600	200	988,6
	Porsentase Bimbingan Teknis dan supervisi Pembangunan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Bimbingan Teknis dan supervisi Pembangunan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		12	20.000.000	288	193.729.600	300	197.729.600	2.500	988,6
		PUSKESMAS WOLOMARANG			-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
73		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar				#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit				#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan Persentase Desa / Kelurahan STBM Persentase Desa / Kelurahan STBM Persentase Desa / Kelurahan UCI Persentase FKTP terakreditasi Persentase FKTP terakreditasi Persentase FKTP terakreditasi (%) Persentase Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan kerja Persentase Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahrag Persentase Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah [deleted] Presentase Puskesmas yang melakukan respon KLB/wabah				#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
74		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)				#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif				#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif				#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		PUSKESMAS MAGEPANDA					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
75		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar				#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit				#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan Persentase Desa / Kelurahan STBM Persentase Desa / Kelurahan STBM Persentase Desa / Kelurahan UCI Persentase FKTP terakreditasi Persentase FKTP terakreditasi Persentase FKTP terakreditasi (%) Persentase Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan kerja Persentase Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahrag Persentase Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah [deleted] Presentase Puskesmas yang melakukan respon KLB/wabah				#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
76		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)				#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif				#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	RSUD TC Hilelrs Maumere	RSUD DR. T. C. HILLERS MAUMERE			100	95.818.067.258	100	59.421.243.510	200	148.133.551.116	200	154,60
89		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		100	95.818.067.258	100	59.421.243.510	200	148.133.551.116	200	154,60

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100	24.695.488.717	100	1.189.914.600	200	24.118.039.043	200	97,66
		Pengadaan Alat kesehatan/Alat penunjang medik fasilitas Pelayanan	Jumlah Alat kesehatan/Alat penunjang medik fasilitas Pelayanan		33	24.695.488.717	4	1.189.914.600	35	24.118.039.043	106,06061	97,66
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan Persentase Desa / Kelurahan STBM Persentase Desa / Kelurahan STBM Persentase Desa / Kelurahan UCI Persentase FKTP terakreditasi Persentase FKTP terakreditasi Persentase FKTP terakreditasi (%) Persentase Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan kerja Persentase Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahrag Persentase Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah [deleted] Presentase Puskesmas yang melakukan respon KLB/wabah		100	71.122.578.541	100	58.231.328.910	200	124.015.512.073	200	174,37
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		12	71122578541	12	58.231.328.910	24	124.015.512.073	200	174,37
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar		Perbedaan (Defiasi) Penduduk Miskin Antar Wilayah		12.00							
			IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)		46.87							
			Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik		46.87							
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak		55.48							
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak		52.34							
			Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik		73.28							
			Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Keadaan Baik		67.09							
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100	98.726.764.302	116,7	38.539.273.164	216,68	82.670.681.615	217	83,74
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang Dilaksanakan		100	309.090.000	122,8	3.193.538.553	223	6.497.771.553	223	2.102
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100	309.090.000	122,8	3.193.538.553	222,83	6.497.771.553	223	2.102,23
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		-	-	1,33	2.405.732.200	2,66	4.896.568.250	#DIV/0!	#DIV/0!
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		-	-	0,2567	470.134.500	0,50	965.349.500	#DIV/0!	#DIV/0!
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	0,3	240.090.000	0,70	199.541.000	0,80	399.391.000	266	166,35
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dok	3	69.000.000	1	118.130.853	2,00	236.462.803	67	342,70
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM		100	32.851.388.062	100,00	2.244.443.844	200	5.624.202.664	200	17
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prsentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota		100	32.851.388.062	100	2.244.443.844	200,00	5.624.202.664	200	17,12
		Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	L/Dtk	25	14.550.694.031	1	13.600.000	2,00	34.149.970	8	0,23
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	L/Dtk	25	14.550.694.031	20	2.122.359.657	40,00	5.317.153.368	160	36,54
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah SR yang Terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	L/Dtk	20	3.750.000.000	20	108.484.187	40,00	272.899.326	200	7,28
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM AIR LIMBAH	Persentase Pengembangan Sistem Air Limbah		100	17.588.132.754	100	1.361.600.000	200	2.730.149.970	200	15,52
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		100	17.588.132.754	100	1.361.600.000	200	2.730.149.970	200	15,52
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah RT yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	M3/Hari	525	17.588.132.754	525	1.348.000.000	1.050	2.696.000.000	200	15,33
		Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem PengelolaanAir Limbah Domestik(SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang disusun				1	13.600.000	2	34.149.970	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan Sistem Drainase		100	-	91	136378671	191	286.378.671	191	#DIV/0!
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota		100	-	91	136.378.671,00	191	286.378.671	191	#DIV/0!
		Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi		-	-	91	136.378.671,00	191	286.378.671	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung		100	309.090.000	131	101.314.520	231	234.164.850	231	76
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		100	309.090.000	131	101.314.520	230,99	234.164.850	231	75,76
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	210	309.090.000	93	101.314.520	129,00	234.164.850	61	75,76
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Penanganan Jalan		100	25.409.941.658	132	24.760.633.160	231,66	53.174.382.042	232	209,27
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		100	25.409.941.658	132	24.760.633.160	231,66	53.174.382.042	232	209,27
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dok	3	85.240.000	1	114.575.720	2,00	255.555.320	67	299,81
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	18	20.801.395.217	6,86	21.607.635.363	10,86	46.167.192.875	60	221,94
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Km	6	4.523.306.441	0,67	1.305.237.000	1,67	2.613.688.400	28	57,78
		Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun		-	-	1	1.624.219.527	2,00	3.854.172.897	#DIV/0!	#DIV/0!
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan Jembatan	Dok	3	1.575.000.000	1	108.965.550	2,00	283.772.550	67	18,02
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi		100	170.269.905	178	115.117.770	278,33	234.683.910	278	137,83
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		100	60.000.000	45	83.358.760	145,00	166.845.080	145	278,08
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	60	60.000.000	45	83.358.760	145,00	166.845.080	242	278,08
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100	39.000.000	100	16.050.200	200	33.647.700	200	86,28
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	2	39.000.000	1	16.050.200,00	2	33.647.700	100	86,28
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		100	71.269.905	100	15.708.810,00	200	34.191.130	200	47,97
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	BU	38	71.269.905	10	15.708.810,00	20	34.191.130	53	47,97
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang		100	2.745.173.250	97	710.083.905	196,67	1.511.725.205	197	55,07
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		100	1.565.275.000	100	632.579.705	200,00	1.348.773.905	200	86,17
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	2	821.275.000	1	432.037.945	2,00	944.926.445	100	115,06
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	744.000.000	1	200.541.760	2,00	403.847.460	100	54,28

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan		100	540.000.000	90	50.443.900	190,00	106.414.100	190	19,71
		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	L	480	540.000.000	135	50.443.900	285,00	106.414.100	59	19,71
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100	639.898.250	100	27.060.300,00	200,00	56.537.200	200	8,84
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	3	639.898.250	1	27.060.300,00	2,00	56.537.200	67	8,84
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN											
			IKUP (Indeks Kualitas Urusan Permukiman)		48.28							
			Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana		9.38							
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)		Persentase penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR		77.05							
	Penataan lingkungan yang sehat dan nyaman didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai		Persentase Rumah Tangga yang dilayani listrik		100							
			Persentase Rumah Tangga yang terlayani air minum bersih		79.14							
			Persentase Rumah Tangga yang terlayani/memiliki sanitasi dasar		31.94							
			Persentase jalan lingkungan yang dibangun		31.99							
			Persentase drainase lingkungan kawasan permukiman yang dibangun		23.65							
			Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan		100							
			Persentase konflik pertanahan yang ditangani		100							
			Persentase lahan yang disediakan untuk pembangunan		100							
	Meningkatnya Kualitas Permukiman		Indeks Kualitas Urusan Permukiman	Persen	48.28							
		WAJIB										
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN				34.402.000.000	90,90	4.886.105.895	191	10.172.966.666	#DIV/0!	29,57
1		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pengembangan perumahan		133	1.255.000.000	70,76	372.307.700	171	782.632.030	128,07	62,36
		Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		100	60.000.000	100,00	22.190.000	200	65.696.070	200,00	109,49
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Rumah	100	30.000.000	1,00	0	2	13.699.930	2,00	45,67
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Rumah	100	30.000.000	1,00	22.190.000	2	51.996.140	2,00	173,32
		Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		100	-	0,00	0	100	-	100,00	#DIV/0!
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	-	-	0,00	0	26	-	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		100	1.045.000.000	114,29	312.934.000	214	625.681.300	214,29	59,87
		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Rumah	15	600.000.000	6,00	164.342.000	11	329.002.070	73,33	54,83
		Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Rumah	5	445.000.000	2,00	148.592.000	4	296.679.230	80,00	66,67
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		100	150.000.000	68,77	37.183.700	169	91.254.660	168,77	60,84
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Dokumen	1	30.000.000	1,00	37.183.700	2	81.214.660	200,00	270,72
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	1	120.000.000		0	1	10.040.000	100,00	8,37
2		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			50	3.070.000.000	100,00	320.914.000	200	650.913.540	400,00	21,20
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		100	3.070.000.000	100,00	177.210.000	200	357.210.000	200,00	11,64
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	Rumah	100	3.070.000.000	1,00	177.210.000	2	357.210.000	2,00	11,64
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		-		100,00	143.704.000	200	293.703.540	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				4,00	143.704.000	8	293.703.540	#DIV/0!	#DIV/0!
3		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan		100	12.600.000.000	100,00	268.698.520	200	721.849.660	200,00	5,73
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas diBawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		100	12.600.000.000	100,00	268.698.520	200	721.849.660	200,00	5,73
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar KawasanPermukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Rumah	400	12.600.000.000	21,00	268.698.520	42	721.849.660	10,50	5,73
4		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		100	11.871.000.000	100,00	12.168.720	200	25.138.720	200,00	0,21
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan		100	11.871.000.000	100,00	12.168.720	200	25.138.720	200,00	0,21
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjangi Fungsi Hunian	Desa/Kel	100	11.871.000.000	1,00	12.168.720	2	25.138.720	2,00	0,21
	Meningkatnya professionalitas ASN											
	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik											
	Berkurangnya permasalahan tentang pertanahan											
	Tersedianya mekanisme konsultasi dan pengaduan		Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan	Persen	100							
6		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase penyelesaian sengketa tanah garapan		100	50.000.000	100,00	14.214.060	200	34.713.940	200,00	69,43

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pertanahan yang terselesaikan		100	50.000.000	100,00	14.214.060	200	34.713.940	200,00	69,43
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konfik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	50.000.000	5,00	14.214.060	10	34.713.940	500,00	69,43
7		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentase penyelesaian ganti kerugian dan dan santunan		100	2.500.000.000	100,00	1.182.856.150	200	2.485.856.070	200,00	99,43
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah yang disediakan untuk pembangunan		100	2.500.000.000	100,00	1.182.856.150	200	2.485.856.070	200,00	99,43
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	2.500.000.000	16,00	1.182.856.150	32	2.485.856.070	1.066,67	99,43
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA											
			Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	2,26		76,92					
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,7		81,08					
	Meningkatnya Penegakan Regulasi Daerah		Jumlah Regulasi Daerah yang ditegakkan	Buah	9		100					
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			100	19.102.167.377	100,00	5.604.126.758,46	200	10.273.379.572	200	54
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM1	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		336	1.365.164.251	100,00	552.563.147,00	133	663.662.947	40	49
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam Daerah		371	1.205.352.357	100,00	512.554.435,00	133	623.654.235	36	52
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Patroli Gabungan	Dokumen	3	103.854.240	3,00	31.289.530,00	4	64.889.330	133	62
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Trantibum Yang dicegah melalui Deteksi Dini, dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Kasus	75	1.101.498.117	30,00	481.264.905,00	64	558.764.905	85	51
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase	300	159.811.894	100	40.008.712	100	40.008.712	33	25,03
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPN Penegak Perda	Laporan	6	159.811.894	1	40.008.712	1	40.008.712	16,67	25,03
	Tersedia Sistem Informasi Pelayanan Publik		Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran (wilayah Daratan Kecamatan Alok, Alok Barat, Alok Timur, Kangae, Kewapante, Nelle, Nita)									
			Luas Wilayah Kabupaten Sikka									
			Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran									
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran									

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Gangguan Bencana Kebakaran	Persentase	100	1.921.844.280	100	122.280.000	200	205.080.000	200,00	10,67
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran	Persentase	100	1.921.844.280	100	122.280.000	200	205.080.000	200,00	10,67
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Waktu Penanganan Pencegahan Kebakaran	Dokumen	3	244.799.280	4	73.950.000	16	156.750.000	533,33	64,03
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	9	1.677.045.000	3	48.330.000	3	48.330.000	33,33	2,88
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											
	Berkurangnya Kerentanan Bencana		Indeks Risiko Bencana	Indeks	117,68							
			Potensi penduduk terpapar :		125,48							
			Potensi kerugian :									
			a. Fisik		2.000.000.000							
			b. Ekonomi		109.058.100.000							
			c. Lingkungan		55.157,93							
	Meningkatnya Profesionalitas ASN		Indeks kualitas pelayanan publik	Indeks	65,50							
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik		Indeks Sarana dan Prasarana pada BPBD	Indeks	0,71							
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			100	4.275.497.574	94	2.954.149.553	160	5.610.551.046	160,35	131,23
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik											
	Berkurangnya Kerentanan Bencana		Indeks Resiko Bencana									
			Fisik		2,000,000,000							
			Ekonomi		109.058.100.000							
			Lingkungan									
			Jumlah Dokumen		5							
			Jumlah Regulasi		2							
			Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan		100							
			Jumlah Desa Tanggu Bencana									
		Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Penagnanan Bencana		100	1.284.869.900	98	386.549.900	148	577.642.290	97,73	47,36
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		100	450.000.000	100	138.379.185	200	187.960.745	100,00	90,08
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	4.000	450.000.000	600	138.379.185	800	187.960.745	100,00	90,08
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100	290.425.000	91	48.873.195	91	48.873.195	90,91	42,16
		Penyusunan rencana Kotijensi	Jumlah Dokumen rencana Kontijensi	Dokumen	3	40.425.000	0	17.765.570	0	17.765.570	-	23,71

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Desa	100	250.000.000	10	31.107.625	10	31.107.625	100,00	75,87
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100	424.444.900	100	128.420.270	200	269.931.100	100,00	27,22
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Tim TRC dan Pusdalop)	SK	6	24.444.900	3	221.113.377	5	324.898.327	100,00	85,28
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yan mendapat disrtibusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban	Korban	1.000	400.000.000	12	180.468.420	21	218.194.300	100,00	84,95
		Penataan Sistim dasar Penanggulangan Bencana	Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100	120.000.000	100	70.877.250	100	70.877.250	100,00	94,50
		Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Laporan	9	120.000.000	12	70.877.250	12	70.877.250	100,00	94,50
	DINAS SOSIAL											
			Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar		60							
			Persentase PPKS di Luar Panti Yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar		10.74							
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Bekerjasama Dengan Dinas Sosial		42.86							
			Persentase Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Saat Bencana		100.00							
	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL					40,30	3.930.441.385	40,30	3.930.441.385	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Pemberdayaan Sosial		100	405.000.000	17,11	197.937.130	117,11	253.018.928	117,10526	62,47380938
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		100	405.000.000	17,11	197.937.130	117,11	253.018.928	117,10526	62,47380938
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat/Kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	Org	115	85.000.000	0,00	901.410	0,00	901.410	0	1,060482353
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	Org	21	105.000.000	21,00	22.362.990	44,00	28.292.988	209,52381	26,94570286
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Kesejahteraan Sosial Keluarga yang diberdayakan	Kel	75	215.000.000	0,00	103.935.860	0,00	103.935.860	0	48,34226047
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang diberdayakan	Paket			5,00	70.736.870	6,00	119.888.670	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		100	92.727.000	100	22.770.400	200,00	27.770.400	200	29,94855867
		Pemulangan Warga Negara Migran Tindak kekerasan dari Titik Deborkasi di Daerah Kabupaten /Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Tindak kekerasan dari Titik Deborkasi di Daerah Kabupaten /Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		100	92.727.000	100	22.770.400	200,00	27.770.400	200	29,94855867

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Tindak kekerasan dari Titik Deborkasi di Daerah Kabupaten /Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Org	300	92.727.000	23	22.770.400	33,00	27.770.400	11	29,94855867
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial		100	511.454.589	25,00	226.522.116	125,00	366.295.816	125	71,61844353
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar		100	511.454.589	50,00	226.522.116	150,00	366.295.816	150	71,61844353
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	90	161.100.589	31,00	64.478.396	31,00	78.302.296	34,444444	48,60459945
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Alat Bantu	Org	90	150.000.000	76,00	98.153.000	76,00	114.203.000	84,444444	76,13533333
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti sosial yang mendapatkan Bimbingan Sosial	Org	225	-	0,00	15.670.800	30,00	115.670.600	13,333333	#DIV/0!
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandang dan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan dan Perlindungan Sosial dan Hukum	Org	100	150.000.000	56,00	30.607.600	81,00	40.507.600	81	27,00506667
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Anak Terlantar, ABH, Penyandang Disabilitas Yang dirujuk Ke Balai Rehabilitasi Sosial	Org	30	30.000.000	0,00	333.400	0,00	333.400	0	1,111333333
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Anak Terlantar, ABH, Penyandang Disabilitas Yang dirujuk Ke Balai Rehabilitasi Sosial	Org	30	50.354.000	8,00	17.278.920	8,00	17.278.920	26,666667	34,31489057
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial		100	-	0,00	0	100,00	-	100	#DIV/0!
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				0,00	0	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Yang Mendapatkan Bimbingan Sosial				0,00	0	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial				0,00	0	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial		100	3.075.000.000	30,48	549.951.380	130,48	1.698.387.180	130,4781	55,23210341
		Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar	Jumlah Anak - Anak Terlantar Yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		100	370.000.000	20,00	30.320.240	120,00	30.320.240	120	8,194659459
		Penjangkauan Anak - Anak Terlantar	Teridentifikasinya kasus Anak Terlantar	Org	300	370.000.000	12,00	18.416.240	12,00	18.416.240	4	4,977362162

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Teridentifikasinya kasus Anak Terlantar	Org	300	370.000.000	0,00	11.904.000	0,00	11.904.000	0	3,217297297
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemutahiran Data Fakir Miskin		100	2.705.000.000	40,96	519.631.140	140,96	1.668.066.940	140,9562	61,66606063
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Dokumen	194	900.000.000	194,00	294.976.840	196,00	294.976.840	101,03093	32,77520444
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Dokumen	72.000	1.050.000.000	11726,00	132.818.980	11728,00	226.840.380	16,288889	21,60384571
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kel	23.285	1.655.000.000	10961,00	91.835.320	10961,00	1.146.249.720	47,073223	69,25980181
	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan				43,86	107.513.360	43,86	156.310.360	#DIV/0!	#DIV/0!
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana				0,00	0	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan bantuan Makanan			-	0,00	0	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan bantuan Sandang	Paket		-	0,00	0	1,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana		100	463.635.000	87,72	107.513.360	187,72	156.310.360	187,7193	33,71409837
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Reaksi Cepat TAGANA dalam Penanganan Korban Bencana dan Penguatan Kapasitas TAGANA	Paket	62	463.635.000	50,00	107.513.360	51,00	156.310.360	82,258065	33,71409837
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					0,00	0	0,00	4.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					0,00	0	0,00	4.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1	-	0,00	0	1,00	4.000.000	100	#DIV/0!
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					83,00	10.356.413.756	83	10.356.413.756	83,00	94,00
			Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	3							
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik		Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks	4							
		Penataan Organisasi	-		100	68.600.000	100	20.555.333	100	26.155.333	100,00	99,78
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dok	12	68.600.000	100	20.555.333	112	26.155.333	100,00	99,78
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka		4							
			Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	%	17,05-15,03							
			Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	0							
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-		100	822.767.366	30	7.447.526.052	30	8.883.518.452	29,72	97,76
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-		100	716.767.366	62	7.440.974.052	62	8.876.966.452	62,49	98,16
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja pada tahun n	Org	180	649.767.366	553	7.429.922.052	603	8.865.914.452	63,56	98,27
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	17	67.000.000	-	11.052.000	15	11.052.000	-	55,26
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-		100	24.000.000	-	825.000	-	825.000	-	6,07

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		17	24.000.000	-	825.000	-	825.000	-	6,07
		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-		100	82.000.000	27	5.727.000	27	5.727.000	26,67	23,68
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	40	82.000.000	8	5.727.000	8	5.727.000	26,67	23,68
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-		100	836.200.088	71	150.766.180	138	165.805.880	71,28	43,58
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-		100	165.750.000	67	56.991.580	167	67.930.480	66,54	36,46
		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Org	1	25.750.000	1	7.917.580	1	7.917.580	50,00	82,39
		Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKAD/AKL	Org	165	60.000.000	168	18.955.800	169	29.894.700	100,00	94,82
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Org	75	80.000.000	4	30.118.200	4	30.118.200	4,44	23,77
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-		100	260.000.000	74	46.963.300	174	47.263.300	74,34	35,54
		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dok	4	70.000.000	2	7.168.580	3	7.168.580	100,00	14,34
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Org	150	130.000.000	50	33.309.720	50	33.309.720	100,00	74,60
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Org	165	60.000.000	61	6.485.000	62	6.785.000	61,00	17,30
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-		100	410.450.088	73	46.811.300	73	50.612.100	72,97	81,41
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Org	24	190.450.088	25	27.810.500	25	27.810.500	104,17	84,98
		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Org	75	135.000.000	2	19.000.800	2	19.000.800	20,00	76,69
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Org	60	85.000.000	-	-	3	3.800.800	-	#DIV/0!
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-		100	310.635.000	97	157.089.390	147	193.148.950	97,00	65,03
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		100	61.500.000	100	103.278.280	100	103.278.280	100,00	55,33
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	5	61.500.000	20	103.278.280	20	103.278.280	100,00	55,33
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-		100	249.135.000	94	53.811.110	194	89.870.670	94,00	97,98
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perkara	10	78.817.500	20	24.694.100	20	24.694.100	100,00	99,01

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	1	170.317.500	27	29.117.010	67	65.176.570	90,00	97,12
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					-	-	-	-		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					-	-	-	-		
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-		100	135.789.120	100	31.780.510	100	80.169.413	100,00	99,33
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		100	135.789.120	100	31.780.510	100	80.169.413	100,00	99,33
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2	108.168.000	1	17.226.240	2	65.615.143	100,00	98,81
		Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	2	27.621.120	2	14.554.270	2	14.554.270	100,00	99,96
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-		100	275.011.591	100	86.139.669	200	87.514.669	100,00	97,55
		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-		100	275.011.591	100	86.139.669	200	87.514.669	100,00	97,55
		Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	KK	101	95.000.000	15	29.126.170	15	29.126.170	100,00	97,97
		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Permukiman	2	180.011.591	1	57.013.499	2	58.388.499	100,00	97,33
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)		89							
			IDG (Indeks Development Gender)		63							
			TFR (Total Fertility Rate)		3							
			Rasio KDRT		3							
			Rasio Kekerasan Terhadap Anak		2							
			Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan		2							
			TFR		16							
			Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)		62							
			Partisipasi PUS menjadi Akseptor		62							
			Angka Pemakaian Kontrasepsi Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun		28							
			Kampung KB									
	Menurunnya Kesenjangan Gender (IK: Presntase Perempuan yang terlibat dalam Pembangunan)		IK: Presntase Perempuan yang terlibat dalam Pembangunan)									
							80	7.466.231.889	80	7.466.231.889	80,21	66,67
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			100	437.027.358	69	118.457.654	94	244.867.633	68,75	26,06
	Menurunnya Kesenjangan Gender	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Desa/Kel yang memiliki PUG dan Anak		100	27.981.448	100	27.841.680	200	61.239.330	100,00	56,82
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		100	27.981.448	100	27.841.680	200	61.239.330	100,00	56,82

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang didampingi		10	13.750.000	1	12.154.580	1	12.154.580	100,00	81,03
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah ASN Perempuan yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan		20	14.231.448	1	15.687.100	2	49.084.750	100,00	46,14
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlaksananya Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota		100	302.955.910	67	139.559.708	100	232.572.037	66,67	40,38
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota		100	38.750.000	100	15.697.220	100	15.697.220	100,00	51,33
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenagan Kab/Kota	Jumlah desa/kelurahan yang mendapat advokasi dan informasi tentang perlindungan perempuan		20	38.750.000	12	15.697.220	12	15.697.220	100,00	51,33
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kabupaten/Kota		100	87.100.000	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan yang mendapat advokasi penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan		35	63.750.000	-	-	-	-	-	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan		20	23.350.000	-	-	-	-	-	-
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	177.105.910	100	123.862.488	200	216.874.817	100,00	49,55
		Advokasi Kebijakkan dan Pendampingan Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan dukungan layanan bagi perempuan korban kekerasan		1	177.105.910	12	123.862.488	24	216.874.817	100,00	49,55
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Peningkatan Pemenuhan Hak Rakyat		100	53.045.000	75	21.473.450	75	21.473.450	75,00	61,35
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Mendapat Advokasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak		100	53.045.000	75	21.473.450	75	21.473.450	75,00	61,35
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan advokasi kebijakan pemenuhan hak anak		1	53.045.000	9	21.473.450	9	21.473.450	75,00	61,35
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Anak yang mendapat Perlindungan Khusus		100	53.045.000	-	-	-	-	-	-
		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Program dan Koordinasi Lintas Sektor dalam kegiatan Pencegahan Kekerasan		100	53.045.000	-	-	-	-	-	-
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak		5	53.045.000	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					300	3.980.604.605	300	3.980.604.605	#DIV/0!	56,59
	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga (IK: Presentase Peningkatan Jumlah Akseptor KB)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana		100	28.730.000	100	52.530.000	200	52.530.000	100,00	54,72
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	Cakupan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB		100	28.730.000	100	52.530.000	200	52.530.000	100,00	54,72
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		20	28.730.000	12	52.530.000	24	52.530.000	100,00	54,72
	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga (IK: Presentase Peningkatan Jumlah Akseptor KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana		100	3.354.067.752	100	2.802.434.455	200	5.642.088.714	100,00	63,24
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB		100	85.000.000	100	841.674.600	200	1.260.316.900	100,00	82,49
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		100	50.000.000	21	427.500.000	21	427.500.000	100,00	73,71
		Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		21	35.000.000	21	414.174.600	33	832.816.900	100,00	94,06
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PPKBD/sub PPKBD yang mendapat pelatihan pengelolaan KKBPK		100	420.000.000	100	605.513.200	200	1.208.418.284	100,00	65,20
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		640	420.000.000	160	605.513.200	172	1.208.418.284	100,00	65,20
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan dan pelayanan KB		100	2.849.067.752	100	1.355.246.655	200	3.173.353.530	100,00	54,60
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		100	24.830.000	38	88.675.210	50	840.809.535	100,00	81,39
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya Kesertaan Akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		4.700	1.441.726.700	12	571.724.750	12	571.724.750	100,00	34,42
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Meningkatnya Pelayanan KB		1	1.382.511.052	3	694.846.695	15	1.760.819.245	100,00	97,53
	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga (IK: Presentase Peningkatan Jumlah Akseptor KB)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)		100	600.300.000	100	1.125.640.150	200	3.544.483.760	100,00	44,91
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Peserta Akseptor KB Baru		100	600.300.000	100	1.125.640.150	200	3.544.483.760	100,00	44,91
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		18	600.300.000	21	1.125.640.150	33	3.544.483.760	100,00	44,91

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
	DINAS KETAHANAN PANGAN		Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten		0.49							
			Ketersediaan energi dan protein per kapita		3							
			Penguatan cadangan pangan		50							
			Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah		3							
			Stabilitas harga dan pasokan pangan		12							
			Skor pola pangan harapan		70							
			Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		20							
			Penanganan daerah rawan pangan		17							
			Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah		80							
			Indeks Inovasi Daerah		70							
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		80							
			Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan		100							
2		DINAS KETAHANAN PANGAN				3.265.166.480	91	3.192.223.969	91	5.820.057.076	#DIV/0!	178,25
2		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	%	100	544.996.000	67	1.138.665.381	167	1.529.507.521	1,67	280,65
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	%	100	75.000.000	100	18.043.740	200	68.040.340	2,00	90,72
		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	laporan	1	15.000.000	1	-	2	17.998.300	2,00	119,99
		Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kab/Kota	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	unit	3	15.000.000	3	3.575.000	6	10.575.000	2,00	70,50
		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kab/Kota	informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	unit	2	15.000.000	2	14.468.740	4	32.467.040	2,00	216,45
		Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	lap	2	15.000.000	2	-	4	7.000.000	2,00	46,67
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah Laporan Neraca Bahan Makanan	dok	2	15.000.000	2	-	4	-	2,00	-
2		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	%	100	301.996.000	-	-	100	-	1,00	-
2		Pengadaan cadangan pangan pemerintah kab/kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kab/kota	ton	17	301.996.000	-	-	17	-	1,00	-
2		Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kab/kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kab/kota yang terpelihara	ton	17	-	-	-	17	-	1,00	#DIV/0!
2		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	Persentase pencapaian target konsumsi pangan per kapita /Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	100%	100	168.000.000	100	1.120.621.641	200	1.461.467.181	2,00	869,92
2		Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	target konsumsi pangan per kapita per tahun	dok	1	5.000.000	1	4.989.300	2	4.989.300	2,00	99,79
2		Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	laporan	2	153.000.000	2	1.115.632.341	4	1.286.055.111	2,00	840,56

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
2		koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	lap ran	1	10.000.000	1	-				
2		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentasepenanganan kerawanan pangan	%	100	70.000.000	96	64.481.379	100	121.218.409	100,00	173,17
2		Kegiatan Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Jumlah dokumen kerentanan dan ketahanan pangan	%	1	25.000.000	100	23.636.449	2	4.244.809	0	
		penyusunan, pemutahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Jumlah peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang di mutahirkan	dok	1	25.000.000	1	23.636.449	2	4.244.809	200,00	
2		Kegiatan Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten /kota	Persentase Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten /kota	%	100	45.000.000	92	40.844.930	109	116.973.600	0	
		Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah kabupaten/kota	dok	1	20.000.000						
2		Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan kerawanan pangan dan Gizi kabupaten /kota	jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten /kota	laporan	12	25.000.000	12	40.844.930		116.973.600		
2		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase terlaksananya penguatan kelembagaan pangan segar Daerah	%	100	70.000.000	100	30.770.311	101	25.763.400	0	0
2		Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Keamanan Pangan segar daerah kab/kota	Persentase Pelaksanaan pengawasan Keamanan Pangan segar daerah kab/kota	%	100	70.000.000	100	30.770.311	101	25.763.400	0	
		Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar Asal Tumbuhan Daerah kab/kota	dok	2	25.000.000	2	19.266.320	2	24.998.400	100,00	
		Rekomendasi perijinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Perijinan keamanan pangan segar daerah kab/kota	dok			-	-	2	-	100,00	
		Penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dankeamanan pangan segar asal tumbuhan	dok	3	45.000.000	3	-	3	-	100,00	
		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas /keamanan pangan segar daerah kab/kota yang dibina	dok	1	25.000.000	1	11.503.991	2	765.000	200,00	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP											
			IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)		73.81							
			Indeks Kualitas Air		54.63							
			Indeks Kualitas Udara		95.74							
			Indeks Tutupan Lahan		71.74							
			Persentase Penanganan Sampah Perkotaan		83.51							
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP					92,51	12.319.883.718	93	12.319.883.718	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup		#DIV/0!	75.000.000	100,00	711.110.580	#DIV/0!	711.110.580	#DIV/0!	948
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersedia	Persentase	100	75.000.000	100,00	61.190.440	#DIV/0!	61.190.440	#DIV/0!	82
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	3	29.294.000	3,00	19.327.000	3	19.327.000	100	66
		Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	4	45.706.000	1,00	41.863.440	1	41.863.440	25	92

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	Terlaksananya pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		#DIV/0!	-	100,00	649.920.140	#DIV/0!	649.920.140	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Terlaksananya pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dokumen	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	-	-	2,00	649.920.140	2	649.920.140	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Prosentase Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup		100	175.000.000	140,33	152.298.970	#DIV/0!	154.798.970	#DIV/0!	88
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	Jumlah Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut	Persentase	100	105.519.200	116,67	99.849.500	#DIV/0!	99.849.500	#DIV/0!	95
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Ari, Tanah, Udara dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kali	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	12	105.519.200	14,00	99.849.500	14	#VALUE!	117	#VALUE!
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		100	69.480.800	164,00	52.449.470	264	54.949.470	264	79
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Laporan	50	69.480.800	82,00	52.449.470	115	54.949.470	230	79
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		100	125.000.000	100,00	584.322.579	200	599.293.779	200	479
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sikka	Jumlah Anakan dan Luas Lahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase	100	125.000.000	100,00	584.322.579	200	599.293.779	200	479
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Ha	1	125.000.000	2,44	584.322.579	3	599.293.779	445	479
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya (Konservasi Daerah Mata Air dan DAS	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3		100	25.000.000	100,00	24.378.800	#DIV/0!	24.378.800	#DIV/0!	98
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian B3 dan limbah B3		100	25.000.000	100,00	24.378.800	#DIV/0!	24.378.800	#DIV/0!	98

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yg Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kab/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yg Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	4	25.000.000	4,00	24.378.800	4	24.378.800	100	98
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		100	90.000.000	100,00	71.906.700	#DIV/0!	71.906.700	#DIV/0!	80
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	90.000.000	100,00	71.906.700	#DIV/0!	71.906.700	#DIV/0!	80
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan hidup	Laporan			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Dokumen			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	55	90.000.000	55,00	71.906.700	55	71.906.700	100	80
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	80.000.000	54,17	157.769.320	154	237.663.636	154	297
		Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingk.hidup untk lembaga kemasyr. Tingkt daerah kab/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100	80.000.000	54,17	157.769.320	154	237.663.636	154	297
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingk.Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kel. Masy. / pelaku usaha	12	68.000.000	10,00	145.769.670	12	185.707.270	100	273
		Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kel. Masy. / pelaku usaha	12	12.000.000	3,00	11.999.650	15	51.956.366	125	433
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		100	95.000.000	86,49	61.146.520	#DIV/0!	61.146.520	#DIV/0!	64
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase	100	95.000.000	86,49	61.146.520	#DIV/0!	61.146.520	#DIV/0!	64
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dikelola	Kasus			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Dokumen	25	75.000.000	17,00	50.451.930	17	50.451.930	68	67
		Penerapan Sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	1	20.000.000	15,00	10.694.590	15	10.694.590	1.500	53
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang Tertangani		100	1.974.992.450	51,61	7.353.898.383	#DIV/0!	7.353.898.383	#DIV/0!	372
		Pengelolaan Sampah	Jumlah Volume Sampah yang Tertangani	Persentase	100	1.974.992.450	51,61	7.353.898.383	#DIV/0!	7.353.898.383	#DIV/0!	372
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	m3 / tahun			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	13	25.149.792	6,00	25.058.410	6	25.058.410	46	100
		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	3	727.680.108	13,00	3.076.593.000	13	3.076.593.000	433	423
		Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengelolahan Sampah di Instalasi Pengelolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Per Ton	1	156.868.300	1,00	155.571.960	1	155.571.960	100	99
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	64.896	1.065.294.250	6.692,40	4.096.675.013	6.692	4.096.675.013	10	385
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
			IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)		4		3.20					
			Persentase Layanan Administrasi Kependudukan Yang Berkualitas		100		98					
			Cakupan penduduk yang memiliki KTP-el		100		98,48					
			Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK)		100		99,1					
			Cakupan penduduk (Anak usia 0- 17 thn kuang 1 hari) yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)		100		37,57					
			Cakupan Penduduk (Anak) yang memiliki akta kelahiran		100		86,24					
			Cakupan penduduk yang memiliki akta perkawinan		100		54,44					
			Cakupan penduduk yang memiliki akta perceraian		100		33,1					
			Cakupan penduduk yang memiliki akta kematian		2		1141					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			100	18.392.518.714	91	5.829.973.653	191	10.156.140.672	191	55
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan		100	980.857.486	100	315.482.500,0	200	543.934.000,0	200	55
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki KTP-el dan KIA		100	924.923.231	100	297.622.500	200	513.624.000	200	56
		Pendataan Penduduk Non permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dok	6	15.372.681	2	4.860.000	4	11.260.000	67	73
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dok	150.000	516.397.961	50.000	166.722.500	98.000	320.524.000	65	62
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Lap	6	361.779.954	2	116.320.000	4	172.120.000	67	48
		Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk		345.000	31.372.635	115.000	9.720.000	190.000	9.720.000	55	31
		Penataan Pendaftaran Penduduk			100	29.353.659	100	9.450.000	100	19.950.000	100	68
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Dok	6	29.353.659	2	9.450.000	4	19.950.000	67	68
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			100	26.580.596	100	8.410.000	100	10.360.000	100	39
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Lap	6	26.580.596	2	8.410.000	4	10.360.000	67	39
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen catatan Sipil bagi masyarakat		100	718.107.468	65	226.239.820	165	606.142.000	165	84
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase jumlah dokumen dan pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan		100	453.595.077	100	146.470.190	200	292.186.790	200	64
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dok	18	90.215.149	6	28.967.800	12	66.005.000	67	73
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layananan Pencatatan Sipil Yang ditingkatkan		18	321.194.583	6	103.890.000	12	178.690.000	67	56
		Pengumpulan,Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatn Sipil	Jumlah Dokumen, Analisis, dan Diseminasi data pencatatn Sipil	Dok	150	29.512.655	50	9.512.390	100	28.391.790	67	96
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil dengan Kebutuhan yang tersedia	Dok	12	12.672.690	20	4.100.000	40	19.100.000	333	151
		Penyelengaraan Pencatatan sipil			100	264.512.391	96	79.769.630	196	228.465.030	196	86
		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahaan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan Nilah, Talak, Cerai, dan Rijuk bagi penduduk yang beragama islam	Lap	6	8.484.521	0	0	0	-	0	0

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahaan di Bidang Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/Kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota	Lap	6	19.225.398	2	2.495.000	4	2.895.000	67	15
		Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/kota dalam Penertiban Pelayanan pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga Non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban Pelayanan Pencatatan sipil	Lap	6	20.894.484	2	5.950.000	4	9.910.000	67	47
		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara Aktif pendaftaran peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Lap	450	117.763.290	150	38.050.000	300	117.950.000	67	100
		Fasilitasi Terkait Pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	Lap	80	38.636.250	20	12.390.000	45	35.790.000	56	93
		Penyelengaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil	Dok	18	15.297.760	6	4.947.630	12	8.387.030	67	55
		Sosilisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Lap	3	44.210.688	1	15.937.000	2	53.533.000	67	121
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah ASN yang diberikan Bimbingan Teknis		100	0	0	0	100	85.490.180	100	#DIV/0!
		Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Lap			0	0	0	85.490.180	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemenuhan pemanfaatan data kependudukan untuk stake holder		100	3.102.277.186	93	989.851.125	193	1.415.413.200	193	46
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang akurat dan memadai		100	2.908.724.348	87	933.393.875	187	1.330.438.750	187	46
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Dok	3	2.737.574.446	1	878.603.865	2	1.231.694.890	67	45
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		36	146.494.565	12	46.987.460	20	79.241.310	56	54
		Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil Inventarisasi data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Lap	6	24.655.337	2	7.802.550	4	19.502.550	67	79
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terbentuknya sistem koneksi NIK		100	145.244.482	100	46.735.750	200	75.252.950	200	52
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengolahaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengolahaan Informasi Administrasi Kependudukan	Lap	36	31.772.103	12	10.238.920	24	18.588.920	67	59
		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	Lap	102	90.101.219	34	28.960.480	84	49.127.680	82	55
		Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah dokumen Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Lap	6	23.371.160	2	7.536.350	4	7.536.350	67	32
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			100	48.308.356	93	9.721.500	193	9.721.500	193	20

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuidukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	lap	150	32.853.918	50	9.593.500	100	9.593.500	67	29
		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan data Kependudukan	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependuduksn dan pendaygunaan data kependudukan	Lap	12	15.454.438	0	128.000	4	128.000	33	1
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	tersedianya data informasi kependudukan yang valid dan akurat		100	64.923.891	100	20.958.050	200	26.854.750	200	41
		Penyusunan Profil Kependudukan	tersusunnya buku laporan dan profil kependudukan		100	64.923.891	100	20.958.050	200	26.854.750	200	41
	Lembaga dan Masyrakat	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	jumlah data kependudukan kabupaten/Kota	Data	6	13.444.364	2	4.309.420	4	4.309.420	67	32
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	6	51.479.527	1	16.648.630	3	22.545.330	50	44
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik											
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
	Mengentasnya Status desa sangat tertinggal dan tertinggal		Penurunan Jumlah Desa Sangat Tertinggal	0		2	-	2	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Penurunan Jumlah Desa Tertinggal	15		45						
			Penambahan Jumlah Desa Berkembang	94		79						
			Penambahan Jumlah Desa Maju	35		21						
			Penambahan Jumlah Desa Mandiri	3		0						
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana		Indeks Sarana Prasarana	0,435		0,429						
		Total Realisasi Program			336		312		312		92,86	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			100	461.800.004	94,91	2.105.832.253	195	2.662.704.881	194,91	576,59
2		PROGRAM PENATAAN DESA	PERSENTASE CAPAIAN PENATAAN DESA		100		100	49.422.300	200	99.422.160	200,00	#DIV/0!
		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Capaian Penyelenggaraan Penataan Desa		100		100	49.422.300	200	99.422.160	200,00	#DIV/0!
		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	10	390.225.447	10	49.422.300	10	99.422.160	100,00	25,48
3		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE CAPAIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA YANG DILAKSANAKAN		100		100	147.252.515	200	515.300.495	200,00	#DIV/0!
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase capaian pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100		100	147.252.515	200	515.300.495	200,00	#DIV/0!
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang di fasilitasi	Dokumen	3.807	99.999.940	181	39.919.940	181	79.919.880	4,75	79,92
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang disusun	Dokumen	4	369.999.780	2	165.157.740	5	363.207.040	125,00	98,16
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang difasilitasi	Dokumen	181	264.999.720	181	49.835.470	328	99.834.910	181,22	37,67
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa yang difasilitasi	Dokumen	181	434.999.680	181	77.799.375	328	157.798.675	181,22	36,28
4		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE CAPAIAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG DILAKSANAKAN		100		100,00	46.944.552	200	185.769.340	200,00	#DIV/0!

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan		100		100	46.944.552	200	185.769.340	200,00	#DIV/0!
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Desa yang difasilitasi	Laporan	90	242.952.766	30	49.995.700	30	99.995.520	33,33	41,16
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi	Dokumen	23	300.000.000	23	58.834.583	46	147.659.551	200,00	49,22
	DINAS PERHUBUNGAN											
	Meningkatnya Profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN									
	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik		Indeks Peningkatan Sarana dan Prasarana									
		DINAS PERHUBUNGAN					77,64	6.680.903.379,00	177,64	14.766.454.085	#DIV/0!	#DIV/0!
	Meningkatnya kualitas infrastruktur		Indeks Kualitas Urusan Perhubungan	%	90							
	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas		Cakupan Layanan Transportasi	%	79							
			Persentase Angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan	%	92							
			Cakupan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardril dan peneraangan jalan umum)	%	68							
			Standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten	%	100							
			Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalulintas	%	10							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jumlah Penyelenggaran lalulintas angkutan jalan yang dilaksanakan	%	#DIV/0!	4.547.354.531	68	1.698.748.300,00	167,59	4.966.956.311	#DIV/0!	109,23
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		#DIV/0!	-	-	-	100,00	503.777.780	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabuoaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		-	-	-	-	1,00	503.777.780	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan jalan yang disedikan	%	100	35.176.016	100	1.238.976.268,00	200,00	3.590.035.083	200	10.205,92
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Paket	1	3.298.000	10	13.572.500,00	20,00	1.088.600.120	2.000	33.007,89
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	5	31.878.016	125	1.225.403.768,00	250,00	2.501.434.963	5.000	7.846,90
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C yang dikelolah	Unit	100	304.000	100	66.178.512,00	200,00	135.315.382	200	44.511,64
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	304.000	12	66.178.512,00	24,00	135.315.382	1.200	44.511,64
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penyeleggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir	%	100	43.439.000	100	252.094.600,00	200,00	402.699.496	200	927,05

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		3	43.439.000	12	252.094.600,00	24,00	402.699.496	800	927,05
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Jumlah kendaraan yang di uji	%	100	15.805.000	50,18	86.481.920,00	150,18	204.757.070	150	1.295,52
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dok	-	-	1.250	25.000.000,00	3.750,00	75.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	1	15.805.000	9	61.481.920,00	18,00	129.757.070	1.800	820,99
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	100	46.000	41	13.002.000,00	140,54	46.396.310	141	100.861,54
		Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Lap	1	46.000	-	-	12,00	20.765.740	1.200	45.142,91
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Lap	-	-	15	13.002.000,00	40,00	25.630.570	#DIV/0!	#DIV/0!
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Berkurangnya Pelanggaran lalulintas	%	100	1.445.000	50	7.075.000,00	150,00	18.797.990	150	1.300,90
		Pelaksanaan Inpeksi, Audit dan pemantuan sistem manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		1	1.445.000	3	7.075.000,00	9,00	18.797.990	900	1.300,90
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100	7.350.000	100	34.940.000,00	200,00	65.177.200	200	886,76
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Lap	5	7.350.000	6	34.940.000,00	12,00	65.177.200	240	886,76
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN PELAYARAN		100	314.723.542	100	305.751.204,00	200,00	711.238.361	200	225,99
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota			100	41.265.000	100	126.936.854,00	200,00	258.965.469	200	627,57
		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota		2	41.265.000	6	126.936.854,00	12,00	258.965.469	600	627,57
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembanguan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		100	273.458.542	100	178.814.350,00	200,00	452.272.892	200	165,39
		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	jumlah Pelabuhan yang di Bangun		2	273.458.542	2	178.814.350,00	4,00	452.272.892	200	165,39
			Indeks Kualitas kebijakan Publik		2.28							

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik (SPBE)		2							
			Kebijakan internal SPBE		16							
			Tata Kelola SPBE		8							
			Manajemen SPBE		-							
			Cakupan ketersedian Informasi dan Komunikasi Publik		100							
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE		100							
			Presentase OPD yang mengunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah		100							
			Presentase OPD yang mengunakan data statistik dalam evaluasi perencanaan pembangunan daerah		100							
			Presentase pengamanan data dan kontent informasi Pemerintah Daerah yang tersedia		100							
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			100	4.763.075.328	99,42	3.796.442.803	#DIV/0!	6.620.134.173	#DIV/0!	138,99
1	Meningkatnya Efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan											
	Meningkatnya pelayanan data dan informasi pemerintahan berbasis elektronik		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik (SPBE)		2							
			Kebijakan internal SPBE		16							
			Tata Kelola SPBE		8							
			Manajemen SPBE		-							
			Cakupan ketersedian Informasi dan Komunikasi Publik		100							
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan ketersedian Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase	100	766.350.000	93,94	259.274.861,00	193,94	332.361.361	193,94	43,37
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase	100	766.350.000	93,94	259.274.861	193,94	332.361.361	193,94	43,37
		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	1	120.000.000	2,00	84.750.539	3	89.300.239	300,00	74,42
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	1	35.000.000	-	-	0	-	-	-
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen			-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	4	460.000.000	5,00	17.564.080	6	48.318.480	150,00	10,50
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	60	31.350.000	2,00	49.160.440	3	71.943.040	5,00	229,48
		Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	1	60.000.000	1,00	15.000.000	1	15.000.000	100,00	25,00
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	25	30.000.000	11,00	33.962.912	11	33.962.912	44,00	113,21
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	1	30.000.000	1,00	27.688.510	1	42.688.310	100,00	142,29
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit			9,00	31.148.380	9	31.148.380	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE		100							
		Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE		100	133.196.640	100	138.005.399	#DIV/0!	170.780.399	#DIV/0!	791,46
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan e-government (SPBE) Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang tersedia	OPD	100	133.196.640	100	138.005.399	#DIV/0!	170.780.399	#DIV/0!	791,46
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	118.196.640	1,00	43.404.220	1	59.629.220	50,00	50,45
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah :	Layanan	3	15.000.000	3,00	94.601.179	3	111.151.179	100,00	741,01
			1. Pemasangan Wifi Internet (Hot Spot)		10							
			2. Pembangunan Tower		22							
			3. Pembangunan VSAT (Visat Satelit Internet)		15							
		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik										
			Presentase OPD yang mengunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah		100							
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase OPD yang mengunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100	353.000.000	100	142.493.730	168	219.570.330	168	221,25
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral di setiap OPD	Persentase	100	353.000.000	100	142.493.730	168	219.570.330	168	221,25
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorai	Dokumen	1	120.000.000	1	40.011.640	2	74.561.440	200	62,13
		Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	51	73.000.000	80,10	30.036.640	80,1	30.036.640	157,06	41,15
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	50.000.000	1,35	12.326.480	1,35	12.326.480	135,00	24,65
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	67	110.000.000	61,00	60.118.970	128	102.645.770	191,04	93,31
		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian						-				#DIV/0!
			Presentase pengamanan data dan kontent informasi Pemerintah Daerah yang tersedia		100							
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Presentase pengamanan data dan kontent informasi Pemerintah Daerah yang tersedia	Persentase	100	125.000.000	100	122.231.440	101	299.162.880	101,00	#DIV/0!
		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penggunaan Persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Persentase	100	125.000.000	100	122.231.440	101	149.581.440	101	#DIV/0!
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan tentang Informasi berklasifikasi Pemerintah Daerah yang tersedia	Dokumen	1		-	-	1	2.350.000	100,00	#DIV/0!
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan			1,00	55.250.640	1	55.250.640	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	125.000.000	1,00	33.832.570	1	58.832.570	100,00	47,07
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	OPD	0		20,00	33.148.230	20	33.148.230	#DIV/0!	#DIV/0!
	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH											
			Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		2							
			Jumlah IKM Baru		130							
			Jumlah IKM Industri Pengolahan		2							
	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					99,00	#REF!	99,00	#REF!	#DIV/0!	#REF!
	Meningkatnya Profesionalitas ASN											
	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat		Persentase Koperasi yang sehat		39.40							
	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha		Persentase Koperasi yang memiliki Sertifikat NIK		46							
			Persentase Jumlah Koperasi Sehat		14							
			Persentase UMKM yang terkurasi		10							
			Jumlah UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)		2							
			Jumlah UMKM yang diberdayakan		2							
23		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatkan Pelayaan Ijin Usaha Simpan Pinjam		100	35.020.133	100,00	22.514.500	100,00	29.839.500,00	100,00	85,21
24		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelayaan Ijin Usaha Simpan Pinjam		100	26.265.100	100,00	16.684.500	100,00	19.384.500,00	100,00	73,80
25		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten atau Kota		7	26.265.100	45,00	16.684.500	60,95	19.384.500,00	870,71	73,80
26		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam		100	8.755.033	100,00	5.830.000	100,00	10.455.000,00	100,00	119,42
27		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wiayah Keanggotaan dalam Daerah Kabuoaten/Kota		55	8.755.033	10,00	5.830.000	67,32	10.455.000,00	122,40	119,42
31		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya SDM Perkoperasian		100	45.000.000	100,00	236.106.920	200,00	236.106.920,00	200,00	524,68
32		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabuoaten/kota	Meningkatnya SDM Perkoperasian		100	45.000.000	100,00	236.106.920	200,00	236.106.920,00	200,00	524,68
33		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaaan,Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah SFM yang memahami pengetahuan perkoperasian		25	45.000.000	40,00	236.106.920	40,00	236.106.920,00	160,00	524,68
34		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya SDM Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		100	110.000.000	100,00	#REF!	100,00	#REF!	100,00	#REF!

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
35		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya SDM Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		100	110.000.000	100,00	384.860.370	200,00	409.660.370,00	200,00	372,42
37		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro		30	110.000.000	20,00	384.860.370	91,26	409.660.370,00	304,20	372,42
38		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasan, SDM serta Desain dan Teknologi		100	2.153.781.145	100,00	315.104.975	100,00	315.104.975,00	100,00	14,63
39		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasan, SDM serta Desain dan Teknologi		100	2.153.781.145	100,00	315.104.975	100,00	315.104.975,00	100,00	14,63
40		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumberdaya Manusia, serta desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasan, SDM serta Desain dan Teknologi		36	2.153.781.145	60,00	315.104.975	60,00	315.104.975,00	166,67	14,63
	Meningkatnya Aktivitas Perdagangan		Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan		10							
			Jumlah Barang Masuk dan Keluar		2.897.070							
41		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pembangunan Fasilitas Pasar		100	1.820.000.000	100,00	833.330.447	200,00	1.537.998.147,00	200,00	84,51
42		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan Fasilitas Pasar		100	1.820.000.000	100,00	833.330.447	200,00	1.537.998.147,00	200,00	84,51
43		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumah Sarana Distribusi Perdagangan		2	120.000.000	12,00	732.952.730	239,51	1.437.620.430,00	11.975,50	1.198,02
44		Fasilitasi Pengelollaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumah Sarana Distribusi Perdagangan		12	1.700.000.000	12,00	100.377.717	12,00	100.377.717,00	100,00	5,90
46		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tersedianya barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya		100	180.000.000	100,00	147.649.300	200,00	374.379.900,00	200,00	207,99
47		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya		100	180.000.000	100,00	147.649.300	200,00	374.379.900,00	200,00	207,99
48		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumblah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		4	100.000.000	12,00	57.848.000	84,25	165.066.900,00	2.106,25	165,07
49		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronidasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		8	40.000.000	12,00	28.571.300	128,93	99.741.200,00	1.611,63	249,35
50		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		1	40.000.000	12,00	61.230.000	113,76	109.571.800,00	11.376,00	273,93
53		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		100	265.000.000	100,00	80.550.000	200,00	844.556.100,00	200,00	318,70
54		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		100	265.000.000	100,00	62.870.000	200,00	826.876.100,00	200,00	312,03

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
55		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur,Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan di Tera ulang		1	155.000.000	1,00	10.000.000	77,30	694.020.300,00	7.730,00	447,76
56		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha dibidang Metrologi Legal yang dibina		100	110.000.000	1.016,00	52.870.000	1.124,60	132.855.800,00	1.124,60	120,78
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri		Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		2							
	Meningkatnya Prodiktivitas Industri		Jumlah IKM Baru		130							
			Jumlah IKM Industri Pengolahan		2							
57		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Berkembangnya PemanfaatanSumberdaya Industri Daerah dengan mendukung sektor Industri tahun 2021		100	-	100,00	156.790.650	200,00	1.449.817.450,00	200,00	#DIV/0!
58		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Berkembangnya Pemanfaatan Sumberdaya Industri Daerah demi Mendukung Sektor Industri Tahun 2021		100		100,00	156.790.650	200,00	1.449.817.450,00	200,00	#DIV/0!
59		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Peralatan Produksi Moke yang terbiayai, Tersedianya Bahan Tenun Ikat Bagi Masyarakat, Tersedianya Bantuan Bagi Masyarakat, Tersedianya Galery Tenun Ikat yang terbangun, Tersedianya Mesin Gurinda bagi Masyarakat, Tersedianya Mesin Jahit Bagi Masyarakat, tersedianya Modal Usaha UBSP		100	-	1,00	156.790.650	121,00	1.449.817.450,00	121,00	#DIV/0!
60		PROGRAM PENGELOLAAN SISTIM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya Legalitas IKM demi mendukung Peningkatan PDRB sektor Industri		100	-	100,00	10.054.200	100,00	10.054.200,00	100,00	#DIV/0!
61		PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI,IPUI,IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Legalitas IKM demi mendukung Peningkatan PDRB sektor Industri		100		100,00	10.054.200	100,00	10.054.200,00	100,00	#DIV/0!
62		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan dan Perusahaan Industri dan Perusahaaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuanan Persyaratan Teknis, Perijinan berusaha Sektor Industri dan atau dalam rangka perluasan usaha untuk Bidang usaha dengan risiko usaha menengah dan Tinggi melalu SIINAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS		35	-	1,00	10.054.200	1,00	10.054.200,00	2,86	#DIV/0!
			Jumlah investor berskala nasional PMA		12							
			Jumlah investor berskala nasional PMDN		145							
			Jumlah inovasi		1							
			Promosi Investasi		2							
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					76,77	3.154.112.599	77	3.154.112.599	#DIV/0!	#DIV/0!
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik											
	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja											
		Kegiatan Penataan Organisasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		100	50.000.000	100	32.070.000	200	52.070.000	200	104
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Keg	14	50.000.000	14	32.070.000	28	77.070.000	200	154
	Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi		Jumlah investor berskala nasional PMA		12							

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
			Jumlah investor berskala nasional PMDN		145							
			Jumlah inovasi		1							
			Promosi Investasi		2							
2		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Realisasi Investasi		100	-	0	-	100	-	100	#DIV/0!
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor yang di fasilitasi / insentif di bidang Penanaman Modal	Invest	5	-	0	-	4	-	80	#DIV/0!
3		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal		100	158.024.506	100	47.999.150	200	78.052.350	200	49
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	Kali	100	158.024.506	100	27.258.680	200	57.311.880	200	36
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota	Kali	1	158.024.506	1	27.258.680	2	57.311.880	200	36
4	Meningkatnya sistim informasi perijinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	JUMLAH JENIS IZIN YANG DITERBITKAN		100	310.000.000	76	58.903.750	176	365.903.750	176	118
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ijin yang diterbitkan	Pelaku Usaha	100	310.000.000	76	25.555.200	176	332.555.200	176	107
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	2.200	310.000.000	4	14.830.000	2154	321.830.000	98	104
		Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Keg Usaha	35	40.000.000	75	44.073.750	105	82.073.750	300	205
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM		100	112.749.898	100	435.110.800	200	478.678.800	200	425
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahan	100	112.749.898	100	595.542.130	200	639.110.130	200	567
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Cakupan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Perusahan	35	112.749.898	60	408.986.730	85	452.554.730	243	401
		Pengawasan Penanaman Modal	Cakupan Pengawasan Penanaman Modal	Perusahan	40	36.000.000	60	186.555.400	95	221.555.400	238	615
6		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Ijin Yang Sesuai Standar		100	133.250.000	100	-	100	30.967.100	100	23
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanaman Modal dan Perijinan Serta Potensi Investasi Daerah	Dok	100	133.250.000	3	0	3	30.967.100	3	23
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN											
	Meningkatnya Literasi Masyarakat		Rasio Pemerataan Layanan Perpustakaan		0,0015		0,6854		0,6867		45.385	
			Rasio Ketercukupan Koleksi		0,9304		0,2260		0,7642		82,13	
			Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan		0,0019		0,2087		0,3216		17.304	
			Rasio Tingkat Kunjungan Pemustaka per Hari		0,0462		0,1033		0,1246		269,56	
			Rasio Perpustakaan Ber NSP		0,1773		1,0000		1,0643		600	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
			Rasio Partisipasi Masyarakat dalam promosi perpustakaan		0,0002		0,1826		0,1829		112.093	
			Rasio Jumlah Anggota Perpustakaan		0,0177		1,0000		1,0217		5.781	
	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat		Nilai Tingkat Kegemenaran Membaca Masyarakat		63,38		64,25		117,03		184,65	
	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Kearsipan		Tingkat ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional		100			16,95		77		76,98
			Prosentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai kaidah kearsipan		83			16,66666667		49		58,64
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Indeks Profesionalisme ASN		83			Belum dilakukan Penilaian		Belum dilakukan Penilaian		
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik		Indeks Sarana Prasarana		1			0,23		0		73,33
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					82,42	1.025.867.454,50	182,42	#REF!	#DIV/0!	#REF!
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Penyelenggaraan Perpustakaan		100	1.426.515.385	100,00	1.524.919.980,00	200,00	3.246.754.251,34	200,00	227,60
		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentae Pelaksanaan Layanan dan Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten		100	280.000.000	100,00	1.524.919.980,00	200,00	2.574.149.370,00	200,00	919,34
		Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpus	3	45.000.000	1,00	767.516.041,00	2,00	1.542.513.731,00	66,67	3.427,81
		Pengkingkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang	45	75.000.000	15,00	35.020.930,00	30,00	98.546.860,00	66,67	131,40
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eks	75.834	30.000.000	2417,00	194.046.920,00	4.834,00	393.285.700,00	6,37	1.310,95
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dok	6	130.000.000	1,00	49.934.310,00	2,00	99.928.620,00	33,33	76,87
		Kegiatan Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca		100	1.146.515.385	100,00	-	200,00	672.604.881,34	200,00	58,67
		Sosialiasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran	Lokus	195	635.000.000	58,00	106.195.257,00	116,00	248.285.107,00	59,49	39,10
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabuaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpus	1	511.515.385	2,00	511.492.495,00	4,00	1.042.007.526,34	400,00	203,71
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis		100	387.635.000	100,00	48.038.430,00	200,00	169.665.430,00	200,00	43,77
		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Arsip Dinamis Kabupaten/Kota	Persentae Pelaksanaan Layanan dan Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten		100	232.000.000	100,00	59.938.430,00	200,00	120.926.780,00	200,00	52,12
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	3.000	102.500.000	1000,00	24.838.930,00	2.000,00	49.827.780,00	66,67	48,61
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	150	69.500.000	50,00	19.999.650,00	100,00	39.999.300,00	66,67	57,55

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip	Lap	33	60.000.000	11,00	15.099.850,00	22,00	31.099.700,00	66,67	51,83
		KegiatanPengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Statis		100	38.000.000	100,00	-	200,00	8.999.330,00	200,00	23,68
		Akuisisi ,Pengolahan,Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arisp	12	38.000.000	4,00	8.999.330,00	8,00	17.998.660,00	66,67	47,36
		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Infoemasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Infoemasi Kearsipan		100	117.635.000	100,00	-	200,00	51.639.320,00	200,00	43,90
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Lap	9	117.635.000	3,00	41.172.520,00	6,00	92.811.840,00	66,67	78,90
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		50	46.000.000	50,00	-	150,00	18.003.370,00	300,00	39,14
		Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah		100	46.000.000	100,00	-	200,00	18.003.370,00	200,00	39,14
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)	Arisp	300	46.000.000	100,00	16.473.370,00	200,00	34.476.740,00	66,67	74,95
		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan	Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan		-	-	-	-	100,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar			0,00	-	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	DINAS PERIKANAN		Kontribusi PDRB dari Sektor Perikanan		12.64							
			Produksi perikanan (ton/tahun)		27							
			Nilai produksi perikanan (Rp /Tahun)		418,014,687,964							
			Pendapatan nelayan (Rp/Tahun)		20,551,362							
			Tingkat Konsumsi ikan (Kg/ kapita /tahun)		80.49							
		DINAS PERIKANAN			100	20.032.440.992	103,48	16.635.961.435	203,48137	46.445.232.247	203,48	232
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan pengelolaan perikanan tangkap	Persentase	100	116.556.809	100,00	10.584.534.694	200	13.708.589.498	200,00	11.761
		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang mengikuti pembinaan dan pelatihan pengembangan kapasitas nelayan	Persentase	100	116.556.809	100,00	10.584.534.694	200	13.708.589.498	200,00	11.761
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya	Orang	120	116.556.809	150	10.584.534.694	280	13.708.589.498	233,33	11.761
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	Persentase	100	200.908.500	100,00	306.678.300	200	457.254.300	200,00	228
		Kegiatan Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	Persentase	100	200.908.500	100,00	306.678.300	200	457.254.300	200,00	228

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	Kelompok	9	200.908.500	3	306.678.300	4	457.254.300	44,44	228
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase	100	4.624.288.381	104,17	1.583.947.029,00	204,17	10.070.209.280	204,17	217,77
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis bahan baku industri untuk mendukung pengoperasian pabrik es	Persentase	100	4.624.288.381	104,17	1.583.947.029,00	204,17	10.070.209.280	204,17	217,77
		Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	18	4.624.288.381	12,50	1.583.947.029,00	35,50	10.070.209.280	197,22	217,77
	DINAS PERTANIAN		Kontribusi sektor pertanian dalam PDR		0							
			Produksi tanaman pangan		179,766.70							
			Produksi tanaman Holtikultura		158,521.30							
			Produksi tanaman perkebunan		29,014.27							
			Produksi ternak besar		29							
			Produksi ternak kecil		164							
			Produksi ternak unggas		808							
		DINAS PERTANIAN	.....		100	30.932.949.272	97	19.229.037.266	197	132.821.118.518	197	429
	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan		Kontribusi sektor pertanian dalam PDR		0							
	Meningkatnya produktivitas tanaman hortikultura		Produksi tanaman pangan		179,766.70							
	Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan		Produksi tanaman perkebunan		29,014.27							
			Produksi ternak besar		29							
			Produksi ternak kecil		164							
			Produksi ternak unggas		808							
	DINAS PERTANIAN											
2		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase	100	3.775.000.000	97	1.148.403.986	197	19.398.403.986	197	514
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase	100	1.550.000.000	100	844.398.936	200	10.594.398.936	200	684
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dokumen			7	366.520.000	7	366.520.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dokumen	2	1.550.000.000	3	477.878.936	13	10.227.878.936	650	660
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase	100	2.225.000.000	93	304.005.050	193	8.804.005.050	193	396
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	6	1.725.000.000	1	178.405.630	11	4.428.405.630	180	257
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Dokumen	6	500.000.000	2	125.599.420	12	4.375.599.420	200	875
	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan		Produksi tanaman Holtikultura		158,521.30							
3		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase	100	1.444.240.209	100	130.972.720	#REF!	130.972.720	102	9
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase	100	1.444.240.209	2	130.972.720	102	130.972.720	102	9
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	6	1.444.240.209	2,00	130.972.720	2,00	130.972.720	33	9
	Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan		Produksi tanaman perkebunan		29,014.27							
	Meningkatnya produktivitas peternakan		Produksi ternak besar		29							
			Produksi ternak kecil		164							
			Produksi ternak unggas		808							

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
3		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase	100	2.775.000.000	100	469.206.508	200	2.219.206.508	200	80
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persetase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100	2.775.000.000	100	469.206.508	200	2.219.206.508	200	80
		Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Laporan	63	2.100.000.000	21	298.234.658	21	298.234.658	33	14
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	63	675.000.000	21	170.971.850	126	1.920.971.850	200	285
4	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Petani		100	2.850.000.000	83	570.882.320	183	6.820.882.320	183	239
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian		100	2.850.000.000	83	570.882.320	183	6.820.882.320	183	239
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		7.200	1.350.000.000	2.000	183.917.000	2.021	1.433.917.000	28	106
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		15	1.500.000.000	3	386.965.320	28	5.386.965.320	187	359
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN											
			Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB		0.70							
			Jumlah Kunjungan Wisata		39							
			Rata-rata lama tinggal wisatawan		1.98							
			Jumlah belanja wisatawan		78							
			Jumlah pelestarian dan pengembangan budaya		4							
			Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya		1							
			Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi		2							
			Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu		67							
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				3.752.271.309	93,65	5.567.569.757,87	93,65	12.377.252.109	#DIV/0!	329,86
1		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	TERSELENGGARANYA PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		100	753.584.510,00	83,33	1.453.007.550,00	183,33	2.244.805.650	183,33333	297,8837304
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100	331.480.000,00	100,00	152.380.350,00	200,00	484.833.950	200,00	146,26
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Obyek	1	225.000.000,00	1,00	124.219.150,00	1,00	124.219.150	100	55,20851111
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Orang	20	106.480.000,00	30,00	28.161.200,00	32,00	360.614.800	160	338,6690458
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100	422.104.510,00	100,00	89.300.000,00	200,00	548.644.500	200,00	129,98
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Orang	10	422.104.510,00	11,00	462.115.000,00	14,00	921.459.500	140	218,3012686
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Laporan	37		1,00	399.452.110,00	1,00	399.452.110	2,7027027	#DIV/0!

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota			100		50,00	1.211.327.200,00	50,00	1.211.327.200	50,00	#DIV/0!
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Obyek	-		2,00	39.994.940,00	2,00	39.994.940	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	TERSELENGGARANYA PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		100		100,00	195.650.000,00	100,00	195.650.000	100	#DIV/0!
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			100	365.955.806,00	100,00	195.650.000,00	200,00	195.650.000	200,00	53,46
		Pengembangan Cagar Budaya	Terselenggaranya Pengembangan Cagar Budaya	Obyeek	5	126.798.573,00	2,00	94.850.000,00	2,00	94.850.000	40	74,80368095
		Pemanfaatan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Obyek	25	239.157.233,00	15,00	100.800.000,00	15,00	100.800.000	60	42,14800395
3		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	TERSELENGGARANYA PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		100	1.712.441.688,00	100,00	166.681.340,00	200,00	457.611.340	200	26,72274
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			100	1.650.567.211,00	100,00	7.000.270,00	200,00	7.000.270	200,00	0,42
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kab/Kota	Terlaksananya Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kab/Kota	Unit	1	1.650.567.211	0,00	0,00	0,00	-	0	0
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Dokumen			1,00	33.420.270,00	1,00	33.420.270	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			100	61.874.477,00	100,00	149.681.070,00	200,00	440.611.070	200,00	712,10
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Dokumen	9	61.874.477	0,00	0,00	1,00	290.930.000	11,111111	470,1938733
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Laporan			1,00	553.933.192,00	1,00	553.933.192	#DIV/0!	#DIV/0!
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen			1,00	21.292.080,00	1,00	21.292.080	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			100	0,00	100,00	15.000.000,00	200,00	15.000.000	200,00	#DIV/0!
		Pembinaan dan Pengawasan Untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Resiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Resiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota	Laporan			215,00	15.000.000,00	215,00	15.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	TERSELENGGARANYA PEMASARAN PARIWISATA		100	294.189.200,00	100,00	75.578.650,00	200,00	107.217.587	200	36,44511321
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			100	294.189.200,00	100,00	75.578.650,00	200,00	107.217.587	200,00	36,45
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	11.760.100	4,00	85.226.040,00	6,00	115.225.840	600	979,803233
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Mitra	1	154.794.750	2,00	16.433.960,00	2,00	16.433.960	200	10,61661329

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	4	127.634.350	7,00	16.236.450,00	107,00	17.875.587	2675	14,00531048
5		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	TERSELENGGARANYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		100	395.491.536,00	100,00	423.334.750,00	200,00	3.164.668.310	200	800,1861031
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			100	321.266.436,00	100,00	419.484.750,00	200,00	1.175.670.710	200,00	365,95
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	Orang			2,00	127.621.880,00	2,00	127.621.880	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Orang	30	280.000.000	85,00	149.463.010,00	145,00	769.362.090	483,33333	274,772175
		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata		10	41.266.436	430,00	142.399.860,00	530,00	278.686.740	5300	675,3351319
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			100	74.225.100,00	100,00	3.850.000,00	200,00	1.988.997.600	200,00	2.679,68
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	10	74.225.100	80,00	994.778.660,00	180,00	2.979.926.260	1800	4014,715049
	SEKRETARIAT DAERAH		Indeks Reformasi Birokrasi		CC							
			SAKIP		BB							
	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH					72,08	15.079.653.921	72	15.079.653.921	#DIV/0!	#DIV/0!
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	-	37,93	43.342.000	138	43.342.000	37,93	#DIV/0!
		Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian					55,05	7.090.000	55	7.090.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20,80	36.252.000	21	36.252.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100	-	83,33	199.850.000	183	199.850.000	83,33	#DIV/0!
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	2		2,00	15.600.000	2	15.600.000	100,00	#DIV/0!
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2		2,00	180.000.000	2	180.000.000	100,00	#DIV/0!
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2		1,00	4.250.000	1	4.250.000	50,00	#DIV/0!
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksana nya Kepro-tokolan dan Komunikasi KDH dan WKDH		100	95.850.200	79,17	25.648.500	179	25.648.500	79,17	26,76
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Ke-protokolan	Dokumen	12	57.850.200	10,00	16.000.000	10	16.000.000	83,33	27,66

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumen	12	38.000.000	9,00	9.648.500	9	9.648.500	75,00	25,39
2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		100		98,98	2.891.325.330	199	2.891.325.330	98,98	#DIV/0!
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100	9.426.500.000	100,00	2.369.868.280	200	2.369.868.280	100,00	25,14
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen			8,00	2.023.503.280	8	2.023.503.280	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Trans migrasi, Kesehatan, Pember-dayaan Perempuan dan Perlin dungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pember dayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen			3,00	40.465.000	3	40.465.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masya-rakat yang Meliputi Urusan Ke-pemudaan dan Olah raga, Pariwi sata, Pendi dikan, Kebu dayaan, Per pustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	58	9.426.500.000	58,00	305.900.000	58	305.900.000	100,00	3,25
		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pena-taan Admi-nistrasi Pe-merintahan		100	97,877,500	100,00	8.870.000	200	8.870.000	100,00	#VALUE!
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Penge-lolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	21	97,877,500	21,00	8.870.000	21	8.870.000	100,00	#VALUE!
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase pelaksana an Fasilitasi dan Koordi nasi Hukum		100	174.054.900	95,92	505.383.050	196	505.383.050	95,92	290,36
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersusun	Produk			72,00	201.535.480	72	201.535.480	#DIV/0!	#DIV/0!
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapat kan fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	14	58.843.900	10,00	251.098.360	10	251.098.360	71,43	426,72
		Pendokumentasian Produk hukum dan pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumen tasi	Dokumen	12	115.211.000	12,00	52.749.210	12	52.749.210	100,00	45,78
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama Daerah		100	53.150.000	100,00	7.204.000	200	7.204.000	100,00	13,55
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	8	53.150.000	8,00	7.204.000	8	7.204.000	100,00	13,55
3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksana an Program Perekonomian dan Pembangunan				34,45	404.146.660	34	404.146.660	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		100	153.200.000	100,00	114.604.160	200	114.604.160	100,00	74,81
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	4	88.200.000	4,00	79.607.320	4	79.607.320	100,00	90,26

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dokumen	4	65.000.000	4,00	34.996.840	4	34.996.840	100,00	53,84
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		100	328.185.000	59,21	89.378.500	159	89.378.500	59,21	27,23
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	18	203.750.000	18,00	49.620.000	18	49.620.000	100,00	24,35
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	6	124.435.000	6,00	8.070.500	6	8.070.500	100,00	6,49
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen			49,42	31.688.000	49	31.688.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaaan Barang dan Jasa		100	283.450.000	36,84	165.274.000	137	165.274.000	36,84	58,31
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	3	73.600.000	3,00	151.354.000	3	151.354.000	100,00	205,64
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	4	114.850.000	-	-	-	-	-	-
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	12	95.000.000	4,00	13.920.000	4	13.920.000	33,33	14,65
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		100	51.000.000	87,50	34.890.000	188	34.890.000	87,50	68,41
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	4	17.000.000	3,00	4.670.000	3	4.670.000	75,00	27,47
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mine ral, Lingku ngan Hidup, Kominfo, Perhubung an, Statistik, Persandian	Dokumen	2	17.000.000	2,00	17.220.000	2	17.220.000	100,00	101,29
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koor-dinasi, Sin kronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Peker jaan Umum dan Penata an Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Per mukiman, Pertanahan	Dokumen	2	17.000.000	2,00	13.000.000	2	13.000.000	100,00	76,47
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN										
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksana nya Kepro-tokolan dan Komunikasi KDH dan WKDH		100	95.850.200	79,17	25.648.500	179	25.648.500	79,17	26,76
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Ke-protokolan	Dokumen	12	57.850.200	10,00	16.000.000	10	16.000.000	83,33	27,66

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumen	12	38.000.000	9,00	9.648.500	9	9.648.500	75,00	25,39
		BAGIAN PEMERINTAHAN										
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat									
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan									
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan									
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama Daerah		100	53.150.000	#VALUE!	#REF!	#VALUE!	#REF!	#VALUE!	#REF!
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	8	53.150.000	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan yang Dilaksanakan Dalam Kurun Waktu 1 (satu) Tahun				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		BAGIAN PEREKONOMIAN					-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		BAGIAN HUKUM					-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		BAGIAN ORGANISASI					-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		NON URUSAN					-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penataan Organisasi	-				100,00	265.748.646	100	265.748.646	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen			4,00	183.118.985	4	183.118.985	#DIV/0!	#DIV/0!
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan			2,00	40.355.491	2	40.355.491	#DIV/0!	#DIV/0!
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen			2,00	42.274.170	2	42.274.170	#DIV/0!	#DIV/0!
		BAGIAN UMUM					-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		BAGIAN SUMBER DAYA ALAM					-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					95,51	520.673.570	96	520.673.570	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				100,00	315.677.145	100	315.677.145	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				100,00	315.677.145	100	315.677.145	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12,00	254.691.900	12	254.691.900	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12,00	24.940.000	12	24.940.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				12,00	36.045.245	12	36.045.245	#DIV/0!	#DIV/0!
		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN					88,89	9.511.017.078	89	9.511.017.078	#DIV/0!	#DIV/0!
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH											
	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan		2	%						
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					99,85	32.603.185.667	99,85	32.603.185.667	#DIV/0!	#DIV/0!
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase	100	1.150.000.000	98,61	17.331.592.612	198,61	17.520.996.312	198,61	1523,56
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	orang	35	575.000.000	35,00	16.929.592.612	70,00	16.929.592.612	200,00	2944,28
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	paket	2	240.000.000	1,00	279.500.000	3,00	461.498.700	150,00	192,29
		Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	35	335.000.000	35,00	122.500.000	70,00	129.905.000	200,00	38,78
		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Administrasi DPRD	Persentase	100	1.096.000.000	100,00	3.162.304.745	200,00	6.077.948.939	200,00	554,56
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	dokumen	1		1,00	148.802.740	2,00	148.802.740	200,00	#DIV/0!
		Fasilitasi Fraksi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	laporan	9	90.000.000	9,00	282.719.510	18,00	282.719.510	200,00	314,13
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	laporan	12	250.000.000	140,00	1.794.705.235	152,00	3.870.609.429	1266,67	1548,24
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	paket	1	756.000.000	36,00	1.084.880.000	37,00	1.924.620.000	3700,00	254,58
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase	100	5.615.526.000	100,00	7.312.083.870	200,00	14.919.897.916	200,00	265,69

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pembentukan Pembangunan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Persentase	100	2.352.926.000	100,00	1.625.396.440	200,00	2.477.529.416	200,00	105,30
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	dokumen	1	2.352.926.000	6,00	1.625.396.440	7,00	2.477.529.416	700,00	105,30
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas	Persentase	100	1.000.000.000	100,00	3.157.770.000	200,00	6.627.451.070	200,00	662,75
		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	dokumen	1		1,00	665.170.000	2,00	665.170.000	200,00	#DIV/0!
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	dokumen	1	1.000.000.000	2,00	2.446.400.000	3,00	5.916.081.070	300,00	591,61
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	laporan	1		12,00	46.200.000	13,00	46.200.000	1300,00	#DIV/0!
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan aspirasi Masyarakat	Persentase	100	2.250.000.000	100,00	2.388.020.000	200,00	5.654.070.000	200,00	251,29
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	laporan	1	300.000.000	70,00	288.100.000	71,00	561.050.000	7100,00	187,02
		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	dokumen	1	1.950.000.000	70,00	2.099.920.000	71,00	5.093.020.000	7100,00	261,18
		Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase	100	12.600.000	100,00	140.897.430	200,00	160.847.430	200,00	1276,57
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	laporan	12	12.600.000	140,00	140.897.430	152,00	160.847.430	1266,67	1276,57
			Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		400							
			Jumlah Mutasi dan Promosi ASN		3							
			Jumlah Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		20							
			Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1							
	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			100,00	12.270.726.482	99,34	9.760.605.214	199,34	18.144.954.203	199,33868	147,87
			Indeks Kualitas perencanaan		100							
			Persentase ketersediaan data sesuai Permendagri 86/2017		100							
			Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan dan kesesuaian antar bab: 70%		100		96,85					
			Persentase kegiatan perencanaan yang sesuai dengan tahapan dan waktu (Evaluasi Kebijakan)		100							
			Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan		100							
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase	100	3.266.142.968	100,00	1.981.956.040	200,00	3.356.235.940	200	102,76
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase capaian pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	Persentase	100	1.817.441.052	100,00	1.070.164.500	200,00	2.006.511.460	200	110,40
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	26.522.500	1,00	39.931.600	2,00	61.861.700	200	233,24
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	Berita Acara	1	428.856.519	1,00	177.520.200	2,00	344.930.910	200	80,43
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	105	195.072.033	582,00	94.672.500	687,00	159.954.300	654,29	82,00
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	1.166.990.000	4,00	758.040.200	7,00	1.439.764.550	350	123,37

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	100	440.846.916	100,00	73.061.220	200,00	188.131.220	200	42,67
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	2	361.279.416	2,00	15.741.320	5,00	70.309.520	250	19,46
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	Dokumen	1	79.567.500	1,00	57.319.900	2,00	117.821.700	200	148,08
		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	100	636.540.000	100,00	539.014.520	200,00	861.877.460	200,00	135,40
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	318.270.000	2,00	141.233.320	4,00	306.019.560	200	96,15
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	318.270.000	5,00	397.781.200	10,00	555.857.900	200	174,65
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase	100	371.315.000	100	299.715.800	200,00	299.715.800	200	80,72
		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	1	371.315.000	2,00	299.715.800	3,00	299.715.800	300	80,72
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	100	1.773.726.880	99,27	871.435.983	199,27	1.740.880.909	199,27	98,15
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	838.750.618	97,80	371.507.026	197,80	713.905.022	197,80	85,12
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan yang dihasilkan	Dokumen	3	148.378.429	11,00	78.222.926	19,00	175.529.852	633,33	118,30
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi	PD	3	36.289.251	6,00	7.837.900	14,00	26.289.600	466,67	72,44
		'Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan yang dimonitoring dan evaluasi	Dokumen	3	37.924.417	13,00	12.672.200	19,00	25.337.100	633,33	66,81
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	48.801.400,00	6,00	-	7,00	-	700	0,00
		'Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia yang dihasilkan	Dokumen	6	461.548.683	17,00	263.534.000	79,00	412.369.810	1317	89,34
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi	PD	6	52.904.219	12,00	5.976.000	74,00	41.029.900	1233,3333	77,56
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia yang dimonitoring dan evaluasi	PD	6	52.904.219	24,00	3.264.000	55,00	33.348.760	916,67	63,04
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase	100	467.488.662	100,00	249.737.787	200,00	519.188.017	200,00	111,06

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dihasilkan	Dokumen	7	82.647.823	19,00	32.169.600	33,00	106.358.770	471,43	128,69
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang diasistensi	Laporan	2	71.526.090	14,00	38.384.857	28,00	73.458.517	1400	102,70
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dimonitoring dan evaluasi	Laporan	1	79.642.930	29,00	56.977.400	43,00	143.563.100	4300	180,26
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	52.904.219	14,00	25.121.470	15,00	25.121.470	1500	47,48
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA yang dihasilkan	Dokumen	2	51.791.653	8,00	21.867.060	12,00	37.825.060	600	73,03
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	2	29.325.398	4,00	16.136.700	8,00	26.203.900	400	89,36
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA yang dimonitoring dan evaluasi	Laporan	1	61.458.149	9,00	32.660.000	13,00	80.236.500	1300	130,55
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	2	38.192.400	4,00	26.420.700	5,00	26.420.700	250	69,18
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	467.487.600	100,00	250.191.170	200,00	507.787.870	200	108,62
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	94.860.480	13,00	70.903.000	18,00	159.810.300	360	168,47
		'Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	20	33.438.189	10,00	10.367.190	30,00	29.979.550	150	89,66
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	20	76.192.034	20,00	41.840.000	40,00	81.941.800	200	107,55
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	50.729.161	10,00	27.108.700	11,00	27.108.700	1100	53,44
		'Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dihasilkan	Laporan	34	66.037.842	42,00	15.367.000	178,00	54.215.640	523,53	82,10
		'Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di asistensi	Laporan	34	33.107.082	42,00	15.408.000	178,00	29.999.200	523,53	90,61
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di Monitoring dan Evaluasi	Laporan	34	62.393.651	84,00	30.230.000	220,00	51.386.300	647,06	82,36

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	50.729.161	42,00	38.967.280	76,00	73.346.380	7600	144,58
	Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah		Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	%	80							
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	70							
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	80							
			Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100	100							
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan		100	2.237.299.139	100,00	2.620.020.108	200,00	4.681.398.418	200,00	209,24
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Kelitbangan direkomendasikan	Persentase	100	638.449.620	100,00	844.456.239	200,00	1.786.495.036	200,00	279,82
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	0	-	2,00	463.787.624	2,00	463.787.624	#DIV/0!	#DIV/0!
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	1	169.531.820	2,00	125.386.760	3,00	198.703.803	300	117,21
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	214.301.800	1,00	132.339.836	2,00	927.280.111	200	432,70
		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	1	254.616.000	2,00	122.942.019	3,00	196.723.498	300	77,26
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase	100	300.000.000	100	304.119.360	200,00	446.464.420	200	148,82
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	300.000.000	2,00	304.119.360	3,00	446.464.420	300	148,82
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase dan Implementasi Rencana Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase	100	500.000.000	100	724.451.249	200,00	1.223.792.209	200	244,76
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1	500.000.000	3,00	724.451.249	4,00	1.223.792.209	400	244,76
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	0	-	0,00	-	1,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	Persentase	100	798.849.519	100	746.993.260	200,00	1.224.646.753	200	153,30
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Laporan	1	265.224.735	4,00	600.067.970	5,00	931.931.712	500	351,37
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	1	159.135.000	1,00	142.780.490	2,00	230.247.150	200	144,69
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	339.480.084	1,00	4.144.800	2,00	37.262.191	200	10,98
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	35.009.700	1,00	-	2,00	25.205.700	200	72,00

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur		Indeks kualitas sarana dan prasarana aparatur		0,6							
		BPKAD			100	54.340.484.126	94	48.706.863.090,78	194	99.589.382.235	194,06	183,27
	Meningkatnya Profesionalitas ASN											
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik											
	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah		Penetapan APBD tepat waktu		Tepat Waktu			Tepat Waktu				
			Persentase Belanja Pendidikan (20%)		> 20			> 20				
			Persentase Belanja Kesehatan (10%)		> 10			> 10				
			Persentase Belanja Infrastruktur (25%)		≥25%			≥25%				
			Persentase Penyerapan Anggaran APBD		100			85,10				
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan Keuangan daerah yang transparan dan akuntabel		100	3.621.543.880	98	14.950.524.097,78	198	28.706.257.615	198,03	792,65
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Anggaran Daerah yang dihasilkan	Dok	100	1.844.423.840	94	1.494.900.820,00	194	2.836.447.799	194,09	153,79
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dok	6	99.999.740	2	82.589.830,00	4	175.888.030	66,67	175,89
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Dok	6	99.999.740	2	83.269.930,00	4	139.892.730	66,67	139,89
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang di verifikasi	Dok	150	69.999.180	50	62.332.400,00	100	94.165.400	66,67	134,52
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan SKPD yang di verifikasi	Dok	150	69.999.180	50	24.624.000,00	115	50.189.800	76,67	71,70
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang di verifikasi	Dok	150	79.999.160	50	82.874.000,00	100	166.231.000	66,67	207,79
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan DPA yang di verifikasi	Dok	150	79.999.160	50	952.560,00	100	64.495.560	66,67	80,62
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda APBD dan Perbup penjabaran APBD yang disusun	Dok	6	618.388.040	2	566.995.770,00	4	1.072.394.269	66,67	173,42
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	Dok	6	622.009.210	2	513.764.650,00	4	956.421.830	66,67	153,76
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi tentang pedoman pengelolaan keuangan yang dihasilkan	Dok	6	26.693.280	6	17.647.680,00	8	17.647.680	133,33	66,11
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja yang dilaksanakaan	Keg	36	77.337.150	9	59.850.000,00	25	99.121.500	69,44	128,17
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Perbendaharaan daerah yang dihasilkan		100	543.676.200,00	100	543.959.900,00	200	993.365.493	200,00	182,71
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan Kas Daerah yang disusun	Dokumen	2.850	182.983.600	950	175.982.700,00	1.502	328.507.193	52,70	179,53
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen Anggaran Kas dan SPD yang disusun	Dokumen	28.500	259.957.600	9.500	264.357.000,00	9.644	470.190.900	33,84	180,87
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen laporan Penerimaan dan pengeluaran kas dan Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang disusun	Dok	2.375	100.735.000	900	103.620.200,00	904	194.667.400	38,06	193,25
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Dok	100	996.724.200	100	943.989.760,00	200	1.627.019.516	200,00	163,24

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dok	54	259.094.900	18	274.147.700,00	36	492.638.900	66,67	190,14
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Tahunan dan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	Dok	6	457.454.000	3	433.859.460,00	5	770.725.007	83,33	168,48
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Ranperbup standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang dihasilkan	Dok	3	280.175.300	1	235.982.600,00	2	363.655.609	66,67	129,80
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Urusan Kewengan Pengelolaan Keuangan Daerah		100	13.440.899.684	96	11.967.673.617,78		11.967.673.618		
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terealisasinya Pembayaran cicilan Pokok dan Bunag Punjaman Daerah		12	11.430.328.307	12	10.953.635.417,78		6.799.837.623		
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terealisasinya Dana Darurat Mendesak		12	2.010.571.377	11	1.014.038.200,00		1.014.038.200		
	Meningkatnya kinerja Pengelolaan BMD Perangkat Daerah		Persentase MCP Pengelolaan BMD		100		98,00					
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan Barang Milik daerah yang akuntabel		100	1.233.443.840	100	1.017.623.590,00	200	1.815.298.544	200,00	147,17
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dihasilkan		100	1.233.443.840	100	1.017.623.590,00	200	1.815.298.544	200,00	147,17
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga yang disusun	Dok	6	124.999.900	2	151.902.200,00	4	242.610.500	66,67	194,09
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	Dok	6	114.999.600	2	64.768.200,00	4	153.566.000	66,67	133,54
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun	Dok	9	273.399.100	5	239.296.120,00	10	327.315.120	111,11	119,72
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Inventaris Barang Milik Daerah	Dok	3	-	0	0,00	1	124.049.300	33,33	#DIV/0!
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yg diamankan	Dok	210	321.693.360	70	251.186.800,00	140	426.534.024	66,67	132,59
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengawasan dan pengendalian penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah yang disusun	Dok	606	205.549.620	202	154.896.020,00	487	319.402.450	80,36	155,39
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Dok	15	192.802.260	1	155.574.250,00	2	221.821.150	13,33	115,05
	BADAN PENDAPATAN DAERAH											
	Meningkatnya PAD		Persentase Peningkatan PAD 1,5%	%	2	- 100.515.005.327						
		BADAN PENDAPATAN DAERAH			200	22.232.090.705	92	8.053.017.586	92,12	92		
1	Meningkatnya PAD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah		100	8.711.459.362	100	1.978.708.200	100,00	4.084.491.340	100,00	46,89
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Efektivitas PAD		100	8.711.459.362	100	1.978.708.200	200,00	4.084.491.340	200,00	46,89
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dok	1	1.249.292.650	12	469.366.000	24,00	1.016.726.000	2.400,00	81,38
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dok	4	76.250.000	11	88.133.500	22,00	183.633.000	550,00	240,83
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Lap			4	52.648.220	8,00	121.797.690	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit			6	43.735.000	12,00	88.589.650	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Lap			12	450.713.430	24,00	902.035.990	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Dok	3	1.846.479.178	2	145.263.170	4,00	295.331.810	133,33	15,99
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dok			12	90.717.780	24,00	188.163.500	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dok	3	1.846.479.178	12	441.259.500	24,00	887.551.520	800,00	48,07
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dok			30	29.735.000	60,00	59.695.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dok	3	1.846.479.178	11	71.505.700	22,00	145.413.920	733,33	7,88
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Lap. Pajak			11	49.677.700	22,00	99.677.360	#DIV/0!	#DIV/0!
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Lap	3	1.846.479.178	12	45.953.200	24,00	95.875.900	800,00	5,19
	Meningkatnya profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 : 84,8		86							
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pengelolaan PAD		Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan BapendaTahun 2022 0,29		1							
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH											
	Meningkatnya Profesionalitas ASN		Indeks Profesional ASN		55,05		70					
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM					80,87	3.389.076.235	81	3.389.076.235	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kepegawaian Daerah	Persentase	100	2.699.026.267	72,02	672.221.145	172	3.048.808.655	172	113
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersedian PNS	Persentase	100	98.526.267	100,00	329.300.707	200	557.889.127	200	566
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	76.026.267	1,00	310.084.547	2	527.303.567	200	694
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	22.500.000	1,00	19.216.160	2	30.585.560	200	136
		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	Persentase	100	80.000.000	100,00	79.567.578	200	187.835.488	200	235
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	SK	1.500	80.000.000	1500,00	79.567.578	3.049	187.835.488	203	235
		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		100	2.485.000.000	83,33	220.818.660	183	2.194.735.260	183	88
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Orang	6	485.000.000	4,00	200.000.000	10	685.000.000	167	141
		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Terlakasananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Orang	250	2.000.000.000	1,00	20.818.660	2	1.509.735.260	0,8	75
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase	100	35.500.000	4,76	42.534.200	105	108.348.780	105	305
		Pengelolaan Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	30	17.500.000	0,00	13.403.720	40	59.829.120	133	342
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Dokumen	2	18.000.000	2,00	29.130.480	4	48.519.660	200	270
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan SDM		100	84.871.894	100	276.270.577	200	676.225.177	200	797
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase sertifikasi, kelembagaan, pengembangan,kompetensi manajerial dan fungsional		100	84.871.894	100	276.270.577	200	676.225.177	200	797
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi pengelolaan kelembagaan,tenaga pengembang kompetensi,sumber belajar, kerjasama pengembang kompetensi Pimpinan Daerah,JPTP,Kepemimpinan dan Prajabatan serta fungsional	Dokumen	1	84.871.894	1	276.270.577	2	676.225.177	200	797
			Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	459.218.522						
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan		Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	5.125.173.015						
			Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	%	53	209.541.117						
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B	Nilai	73	145.707.719						
	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT			100	5.939.640.373	101	5.553.121.165	201	9.758.671.028	201	164
I.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Terpenuhinya peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	%	100	915.966.737	100	617.180.754	200	956.317.954	200	104
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan Reguler pada Pemerintah dan Desa	%	100	816.329.980	100	580.277.824	200	860.835.324	200	105
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah	Laporan	5	43.071.161	4	38.043.140	5	47.162.040	100	109
		Pengawasan Keuangan pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah	Laporan	12	83.806.326	6	48.659.050	8	65.698.450	67	78
		Reviu Laporan kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	13	41.996.151	11	24.184.800	16	41.670.600	125	99
		Reviu laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	7	91.408.841	66	51.555.807	73	82.104.307	1.043	90
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	50	346.506.384	42	293.637.200	58	456.088.300	116	132
		Monitoring dan evaluasi Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut Hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	90	209.541.117	38	124.197.827	60	168.111.627	67	80
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	%	100	99.636.757	100	36.902.930	200	95.482.630	200	96
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	9	99.636.757	7	36.902.930	15	95.482.630	167	96
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terpenuhinya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	%	100	459.218.522	100	254.363.871	200	590.657.671	200	129
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pendampingan Tugas Kepemerintahan di Bidang Pengawasan	%	100	122.514.642	100	115.291.671	200	240.603.071	200	196
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	Rekomendasi	5	122.514.642	5	115.291.671	11	240.603.071	220	196
		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan Tugas Kepemerintahan di Bidang Pengawasan		100	336.703.880	100	139.072.200	200	350.054.600	200	104
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	74	336.703.880	220	139.072.200	225	350.054.600	305	104

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
II.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Terpenuhinya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		100	145.707.719	103	119.277.000	203	183.145.300	203	126
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pendampingan Tugas Kepemerintahan di Bidang Pengawasan		100	145.707.719	103	119.277.000	203	183.145.300	203	126
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Rekomendasi	100	145.707.719	158	119.277.000	209	183.145.300	209	126
		KECAMATAN ALOK			100	12.253.108.734	106,67	3.720.726.282	173,33	6.885.134.288	173,33	178,29
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana											
2	Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PRESENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	227.934.000	100,00	13.240.000	200,00	48.251.400	200,00	71,59
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksannya koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait		100	227.934.000	100,00	13.240.000	200,00	48.251.400	200,00	71,59
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /sinergi peencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	laporan	12	227.934.000	12	13.240.000	24,00	48.251.400	200,00	71,59
3	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		50	30.909.000	200,00	9.999.540	250,00	19.999.540	500,00	200,00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	30.909.000	200,00	9.999.540	300,00	19.999.540	300,00	200,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lmga	10	30.909.000	20,00	9.999.540	30,00	19.999.540	300,00	200,00
		Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		-	-	0,00	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan					-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					0,00	0,00	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					0,00	0,00	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Evaluasi Kelurahan					0,00	0,00	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	120.704.359	100,00	487.685.000	100,00	487.685.000	100	2.121,29
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		100	120.704.359	100,00	487.685.000	100,00	487.685.000	100	2.121,29
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	dok	2	120.704.359	2,00	487.685.000	2,00	487.685.000	100	2.121,29
5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PRESENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		100	30.909.000	33,33	4.650.000	133,33	8.575.000	133,33	97,63
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	30.909.000	33,33	4.650.000	133,33	8.575.000	133,33	97,63
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dok	3	30.909.000	1	4.650.000	4,00	8.575.000	133,33	97,63
		KELURAHAN MADAWAT			-	-	-	-	0	-	-	-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	-	-	-	0	-	0	-
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0	-	-	-	0	-	0	-
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	-	-	-	0	-	0	-
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	-	-	-	0	-	0	-
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-
							#REF!					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	-	-	-	0	-	0	-
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	0	-	0	-
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		KELURAHAN KABOR			-	-	-	-	0	-	-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	-	-	-	0	-	0	-
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0	-	-	-	0	-	0	-
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	-	-	-	0	-	0	-
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	-	-	-	0	-	0	-
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	-	-	-	0	-	0	-
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	0	-	0	-
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		KELURAHAN NANGALIMANG			-	-	-	-	0	-	-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	-	-	-	0	-	0	-
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0	-	-	-	0	-	0	-
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	-	-	-	0	-	0	-
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	-	-	-	0	-	0	-
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	-	-	-	0	-	0	-
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	0	-	0	-
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		KELURAHAN KOTA UNENG			-	-	-	-	0	-	-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	-	-	-	0	-	0	-
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0	-	-	-	0	-	0	-
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	-	-	-	0	-	0	-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	-	-	-	0	-	0	-
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	-	-	-	0	-	0	-
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	0	-	0	-
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		KECAMATAN ALOK BARAT					61	4.092.218.096	60,57	4.092.218.096,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Administrasi Pemerintahan					-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	175.048.500	100	92.200.000	100,00	92.200.000,00	100,00	52,67
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang Dilaksanakan		100	175.048.500	100	92.200.000	100,00	92.200.000,00	100,00	52,67
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	144	175.048.500	132	92.200.000	132,00	151.600.000,00	91,67	52,67
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	1.010.883.870	42	387.993.770	42,29	387.993.770,00	42,29	38,38
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	10.609.000	1	9.987.650	1,00	9.987.650,00	1,00	94,14
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	22	10.609.000	22	9.987.650	22,00	19.887.650,00	100,00	94,14
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100	1.000.274.870	84	890.150.828	83,57	890.150.828,00	83,57	88,99
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	40	27.614.151	40	23.679.670	40,00	36.068.670,00	100,00	85,75
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan	-	-	4	69.317.198	4,00	69.317.198,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	48	902.899.838	25	739.448.960	25,00	1.583.871.660,00	52,08	81,90
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	48	69.760.880	48	57.705.000	48,00	112.305.000,00	100,00	82,72
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	68.958.500	-	-	-	-	-	-
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	68.958.500	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100	68.958.500	-	-	-	-	-	-
		KELURAHAN WURING			-	-	-	-	0	-	-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0	-	-	-	0	-	0	-
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0	-	-	-	0	-	0	-
		Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	bulan			-	-	0	-	0	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	-	-	-	0	-	0	-
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	-	-	-	0	-	0	-
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		KELURAHAN HEWULI			-	-	-	-	0	-	-	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	-	-	-	0	-	0	-
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	-	-	-	0	-	0	-
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		KELURAHAN WAILITI			-	-	-	-	0	-	-	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	-	-	-	0	-	0	-
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	-	-	-	0	-	0	-
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		KELURAHAN WOLOMARANG			-	-	-	-	0	-	-	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	-	-	-	0	-	0	-
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	-	-	-	0	-	0	-
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		KECAMATAN ALOK TIMUR			100	19.009.722.286	99,65	6.033.570.944	126,55	11.147.323.313	127	59
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana											
2	Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	401.817.000	100,00	121.260.000	200	143.110.000	200	35,62
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	401.817.000	100,00	121.260.000	200	143.110.000	200	35,62
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	36	401.817.000	12,00	121.260.000	24	143.110.000	67	35,62
3	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERSELENGGARANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	3.349.210.399	100,00	1.567.907.560	200	2.644.387.410	200	59,77
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	50.000.000	100,00	531.385.040	200	544.920.040	200	59,77
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	30	50.000.000	10,00	16.348.000	18	29.883.000	60	59,77
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100	3.299.210.399	100,00	1.036.522.520	200	2.099.467.370	200	35,66
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	24	110.355.760	8,00	19.369.520	16	39.358.320	67	35,66
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	unit	30	250.000.000	30,00	79.505.900	30	79.505.900	100	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat di Kelurahan yang diberdayakan	Lembaga	24	2.656.669.499	8,00	898.249.900	16	1.877.605.950	67	70,68
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan	Laporan	36	282.185.140	12,0	39.397.200	24	102.997.200	67	36,50
4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	176.699.000	100,00	40.191.700	200	50.391.700	93	50,00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	176.699.000	100,00	40.191.700	200	50.391.700	93	50,00

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Laporan	15	116.699.000	4,00	20.391.700	4	20.391.700	27	17,47
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	36	60.000.000	12,0	19.800.000	24	30.000.000	67	50,00
5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	107.800.000	100,00	7.850.000	200	12.845.000	73	13,84
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	107.800.000	100,00	7.850.000	200	12.845.000	73	13,84
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan	3	15.000.000	1,00	6.277.400	1	6.277.400	33	41,85
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah laporan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	15	92.800.000	6,00	7.850.000	11	12.845.000	73	13,84
		KELURAHAN WAIOTI			100,00	1.337.435.045,00	94,44	350.712.977	194,44444	713.571.185	194,44	53,35
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	37.090.800,00	100,00	4.200.000	100	4.200.000	100	11,32
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	37.090.800,00	100,00	4.200.000	100	4.200.000	100	11,32
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	36	37.090.800,00	12,00	4.200.000	12	4.200.000	33,333333	11,32
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	734.383.987,00	100,00	200.070.000	200	412.189.000	200	56,13
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	734.383.987,00	100,00	200.070.000	200	412.189.000	200	56,13
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	24	91.339.700,00	8,00	2.130.000	16	7.119.000	66,666667	7,79
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	50.000.000,00	-	-	0	-	0	-
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lembaga	24	551.759.147,00	8,00	188.940.000	16	388.920.000	66,666667	70,49
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	36	41.285.140,00	12,00	9.000.000	24	16.150.000	66,666667	39,12
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100	77.272.500,00	100,00	6.090.000	100	6.090.000	100	7,88
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			100	77.272.500,00	100,00	6.090.000	100	6.090.000	100	7,88
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Laporan	3	77.272.500,00	1,00	6.090.000	1	6.090.000	33,333333	7,88

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		KELURAHAN NANGAMETING			100,00	1.230.549.932,00	100,00	382.114.395	200	741.807.075	200,00	60,28
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	37.090.800,00	100,00	23.420.000	100	23.420.000	100	63,14
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	37.090.800,00	100,00	23.420.000	100	23.420.000	100	63,14
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan	36	37.090.800,00	12,00	23.420.000	12	23.420.000	33,333333	63,14
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	714.027.320,00	100,00	215.368.800	200	429.434.800	200	60,14
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	714.027.320,00	100,00	215.368.800	200	429.434.800	200	60,14
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan	24	17.000.000,00	8,00	10.123.200	16	15.123.200	66,666667	88,96
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan	6	50.000.000,00	4,00	11.587.000	4	11.587.000	66,666667	23,17
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan	24	604.527.320,00	8,00	183.771.400	16	382.837.400	66,666667	63,33
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan	36	42.500.000,00	12,00	9.887.200	24	19.887.200	66,666667	46,79
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100	61.818.000,00	100,00	6.397.200	100	6.397.200	100	10,35
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			100	61.818.000,00	100,00	6.397.200	100	6.397.200	100	10,35
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan	3	61.818.000,00	1,00	6.397.200	1	6.397.200	33,333333	10,35
		KELURAHAN WAIROTANG			100,00	1.019.296.311,00	100,00	337.262.821	200	661.870.878	200,00	64,93
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	37.090.800,00	100,00	23.250.000	100	23.250.000	100	62,68
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	37.090.800,00	100,00	23.250.000	100	23.250.000	100	62,68
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	36	37.090.800,00	12,00	23.250.000	12	23.250.000	33,333333	62,68
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	652.723.955,00	100,00	214.513.020	200	428.993.070	200	65,72
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	652.723.955,00	100,00	214.513.020	200	428.993.070	200	65,72

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	24	15.000.000,00	8,00	7.116.320	8	7.116.320	33,333333	47,44
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	50.000.000,00	9,00	31.956.500	9	31.956.500	150	63,91
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lembaga	24	557.723.955,00	8,00	167.710.200	16	372.290.250	66,666667	66,75
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	36	30.000.000,00	12,00	7.730.000	24	17.630.000	66,666667	58,77
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	-	-	-	0	-	0	-
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	-	-	-	0	-	0	-
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan			-	-	0	-	0	-
		KELURAHAN BERU			100,00	1.218.306.242,00	99,38	340.030.580	199,375	654.622.100	199,38	53,73
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	37.090.800,00	100,00	10.560.000	100	10.560.000	100	28,47
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	37.090.800,00	100,00	10.560.000	100	10.560.000	100	28,47
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan	36	37.090.800,00	12,00	10.560.000	12	10.560.000	33,333333	28,47
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	566.804.662,00	100,00	199.315.700	200	413.070.500	200	72,88
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	566.804.662,00	100,00	199.315.700	200	413.070.500	200	72,88
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan	24	25.516.060,00	-	-	8	4.999.800	33,333333	19,59
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan	6	50.000.000,00	17,00	35.962.400	17	35.962.400	283,33333	71,92
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan	24	460.288.602,00	8,00	163.353.300	16	345.558.300	66,666667	75,07
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	kegiatan	36	31.000.000,00	-	-	12	26.550.000	33,333333	85,65
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100	61.818.000,00	-	-	0	-	0	-
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			100	61.818.000,00	-	-	0	-	0	-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan	3	61.818.000,00	-	-	0	-	0	-
		KELURAHAN KOTA BARU			100,00	1.493.941.852,00	100,00	362.012.674	200	732.736.564	200,00	49,05
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	37.090.800,00	-	-	0	-	0	-
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	37.090.800,00	-	-	0	-	0	-
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	36	37.090.800,00	-	-	0	-	0	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	837.055.615,00	100,00	207.255.000	200	415.780.000	200	49,67
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	837.055.615,00	100,00	207.255.000	200	415.780.000	200	49,67
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	24	22.500.000,00	-	-	8	5.000.000	33,333333	22,22
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	50.000.000,00	-	-	0	-	0	-
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lembaga	24	482.370.475,00	8,00	194.475.000	16	388.000.000	66,666667	80,44
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	36	282.185.140,00	12,00	12.780.000	24	22.780.000	66,666667	8,07
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100	61.818.000,00	100,00	7.904.500	100	7.904.500	100	12,79
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			100	61.818.000,00	100,00	7.904.500	100	7.904.500	100	12,79
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Laporan	3	61.818.000,00	1,00	7.904.500	1	7.904.500	33,333333	12,79
1	Meningkatkan pelayana Publik	Kecamatan Bola			100	1.624.107.227	84	1.263.352.853	184	2.681.035.908	184	165
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	43.870.580	58	39.945.000	158,33	83.815.580,00	158	191
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		100	43.428.600	67	39.625.000	166,67	83.053.600,00	167	191
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan degan Perangkat Daerah dan Instansi Vetikal Terkait	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	laporan	12	43.428.600	8	39.625.000	20,00	83.053.600,00	167	191
		Pelaksanaan Urusan yang dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Yang dilimpahkan Kepada Camat		100	441.980	50	320.000	150,00	761.980,00	150	172

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	2	441.980	1	320.000	3,00	761.980,00	150	172
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	10.000.000	100	9.142.800	200,00	19.142.800,00	200	191
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Desa		100	10.000.000	100	9.142.800	200,00	19.142.800,00	200	191
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Urusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah partisipsi masyrakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	lembaga	8	10.000.000	8	9.142.800	16,00	19.142.800,00	200	191
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	32.000.000	92	31.210.000	191,67	63.210.000,00	192	198
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		100	32.000.000	92	31.210.000	191,67	63.210.000,00	192	198
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	laporan	12	16.000.000	11	15.480.000	23,00	31.480.000,00	192	197
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dok	12	16.000.000	11	15.730.000	23,00	31.730.000,00	192	198
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	27.000.000	69	11.000.000	168,75	38.000.000,00	169	141
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	27.000.000	69	11.000.000	168,75	38.000.000,00	169	141
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dok	8	12.000.000	11	11.000.000	19,00	23.000.000,00	238	192
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dok	8	15.000.000	-	-	8,00	15.000.000,00	100	100
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dok			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	Tersedianya Sarana dan Prasarana		Indeks Sarana Prasarana		3,20		#REF!					
			Inovasi Pelayanan		3,28							
	Inovasi Pelayanan Publik		Kemudahan Akses, Cepat Akurat dan Akuntabel		3,25							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan		Tersedianya SOP		3,18							
1	Meningkatkan pelayana Publik	Kecamatan Doreng			100	1.454.263.327	55,23	1.356.413.937	155	2.810.677.264	155,23	193,27
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	35.680.000	-	0	100	35680000	100,00	100,00
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	laporan	100	35.680.000	-	-	100,00	35.680.000,00	100,00	100,00
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan degan Perangkat Daerah dan Instansi Vetikal Terkait	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	laporan	12	35.680.000	-	0	100	35680000	833,33	100,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	15.258.200	100,00	14975000	200	30233200	200,00	198,14
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Desa	lembaga	100	15.258.200	100,00	14975000	200	30233200	200,00	198,14
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Urusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah partisipsi masyrakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	lembaga	10	15.258.200	10,00	14975000	110	30233200	1.100,00	198,14

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	12.000.000	100,00	6.600.000,00	200,00	18.600.000,00	200,00	155,00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	dokumen	100	12.000.000	100,00	6.600.000,00	200,00	18.600.000,00	200,00	155,00
		Pelaksanaan Tugas Forum Koodinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Bulan	12	10.560.000	12,00	6.600.000,00	112,00	17.160.000,00	933,33	162,50
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	2.000.000	-	0	100	2000000	100,00	100,00
		Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya penyelenggaraanPembinaaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	dokumen	100	2.000.000	-	0	100	2000000	100,00	100,00
		Fasilitasi Peyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemerintah desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	dokumen	12	2.000.000	-	0	100	2000000	833,33	100,00
		KECAMATAN HEWOKLOANG			57	1.191.271.017	93,23	1.355.938.135,00	149,90	2465043171	264,52	206,93
2	Tersedia Sistem Pelayanan Informasi Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100	54.000.000	76,92	64.844.400	176,92	118.694.400	1.474,36	472,55
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	54.000.000	76,92	64.844.400	176,92	118.694.400	176,92	219,80
		Koordinasi/sinergis Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	lap	168	54.000.000	9,00	48.990.000	177,00	102.840.000	177,00	190,44
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dok	-		1,00	15.854.400	1,00	15.854.400	0,60	29,36
3	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERSELENGGARANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100	10.550.000	100,00	9.999.480	200,00	20.549.480	#DIV/0!	#DIV/0!
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	10.550.000	100,00	9.999.480	200,00	20.549.480	200,00	194,78
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	desa	7	10.550.000	7,00	9.999.480	14,00	20.549.480	14,00	194,78
4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	-	-	100,00	23.302.120	100,00	23.302.120	1.428,57	220,87
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-	-	100,00	23.302.120	100,00	23.302.120	#DIV/0!	#DIV/0!
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	-	-	50,00	11.312.120	50,00	11.312.120	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dok	-	-	12,00	11.990.000	12,00	11.990.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	-	-	100,00	19.400.000	100,00	19.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			-	-	100,00	19.400.000	100,00	19.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dok	-		14,00	19.400.000	14,00	19.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	KECAMATAN KANGAE						93,23					
	Tersedianya Sarana dan Prasarana				78,55		ST					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
	Tersedianya SOP				0,80							
	Inovasi Pelayanan Publik				0,09							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan				0,48							
		KECAMATAN KANGAE			100	5.696.680.842	99,19	1.658.079.326	159,18667	3.091.115.394	159,19	54,26
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PRESENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	257.570.135	100,00	76.000.000	200	102.850.000	200	39,93
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	257.570.135	100,00	76.000.000	200	102.850.000	200	39,93
		Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang dilaksanakan	Laporan	12	257.570.135	12,00	76.000.000	24	102.850.000	200	39,93
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	30.909.000	100,00	10.000.000	200	19.999.500	200	64,70
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	30.909.000	100,00	10.000.000	200	19.999.500	200	64,70
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Fasilitas untuk Kegiatan Musyarah tingkat Desa	kegiatan	9	30.909.000	9,00	10.000.000	18	19.999.500	200	64,70
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	98.908.800	100,00	25.990.000	100	25.990.000	100	26,28
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	98.908.800	100,00	25.990.000	100	25.990.000	100	26,28
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecmatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	desa	9	98.908.800	9,00	25.990.000	9	25.990.000	100	26,28
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		100	77.272.500	100,00	13.990.000	100	13.990.000	100	18,10
		Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pengawasan Pemerintah desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pengawasan Pemerintah desa		100	77.272.500	100,00	13.990.000	100	13.990.000	100	18,10
		Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolah Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	desa	9	77.272.500	9,00	13.990.000	9	13.990.000	100	18,10
	Kecamatan Kewapante											
		KECAMATAN KEWAPANTE			0	-	80,00	1.648.839.958	80	1.648.839.958	-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PRESENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0	-	100,00	85.580.000	100	85.580.000	0	-
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0	-	100,00	85.580.000	100	85.580.000	0	-
		Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang dilaksanakan	bulan			12,00	85.580.000	12	85.580.000	0	-
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	bulan			-	-	0	-	0	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0	-	100,00	9.978.000	100	9.978.000	0	-
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	-	100,00	9.978.000	100	9.978.000	0	-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	kegiatan			1,00	9.978.000	1	9.978.000	0	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		0	-	-	-	0	-	0	-
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		0	-	-	-	0	-	0	-
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	desa			-	-	0	-	0	-
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		0	-	100,00	18.272.800	100	18.272.800	0	-
		Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pengawasan Pemerintah desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pengawasan Pemerintah desa		0	-	100,00	18.272.800	100	18.272.800	0	-
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	desa			12,00	18.272.800	12	18.272.800	0	-
1		KECAMATAN KOTING					99	1.224.363.548	99	1.224.363.548	#DIV/0!	#DIV/0!
	Meningkatnya akses dan Manajemen Pelayanan Publik											
	Tersedianya Sarana dan Prasarana				78,55		ST					
	Tersedianya SOP				0,80							
	Inovasi Pelayanan Publik				0,09							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan				0,48							
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan dan Pengawasan Pemrinthan Desa/Kelurahan											
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	18.000.000	100	17.000.000	200	35.000.000	100	94
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100		100	17.000.000	200	17.000.000	100	#DIV/0!
		Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergisitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan			12	17.000.000	12	17.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!
III		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	10.000.000	100	18.235.520	200	28.235.520	100	182
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		100		100	10.811.040	200	10.811.040	100	#DIV/0!
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan			7	10.811.040	7	10.811.040	#DIV/0!	#DIV/0!
IV		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	-	100	3.480.000	200	3.480.000	100	#DIV/0!
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100		100	3.480.000	200	3.480.000	100	#DIV/0!
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen			1	5.480.000	1	5.480.000	#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	-	100	780.000	200	780.000	100	#DIV/0!

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasn Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		100		100	780.000	200	780.000	100	#DIV/0!
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen			7	780.000	7	780.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	KECAMATAN LELA											
	Tersedianya Sarana dan Prasarana				78,55		#REF!					
	Tersedianya SOP				0,80							
	Inovasi Pelayanan Publik				0,09							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan				0,48							
1		KECAMATAN LELA			100	1.840.559.913	83,78	1.533.984.148	183,78	3.295.222.864,00	183,78	179,03
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	64.880.000	100,00	64.540.400	7,80	5.459.600	0,52	339.600
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	64.880.000	100	64.540.400	3	5.459.600	3,00	339.600
		Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergisitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	bulan	12	64.880.000	12	64.540.400	24	134.540.400	200,00	207
III		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	9.999.880	22,22	9.999.800	0,0	200	0,00	80
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	9.999.880	22,22	9.999.800	0	200	0,00	80
		Peningkatan pertisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	lembaga	9	9.999.880	2	9.999.800	3	19.999.800	33,33	200
IV		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	23.671.630	100,00	19.283.000	39,74	12.717.000	18,54	4.388.630
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	23.671.630	1	19.283.000	12	12.717.000	1,00	4.388.630
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	1	23.671.630	1,00	19.283.000	13	51.283.000	1.300,00	217
V		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PRASENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	17.896.780	100,00	17.530.000	12	2.470.000	2,05	366.780
		Fasilitasi,Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi,Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	17.896.780	100,00	17.530.000	3	2.470.000	1,00	366.780
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	1	17.896.780	1,00	17.530.000	13	37.530.000	1.300,00	210
	Tersedianya Sarana dan Prasarana				78,55		#REF!					
	Tersedianya SOP				0,80							
	Inovasi Pelayanan Publik				0,09							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan				0,48							
		KECAMATAN MAGEPANDA			97	1.968.139.844	93,90	1.278.432.984	193,90	2.711.977.865,00	200,59	137,79
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	139.830.000	100,00	63.559.720	200,00	83.559.720,00	200,00	59,76

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		100	85.500.000	100,00	48.924.720	200,00	68.924.720,00	200,00	80,61
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Honor Tim Monev Tingkat Kecamatan	bulan	12	24.600.000	12,00	48.924.720	24,00	68.924.720,00	200,00	280,18
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di tingkat Kecamatan	bulan	12	60.900.000	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan		100	12.420.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Honor Tim PATEN	kegiatan	3	12.420.000	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat		100	54.330.000	100,00	14.635.000	200,00	14.635.000,00	200,00	26,94
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Tercapainya Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan terkait	bulan	12	54.330.000	12,00	14.635.000	24,00	14.635.000,00	200,00	26,94
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	34.090.080	69,50	6.950.000	169,50	41.040.080,00	169,50	120,39
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	34.090.080	69,50	6.950.000	169,50	41.040.080,00	169,50	120,39
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tercapainya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	8	34.090.080	8,00	9.950.000	16,00	44.040.080,00	200,00	129,19
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	14.760.000	100,00	24.090.000	200,00	36.090.000,00	200,00	244,51
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	14.760.000	100,00	24.090.000	200,00	36.090.000,00	200,00	244,51
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	Tercapainya Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	bulan			-	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tercapainya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	bulan	12	14.760.000	12,00	24.090.000	24,00	36.090.000,00	200,00	244,51
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	20.000.000	100,00	48.194.000	200,00	48.194.000,00	200,00	240,97
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	20.000.000	100,00	48.194.000	200,00	48.194.000,00	200,00	240,97
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tercapainya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	bulan	12	3.200.000	12,00	31.500.000	24,00	31.500.000,00	200,00	984,38
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	bulan	12	16.800.000	12,00	16.694.000	24,00	16.694.000,00	200,00	99,37
	KECAMATAN MAPITARA											
	Tersedianya Sarana dan Prasarana						#REF!					
	Tersedianya SOP											
	Inovasi Pelayanan Publik											
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan											

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		KECAMATAN MAPITARA			100	1.458.940.182	83,02	1.016.246.960,00	143	2.243.015.703	143	154
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	83.128.700	75,00	29.404.000,00	175	106.979.000	175	129
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		100	83.128.700	75,00	29.404.000,00	175	106.979.000	175	129
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	Tercapainya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	bulan	12	83.128.700	9,00	29.404.000,00	102	106.979.000	853	129
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	13.178.800	75,00	12.178.800,00	175	23.158.800	175	176
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	13.178.800	75,00	12.178.800,00	175	23.158.800	175	176
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tercapainya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	4	13.178.800	9,00	12.178.800,00	21	23.158.800	525	176
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	38.550.000	83,33	8.100.000,00	183	8.100.000	183	21
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	38.550.000	83,33	8.100.000,00	8.100.100	41.650.000	8.100.100	108
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tercapainya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	laporan	12	38.550.000	10,00	8.100.000,00	8.100.012	41.650.000	67.500.100	108
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	15.000.000	83,33	6.150.000,00	183	6.150.000	183	41
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	15.000.000	83,33	6.150.000,00	183	16.150.000	183	108
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	laporan	12	15.000.000	10,00	6.150.000,00	6.150.012	16.150.000	51.250.100	108
	KECAMATAN NELLE											
	Tersedianya Sarana dan Prasarana				0,49		0,47					
	Tersedianya SOP				0,17		0,46					
	Inovasi Pelayanan Publik				0,48		0,15					
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan				0,30							
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	KECAMATAN NELLE			100	1.412.888.376	98,19	1.200.728.796,00	168	2.286.272.727	168	162
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	60.540.000	18,75	55.160.000,00	69	64.910.000	69	107
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	51.740.000	50,00	51.300.000,00	150	61.050.000	150	118
		Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	12	41.640.000	12,00	41.200.000,00	24	50.950.000	200	122
		Peningkatan Efektifits di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemrintahan di Tigkat Kecamatan	dokumen	12	10.100.000	-	10.100.000,00	-	10.100.000	-	100

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pelaksanaan Urussan Pemrintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urussan Pemrintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100	8.800.000	-	3.860.000,00	-	3.860.000	-	44
		Pelaksanaan Urusan Pemrintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	12	8.800.000	-	3.860.000,00	-	3.860.000	-	44
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	10.609.000	100,00	11.000.000,00	200	20.682.000	200	195
		Koordinasi Kegiatan Pemerdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerdayaan Desa		100	10.609.000	100,00	11.000.000,00	200	20.682.000	200	195
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	kegiatan	1	10.609.000	1,00	11.000.000,00	2	20.682.000	200	195
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	33.948.800	100,00	25.230.000,00	200	65.117.500	200	192
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	33.948.800	100,00	25.230.000,00	200	65.117.500	200	192
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	12	33.948.800	12,00	25.230.000,00	24	65.117.500	200	192
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	10.609.000	100,00	12.510.000,00	100	12.510.000	100	118
		Fasilitaasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitaasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	10.609.000	100,00	12.510.000,00	100	12.510.000	100	118
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	5	10.609.000	5,00	12.510.000,00	5	12.510.000	100	118
	KECAMATAN NITA											
	Tersedianya Sarana dan Prasarana		Indeks Sarana Prasarana		66,90		#REF!					
	Tersedianya Profesionalisme Sumber Daya Manusia		Indeks Sumber Daya Manusia		0,79							
	Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik		Kemudahan Akses, Cepat Akurat dan Akuntabel		0,79							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan		Tersedianya SOP		0,40							
	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik		Jumlah Inovasi		0,15							
1	Meningkatkan Pelayanan Publik	KECAMATAN NITA			100	2.006.683.697	73,18	1.742.066.935,00	199,23	3.100.441.969,00	199,23	154,51
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	72.163.000	66,67	52.080.900	200	76.950.900	200	107
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	49.238.000	100	40.000.900	24	63.330.000	24	129
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	laporan	12	29.697.500	12	26.380.000	12	13.620.900	100	46
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	12	19.540.500	12	13.620.900	-	680.000	-	3
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			100	10.000.000	-	680.000	-	680.000	-	7
		Koordinasi/Sinergi dengan Peragkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan /atau Instansi Vertikal yang Terkait	dokumen	12	10.000.000	-	680.000	100	11.400.000	833	114

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100	12.925.000	100	11.400.000	12	11.400.000	12	88
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	dokumen	12	12.925.000	12	11.400.000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100	10.000.000	100,00	10.000.000	200	18.150.000	200	182
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		lembaga	100	10.000.000	100	10.000.000	25	18.150.000	25	182
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	5	10.000.000	15	10.000.000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100	31.827.000	-	-	100	11.150.000	100	35
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100	31.827.000	-	-	12	11.150.000	12	35
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	dokumen	10	31.827.000	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			100	31.826.998	100,00	3.740.000	200	34.522.542	200	108
		Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	31.826.998	100	3.740.000	90	4.546.714	90	14
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen	30	4.546.714	45	-	90	5.226.714	300	115
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	dokumen	15	4.546.714	45	680.000	90	4.546.714	600	100
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	15	4.546.714	45	-	15	4.285.600	100	94
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Kepala Desa	dokumen	4	4.546.714	-	-	90	6.155.600	2.250	135
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	dokumen	15	4.546.714	45	1.870.000	90	4.285.600	600	94
		Fasiliatsi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	dokumen	15	4.546.714	45	-	90	5.475.600	600	120
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	dokumen	15	4.546.714	45	1.190.000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	KECAMATAN PAGA											
	Tersedianya Sarana dan Prasarana						#REF!					
	Tersedianya SOP											
	Inovasi Pelayanan Publik											
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan											
		KECAMATAN PAGA			100	4.370.226.953	76,37	1.313.421.418,00	163,86933	2.471.913.219	163,87	56,56
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	167.563.000	99,06	39.707.400	149,06	70.307.400	149,06	41,96
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	143.163.000	91,67	36.433.400	191,67	67.033.400	191,67	46,82

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		36	91.800.000	12,00	30.657.000	24,00	61.257.000	66,66666 67	66,72875 817
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		36	51.363.000	10,00	5.776.400	10,00	5.776.400	27,7777 78	11,24622 783
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			100	24.400.000	33,33	3.274.000	33,33	3.274.000	33,3333 33	13,41803 279
		Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		9	24.400.000	1,00	3.274.000	1,00	3.274.000	11,1111 11	13,41803 279
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERSELENGGARANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	30.909.000	99,52	10.300.000	199,52	20.300.000	199,524 6	65,67666 375
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	30.909.000	42,86	10.300.000	142,86	20.300.000	142,857 14	65,67666 375
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		42	30.909.000	6,00	10.300.000	20,00	20.300.000	47,6190 48	65,67666 375
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	33.948.800	98,99	10.200.000	198,99	16.200.000	198,99	47,72
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100	33.948.800	100,00	10.200.000	200,00	16.200.000	200,00	47,72
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		36	33.948.800	12,00	10.200.000	24,00	16.200.000	66,6666 67	47,71891 79
	KECAMATAN PALUE											
	Tersedianya Sarana dan Prasarana						#REF!					
	Tersedianya SOP											
	Inovasi Pelayanan Publik											
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan											
		KECAMATAN PALUE					91	1.384.194.747	91	1.384.194.747	-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	48.377.000	70	54.310.000	170	54.310.000	70	112
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	48.377.000	70	54.310.000	170	54.310.000	70	112
		Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	21.854.500	12	49.810.000	12	49.810.000	100	228
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	26.522.500	2	4.500.000	2	4.500.000	100	17
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERSELENGGARANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	20.761.700	100	9.550.000	200	9.550.000	100	46
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	20.761.700	100	9.550.000	200	9.550.000	100	46
		Peningkatan Patisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	8	20.761.700	8	9.550.000	8	9.550.000	100	46

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERSELENGGARANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	76.066.500	100	21.200.000	200	21.200.000	100	28
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			100	76.066.500	100	21.200.000	200	21.200.000	100	28
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konfklik Sosial yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Laporan			4	8.600.000	4	8.600.000	-	-
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	76.066.500	4	12.600.000	4	12.600.000	33	17
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	22.278.900	100	10.950.000	200	10.950.000	100	49
		Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	22.278.900	100	10.950.000	200	10.950.000	100	49
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	8	10.609.000	8	3.650.000	8	3.650.000	100	34
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	8	11.669.900	8	7.300.000	8	7.300.000	100	63
	KECAMATAN TALIBURA											
	Tersedianya Sarana dan Prasarana						#REF!					
	Tersedianya SOP											
	Inovasi Pelayanan Publik											
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan											
		KECAMATAN TALIBURA			100	15.895.440.000	99	1.895.014.397	199	13.769.381.945	199	87
1	Meningkatnya akses dan manajemen pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100	799.600.000	100	90.796.720	200	449.796.720	200	56
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	799.600.000	100	90.796.720	200	449.796.720	200	56
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		12	799.600.000	12	90.796.720	12	449.796.720	100	56
2	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	106.000.000	100	10.000.000	200	48.149.600	200	45
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	106.000.000	100	10.000.000	200	48.149.600	200	45
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	100	106.000.000	96	10.000.000	96	48.149.600	96	45
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	-	100	17.633.800	200	27.633.800	200	#DIV/0!
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	-	100	17.633.800	200	27.633.800	200	#DIV/0!
		Pelaksanaan Tugas Forum Koodinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Dokumen	100	-	98	17.633.800	98	27.633.800	98	#DIV/0!
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN OENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	7.494.920.000	100	367.403.302	200	6.101.012.276	200	81

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	7.494.920.000	100	367.403.302	200	6.101.012.276	200	81
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Dokumen	20	177.000.000	20	30.000.000	20	100.870.000	100	57
	KECAMATAN TANAWAWO											
	Tersedianya Sarana dan Prasarana						#REF!					
	Tersedianya SOP											
	Inovasi Pelayanan Publik											
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan											
		KECAMATAN TANA WAWO			100,00	1.523.976.189,00	41	1.124.258.507	141	2.468.425.334	41	74
		Administrasi Pemerintahan										
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	90.008.800	44	50.065.000	144	140.073.800	44	56
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		100	40.800.000	97	39.600.000	197	80.400.000	97	97
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	40.800.000	97	39.600.000	197	80.400.000	809	97
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemeintahan di Tkt. Kecamatan		100	19.948.800	0	0	100	19.948.800	0	0
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaaa Pelayanan kepada Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Bulan	12	19.948.800	0	0	100	19.948.800	0	0
		Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang dilimpahkan kepada Camat			100	29.260.000	36	10.465.000	136	39.725.000	36	36
		Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang terkait dengan kewenangan lain dilimpahkan	Terselenggaranya Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	BUlan	100	29.260.000	36	10.465.000	36	39.725.000	36	36
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	19.118.500	48	15.670.000	148	34.788.500	48	82
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	19.118.500	48	15.670.000	148	34.788.500	48	82
		Peningkatan Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	12	19.118.500	48	15.670.000	148	34.788.500	402	82
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	10.251.600	0	0	100	10.251.600	0	0
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	10.251.600	0	0	100	10.251.600	0	0
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaaan Pemberdayaan Masyaraakat Desa	Tercapainya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Bulan	12	10.251.600	0	0	100	10.251.600	0	0
	KECAMATAN WAIBLAMA											
	Tersedianya Sarana dan Prasarana											
	Tersedianya SOP											

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
	Inovasi Pelayanan Publik											
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan											
1		KECAMATAN WAIBLAMA			100	1.321.462.310	96	1.299.476.283	196	1.517.937.163	196	115
II	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan dan Pengawasan Pemrinthan Desa/Kelurahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	20.000.000	81	38.945.000	181	58.945.000	181	295
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	20.000.000	81	38.945.000	181	58.945.000	181	295
		Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergisitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	120	20.000.000	12	41.540.000	132	61.540.000	110	308
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen			200	20.000.000	200	20.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!
III		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	10.000.000	100	-	200	10.000.000	200	100
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	10.000.000	100	4.225.000	200	14.225.000	200	142
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lembaga	7	10.000.000	-	-	7	10.000.000	100	100
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan			1	4.225.000	1	4.225.000	#DIV/0!	#DIV/0!
IV		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100		100	31.230.000	200	31.230.000	200	#DIV/0!
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100		100	31.230.000	200	31.230.000	200	#DIV/0!
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	12.000.000	3	31.230.000	4	43.230.000	400	360
V		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100		100	20.710.000	200	20.710.000	200	#DIV/0!
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasn Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		100	-	100	20.710.000	200	20.710.000	200	#DIV/0!
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen			21	20.710.000	21	20.710.000	#DIV/0!	#DIV/0!
							96	1.299.476.283			96	87
	KECAMATAN WAIGETE						-					
	Meningkatnya akses dan Manajemen Pelayanan Publik											
	Tersedianya Sarana dan Prasarana				93,61		SR					
	Tersedianya SOP				108,51							
	Inovasi Pelayanan Publik				0,09							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan				127,66							
1		KECAMATAN WAIGETE				1.784.614.062	69	1.002.260.918	69	2.340.151.443	0	409
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	52.263.000	100	64.954.000	200	86.114.000	100	124

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	52.263.000	100	43.423.500	200	64.583.500	100	83
		Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergisitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	52.263.000	12	43.423.500	36	64.583.500	100	83
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat		100	-	100	21.530.500	200	21.530.500	100	#DIV/0!
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengaan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan			12	21.530.500	12	21.530.500	#DIV/0!	#DIV/0!
III		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	22.000.000	92	9.980.000	192	17.630.000	92	45
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	22.000.000	92	9.980.000	192	17.630.000	92	45
		Peningkatan Partisipasi Masyarakaat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	12	22.000.000	11	9.980.000	23	17.630.000	92	45
IV		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	33.948.800	79	28.370.000	179	36.370.000	79	84
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	33.948.800	79	28.370.000	179	36.370.000	79	84
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinana di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Laporan			-	-	12	8.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	12	16.000.000	9	12.370.000	9	12.370.000	75	77
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	12	17.948.800	10	16.000.000	10	16.000.000	83	89
V		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	26.827.800	150	27.000.000	250	31.800.000	150	101
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasn Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		100	26.827.800	150	27.000.000	250	31.800.000	150	101
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	11	18.827.800	22	12.000.000	22	16.800.000	200	64
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaangunaan Asset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	11	8.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000	100	188
												409
	Meningkatnya akses dan Manajemen Pelayanan Publik											
	Tersedianya Sarana dan Prasarana				93,61		SR					
	Tersedianya SOP				108,51							
	Inovasi Pelayanan Publik				0,09							
	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan				127,66							
1		KECAMATAN MEGO					74	1.357.369.264	74	1.357.369.264	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	74.263.000	100	8.160.000	200	8.160.000	100	11

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahaan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Desa	12	74.263.000	12	8.160.000	12	8.160.000	100	11
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100	10.609.000	100	9.600.000	200	9.600.000	100	90
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum musyawarah perencanaan \pembangunan di Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perncanaan di desa	Laporan	12	10.609.000	12	9.600.000	12	9.600.000	100	90
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pelaksanaan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang terlaksana		100		-	-	100	-	-	#DIV/0!
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinana di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	12	33.948.800	-	-	-	-	-	-
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI										
			Persentase Peran Serta Masyarakat yang ikut Pemilu	89%								
			Persentase Penurunan Konflik Sosial	89,14%		100%						
			Cakupan Partai Politik yang Dibina	100%		100%						
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			100	16.209.706.301	99,46	39.636.761.967	#DIV/0!	44.385.463.268	#DIV/0!	273,82
	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, Idiologi dan pembauran kebangsaan											
1		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan		100	365.838.924	98,40	443.875.920	126,35 %	462.235.920	98,40%	98,40%
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis kegiatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100	365.838.924	100,00	443.875.920	200,00	462.235.920	200,00	126,35
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	210	56.748.924	20	18.107.870	120,00	36.467.870	57,14	64,26
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikut Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	KK	150	309.090.000	100	79.252.180	100,00	79.252.180	66,67	25,64
		Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka				55	346.515.870	55,00	346.515.870	#DIV/0!	#DIV/0!
	Meningkatnya Pembinaan terhadap Partai Politik											
2		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.	Persentase	100	769.656.594	97	35.981.194.293	196,77	36.781.894.250	196,77	4779,00

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Kebijakan Teknis kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase	100	769.656.594	97	35.981.194.293	196,77	36.781.894.250	196,77	4779,00
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen	11	769.656.594	18	35.786.899.773	29,00	36.521.905.730	263,64	4745,22
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				12	194.294.520	18,00	259.988.520	#DIV/0!	#DIV/0!
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase	100	231.817.500	100	74.638.470	#DIV/0!	74.638.470	#DIV/0!	32,20
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase	100	231.817.500	100	74.638.470	#DIV/0!	74.638.470	#DIV/0!	32,20
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	225	231.817.500	50	74.638.470	50,00	74.638.470	22,22	32,20
3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100	417.271.500	100	121.053.600	200,00	206.048.800	200,00	49,38
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100	417.271.500	100	121.053.600	200,00	206.048.800	200,00	49,38
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	18	262.726.500	3	84.904.400	8,00	169.899.600	44,44	64,67
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Orang	225	154.545.000	100	36.149.200	200,00	36.149.200	88,89	23,39

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sikka s/d Tahun 2024 (%)	
4		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase	100	6.769.071.000	100	711.446.915	200,00	2.576.461.506	200,00	38,06
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kebijakan Teknis Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase	100	6.769.071.000	100	711.446.915	200,00	2.576.461.506	200,00	38,06
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	45	6.769.071.000	45	711.446.915	66,00	2.576.461.506	146,67	38,06

2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah yang dihadapi Kabupaten Sikka saat ini adalah sebagai berikut :

2.6.1 Permasalahan Berdasarkan aspek sasaran Pembangunan

1. Kualitas pembangunan manusia masih kurang, disebabkan oleh :
   a. Kualitas Pendidikan Kabupaten Sikka Masih Rendah
   b. Masih rendahnya derajat Kesehatan Masyarakat
   c. Kualitas Hidup Masyarakat masih rendah
   d. Masih ada kesenjangan Pembangunan Manusia antar gender

2. Perekonomian kabupaten Sikka meningkat dengan baik, namun tingkat kesejahteraan Masyarakat masih relatif rendah yang disebabkan oleh:
   a. Sektor primer (pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan) yang menjadi penopang PDRB mengalami pertumbuhan yang relatif rendah
   b. Sektor sekunder belum memiliki kemampuan untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor sekunder yang rendah dengan pertumbuhan yang juga relatif rendah
   c. Sektor Tersier memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang tinggi namun demikian belum mampu menarik pertumbuhan ekonomi, karena barang yang diperdagangkan produk mentah sehingga belum menghasilkan nilai tambah.

3. Permasalahan Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup Kualitas aksesibilitas infrastruktur masih rendah disebabkan oleh:
   a. Akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas masih rendah
   b. Kualitas Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau Masih Rendah
   c. Akses Hunian Layak, terjangkau dan berkelanjutan masih sangat rendah

4. Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah, Masih rendahnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan disebabkan oleh Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah.

5. Tatakelola pemerintahan kabupaten Sikka masih belum baik yang disebabkan oleh:
   a. Akuntabilitas Kinerja masih belum baik
   b. Akuntabilitas Keuangan sudah baik, namun masih terdapat catatan dan kemandirian fiskal daerah yang masih rendah
   c. Efektivitas Pemerintahan masih belum baik
   d. Masih terus terjadi gangguan ketertiban dan keamanan di daerah
   e. Kualitas Pelayanan Publik belum baik

2.6.2 Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pendidikan
   - Intelektualitas dan karakter anak usia sekolah masih rendah
   - Masih rendahnya partisipasi anak usia sekolah
   - Kualitas kurikulum pendidikan masih rendah

- Mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan masih rendah
- Kualitas dan distribusi satuan Pendidikan belum optimal
- Bahasa dan sastra daerah belum terlestarikan
- Literasi Masyarakat masih rendah, disebabkan oleh :
- Layanan Perpustakaan belum sesuai Standar Nasional Perpustakaan
- Kualitas perpustakaan dan pustakawan masih rendah

2. Kesehatan
   - Derajat kesehatan Masyarakat masih rendah
   - Kualitas Kesehatan Keluarga rendah, disebabkan oleh :
   - Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat rendah
   - Mutu dan distribusi tenaga kesehatan masih rendah
   - Kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman masih rendah
   - Kualitas pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan masih rendah
   - Akreditasi pelayanan Kesehatan masih rendah

3. Pekerjaan Umum
   - Kualitas aksesibilitas Infrastruktur masih rendah
   - Akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas masih rendah
   - Aksesibilitas transportasi Masyarakat yang nyaman dan aman masih rendah
   - Kualitas Irigasi yang masih rendah
   - Kualitas sistem drainase perkotaan yang masih rendah
   - Akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum masih rendah
   - Akses Masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah masih rendah
   - Layanan Persampahan Regional masih rendah
   - Kualitas Bangunan Gedung yang masih rendah
   - Bangunan dan Lingkungan yang tertata masih rendah
   - Kompetensi tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil masih rendah
   - Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang masih rendah

4. Perumahan dan Pemukiman
   - Akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan masih rendah,
   - Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Masih Rendah
   - Kawasan Permukiman Kumuh Masih Tinggi
   - Masih rendahnya rumah layak huni MBR
   - Penyediaan PSU Permukiman masih rendah

5. Keamanan dan Ketertiban
   - Ketentraman dan ketertiban kehidupan Bermasyarakat belum baik
   - Kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada masih perlu ditingkatkan
   - Penanggulangan Bencana perlu ditingkatkan,

- Penanganan bencana pada saat tanggap darurat masih perlu ditingkatkan
- Kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM,
- Penanganan konflik sosial yang diselesaikan perlu diperbaiki
- Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non-Kebakaran, disebabkan oleh Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non-Kebakaran perlu diperbaiki

6. Sosial
   - Kesejahteraan sosial masih rendah
   - Pemberdayaan sosial yang masih rendah
   - Perlindungan dan Jaminan Sosial masih rendah
   - Rehabilitasi sosial yang masih rendah
   - Tingkat perlindungan korban bencana yang rendah

7. Tenaga Kerja
   - Kesempatan dan produktivitas tenaga kerja masih rendah
   - Informasi tenaga kerja masih rendah
   - Produktivitas tenaga Kerja masih rendah
   - Penempatan tenaga Kerja rendah
   - Rendahnya pemberi kerja yang melindungi tenaga kerja
   - Rendahnya perlindungan hak-hak pekerja

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   - Masih ada kesenjangan pembangunan antar gender
   - Kesetaraan gender dan perlindungan anak masih rendah
   - Kekerasan terhadap Perempuan masih tinggi
   - Kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak masih rendah
   - Pemanfaatan data gender dan anak masih rendah
   - Jaminan pemenuhan hak semua anak secara komprehensif masih rendah
   - Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak masih rendah

9. Keluarga Berencana
   - Belum terwujudnya keluarga berkualitas
   - Pengendalian pertambahan jumlah penduduk yang rendah
   - Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) masih rendah
   - Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) masih rendah

10. Ketahanan Pangan
    - Ketahanan pangan kabupaten sikka masih relatif rendah, namun demikian kinerjanya terus meningkat selama 5 tahun terakhir,

- Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan belum mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi lokal sehingga Sikka masih bergantung dengan pasokan dari luar
- Tingkat keragaman pangan masyarakat Kab. Sikka kinerjanya terus meningkat namun demikian hingga tahun 2024 keragaman konsumsinya masih relatif lebih rendah dari angka capaian nasional
- Masih terdapat desa-desa yang mengalami rawan pangan transien akibat dari perubahan iklim atau bencana pertanian
- Masih terdapat pangan segar yang terindikasi mengandung residu pestisida, walaupun tingkat kejadiannya semakin menurun

11. Lingkungan Hidup
    - Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah
    - Masih rendahnya Kualitas Air, Udara, Tutupan lahan dan pengelolaan persampahan, disebabkan oleh Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah
    - Pengendalian Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Masih Rendah
    - Rendahnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan
    - Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masih Rendah
    - Masih rendahnya tata Kelola persampahan
    - Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP masih rendah
    - Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang masih tinggi
    - Kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH masih rendah
    - Kapasitas SDM bidang lingkungan hidup masih rendah
    - Penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana LH masih rendah
    - Kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati masih rendah
    - Kualitas Tutupan Lahan masih rendah
    - Belum optimalnya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati
    - Masih lemahnya sistem pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan dan izin PPLH.
    - Belum terpenuhinya target proporsi RTH publik dan privat sesuai amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
    - Tingginya laju kerusakan DAS akibat deforestasi, pertambangan, dan praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan.

12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    - Proses pelayanan belum sesuai standar yang ditetapkan
    - Masih rendahnya kualitas layanan pendaftaran penduduk
    - Rendahnya kualitas layanan pencatatan sipil
    - Masih belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan informasi kependudukan
    - Belum meningkatnya kualitas profil kependudukan

13. Perhubungan
    - Kualitas Layanan Transportasi yang nyaman,aman, dan terjangkau masih rendah
    - Kualitas layanan transportasi darat yang berkualitas masih rendah
    - kualitas layanan transportasi penyeberangan masih rendah

14. Komunikasi dan Informatika
    - Penerapan Tata Kelola SPBE belum maksimal
    - Pengelolaan informasi dan komunikasi publik perlu diperbaiki.
    - Masih rendahnya pengelolaan aplikasi informatika.
    - Penerapan layanan statistik belum maksimal
    - Belum adanya SDM berkompetensi untuk penanganan keamanan data dan aplikasi
    - Penyelenggaraan Statistik bersifat sectoral (belum terintegrasi)

15. Kearsipan
    - Pengelolaan Arsip belum baik
    - Tata kelola arsip dinamis dan statis masih rendah.

16. Pemberdayaan Masyarakat dan desa
    - Kualitas penataan desa belum maksimal.
    - Sudah ada kerja sama antar desa dan dengan pihak lain namun implementasinya belum optimal
    - Administrasi pemerintahan desa sudah terintegrasi namun SDM yang mengimplementasikan masih terbatas
    - Kapasitas Lembaga kemasyarakatan belum optimal.
    - Kualitas dan Kompetensi Perangkat Desa masih rendah sehingga perlu ditingkatkan

17. Koperasi dan UMKM
    - Pelayanan izin usaha simpan pinjam masih rendah akibat adanya perubahan regulasi yang membebani pengawas dan pengurus
    - Kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan koperasi masih rendah
    - Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi tidak mengalami kendala namun koperasi yang mendapatkan fasilitas penilaian terbatas
    - Pendidikan dan pelatihan perkoperasian belum optimal diakibatkan keterbatasan anggaran
    - Kompetensi SDM Pengurus dan Pengawas Koperasi Masih rendah karena pendidikan dan pelatihan belum merata
    - Pemberdayaan dan perlindungan koperasi belum optimal
    - Pemberdayaan UMKM belum merata meskipun pertumbuhan usaha mikro meningkat setiap tahunnya
    - Pengembangan UMKM sudah dilaksanakan namun belum optimal hanya sedikit Usaha Mikro yang memiliki daya saing dan belum mumpuni untuk ekspor

- Penguatan badan hukum koperasi tidak ada masalah, namun kesadaran untuk Masyarakat untuk mengelola badan hukumnya masih terbatas

18. Penanaman modal
    - Pengembangan iklim penanaman modal masih belum maksimal, hal ini tercermin dari tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan
    - Promosi penanaman modal masih dikelola secara tradisional dan parsial, akibatnya jumlah investor masih terbatas
    - Pengendalian pelaksanaan penanaman modal masih kurang
    - Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal masih dilakukan secara konvensional
    - Kerjasama penanaman modal masih kurang

19. Pertanahan
    - Keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah belum baik
    - Masih kurangnya kejelasan hak milik atas tanah
    - Masih terdapat konflik, sengketa dan perkara pertanahan
    - Tata kelola sistem informasi manajemen pertanahan harus ditingkatkan

20. Kepemudaan dan Olahraga
    - Daya saing kepemudaan masih rendah
    - Pembudayaan dan prestasi olah raga masih rendah
    - Rendahnya kualitas kepramukaan

21. Kebudayaan
    - Adanya degradasi nilai-nilai budaya sehingga menyebabkan hilangnya identitas dan budaya tradisional
    - Pengembangan kebudayaan masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan masih belum bersifat penuh
    - Pengembangan kesenian tradisional belum dapat dilakukan sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari kemampuan untuk mengembangkan kesenian baru mencapai angka 45%
    - Pembinaan sejarah belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini data dilihat dari kemampuan untuk melakukan peninjauan terhadap sejarah lokal baru mencapai 50 % dari jumlah desa.
    - Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya belum dapat dilakukan secara baik. WBTB dan Cagar Budaya yang dilestarikan baru mencapai 11,46%; demikian juga dengan budaya tak benda yang dilestarikan masih rendah
    - Pengelolaan museum masih terbatas. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan ke museum yang masih rendah

22. Pertanian
    - Tingkat Kesejahteraan petani masih rendah

- Terjadi fluktuasi produksi tanaman pangan setiap tahun akibat dari keterbatasan sarana produksi pertanian
- Prasarana pertanian yang berupa PLP2B telah ditetapkan dalam tahun 2020, namun belum diimplementasikan secara konsisten, demikian juga dengan sarana lainnya sperti jalan pertanian maupun jaringan irigasi yang relatif terbatas
- Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner sudah dilakukan akan tetapi belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan secara optimal
- Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian masih belum optimal.
- Pelayanan untuk izin pembukaan usaha belum ada, akan tetapi pelayanan pendampingan usaha sudah ada.
- Kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian masih terbatas dan kompetensi belum memadai

23. Pariwisata
- Pariwisata dan ekonomi kreatif masih rendah
- Daya tarik destinasi pariwisata masih rendah
- Jangkauan pemasaran pariwisata masih rendah
- Kualitas ekosistem ekonomi kreatif masih rendah
- Kapasitas SDM pariwisata dan ekosistem kreatif masih rendah

24. Perikanan
- Kesejahteraan Nelayan dan pembudidaya ikan cenderung fluktuatif dan rendah
- Produksi perikanan tangkap masih fluktuatif diakibatkan perubahan cuaca, sarpras nelayan tidak mumpuni, manajemen yang belum baik dan adanya pembatasan kewenangan kabupaten.
- Produksi perikanan budidaya belum berkembang dengan optimal, karena kemampuan SDM pembudidaya ikan dalam pengembangan perikanan masih rendah, juga adanya regulasi yang membatasi budidaya laut

25. Perdagangan
- Pertumbuhan sektor perdagangan yang tinggi kurang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal
- Perizinan berusaha sektor Perdagangan sudah berbasis online melalui aplikasi OSS di DPMPTSP sehingga kewenangan Dinas menjadi terbatas untuk melakukan pengawasan usaha perdagangan.
- Kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien dan terintegrasi belum merata
- Kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting masih sangat bergantung dari pasokan luar daerah
- Pelaku usaha yang berorientasi pasar luar kabupaten masih terbatas dengan produk utama adalah produk mentah
- Tertib niaga dan mutu produk masih rendah

26. Perindustrian
- Daya Saing Industri masih rendah
- Perencanaan dan Pembangunan industri dijalankan tanpa ada Peraturan daerah sehingga menghambat pengelolaan bidang Perindustrian
- Perizinan berusaha sektor Perindustrian sudah berbasis online melalui aplikasi OSS di DPMPTSP sehingga kewenangan Dinas Perindustrian menjadi terbatas untuk melakukan pengawasan usaha Perindustrian
- Informasi industri sudah tersedia tetapi pelaku usaha masih belum mampu menggunakan aplikasi digital

27. Transmigrasi
- Pengembangan wilayah baru transmigran masih rendah
- Pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi masih rendah
- Peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi olahraga masih rendah
- Kualitas dan kuantitas sarpras masih kurang, disebabkan oleh :
- Pelaksanaan transmigrasi belum terlaksana dengan baik
- Kawasan transmigrasi belum berkembang (Jumlah Kawasan (UPT))
- Belum terbudayakannya kawasan transmigrasi

28. Perencanaan Pembanguan
- Akuntabilitas Kinerja pemerintahan belum baik
- Perencanaan masih belum baik
- Kualitas perencanaan pembangunan daerah masih rendah
- Kualitas perencanaan pembangunan bidang

29. Pengawasan
- Kualitas pengawasan internal masih buruk
- Penyelenggaraan pengawasan belum maksimal
- Kualitas pendampingan dan asistensi masih rendah

30. Keuangan
- Akuntabilitas Keuangan Pemerintah masih belum baik
- Kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan masih kurang, disebabkan oleh Tata kelola anggaran, perbendaharaan dan pelaporan belum baik (keuangan)
- Pengelolaan aset belum baik
- Belum optimalnya penatausahaan barang milik daerah (keuangan)
- Pendapatan Daerah (PAD) yang masih rendah
- Tata kelola PAD dan pengelolaan keuangan yang belum efektif

31. Penelitian dan Pengembangan
- Kebijakan Inovasi Daerah masih kurang baik, disebabkan oleh :
- Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
- Pemanfaatan Inovasi daerah perlu ditingkatkan.

32. Kepegawaian
- SDM Aparatur yang belum profesional
- Pengelolaan pegawai daerah belum maksimal
- Indeks Profesionalitas ASN sangat rendah
- Masih rendahnya profesionalitas ASN

33. Sekretarian Daerah
- Efektivitas Pemerintahan masih kurang baik
- Penataan Organisasi belum maksimal, disebabkan oleh :
- Tata kelola organisasi pemerintah daerah masih belum baik
- Kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah belum maksimal
- Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat belum efektif
- Pelaksanaan kebijakan Perekonomian dan Pembangunan belum maksimal
- Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum masih kurang baik
- Pelaksanaan Kebijakan pelayanan pengadaan barang dan jasa masih minim.
- Kebijakan administrasi Pembangunan perlu diitingkatkan
-

34. Pemerintahan Umum
- Efektivitas Pemerintahan masih kurang
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
- Masih rendahnya etika dan budaya politik
- Organisasi kemasyarakatan kurang aktif dalam pembangunan daerah
- Masih lemahnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; kebijakan di bidang ketahanan, ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Indikator makro merupakan salah satu indikator kunci daerah untuk melihat potensi ekonomi daerah. Inti dari upaya meningkatkan daya saing yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator makro seperti produk domestik bruto (PDB), stabilitas harga, dan tingkat pengangguran sebagai ukuran kesejahteran. PDB menunjukkan ukuran perekonomian. Stabilitas harga memberikan informasi kepastian bagi pelaku ekonomi untuk mengalokasikan sumber daya. Adanya ketidakstabilan akan mengurangi akumulasi sumber daya manusia, hal ini juga mengurangi laju pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, laju pertumbuhan yang rendah akan mempengaruhi permintaan agregat dan menimbulkan banyaknya sumberdaya yang tidak produktif.

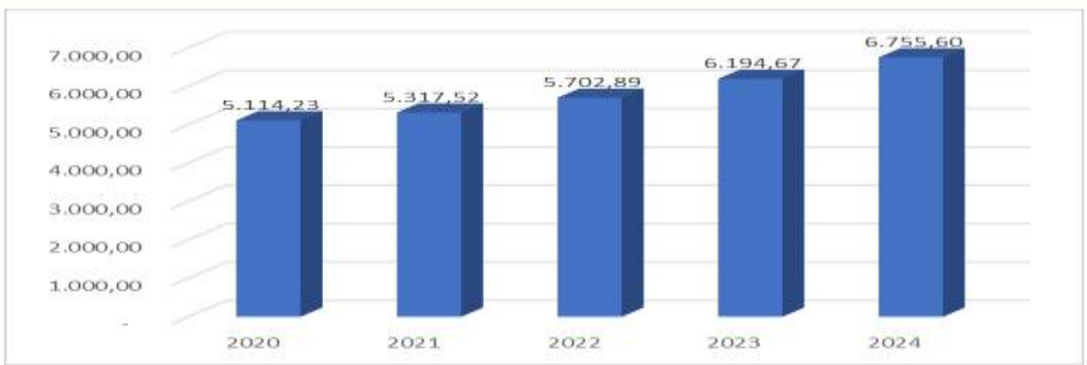
Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tidak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar, dan lain-lain. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai indikator-indikator ekonomi daerah sebagai berikut:

3.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dari masyarakat dalam wilayah domestik suatu daerah. PDRB terdiri dari :

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
   PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun perhitungan. PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.1.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



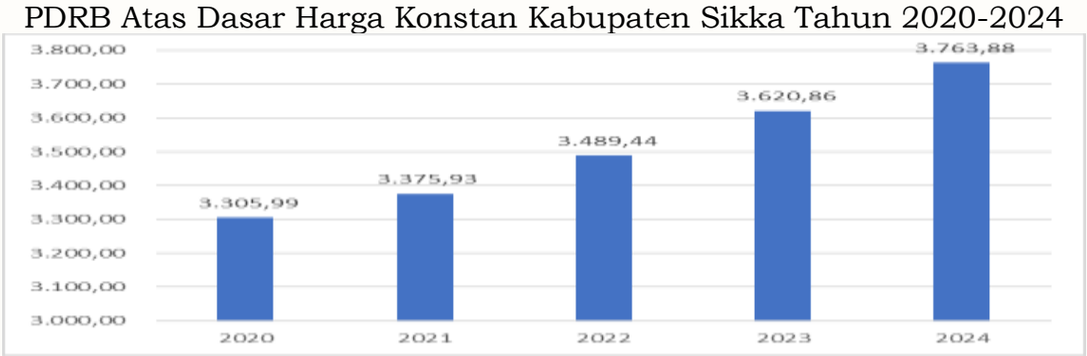
Sumber Data : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2020 sebesar Rp5.114,23,- triliun mengalami kenaikan pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp5.317,52,-

triliun pada Tahun 2022 meningkat lagi menjadi Rp5.702,89, triliun pada Tahun 2023 naik menjadi sebesar Rp6.194,67 triliun dan pada Tahun 2024 naik menjadi sebesar Rp6.755,60 triliun.

2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).
PDRB ADHK dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



Sumber : Data Olahan dari Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

PDRB ADHK Kabupaten Sikka dari Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 PDRB ADHK sebesar Rp3.305,99 triliun mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp3.375,93, triliun naik pada Tahun 2022 menjadi sebesar Rp3.489,44 triliun dan naik pada tahun 2023 sebesar Rp3.620,86 triliun dan naik lagi pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp3.763,88.

3. Pembentukan Sektor dalam PDRB
Pembentukan Nilai PDRB dari masing-masing Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Sektor	Nilai (Rp. Juta)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.162.265,78	1.203.838,17	1.255.464,77	1.309.050	1.351.600
2	Pertambangan dan Penggalian	44.796,23	45.765,52	46.792,06	47.770	49,410
3	Industri Pengolahan	54.264,11	54.780,10	58.362,76	62,760	65,170
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.326,75	4.591,35	4.670,87	5.200	5,670
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.488,46	3.757,46	3.788,48	3.850	3,920
6	Konstruksi	168.823,53	173.110,78	174.588,89	188.310	192,860
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	357.056,81	362.122,77	387.588,56	409.900	447,160
8	Transportasi dan Pergudangan	175.100,96	178.803,10	186.938,10	191.300	182,870
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20.213,73	20.946,90	22.067,05	23.530	24,750
10	Informasi dan Komunikasi	302.298,42	315.765,87	331.317,48	344.760	360,250
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	111.956,04	113.940,61	114.825,90	115..740	119,500
12	Real Estate	66.857,53	68.829,71	71.260,99	73.690	76,500
13	Jasa Perusahaan	6243,02	5611,22	5772,34	6.120	6,460
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	426.643,91	426.170,20	427.024,36	427.570	443,730
15	Jasa Pendidikan	288.754,74	284.115,88	283.636,58	292.000	309,850
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69.519,82	72.695,28	73.963,49	75.470	78,810
17	Jasa lainnya	43.060,78	41.186,00	41.761,91	43.800	45,360
	PDRB	**3.305.670,65**	**3.376.030,93**	**3.489.820**	**3.620.860**	**3.763.880**

Sumber: *Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025*

Dilihat dari sumber pembentuknya, PDRB Kabupaten Sikka hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian, dengan nilai sekitar Rp1,3 triliun lebih. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2024, Nilai sektor sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp1.351.600 triliun, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp447,160,- dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp443,730 triliun. Sedangkan nilai sektor yang paling kecil pada sektor Jasa Perusahaan sebesar Rp6.460 triliun, sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp5.670 triliun dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp3.920 triliun.

Dari Besaran pembentukan Nilai PDRB dari masing-masing Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 secara Persentase dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Persentase Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Sektor	Kontribusi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	36,41	37,43	38,17	38,53	38,51
2	Pertambangan dan Penggalian	1,14	1,12	1,09	1,04	0,99
3	Industri Pengolahan	1,75	1,7	1,71	1,84	1,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,13	0,13	0,14	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08
6	Konstruksi	4,74	4,76	4,71	4,85	4,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,48	10,36	10,79	11,12	11,41
8	Transportasi dan Pergudangan	5,15	5,06	5,39	5,57	4,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61
10	Informasi dan Komunikasi	6,25	6,3	6,19	5,96	5,88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,86	3,92	3,95	3,75	3,61
12	Real Estate	1,94	1,91	2	2,06	2,17
13	Jasa Perusahaan	0,2	0,18	0,18	0,17	0,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,22	12,86	12,08	11,55	11,88
15	Jasa Pendidikan	10,63	10,17	9,65	9,41	9,63
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,16	2,24	2,14	2,19	2,39
17	Jasa lainnya	1,24	1,16	1,13	1,11	1,1
	PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: *Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025*

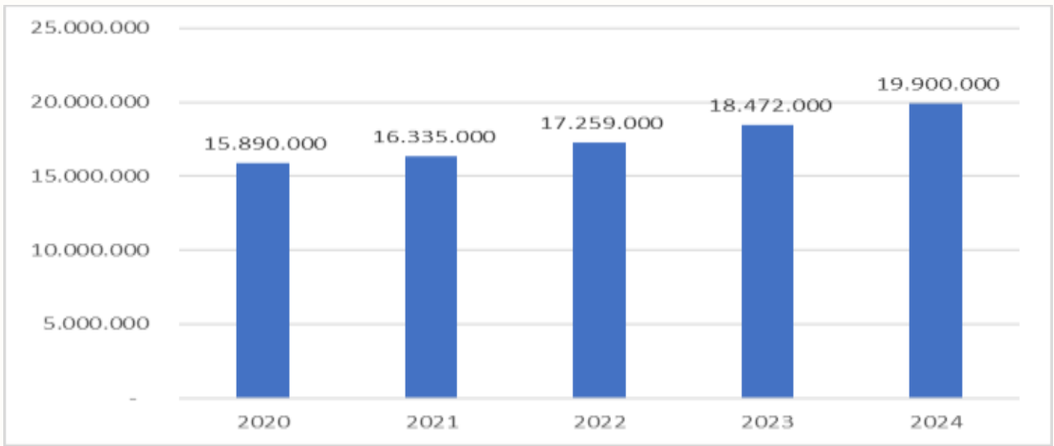
Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Sikka hingga tahun 2024 masih didominasi dari sektor pertanian sebesar 38%, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 11,41%, dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,88%. Sedangkan kontribusi sektor yang paling kecil pada sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,17%, sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,13% dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang hanya berkontribusi sebesar 0,08%.

3.1.2. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita dihitung dengan membagi total pendapatan (seperti Produk Domestik Bruto/PDB) dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita Kabupaten Sikka dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2020 Pendapatan perkapita Kabupaten Sikka sebesar Rp15.890.000 naik lagi pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp16.335.000,-. Pada tahun 2022 Pendapatan Perkapita naik menjadi

sebesar Rp17.259.000,- dan pada tahun 2023 naik lagi menjadi sebesar Rp18.472.000,-. Pada Tahun 2024 Pendapatan Perkapita menjadi sebesar Rp.19.900.000,-. Pendapatan perkapita Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 3.3
Pendapatan Perkapita Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

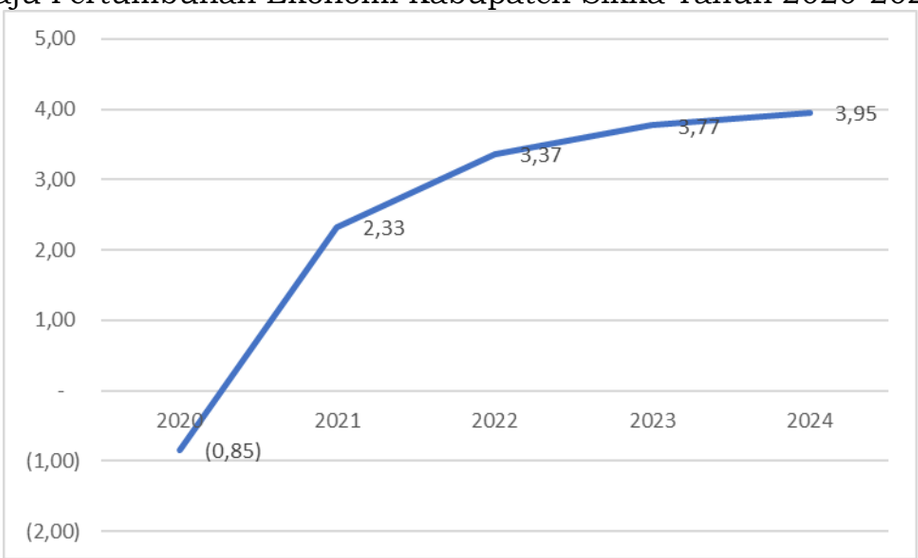


Sumber: *Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025*

3.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka selama periode tahun 2021–2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kabupaten sikka -0,85 mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 2,33% dan terus meningkat pada tahun 2022 sebesar 3,37%, naik lagi tahun 2023 sebesar 3,77% dan pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan lagi menjadi 3,95%.

Grafik 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



Sumber: *Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025*

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka dilihat dari Pertumbuhan masing-masing sektor PDRB menurut sektor/lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,8	3,58	4,24	4,32	3,25
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,29	2,16	2,24	2,10	3,42
3.	Industri Pengolahan	-3,26	0,95	6,54	7,53	3,84
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	8,73	6,12	1,73	11,28	9,16
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,18	7,71	0,83	1,73	1,65
6.	Konstruksi	-8,71	2,54	0,85	7,86	2,42
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,18	1,42	7,03	5,71	9,20
8.	Transportasi dan Pergudangan	-17,35	2,11	4,5	2,33	-4,40
9.	Penyediaan Akomodasi makan dan Minum	-15,24	3,63	5,35	6,19	5,21
10.	Informasi dan Komunikasi	7,21	4,46	4,93	4,06	4,49
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,44,	1,77	0,78	0,79	3,25
12.	Real Estate	-2,32	2,95	3,53	3,41	3,81
13.	Jasa Perusahaan	-31,07	-10,12	2,87	6,09	5,50
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,14	-0,11	0,2	0,13	3,78
15.	Jasa Pendidikan	0,72	-1,61	-0,17	2,96	5,95
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,9	4,57	1,74	2,04	4,43
17.	Jasa Lainnya	-11,52	-4,35	1,4	4,87	3,58
	Total	**-0,85**	**2,13**	**3,37**	**3,77**	**3,95**

Sumber: *Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025*

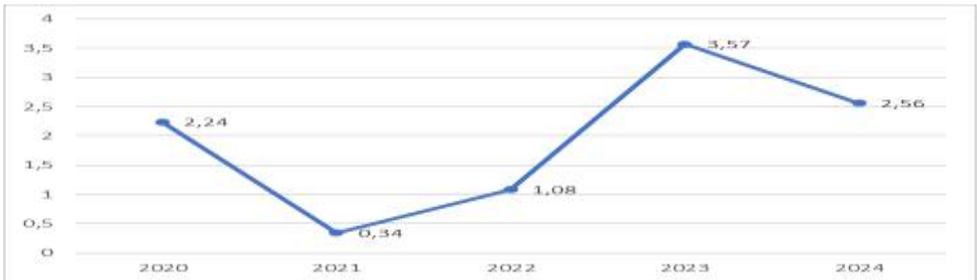
Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dari masing-masing sektor lapangan usaha kontribusi PDRB Kabupaten Sikka tahun 2024 tertinggi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,20 meningkat dari 5,71 pada tahun 2023. Sektor Jasa pendidikan sebesar 5,95 meningkat dari Tahun 2023 sebesar 2,96. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 4,43 meningkat dari tahun 2023 sebesar 2,04, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,25 meningkat dari Tahun 2023 sebesar 0,79.

Sedangkan Sektor ekonomi yang mengalami perlambatan terdapat pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar -4,40 menurun dari Tahun 2023 sebesar 2,33, Sektor Industri Pengolahan sebesar 3,84 menurun dari Tahun 2023 sebesar 7,53, Sektor Konstruksi sebesar 2,42 pada tahun 2024 menurun dari Tahun 2023 sebesar 7,86.

3.1.4. Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga barang-barang secara umum. Apabila terjadi kenaikan harga barang (inflasi) tanpa dibarengi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, maka akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan akibatnya adalah terjadinya kemacetan transaksi yang selanjutnya akan berdampak pada sektor produksi dan perekonomian secara keseluruhan.

Grafik 3.5
Inflasi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa inflasi Kabupaten Sikka mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 inflasi sebesar 2,24 persen, menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,34 persen. Pada tahun 2022 naik menjadi sebesar 1,08 persen, naik lagi pada tahun 2023 menjadi sebesar 3,57 persen dan turun pada tahun 2024 menjadi sebesar 2,56 persen.

Jika dibandingkan dengan Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024 sebesar 0,47 dan Nasional sebesar 1,57, Maka Inflasi Kabupaten Sikka masih terlalu tinggi. Perbandingan Inflasi Kabupaten Sikka dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Inflasi Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024

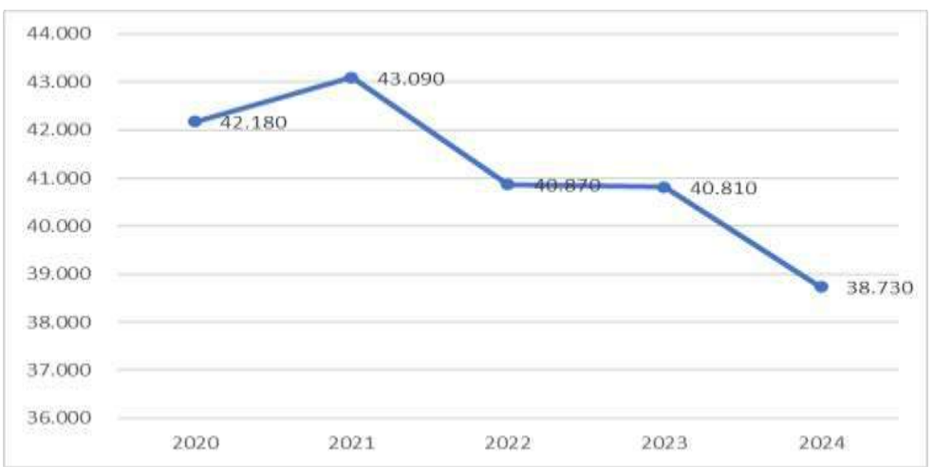
No	Wilayah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Sikka	2,24	0,34	1,08	3,57	2,56
2.	Provinsi NTT	0,61	1,67	6,65	2,42	0,47
3.	Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57

Sumber : NTT dalam Angka, 2025

3.1.5. Angka **Kemiskinan**

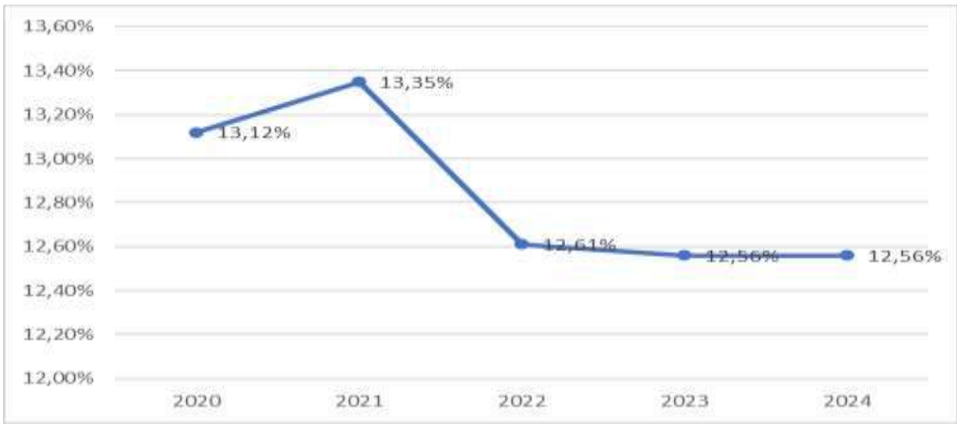
Kesuksesan pembangunan dapat diukur dengan angka kemiskinan yang dihitung berdasarkan persentase orang miskin di suatu wilayah. Persentase orang miskin di Kabupaten Sikka lebih rendah dibandingkan dengan tingkat Provinsi NTT, namun lebih tinggi dari Nasional. Jika dibandingkan dengan penurunan kemiskinan di tingkat provinsi dan nasional, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sikka mengalami perkembangan yang tidak positif. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sikka dari Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.6.
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



Dari grafik diatas, Jumlah Penduduk miskin Kabupaten Sikka dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 42.180 jiwa (13,12%), naik pada tahun 2021 menjadi 43.090 jiwa (13,35), turun lagi di tahun 2022 menjadi 40.870 jiwa (12,61%) dan turun Lagi di tahun 2023 menjadi 40.810 jiwa (12,56%) dan di tahun 2024 turun lagi menjadi 38.730 jiwa (11,89%). Persentase kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 3.7.
Persentase kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sikka Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sikka

No	Indikator	Nasional	Provinsi	Sikka
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,3	3,95 – 4,75	4,3
2	Pendapatan Nasional Bruto Perkapita	5.870		
3	PDB Perkapita		24.71–25,25	20.172.000
4	Tingkat Kemiskinan	6,5-7,5	18,12-18,17	
	Prosesntase penduduk miskin		18,81-18,74	11,13
5	Tingkat Pengangguran Terbuka		2,39-2,94	4,42
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	37,14		
7	Indeks Kualitas Lingkungan	76,67	80,18	75,21
8	Indeks Modal Manusia	0,57		
	Indeks Pembangunan Manusia		0,463	69,97
9	Rasio Gini	0,377-0,380	0,319	0,2355

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Sikka dapat dilihat dari pengelolaan pendapatan, Pengelolaan Belanja dan pengelolaan Pembiayaan. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan dalam perpajakan terkait dengan prinsip keadilan horisontal dan vertikal. Keadilan horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip keadilan vertikal dilandasi pada konsep bahwa masyarakat dengan kondisi yang berbeda, diperlakukan secara berbeda pula. Implikasinya adalah masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi atau memiliki kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sikka, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi

pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam struktur APBD Kabupaten Sikka.

Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Dilihat dari struktur APBD Kabupaten Sikka, penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, yaitu Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB-P2 dan BPHTB merupakan sumber pendapatan primadona bagi Kabupaten Sikka. Sedangkan Pajak Reklame masih harus ditingkatkan lagi upaya pencapaiannya sesuai potensi yang terukur yang dapat dicapai. Mengingat dampak pajak yang signifikan, pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan pajak daerah, tentu saja dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan sesuai kriteria dan persyaratan kementerian/lembaga dalam rangka mendukung capaian RPJMN yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak pusat dan provinsi diupayakan melalui upaya meningkatkan aktivitas ekonomi yang berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal DBH. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Sikka berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Jenis Pendapatan Daerah yang menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah dalam menggali berbagai potensi sumber-sumber penerimaan dan upaya untuk mendapatkannya adalah PAD. Sedangkan jenis Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sangat bergantung pada kebijakan alokasi anggaran dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Komponen pembentuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan (DBH, DAU dan DAK), Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Desa dan Dana Insentif Daerah (DID). Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari DBH dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari Pendapatan Hibah, Pendapatan Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah dijabarkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah
   Jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat kabupaten, meliputi : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-PP), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
b. Retribusi Daerah
   Retribusi Pemerintah Kabupaten Sikka terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 12 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 13 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
   Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan berasal dari dividen laba BUMD yakni PT. Bank NTT dan Perumda Mawarani. Sedangkan Perumda Air Minum Wair Puan belum memberikan kontribusi terhadap PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya: Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Tuntutan Ganti rugi, Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan, Pendapatan BLUD, dll.

Besaran Realisasi Pendapatan Asli daerah dari Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Kode	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
4.1	PAD	**119.601.046.361,49**	**86.021.344.041,33**	**96.165.854.550,58**	**105.869.332.988**	**104.966.732.135**
4.1.01	Pajak Daerah	19.161.863.076,19	19.329.069.532,90	21.715.997.250	35.847.445.100	27.382.123.467
4.1.02	Retribusi Daerah	9.165.525.046	7.774.169.774	8.256.039.482	16.100.605.548	7.512.689.058
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.602.950.139	2.694.036.222	1.707.467.340	1.707.467.340	1.698.073.291
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	88.670.708.100	56.224.068.512,43	64.486.350.478,58	52.213.815.000	68.373.846.319

Sumber : Data Olahan dari BPKAD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Pandapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka dari Tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 PAD sebesar Rp119.601.046.361,49, menurun pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp86.021.344.041,33. Pada tahun 2022 PAD meningkat menjadi sebesar Rp96.165.854.550,58 dan naik lagi pada Tahun 2023 menjadi sebesar Rp105.869.332.988. Pada Tahun 2024 PAD menurun menjadi sebesar Rp104.966.732.135.

3.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Dana Transfer meliputi Transfer Pusat; Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum berupa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dan Dana Transfer Khusus berupa DAK Fisik dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa serta Transfer Antar Daerah; Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Transfer ke Daerah terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil
   Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam.
b. Dana Alokasi Umum
   Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi.
   Besarnya Dana Alokasi Umum yang ditransfer ke daerah ditentukan oleh Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF). Yang menentukan alokasi dasar adalah gaji ASN di daerah. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Kapasitas Fiskal dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan PDRB per kapita, serta besarnya belanja daerah. Kapasitas Fiskal adalah penjumlahan PAD, DBH Pajak, dan DBH SDA
c. Dana Alokasi Khusus
   Dana Alokasi Khusus merupakan dana berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.
   DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat khusus untuk membiayai pelaksanaan program prioritas nasional di daerah. Penggunaan dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini lebih efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.
d. Dana Desa
   Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
e. Dana Insentif Daerah
   Dana Insentif Daerah yang disingkat DID adalah Dana Penyesuaian dalam APBN yang digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan dasar yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu.

Besaran Realisasi Pendapatan Transfer dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Dana Perimbangan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Kode	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**970.348.407.694**	**860.935.612.981**	**793.668.619.861**	**1.066.948.485.575**	**1.067.065.850.070**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	943.927.792.048	830.211.032.981	762.805.369.810	1.032.717.423.000	1.027.157.386.210
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.420.615.646	30.724.580.000	30.863.250.051	34.231.062.575	39.908.463.860

Sumber : Data Olahan dari BPKAD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Transfer Kabupaten Sikka dari Tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun

2020 Pendapatan Transfer sebesar Rp970.348.407.694, menurun pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp860.935.612.981,- dan menurun lagi pada Tahun 2022 menjadi sebesar Rp793.668.619.861. Pada tahun 2023 pendapatan Transfer naik menjadi sebesar Rp1.066.948.485.575 dan pada Tahun 2024 naik lagi menjadi sebesar Rp1.067.065.850.070.

3.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, DBH Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Dana Desa dan DID. Besaran Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2020-2024

Kode	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**38.635.990.000**	**22.180.150.993**	**42.275.991.207**	**34.035.136.275**	**14.508.282.076**
	Pendapatan Hibah	38.635.990.000				200.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		22.180.150.993	42.275.991.207	34.035.136.275	14.308.282.076
	Pendapatan Hibah Dana BOS		30,724,580,000	30.253.250.051	-	
	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	12.022.741.156	14.502.954.838	-

Sumber : Data Olahan dari BPKAD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp38.635.990.000, menurun pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp22.180.150.993,-. Pada Tahun 2022 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah naik menjadi menjadi sebesar Rp42.275.991.207, naik lagi pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp34.035.136.275 dan pada Tahun 2024 menurun menjadi sebesar Rp14.508.282.076.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah pada Tahun 2026, Kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan antara lain :

1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2) Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi;
3) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
4) Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD sebagai ujung tombak pelayanan publik;
5) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah dengan memperbaharui secara berkala data subyek-subyek pajak daerah dan retribusi daerah;
6) Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah;
7) Optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial melalui kerjasama dengan pihak swasta;
8) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
9) Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang

langsung ke bank/lembaga keuangan;
10) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar perangkat daerah pengelolaan pendapatan daerah;
11) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
12) Meningkatkan partisipasi dan peran Pihak Ketiga untuk penyediaan biaya pembangunan daerah;
13) Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
    a) meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
    b) meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui: peningkatan kapasitas sistem online pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
    c) meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
    d) meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
    e) membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face* dengan *fiscus*; dan
    f) Penegakan Perda tentang Pajak Daerah melalui pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah.
14) Meningkatkan dan mengefektifkan sosialisasi kenaikan tarif sesuai Perda dan Perbub kepada masyarakat secara luas;
15) Pendelegasian tugas kepada Camat selaku Koordinator Pungutan PBB P2.
16) Pemberian Keringanan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2022 dan Keputusan Gubernur NTT Nomor 453/KEP/HK/2024;

Mengacu pada kebijakan dan strategi upaya peningkatkan pendapatan daerah Tahun 2026, maka Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sikka Tahun 2026

Kode	URAIAN	2025	Rancangan 2026
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.318.820.000.000**	**1.378.369.657.129**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**113.690.380.553**	**115.049.336.648**
4.1.01	Pajak Daerah	38.156.900.345	38.489.745.362
4.1.02	Retribusi Daerah	7.512.689.058	63.526.192.209
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.000.000.000	2.054.668.682
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	67.020.791.150	10.978.730.395
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.184.620.828.947**	**1.228.913.895.281**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.145.138.584.000	1.189.722.532.395
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.482.244.947	39.191.362.886
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**20.508.790.500**	**34.406.425.200**
	Pendapatan Hibah		
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.508.790.500	34.406.425.200

Sumber : Data Olahan Bapperida, 2025

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Target Pendapatan Daerah

Kabupaten Sikka Tahun 2026 mengalami penurunan dari tahun 2025. Pada tahun 2026 Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp**1.378.369.657.129**, menurun dari Tahun 2025 menjadi sebesar Rp1.318.820.000.000,-. Yang terdiri dari

- PAD Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp115.098.336.648, meningkat dari Tahun 2025 sebesar Rp113.690.380.553,- peningkatan ini dari komponen pajak daerah.
- Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp**1.228.913.895.281** menurun dari Tahun 2025 sebesar Rp1.184.620.828.947, penurunan ini tidak memperhitungkan penerimaan dari DAK Fisik tahun 2026.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp34.406.425.200,-

Rincian Pendapatan Daerah per Perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Rincian Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sikka Tahun 2026

NO	PERANGKAT DAERAH/URAIAN	PAGU
I	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**	**40.064.745.362**
1	PBJT-Hotel	1.288.582.050
2	BPHTB-Pemindahan Hak	3.675.000.000
3	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)	1.575.000.000
4	Opsen PKB	10.233.514.200
5	Pajak Air Tanah	109.525.290
6	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBBP2)	7.886.922.606
7	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.050.000.000
8	Pajak Reklame Berjalan	34.820.625
9	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	544.232.122
10	Pajak Sarang Burung Walet	32.550.000
11	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	143.423.438
12	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	10.710.000.000
13	PBJT-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)	31.500.000
14	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	2.052.267.000
15	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	54.682.031
16	PBJT-Restoran	642.726.000
II	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**6.967.029.426**
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Bank-NTT	2.054.668.682
2	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000
3	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	75.000.000
4	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan OlahragaRetribusi Tempat Olahraga Lapangan Gelora Samador Maumere	5.000.000
5	Retribusi Penyewaan BangunanPenyewaan Bangunan Mlik PEMDA	86.773.550
6	Retribusi Penyewaan TanahPenyewaan Tanah PEMDA	745.587.194
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	3.000.000.000
III	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)**	**1.140.009.629.486**
1	DBH PBB	733.311.000
2	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.465.300.000
3	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	500.000.000
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.714.370.000
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	617.300.000
6	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.297.500.000
7	DAK Non Fisik-BOS Reguler	51.147.077.000
8	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	13.276.795.000
9	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	431.855.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URAIAN	PAGU
10	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	27.255.606.000
11	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.664.658.000
12	DAK Non Fisik-TKG PNSD	19.771.243.000
13	DAK Non Fisik-TPG PNSD	86.267.545.000
14	Dana Desa	147.124.963.000
15	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	58.310.754.000
16	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.600.000.000
17	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	13.478.134.000
18	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	56.803.579.000
19	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	612.842.013.664
20	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	181.083.000
21	DBH PPh Pasal 21	4.333.665.000
22	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	464.644.000
23	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.301.000
24	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	145.000
25	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	284.596.000
26	DBH SDA Perikanan	2.195.036.000
27	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.800.558.416
28	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	3.392.298
29	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.905.156.059
30	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.771.353.242
31	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.710.902.871
32	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.453.212.600
IV	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**	**250.000.000**
1	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan Berupa Penjualan Produk Chosik	250.000.000
V	**BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**	**238.815.000**
1	Hasil Sewa BMDDisediakan Untuk Penerimaan Sewa Gedung SCC	238.815.000
VI	**DINAS PERIKANAN**	**3.000.000.000**
1	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Retribusi kapal 1 - 10 GT	10.050.000
2	Retribusi Pelayanan KepelabuhananRetribusi kapal 21 -30 GT	5.000.000
3	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus ParkirKendaraan roda 2 (dua)	15.000.000
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan BermotorSewa pemakaian Kendaraan Thermo King	30.000.000
5	Retribusi Pemakaian LaboratoriumPemeriksaan Mutu hasil ikan	150.000.000
6	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan Retribusi Pabrik Es Alok	1.017.680.000
7	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan Retribusi Pabrik Es Nangahale	706.560.000
8	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan IkanRetribusi Pabrik Es Nangahure	639.041.000
9	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat PelelanganSewa Lahan dan bangunan Depo	22.000.000
10	Retribusi Penyewaan Tanah dan BangunanSewa lahan / bangunan Cold Storage Nangahure	96.000.000
11	Retribusi Penyewaan Tanah dan BangunanSewa lahan / bangunan Cold Storage Paga	96.000.000
12	Retribusi Penyewaan Tanah dan BangunanSewa lahan / bangunan Cold Storage PPI Alok	96.000.000
13	Retribusi Penyewaan Tanah dan BangunanSewa Lahan / Bangunan Pabrik es Paga	70.000.000
14	Retribusi Penyewaan Tanah dan BangunanSewa Lahan / Bangunan SPDN Alok	46.669.000
VII	**DINAS KESEHATAN**	**20.963.212.600**
1	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Habibola	648.869.074
2	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Feondari	255.011.992
3	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Beru	1.058.375.520

NO	PERANGKAT DAERAH/URAIAN	PAGU
4	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Boganatar	296.851.954
5	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Bola	572.342.760
6	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Hewokloang	515.955.000
7	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Kewapante	684.138.840
8	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Kopeta	997.120.258
9	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Koting	389.135.610
10	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Lekebai	473.950.080
11	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Magepanda	632.368.440
12	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Mapitara	479.001.600
13	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Nanga	637.265.640
14	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Nelle	455.054.475
15	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Nita	1.168.927.920
16	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Paga	796.356.036
17	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Palue	383.812.840
18	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Tanarawa	507.414.266
19	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Teluk	555.084.480
20	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Tuanggeo	329.853.177
21	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Waigete	1.240.758.321
22	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Waipare	1.050.750.792
23	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Watubaing	901.014.840
24	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Wolofeo	559.766.285
25	Pendapatan Kapitasi JKN Puskesmas Wolomarang	864.032.400
26	Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Pasien Umum (Non JKN)	1.010.000.000
27	Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi JKN	1.500.000.000
28	Retribusi Pemakaian LaboratoriumRetribusi Pemakaian Laboratorium Daerah	2.000.000.000
VIII	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**10.000.000**
1	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMDRetribusi Radio	10.000.000
IX	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	**1.500.000.000**
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.500.000.000
X	**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**	**116.735.500**
1	Retribusi KiosSewa Loss di Pusat Jajanan dan Cenderamata Maumere	63.000.000
2	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus ParkirPelataran Parkir di Objek Wisata Tanjung Kajuwulu Kec. Magepanda dan Wairterang Kec. Waigete	8.640.000
3	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan OlahragaTiket Masuk / Entrance Fee Kajuwulu dan Wairterang	10.080.000
4	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan OlahragaToilet / Kamar Bilas / Kamar Ganti	4.032.000
5	Retribusi Pemakaian Alat Pemakaian Billboard	2.400.000
6	Retribusi Pemakaian Alat Pemakaian Sound System	1.500.000
7	Retribusi Pemakaian Alat Peralatan Diving	3.750.000
8	Retribusi Penyewaan Tanah dan BangunanSewa Rumah Panggung di Pusat Jajanan dan Cenderamata	23.333.500
XI	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**320.500.000**
1	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor Excavator	151.200.000
2	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor Whell Loader	69.300.000
3	Retribusi Pemakaian LaboratoriumPengujian Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi dan Pemakaian Alat Laboratorium Teknis	100.000.000
XII	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**265.500.000**
1	Retribusi Persetujuan Bangunan GedungRetribusi Persetujuan Bangunan Gedung	265.500.000
XIII	**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	**2.827.400.000**
1	Pasar Alok Pelataran Harian	78.000.000
2	Pasar Alok Pelataran Rombengan	130.000.000
3	Pasar Alok Pointein	97.000.000
4	Pasar Bola	2.400.000
5	Pasar Kewapante-Air	720.000
6	Pasar Kewapante-Barang Pecah Belah	10.000.000
7	Pasar Kewapante-Harian Sayur	12.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URAIAN	PAGU
8	Pasar Kewapante-Pelataran Rombengan	30.000.000
9	Pasar Kewapante-Pointein	9.600.000
10	Pasar Kewapante-Sandal Sepatu	8.400.000
11	Pasar Lekebai	7.500.000
12	Pasar Maumere-Air	15.000.000
13	Pasar Maumere-Pelataran Harian	78.000.000
14	Pasar Maumere-Pelataran Kue	3.000.000
15	Pasar Maumere-Pointein	75.000.000
16	Pasar Ndete	9.600.000
17	Pasar Nita	20.000.000
18	Pasar Talibura	15.000.000
19	Pasar Waigete	14.000.000
20	Retribusi KiosPasar Alok-Bangunan Tambahan Pintu Keluar	20.000.000
21	Retribusi KiosPasar Alok-Bangunan Tambahan Pintu Masuk	20.000.000
22	Retribusi KiosPasar Alok-Blok A	58.320.000
23	Retribusi KiosPasar Alok-Blok B	135.000.000
24	Retribusi KiosPasar Alok-Blok C	84.400.000
25	Retribusi KiosPasar Alok-Blok D	45.000.000
26	Retribusi KiosPasar Alok-Blok G	14.160.000
27	Retribusi KiosPasar Alok-Blok H	45.000.000
28	Retribusi KiosPasar Kewapante-Kios	43.300.000
29	Retribusi KiosPasar Maumere-Bangunan induk Lantai Atas	82.000.000
30	Retribusi KiosPasar Maumere-Bangunan Tambahan Tekstil	26.316.000
31	Retribusi KiosPasar Maumere-Kios Bangunan Induk Lantai Dasar	144.000.000
32	Retribusi KiosPasar Waigete-Retribusi Kios	14.000.000
33	Retribusi LosLos Textil Baru Barat Alok	7.500.000
34	Retribusi LosLos Textil Baru Timur Alok	7.500.000
35	Retribusi LosPasar Alok-Ayam Potong	37.000.000
36	Retribusi LosPasar Alok-Parut Kelapa	7.500.000
37	Retribusi LosPasar Kewapante-Los Penjahit	12.500.000
38	Retribusi LosPasar Kewapante-Los Sarung	1.900.000
39	Retribusi LosPasar Kewapante-Los Textil	37.500.000
40	Retribusi LosPasar Maumere-Bangunan Induk Barang Pecah Belah	23.000.000
41	Retribusi LosPasar Maumere-Bangunan Induk Textil	60.000.000
42	Retribusi LosPasar Maumere-Bangunan Tambahan emas	17.000.000
43	Retribusi LosPasar Maumere-Bangunan Tambahan Gedung	1.260.000
44	Retribusi LosPasar Maumere-Bangunan Tambahan Kios	39.312.000
45	Retribusi LosPasar Maumere-Bangunan Tambahan Penjahit	672.000
46	Retribusi LosPasar Maumere-Bangunan Tambahan Salon	3.432.000
47	Retribusi LosPasar Maumere-Bangunan Tambahan Sepatu Sandal	28.000.000
48	Retribusi LosPasar Maumere-Bangunan Tambahan Service Elektronik	2.100.000
49	Retribusi LosPasar Maumere-Bangunan Tambahan Warung	27.228.000
50	Retribusi LosPasar Maumere-Lapak Pasar Senja Kabor	17.280.000
51	Retribusi Pelataran Pasar Lela	4.000.000
52	Retribusi PelataranPasar Alok-Air	15.000.000
53	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus ParkirTempat Khusus Parkir-Pasar Alok	1.131.000.000
XIV	**DINAS PERHUBUNGAN**	**1.116.000.000**
1	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000
2	Retribusi Pelayanan KepelabuhananPelayanan Kepelabuhanan	80.000.000
3	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan UsahaPelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha di Terminal dan Pelabuhan	5.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URAIAN	PAGU
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor Pemakaian Kendaraan Bermotor	31.000.000
XV	**DINAS PERTANIAN**	**1.024.000.000**
1	Hasil Penjualan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan LainnyaHasil Penjualan Hewan (Anakan Babi)	64.000.000
2	Hasil Penjualan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya Sperma Babi	24.000.000
3	Hasil Penjualan Tanaman	200.000.000
4	Retribusi Pelayanan Rumah Potong HewanRetribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	500.000.000
5	Retribusi Pemakaian Kendaraan BermotorRetribusi Combine Harvester	36.000.000
6	Retribusi Pemakaian Kendaraan BermotorRetribusi Sewa Traktor	100.000.000
7	Retribusi Pemakaian LaboratoriumRetribusi Pemakaian Peralatan Laboratorium dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan	100.000.000
XVI	**RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE**	**54.338.611.360**
1	Pendapatan BLUD dari bunga Rekening Giro	140.053.365
2	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	4.651.862.030
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	49.546.695.965
	Total	**1.378.369.657.129**

3.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Belanja Daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

Struktur Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Belanja Operasi, Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:
   a. Belanja Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja Pegawai dipergunakan untuk :
      1) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada pembayaran Gaji Pegawai Negeri meliputi PNS;
      2) Belanja Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap;
      3) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara;
      4) Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai;
      5) Belanja Uang Tunggu dan Pensiun Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
      6) Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri;
      7) Belanja Uang Lembur PNS;
      8) Belanja Pegawai Honorer yang diangkat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi pemerintah;

9) Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi/Lembaga/Badan tertentu;
10) Pembayaran uang vakasi;
11) Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarannya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan;
12) Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dikecualikan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.

b. Belanja Barang dan Jasa
Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Belanja Barang dipergunakan untuk :
1) Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari :
   a) Belanja keperluan perkantoran;
   b) Belanja pengadaan bahan makanan;
   c) Belanja penambah daya tahan tubuh;
   d) Belanja bahan;
   e) Belanja pengiriman surat dinas;
   f) Honor yang terkait dengan operasional Satker;
   g) Belanja langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai listrik, telepon, dan air) termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni;
   h) Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional);
   i) Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan aset yang terkait dengan pelaksanaan operasional Satker sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi;
   j) Belanja sewa gedung operasional sehari-hari satuan kerja; dan
   k) Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2) Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Jenis pengeluaran terdiri dari :
   a) Honor yang terkait dengan output kegiatan;
   b) Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan;
   c) Belanja jasa konsultan;
   d) Belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja;

e) Belanja jasa profesi;
f) Belanja biaya pemeliharaan non kapitalisasi yang dikaitkan dengan target kinerja;
g) Belanja jasa;
h) Belanja perjalanan;
i) Belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi;
j) Belanja barang penunjang kegiatan tugas pembantuan;
k) Belanja barang fisik lain tugas pembantuan; dan
l) Belanja barang non operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang direncanakan.

3) Belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU.
4) Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial.

c. Belanja Bunga
Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang, utang dalam negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. Pembayaran bunga utang meliputi antara lain :
1) Pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN), bunga Obligasi Negara, Imbalan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Bunga Pinjaman Program, Bunga Pinjaman Proyek, dan bunga Utang Luar Negeri melalui penjadwalan kembali pinjaman;
2) Pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskon Obligasi Negara;
3) Pembayaran *Loss on Bond Redemption.* Digunakan untuk mencatat beban yang timbul dari selisih *clean price* yang dibayar pemerintah pada saat pembelian kembali SUN *(buyback)* dengan *carrying value* SUN. *Carrying Value* SUN adalah nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah *unamortized discount* atau premium.
4) Pembayaran diskon SBSN; dan
5) Denda merupakan pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan pajak (*restitusi*), pengembalian kelebihan bea dan cukai serta imbalan bunga atas pinjaman perbankan dan bunga dalam negeri jangka pendek lainnya.

d. Belanja Subsidi
Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Belanja subsidi terdiri dari:
1) Energi
Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM)

jenis tertentu, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

2) Non Energi
Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

e. Belanja Hibah, merupakan belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/D, dan Pemerintah Daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah.

3) Belanja Bantuan Sosial, dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Belanja Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan Sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
Kriteria Belanja Bantuan Sosial adalah:
a) Tujuan penggunaan
Penggunaan belanja bantuan sosial ditujukan antara lain :
(1) Belanja Rehabilitasi Sosial
Pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
(2) Belanja Pemberdayaan Sosial
Pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
(3) Belanja Perlindungan Sosial
Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi

kebutuhan dasarnya.

(4) Belanja Penanggulangan Bencana
Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

(5) Belanja Jaminan Sosial
Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan kegiatan yang masuk kategori di dalam skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(6) Belanja Penanggulangan Kemiskinan
Pengeluaran anggaran yang terkait langsung dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(7) Pemberi bantuan
Penggunaan belanja bantuan sosial hanya jika pemberi bantuan adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(8) Persyaratan penerima bantuan
Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

(9) Masa berlaku pemberian bantuan
Belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan apabila kriteria penerima bantuan sosial masih melekat pada penerima bantuan sosial berkenaan.

4) Belanja Modal
Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan aset berkenaan.
Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset :

a) Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis asset berkenaan.
b) Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset.

c) Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
   (1) Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp300.000,-
   (2) Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp10.000.000,-
d) Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/ dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari :

a) Belanja Modal Tanah
   Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
   Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
   Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.
d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
   Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
   Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli *(leasehold)*, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian *(art pieces)*, barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat

teridentifikasi dan terukur.

f) Belanja Modal Aset Lainnya
Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

5) Belanja Tak Terduga
Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

2. Belanja Transfer
   a. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
   b. Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah daerah lainnya dan Partai Politik. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

Gambaran Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 sesuai struktur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Proporsi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020

No	Uraian	2020
2	**BELANJA**	**1.121.887.531.817,77**
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**724.814.251.469,00**
2.1.1	Belanja Pegawai	436.980.729.009,00
2.1.4	Belanja Hibah	4.205.160.850,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.334.343.109,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa	2.088.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa Serta Partai Politik	215.863.575.307,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	63.342.443.194,00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**397.073.280.348,77**
2.2.1	Belanja Pegawai	57.546.182.192,00
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	246.526.056.236,00
2.2.3	Belanja Modal	93.001.041.920,77

Sumber: BPKAD Kabupaten Sikka, 2024

Keterangan : Gambaran Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 mengunakan struktur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Tabel 3.12
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
5	**BELANJA DAERAH**	**1.112.256.100.954**	**1.221.146.017.900**	**1.304.979.359.282**	**1.240.857.073.649**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**757.035.729.662**	**821.503.735.347**	**905.771.996.978**	**923.260.524.221**
5.1.1	Belanja Pegawai	459.111.201.374	466.312.239.092	489.434.963.409	529.306.343.731
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	291.974.368.131	332.274.528.654	353.980.691.578	313.647.400.470
5.1.3	Belanja Bunga	-	10.154.661.544	12.543.068.834	10.953.635.417
5.1.5	Belanja Hibah	4.380.475.157	8.546.106.057	45.731.905.157	68.975.816.603
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.569.685.000	4.216.200.000	4.081.368.000	377.328.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**126.329.007.698**	**192.587.248.790**	**197.056.430.017**	**88.982.650.209**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.732.618.030	3.085.098.903	760.000.000	578.792.830
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.367.133.269	43.082.003.350	79.090.849.239	23.915.983.847
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.212.047.561	45.944.541.953	54.049.879.588	35.481.463.339
5.2.4	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	56.837.248.837,75	99.963.899.584	62.229.746.190	25.136.631.037
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	179.960.000	511.705.000	925.955.000	3.751.779.156
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya				118.000.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**13.754.138.057**	**3.544.191.397**	**3.507.645.287**	**1.034.783.053**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	13.754.138.057	3.544.191.397	3.507.645.287	1.034.783.053
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**215.137.225.537**	**203.510.842.366**	**198.643.287.000**	**227.579.116.166**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.544.000.000	1.735.232.000	3.327.000.000	2.218.616.000
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	212.593.225.537	201.775.610.366	195.316.287.000	225.360.500.166

Sumber: BPKAD Kabupaten Sikka, 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Belanja Daerah Kabupaten Sikka pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2020 Belanja Daerah sebesar Rp1.121.940.951.154,57,-. menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp1.112.256.100.954,- naik lagi pada Tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.221.146.017.900. Pada Tahun 2023 Belanja Daerah naik menjadi sebesar Rp1.304.979.359.282 dan turun lagi pada Tahun 2024 menjadi sebesar Rp1.240.857.073.649.

Dilihat dari struktur belanja daerah pada Tahun 2020 berbeda dengan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024. Struktur Belanja daerah Pada tahun 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp724.814.251.469, yang terdiri dari belanja Pegawai Rp436.980.729.009, belanja Hibah sebesar Rp4.205.160.850, belanja bantuan sosial sebesar Rp2.334.343.109, Belanja Bagi Hasil kepada provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp2.088.000.000, Belanja Tak terduga sebesar Rp63.42.443.194 dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp215.863.575.307. Sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp397.073.280.348,77

Untuk Struktur Belanja daerah Pada tahun 2021 – 2024, terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal, Belanja Tak terduga dan Belanja Transfer.

Kebijakan Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Kebijakan belanja daerah Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
   Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas
   Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan melalui pola penganggaran berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan.
3. Tolok ukur dan target kinerja
   Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Optimalisasi program/kegiatan
   Belanja program/kegiatan diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja program/kegaiatan disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi program/kegaiatan untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel
   Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Mengacu pada Kebijakan belanja daerah Tahun 2026 diatas, maka perhitungan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026 adalah sebagai berikut berikut :

Tabel 3.13
Proyeksi Belanja Kabupaten Sikka Tahun 2026

Kode	URAIAN	2025	Rancangan 2026
5	**BELANJA DAERAH**	**1.435.500.000.000**	**1.348.969.237.465**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.102.613.448.713,33**	**1.120.457.856.945**
5.1.1	Belanja Pegawai	690.636.990.176	690.636.990.176
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	363.704.811.893	384.134.443.966
5.1.3	Belanja Bunga	9.254.225.286	7.176.001.445
5.1.5	Belanja Hibah	36.010.421.358	36.010.421.358
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.007.000.000	2.500.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**98.047.981.675,67**	**-**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	240.800.000	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.868.157.592	

Kode	URAIAN	2025	Rancangan 2026
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.822.325.676	
5.2.4	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	20.771.365.230	
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.345.333.178	
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya		
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.467.189.091**	**1.500.000.000**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.467.189.091	1.500.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**230.371.380.520**	**227.011.380.520**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.153.035.000	5.153.035.000
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	225.218.345.520	221.858.345.520

Sumber : Data Olahan Bapperida, 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sikka pada Tahun 2026 sebesar Rp1.348.969.237.465,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.120.457.856.945,-. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.500.000.000,- dan Belanja Transfer ke pemerintahan Desa sebesar Rp227.011.380.520,-.

Belanja Operasi sebesar Rp1.120.457.856.945,- terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp690.636.990.176,- Pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp365.944.486.296,- (*merupakan akumulai belanja barang dan jasa serta belanja modal*) Belanja Bunga sebesar Rp7.176.001.445,- bantuan sosial sebesar Rp2.500.000.000,-

Belanja Transfer ke pemerintahan Desa sebesar Rp227.011.380.520,- yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp5.153.035.000,- dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp221.858.345.520,-.

3.2.3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh dalam hal terjadi defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran yang dirinci sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan

   Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.

   Penerimaan pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka selama kurun waktu tahun 2021-2022 sebagian besar bersumber dari Penerimaan Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran

Sebelumnya. Sedangkan Tahun 2023 dan 2024 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan
   Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dan Pemberian Pinjaman Daerah.
   Selama kurun waktu Tahun 2021-2024, pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif, penyertaan modal BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan tujuan untuk meningkatkan deviden, memperkuat kelembagaan dan pengembangan usaha dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dari Pinjaman Daerah.

Tabel 3.14
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2024

Uraian	Realisasi Penerimaan Pembiayaan				
	2020	2021	2022	2023	2024
PEMBIAYAAN DAERAH	**58.773.868.105**	**86.780.665.014,42**	**225.113.347.620**	**89.176.019.867,67**	**66.865.040.397**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**68.023.868.104,57**	**93.305.736.418,47**	**236.613.347.620**	**98.252.239.758,12**	**104.414.699.451**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	68.023.868.104,57	39.242.033.168,47	97.193.095.249	98.252.239.758,12	104.414.699.451
Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah		54.063.703.250,00	139.420.252.371	-	-
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**9.250.000.000**	**6.525.071.404,05**	**11.500.000.000**	**9.076.219.890,45**	**37.549.659.054**
Pembentukan Dana Cadangan	9.250.000.000	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		6.125.000.000,00	11.500.000.000	-	
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		400.071.404,05	-	9.076.219.890,45	37.549.659.054
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Sikka, 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2020 Pembiayaan Daerah sebesar Rp58.773.868.105,- meningkat pada Tahun 2021 sebesar Rp86.780.665.014,42, pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp.225.113.347.620, pada tahun 2023 menurun menjadi Rp89.176.019.867,67 dan pada tahun 2024 menurun menjadi Rp.66.865.040,397.

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas

(*money follow priority program*) dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I dan II mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas III. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut :

1) **Prioritas I**, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
2) **Prioritas II,** untuk membiayai belanja pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi prioritas Pembangunan tahun 2024-2026 dan pemenuhan penerapan pelayanan dasar, termasuk akomodasi terhadap hasil reses DPRD dan aspirasi Musrenbang;
3) **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Sikka Tahun 2026

Kode	URAIAN	2025	Rancangan 2026
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**114.287.919.664**	**-29.400.419.664**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	114.287.919.664	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	114.287.919.664	
6.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
6.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**29.400.419.664**	**29.400.419.664**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	**-**	**-**
6.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	29.400.419.664	29.400.419.664
6.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah		

Sumber : Data Olahan Bapperida, 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka dari Tahun 2026 sebesar **Rp-29.400.419.664** menurun dari Tahun 2025 sebesar **Rp114.287.919664**. Sedangan pengeluatan pembiayaan ditargetkan sebesar **Rp29.400.419.664** yang digunakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada PT. SMI yang diambil selisih perhitungan pendapatan dan belanja.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Visi Misi

Visi Misi RPJPN Tahun 2025-2045

Visi RPJPN Tahun 2025-2045 adalah: **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**.

Sasaran visi RPJPN Tahun 2025-2045, yaitu:

a. Pendapatan per kapita setara negara maju.
b. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
c. Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat
d. Daya saing sumber daya manusia meningkat
e. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

Misi RPJPN Tahun 2025-2045

Misi RPJPN untuk periode 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Visi Misi RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045

Visi RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 adalah:

Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sasaran visi RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025-2045, yaitu:

a. Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju
b. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
c. Daya Saing Daerah yang meningkat
d. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif
e. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju net zero emission

Misi RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2025-2045 adalah sebagai berikut:

a. Membangun Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan Terlindungi Hak Dasarnya **(TRANSFORMASI SOSIAL)**
b. Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis ekonomi

hijau dan ekonomi biru **(TRANSFORMASI EKONOMI)**
c. Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif **(TRANSFORMASI TATA KELOLA)**
d. Meningkatkan supremasi hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi **(SUPREMASI HUKUM, STABILITAS DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA)**
e. Pembangunan yang inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi **(KETAHANAN SOSIAL, BUDAYA DAN EKOLOGI)**
f. Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan
g. Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
h. Kesinambungan Pembangunan daerah

Visi Misi RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045

Visi RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045 adalah: **Nian(g) Tanah Sikka Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**.

Sasaran visi RPJPD Kabupaten Sikka tahun 2025-2045, yaitu:
a. Peningkatan kualitas pembangunan manusia yang unggul, inovatif secara adil dan merata.
b. Menurunnya kemiskinan
c. Tata kelola pemerintahan yang bersinergi, inovatif, adaptif, responsif dan akuntabel.
d. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, mandiri dan berdaya saing berbasis potensi lokal
e. Infrastruktur yang berkualitas, adil dan merata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Misi RPJPD Kabupaten Sikka untuk periode 2025-2045 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas SDM yang unggul, inovatif, dan sejahtera
2. Mewujudkan perekonomian yang stabil, mandiri, dan berdaya saing
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel
4. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi yang inklusif dan tangguh
6. Mewujudkan infrastruktur antarwilayah yang berkeadilan
7. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
8. Mewujudkan pembangunan yang kolaboratif, terintegrasi, dan berkesinambungan

KETERKAITAN VISI DAN MISI RPJPD

NO	RPJPN	RPJPD Prop. NTT	RPJPD Kab. Sikka
		VISI	
	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045	Nian(g) Tanah Sikka Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
		SASARAN	
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju	Peningkatan kualitas pembangunan manusia yang unggul, inovatif secara adil dan merata
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Menurunnya kemiskinan
3	Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat	Daya Saing Daerah yang meningkat	Tata kelola pemerintahan yang bersinergi, inovatif, adaptif, responsif dan akuntabel

4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif	Pertumbuhan ekonomi yang stabil, mandiri dan berdaya saing berbasis potensi lokal
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Infrastruktur yang berkualitas, adil dan merata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
MISI			
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Membangun Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan Terlindungi Hak Dasarnya **(TRANSFORMASI SOSIAL)**	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul, inovatif, dan sejahtera
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru **(TRANSFORMASI EKONOMI)**	Mewujudkan perekonomian yang stabil, mandiri, dan berdaya saing
3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif **(TRANSFORMASI TATA KELOLA)**	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Meningkatkan supremasi hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi **(SUPREMASI HUKUM, STABILITAS DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA)**	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pembangunan yang inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi **(KETAHANAN SOSIAL, BUDAYA DAN EKOLOGI)**	Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi yang inklusif dan tangguh
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan infrastruktur antarwilayah yang berkeadilan
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Meningkatkan pembangunan sarana prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	Kesinambungan Pembangunan daerah	Mewujudkan pembangunan yang kolaboratif, terintegrasi, dan berkesinambungan

Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2029
"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Misi :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekonologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam

untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Visi Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029
"NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan"

Misi :
1. Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasi potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)
2. Memperluas pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses (SEHAT)
3. Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran (CERDAS)
4. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)

Visi Misi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 :
"Terwujudnya Masyarakat Sikka Yang Produktif, Kreatif, Unggul dan Mandiri Menuju Maumere Baru"

Adapun artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi adalah sebagai berikut:

- **Produktif**, dapat dipahami dengan kemampuan menghasilkan atau menciptakan hasil yang bernilai atau berguna. Dalam konteks ekonomi, produktif juga dapat merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam jumlah yang efisien. Dalam teori ekonomi, produktivitas dapat diukur dengan membandingkan keluaran yang dihasilkan dengan faktor-faktor produksi yang digunakan. Dalam hal pembangunan daerah, produktif dimaknai dengan pengoptimalan sumber daya untuk menghasilkan nilai tambah di berbagai sektor, termasuk kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka. Pemerintah berupaya dan bekerja keras memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki daerah untuk mengisi ruang produksi pendukung kegiatan ekonomi.
- **Kreatif**, secara umum merujuk pada kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide atau solusi yang baru dan original. Kreativitas sering dikaitkan dengan proses berpikir divergen dan imajinatif yang menghasilkan sesuatu yang unik. Menurut teori psikologi, kreativitas dapat diperkuat melalui latihan, pembelajaran, dan lingkungan yang mendukung. Dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Sikka, visi Kreatif dimaknai dengan Meningkatkan kemampuan berinovasi dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan, dan menciptakan ruang yang mampu mendorong, menampung dan menyalurkan daya cipta dan daya kreasi.
- **Unggul**, berarti memiliki kualitas atau keunggulan yang menjadikan sesuatu lebih baik atau lebih superior dibandingkan yang lain. Konsep keunggulan ini juga sering diasosiasikan dengan kompetisi di pasar atau industri, di

mana produk atau layanan yang unggul akan lebih diminati oleh konsumen. Dalam teori manajemen, konsep keunggulan kompetitif menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan sebuah perusahaan. Dalam visi Kabupaten Sikka, unggul ditujukan untuk memiliki keunggulan berbasis potensi daerah baik itu SDA maupun SDM, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah yang berkelanjutan.

- **Mandiri**, mengacu pada kemampuan seseorang untuk bertindak, bekerja, atau hidup tanpa ketergantungan pada pihak lain. Konsep mandiri juga dapat merujuk pada otonomi, kemandirian, dan kebebasan seseorang dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dalam teori psikologi perkembangan, kemampuan mandiri merupakan tujuan penting dalam setiap tahap perkembangan individu. Makna Mandiri dalam Visi Kabupaten Sikka mengarah pada kemampuan kebutuhan pokok masyarakat dan pemenuhan layanan dasar yang berorientasi pada kesejahteraan berbasis sumber daya lokal.

Menuju Maumere Baru :

- Menggambarkan arah transformasi dan semangat pembaruan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka.
- *Maumere Baru* tidak hanya merujuk pada perubahan fisik wilayah ibukota, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma pembangunan yang berfokus pada kemajuan ekonomi, modernisasi infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan publik.
- Konsep ini juga mengandung cita-cita kolektif untuk menghadirkan wajah baru Kabupaten Sikka yang lebih bersih, tertata, dan berdaya saing, dengan Maumere sebagai pusat pertumbuhan wilayah.
- *M*enjadi simbol dari kemajuan peradaban lokal, di mana nilai-nilai budaya tetap lestari namun mampu beradaptasi dengan dinamika zaman melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif.
- Panggilan untuk melakukan transformasi menyeluruh yang menyeimbangkan antara pembangunan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

Dalam mencapai visi pembangunan dalam lima tahun mendatang, disusun Misi Kabupaten Sikka dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang masing-masing dijelaskan sebagai sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif dan Berkarakter Sosial**

   Misi ini menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Kualitas SDM tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan formal, tetapi juga dari kemampuan berinovasi, berpikir kritis, memiliki kepekaan sosial, dan nilai-nilai karakter seperti integritas, gotong royong, dan etos kerja. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan mutu layanan pendidikan dari PAUD hingga menengah, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, peningkatan akses layanan kesehatan, serta pembinaan nilai-nilai sosial dan budaya melalui pendidikan karakter, literasi, dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan. SDM yang unggul dan berkarakter akan mampu menjadi penggerak transformasi ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

2. **Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing**
   Misi ini bertujuan untuk membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh, inklusif, dan berbasis potensi lokal. Stabilitas ekonomi dicapai melalui penguatan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM. Kemandirian ekonomi diarahkan pada pengurangan ketergantungan terhadap pasar luar dan peningkatan kemampuan produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan daerah. Sementara itu, daya saing ditingkatkan melalui inovasi, digitalisasi ekonomi, hilirisasi komoditas, dan penguatan ekosistem kewirausahaan masyarakat. Misi ini juga mencakup peningkatan investasi daerah, akses ke pasar nasional/internasional, dan penciptaan lapangan kerja produktif yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

3. **Mewujudkan Infrastruktur Antar Wilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan**
   Misi ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah secara merata untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan dan desa. Fokusnya meliputi pengembangan jalan, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat. Aspek keberlanjutan diintegrasikan melalui infrastruktur ramah lingkungan dan tahan bencana, serta mempertimbangkan aspek tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam secara bijak. Misi ini mendukung mobilitas ekonomi, pelayanan publik serta memperkuat keterhubungan wilayah pesisir, pedalaman dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

4. **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan dan Berkelanjutan**
   Misi ini merespons tantangan perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat pengelolaan lingkungan melalui perlindungan kawasan lindung, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pengendalian pencemaran air dan udara, serta pengelolaan sampah terpadu. Edukasi dan pelibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan akan diperluas melalui gerakan sadar lingkungan, sekolah hijau, dan komunitas hijau. Misi ini juga selaras dengan arah pembangunan rendah karbon, ketahanan bencana, dan penguatan ekonomi berbasis ekosistem seperti ekowisata dan pertanian ramah lingkungan.

5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Kolaboratif dan Bebas KKN**
   Misi ini menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan melayani. Pemerintah Kabupaten Sikka akan membangun sistem pelayanan publik yang cepat, berbasis digital, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penguatan sistem pengawasan internal, manajemen kinerja, dan pelaporan yang akuntabel menjadi prioritas untuk mencegah praktik KKN. Efisiensi anggaran dan proses birokrasi didorong melalui simplifikasi regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Di samping itu, kolaborasi dengan sektor

swasta, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan diperluas untuk mendorong partisipasi dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kabupaten Sikka secara keseluruhan. Berdasarkan visi, misi dan permasalahan daerah yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Penjelasan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 berdasarkan misi, dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif dan Berkarakter Sosial

Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berdaya Saing,

Tujuan ini mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Sikka untuk menyiapkan manusia sebagai aktor utama pembangunan yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan teknis, tetapi juga fisik yang sehat, mental yang kuat, serta nilai-nilai sosial dan budaya yang kokoh. Kualitas SDM yang dimaksud bukan hanya dalam konteks akademik semata, melainkan juga menyangkut kapasitas adaptasi terhadap perubahan, etos kerja produktif, serta daya saing di tingkat lokal, nasional, dan global. Ini menjadi pondasi utama untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi daerah. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing, ditetapkan empat sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif Berbasis Kearifan Lokal

Sasaran ini menitikberatkan pada penguatan sistem pendidikan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk anak-anak dari kelompok rentan, disabilitas, dan wilayah terpencil. Pendidikan yang inklusif menjamin hak belajar bagi semua, sedangkan pendidikan adaptif merespon dinamika zaman, seperti digitalisasi dan tuntutan kompetensi abad 21. Integrasi kearifan lokal ke dalam kurikulum dan proses belajar juga penting untuk memperkuat identitas dan karakter budaya masyarakat Kabupaten Sikka.

Sasaran 1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang merata untuk hidup sehat secara Mandiri

Sasaran ini bertujuan memperkuat sistem layanan kesehatan primer dan rujukan, baik dari sisi infrastruktur, SDM kesehatan, maupun ketersediaan layanan dasar yang mudah diakses. Fokus juga diberikan pada promosi dan pencegahan penyakit, serta penguatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko kesehatan (seperti stunting, penyakit menular, dan penyakit tidak menular). Kemandirian dan keberlanjutan menjadi prinsip utama, agar masyarakat tidak selalu bergantung pada intervensi eksternal untuk hidup sehat.

Sasaran 1.3 Meningkatnya Kehidupan Layak Masyarakat yang Bermartabat

Sasaran ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti perumahan, air bersih, sanitasi, serta perlindungan

sosial. Kehidupan layak mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tujuan agar masyarakat Sikka dapat menjalani hidup yang sejahtera dan bermartabat. Ini termasuk penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan penguatan daya beli masyarakat.

Sasaran 1.4 Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif

Sasaran ini menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kesempatan bagi seluruh kelompok, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, dalam seluruh aspek pembangunan. Sasaran ini mendorong pengarusutamaan gender (PUG) dalam kebijakan dan program daerah, memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal (no one left behind), serta memperkuat daya tahan sosial dan ekonomi melalui pembangunan yang ramah lingkungan dan menjamin keberlanjutan antar generasi.

Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing

Tujuan 1 Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sikka

Tujuan "Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Sikka" adalah salah satu inti dari upaya pembangunan daerah untuk periode 2025-2029, secara spesifik merupakan penjabaran operasional dari Misi 2 RPJMD Kabupaten Sikka yaitu "Mewujudkan perekonomian yang stabil, mandiri dan berdaya saing". Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Sikka adalah tujuan strategis yang akan diterjemahkan ke dalam program-program dan kegiatan konkret dalam RPJMD 2025-2029. Program-program ini akan berfokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan, pengembangan UMKM, serta pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, semuanya demi menciptakan masyarakat Sikka yang sejahtera dan mandiri secara ekonomi, serta memiliki daya saing yang kuat.

Kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah indikator utama keberhasilan pembangunan. Apabila masyarakat sejahtera, maka berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, akan turut membaik. Tujuan ini juga menjadi landasan untuk menciptakan stabilitas ekonomi di Kabupaten Sikka, karena masyarakat yang memiliki daya beli dan pendapatan yang cukup akan berkontribusi pada perputaran ekonomi yang sehat.

Untuk mencapai tujuan Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kabupaten Sikka, ditetapkan empat sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 2.1 Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka

Sasaran pertama yang ingin diciptakan adalah tumbuh kembangnya Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka. Untuk memastikan sasaran ini tercapai dan dapat terukur, keberhasilannya akan dipantau melalui Indikator Pertumbuhan sektor pertanian (pangan, horti, peternakan, Perkebunan, perikanan. Sasaran ini ditetapkan untuk menjawab permasalahan Sektor primer (pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan) yang menjadi penopang PDRB tidak tumbuh dan berkembang. Laju pertumbuhannya tidak meningkat signifikan. Sasaran ini adalah bagian krusial dari upaya pembangunan

ekonomi Kabupaten Sikka, dan secara spesifik menargetkan sektor pertanian sebagai motor penggerak utama kesejahteraan masyarakat. Ini bukan hanya tentang meningkatkan produksi, melainkan menjadikan pertanian sebagai fondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan bagi Kabupaten Sikka. Sebagian besar masyarakat Sikka masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Mengembangkan sektor ini secara langsung akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sebagian besar penduduk.

Sasaran 2.2 Berkembangnya Industri Pengolahan Produk Pertanian sebagai Motor Penggerak Ekonomi Lokal

Sasaran ini merupakan langkah strategis lanjutan dari Sasaran 2.1 yang fokus pada sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi. Jika Sasaran 2.1 menekankan pada produksi bahan mentah, maka Sasaran 2.2 ini berorientasi pada nilai tambah dan diversifikasi ekonomi melalui industri pengolahan produk pertanian. Ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi lokal yang lebih kuat, tangguh, dan tidak hanya bergantung pada penjualan komoditas mentah. Bahan mentah pertanian seringkali memiliki harga jual yang rendah. Dengan diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi (misalnya, kopi bubuk dari biji kopi, keripik dari ubi, atau ikan asap dari ikan segar), nilai jual produk akan meningkat secara signifikan. Ini berarti pendapatan petani dan pelaku usaha akan lebih besar. Selain itu ketergantungan pada penjualan bahan mentah membuat petani rentan terhadap fluktuasi harga pasar. Industri pengolahan dapat menyerap kelebihan produksi saat panen raya dan mengubahnya menjadi produk yang lebih tahan lama, sehingga membantu menstabilkan harga dan memberikan kepastian pasar bagi petani.
Keberhasilan Sasaran 2.2 akan diukur melalui dua indikator utama. Indikator pertama adalah Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, indikator ini akan mengukur seberapa pesat peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sikka. Indikator yang kedua adalah Pertumbuhan PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto), PMTB mencerminkan investasi yang dilakukan dalam bentuk aset tetap (misalnya, pembangunan pabrik, pembelian mesin produksi, atau perluasan fasilitas pengolahan).

Sasaran 2.3 Terwujudnya Ekonomi Lokal yang Kokoh melalui Dukungan Perdagangan dan Pariwisata

Sasaran ini melengkapi upaya pembangunan ekonomi Kabupaten Sikka dengan fokus pada sektor tersier, yaitu perdagangan dan pariwisata. Jika sasaran sebelumnya berfokus pada produksi (pertanian) dan pengolahan (industri), sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut dapat didistribusikan, dijual, dan dinikmati, sekaligus menarik pengunjung yang akan membawa dampak ekonomi langsung. Tujuan utamanya adalah menciptakan ekonomi lokal yang kokoh, beragam, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi pasar dan daya tarik wisata daerah.
Sasaran ini penting karena beberapa alasan. Alasan pertama karena sektor perdagangan adalah jembatan vital antara produsen (petani dan industri pengolahan) dan konsumen. Dengan berkembangnya perdagangan, produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar Kabupaten Sikka, sehingga meningkatkan penjualan dan pendapatan. Alasan kedua adalah karena baik sektor perdagangan maupun pariwisata

adalah padat karya. Perdagangan membutuhkan pedagang, distributor, dan staf toko. Pariwisata memerlukan pemandu wisata, staf hotel dan restoran, pengelola objek wisata, pengemudi, dan banyak lagi. Ini akan menciptakan banyak peluang kerja bagi masyarakat lokal. Alasan ketiga adalah pertumbuhan sektor perdagangan dan pariwisata akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor terkait, seperti pembangunan hotel, restoran, pusat perbelanjaan, atau fasilitas pendukung pariwisata lainnya. Alasan keempat adalah Pariwisata menjadi sarana yang efektif untuk mempromosikan keindahan alam, kekayaan budaya, dan produk-produk khas Kabupaten Sikka kepada wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Keberhasilan Sasaran 2.3 akan diukur melalui dua indikator utama yaitu pertumbuhan sektor akomodasi makan minum dan pertumbuhan sektor perdagangan.

Misi 3 Mewujudkan Infrastruktur Antar Wilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Tujuan 1 Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri

Tujuan Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri mencerminkan arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya menekankan aspek fisik semata, tetapi juga keberlanjutan lingkungan, ketangguhan terhadap risiko, dan kemandirian daerah dalam penyediaan layanan dasar. Infrastruktur berkelanjutan berarti dirancang ramah lingkungan, efisien energi, dan mendukung kelestarian sumber daya alam melalui prinsip pembangunan hijau. Infrastruktur tangguh diwujudkan melalui desain adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim, serta sistem manajemen risiko yang terintegrasi sejak tahap perencanaan. Sementara itu, aspek mandiri mengarah pada kemampuan daerah dalam merencanakan, membiayai, mengelola, dan memelihara infrastruktur secara berkelanjutan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi multipihak. Tujuan ini penting untuk menjamin pelayanan publik yang merata dan inklusif antar kawasan, mengurangi ketimpangan spasial, dan memperkuat resiliensi daerah terhadap tekanan sosial dan ekologis. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi strategis bagi pertumbuhan wilayah yang adil dan berdaya saing.

Untuk mencapai tujuan Mewujudkan Infrastruktur Antar Wilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 3.1 Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Aksesibilitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan

Sasaran ini merupakan landasan strategis dalam pencapaian infrastruktur daerah yang mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah. Sasaran ini menitikberatkan pada penyediaan infrastruktur dasar yang memenuhi standar teknis mutu, mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil, dan dirancang untuk tahan terhadap risiko bencana serta perubahan iklim. Cakupan aksesibilitas mencakup konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, jembatan, transportasi publik, serta sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan energi yang efisien. Selain itu, prinsip keberlanjutan mengharuskan infrastruktur tidak hanya dibangun untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dapat berfungsi secara

optimal dalam jangka panjang melalui integrasi dengan tata ruang, konservasi lingkungan, dan penggunaan teknologi tepat guna. Dengan demikian, sasaran ini berperan penting dalam menciptakan infrastruktur yang inklusif, adaptif, dan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berdaya saing.

Misi 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan ketahanan ekosistem yang berkelanjutan

Tujuan ini diarahkan untuk memastikan terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berdaya dukung bagi kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Strategi pencapaiannya meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas udara, air, dan tutupan lahan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim dan risiko bencana. Di samping itu, pendekatan pembangunan berkeadilan turut ditekankan melalui partisipasi masyarakat, peningkatan akses kelompok rentan terhadap layanan lingkungan, serta penguatan tata kelola lingkungan yang transparan dan berbasis data. Peningkatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi lingkungan juga menjadi pilar penting untuk mendukung terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan inklusif di tingkat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 4.1 Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas lingkungan fisik, biologis, dan sosial terus membaik guna mendukung kehidupan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Fokus intervensi diarahkan pada peningkatan pengelolaan kualitas air, udara, dan tanah; penguatan kapasitas sistem pengelolaan limbah dan persampahan; pengendalian pencemaran; serta rehabilitasi dan konservasi ekosistem strategis, seperti kawasan pesisir, hutan lindung, dan daerah aliran sungai. Sasaran ini juga mencakup peningkatan resiliensi ekosistem terhadap tekanan perubahan iklim, termasuk pencegahan dan mitigasi risiko bencana ekologis. Dengan pendekatan berbasis data dan kolaboratif, sasaran ini mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga fungsi ekologis dan memperkuat daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Kolaboratif dan Bebas KKN

Tujuan 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan baik

Tujuan ini mengarahkan Kabupaten Sikka pada tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta penyelenggaraan yang efisien dan bebas dari KKN. Reformasi birokrasi sebagai landasan akan membantu dalam menghilangkan hambatan dalam pelayanan publik, meningkatkan Kualitas pengambilan keputusan dan mempromosikan keterbukaan dan partisipasi publik. Untuk membangun landasan tersebut,

maka dibutuhkan pemerintahan yang responsif, akuntabel dan efisien serta bebas dari KKN. Pemerintahan yang akuntabel baik dari sisi kinerja dan perencanaan akan dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih sistematis dan transparan, serta tertib pada penegakan hukum dan regulasi. Selanjutnya pemerintahan yang efisien hadir dari penyederhanaan birokrasi, penguatan koordinasi dan juga peningkatan Kualitas SDM aparatur. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan bagian dari penyelenggaraan tata kelola yang baik, menekankan pada penguatan masyarakat terkait ideologi Pancasila, kerukunan sosial dan juga pendidikan politik. Tata kelola, sebagai perwujudan fungsinya juga turut andil dalam menciptakan Kualitas layanan publik yang lebih baik, berkualitas, cepat dan mudah diakses sesuai kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, dengan berbasis pada pemanfaatan teknologi digital.

Untuk mencapai tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang responsif, akuntabel dan efisien serta bebas KKN., ditetapkan 5 sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 5.1 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang baik

Berfokus pada upaya perwujudan akuntabilitas kinerja yang akuntabel. Sasaran ini berfokus pada peningkatan perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan Kualitas dalam pengawasan pembangunan daerah. Program-program pada sasaran ini nantinya akan berfokus pada perencanaan yang lebih baik, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Termasuk juga peningkatan Kualitas perencanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Pada aspek pengawasan maka akan menyasar pada penyelenggaraan pengawasan serta perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa perencanaan yang disusun sudah berkualitas dan harmonis, serta memastikan bahwa pengawasan berjalan dengan baik. Sasaran ini akan diukur dengan Nilai Sakip Daerah

Sasaran 5.2 Akuntabilitas Keuangan yang Semakin Baik Diikuti dengan Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah

Dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel, diperlukan akuntabilitas keuangan yang baik. Akuntabilitas keuangan yang baik akan diutamakan pada ketepatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pentingnya ketepatan ini guna memastikan bahwa anggaran yang dimiliki digunakan dengan bijak, dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas, serta transparansi untuk memastikan bahwa pengelolaan tidak disalahgunakan. Selain itu penting untuk Kabupaten Sikka dapat meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan produktivitas aset daerah, serta pertumbuhan PAD. Kemandirian keuangan akan menciptakan keleluasaan dan ruang bagi Kabupaten Sikka untuk dapat tumbuh sesuai dengan arah kebijakan dan visi yang sudah ditentukan dalam perencanaan. Sehingga dapat terwujud tata kelola yang baik dan dapat mendorong pembangunan daerah. Sasaran ini akan diukur menggunakan Persentase PAD terhadap APBD.

Sasaran 5.3 Terwujudnya Efektifitas Pemerintahan yang baik

Sistem pemerintahan yang efektif tidak hanya akan berdampak positif pada tata kelola, namun sistem pemerintahan secara keseluruhan. Sistem pemerintahan yang terintegrasi dengan data yang trasnparan akan

mendorong dalam pengambilan kebijakan yang lebih terbuka, dengan semakin terbukanya informasi ini maka diharapkan dapat mendorong kerjasama antar sektor. Selanjutnya sasaran ini juga sebagai upaya dalam menargetkan peningkatan integritas aparatur melalui transparansi. Selanjutnya, Penggunaan teknologi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tata kelola berjalan dengan efektif, terutama di era dimana jaringan teknologi sudah sangat meluas di Kabupaten Sikka. Penggunaan teknologi diharapkan dapat memberikan efektifitas tidak hanya bagi pelayanan namun juga kinerja pemerintah dan sehingga didapatkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. Sasaran ini akan diukur menggunakan Indeks Persepsi Korupsi.

Sasaran 5.4 Meningkatnya Keamanan dan Kerukunan Masyarakat

Keamanan dan kerukunan masyarakat merupakan bagian integral yang tidak dapat dielakan dalam pelaksanaan fungsi tata kelola pemerintahan. Perwujudan masyarakat yang mandiri akan menjadi fondasi utama dalam stabilitas pemerintahan yang berkeadilan. Keamanan menjamin masyarakat untuk dapat menjalani kehidupannya tanpa adanya gangguan, kerukunan masyarakat mencegah konflik sosial terjadi serta membangun kepercayaan sosial. Hal-hal ini kemudian turut berkontribusi dalam membentuk lingkungan dan kehidupan yang harmonis, serta meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Sehingga dengan menyasar pada sasaran ini, dapat dijalankan kebijakan yang efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendorong kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Sasaran ini diukur menggunakan menurunnya gangguan dan kejadian kriminal dalam masyarakat (gangguan kamtibmas).

Sasaran 5.5 Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan jalan menuju penguatan legitimasi pemerintahan, serta meningkatkan efektivitas serta kesejahteraan yang inklusif. Dengan penguatan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, maka dapat terbentuk kepercayaan masyarakat, yang kemudian akan berdampak pada efektivitas kebijakan yang lebih baik. Responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berarti paham bahwa pelayanan dibuat untuk mengutamakan kebutuhan masyarakat, tidak semata karena kepentingan kaum elit. Sehingga selain terbentuk kepercayaan masyarakat, peningkatan efektivitas kebijakan, dapat terbentuk juga kebijakan berbasis bukti (*evidence based*) atas kebutuhan masyarakat, serta mewujudkan fondasi pemerintahan yang mempunyai akuntabilitas tidak hanya kepada pejabat, tapi juga kepada masyarakat. Sasaran ini diukur menggunakan Indeks kepuasan layanan masyarakat daerah.

4.1.3. Tekad Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan selama periode 2025-2030, Pemerintah Kabupaten Sikka menetapkan 6 tekad Pembangunan yaitu :

1. **Sikka Cerdas Merata**

   Penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sikka sebagai strategi afirmatif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui jaminan akses pendidikan tinggi minimal satu orang per rumah tangga miskin ekstrem, sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam peningkatan kapasitas SDM keluarga miskin dengan sasaran sebanyak 823 anak, serta menaikan insentif bagi 789 guru Non Formal/Kesetaraan, PAUD, SD dan SMP.

2. **Sikka Sehat Bersama**
   Pelayanan gratis, inklusif, dan merata bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan kelompok rentan melalui penguatan infrastruktur layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, penambahan tenaga medis termasuk dokter spesialis, penanganan stunting secara terintegrasi, serta promosi perilaku hidup bersih dan sehat melalui program Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Warga Kabupaten Sikka berbasis E-KTP dengan memperluas cakupan kepesertaan JKN.

3. **Sikka Tangguh Lokal**
   Diarahkan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan lokal, seperti pertanian, perikanan, UMKM berupa pengembangan Maumere Creative Hub dan pariwisata berbasis budaya. Selain itu juga prioritas pada peningkatan produktivitas perikanan tangkap guna mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan kecil serta penyediaan alat tangkap ramah lingkungan sebagai strategi pengembangan rantai nilai perikanan dari hulu ke hilir. Di sektor Perkebunan melalui peremajaan tanaman kakao, kelapa dan pala serta di sektor Peternakan melalui pengembangan Ranch Ogolidi.

4. **Sikka Layak Huni**
   Diarahkan untuk pemenuhan standar dasar infrastruktur permukiman, seperti ketersediaan rumah yang layak huni bagi 3.068 KK miskin ekstrem, akses jalan lingkungan yang memadai, air bersih, listrik, sanitasi sehat, serta konektivitas digital yang menunjang kehidupan modern. Program ini dikembangkan menjadi sebuah “Gerakan Sikka Layak Huni”, yaitu gerakan kolaboratif lintas sektor yang melibatkan pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, desa, swasta, komunitas, dan masyarakat itu sendiri dalam membangun rumah layak huni bagi keluarga miskin ekstrem.

5. **Sikka Lestari Hijau**
   Prioritas pada Pelestarian lingkungan hidup melalui rehabilitasi kawasan kritis, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, integrasi mitigasi perubahan iklim, perbaikan manajemen dan pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah di Kota Maumere, penguatan infrastruktur dan sarana prasarana persampahan, seperti tempat pengolahan sampah terpadu, armada angkut, serta fasilitas pemilahan dan daur ulang, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

6. **Sikka Layanan Bersih**
   Menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, bebas dari praktik korupsi, serta mendorong budaya kolaboratif dalam penyelenggaraan layanan publik, reformasi birokrasi yang mendalam dan transformasi digital sebagai instrumen utama untuk menciptakan pelayanan yang lebih akuntabel dan efektif, digitalisasi layanan publik, Pembangunan sistem pelayanan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat, serta penerapan smart city di tahun 2029.

4.1.4. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2026 adalah :

1. Tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berdaya Saing dengan sasaran:
   a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif Berbasis Kearifan Lokal, dengan strategi :
      1) Transformasi pendidikan dengan integrasi Digital dan Inovasi Pembelajaran terkini;
      2) Pemerataan Akses dan Inklusi Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
      3) Peningkatan Kualitas, Kompetensi, dan kesejahteraan Tenaga Pendidik;
      4) Penguatan Pendidikan Nonformal dan Pembelajaran Alternatif;
      5) Pendidikan Karakter dan Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan;
      6) Pemerataan dan Peningkatan Infrastruktur sarana Pendidikan, dan

distribusi tenaga pendidikan;
7) Kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga dan antar komunitas satuan pendidikan untuk menjaga ekosistem pendidikan;
8) Integrasi kearifan lokal dan pelestarian bahasa dan budaya daerah dalam sistem pendidikan;
9) Membangun Ketahanan pendidikan dalam situasi bencana, ekonomi, dan konflik;

b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang merata untuk hidup sehat secara Mandiri, dengan strategi:
1) Transformasi Layanan Kesehatan Berbasis Teknologi dan Inovasi;
2) Penguatan Kompetensi dan Pemerataan SDM Kesehatan;
3) Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur Kesehatan;
4) Penanganan Mortalitas, Stunting, dan Masalah Gizi Masyarakat bersama lintas sektor;
5) Promosi Kesehatan dan Edukasi Masyarakat berbasis komunitas;
6) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit tidak menular berbasis surveilans;
7) Membangun sistem layanan kesehatan Jiwa dan Perlindungan Sosial ;
8) Penguatan sistem pengawasan keamanan pangan, obat-obatan, dan produk konsumsi untuk perlindungan konsumen yang kolaboratif;
9) Sinkronisasi Kebijakan dan Tata Kelola kesehatan Lintas Level

c. Meningkatnya Kehidupan Layak Masyarakat yang Bermartabat, dengan strategi :
1) Penguatan Perlindungan dan jaminan Sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta Penanggulangan Kemiskinan yang terintegrasi;
2) Penguatan SDM dan sistem pelatihan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal;
3) Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal dan UMKM berbasis desa/kelurahan, SDA, dan kewirausahaan komunitas;
4) Penguatan Ketahanan Sosial dan Budaya dari ancaman sosial-budaya;
5) Penguatan sistem Perlindungan Migran dan Tenaga Kerja Rentan;
6) Penguatan kapasitas keluarga dengan Literasi Digital dan Keuangan;
7) Penguatan Perlindungan Keluarga dan Anak;
8) Membangun sistem penempatan tenaga kerja pemuda yang responsif terhadap kebutuhan wilayah dan perkembangan pasar kerja;
9) Meningkatkan akses perlindungan sosial dan kesetaraan pemuda rentan terhadap layanan dasar dan ketenagakerjaan;
10) Meningkatkan kesempatan kerja lokal, menekan migrasi kerja informal, dan menciptakan skema kerja layak bagi pemuda;

d. Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif, dengan strategi :
1) Penguatan Tata Kelola Responsif Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG);
2) Penguatan Sistem Data dan Perencanaan Responsif Gender;
3) Penguatan Sistem Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan;
4) Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Akses ke Lapangan Kerja Produktif;
5) Peningkatan Akses layanan dasar yang responsif gender untuk peningkatan kualitas hidup;
6) Afirmasi ekonomi, sosial, politik, birokrasi, dan penguatan peran strategis perempuan dalam pengambilan keputusan;
7) Reformasi Sosial dan Edukasi Anti-Patriarki;

2. Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sikka, dengan Sasaran :
a. Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian sebagai Tulang Punggung

Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka, dengan strategi :

1) Pengembangan Sentra Produksi dan Diversifikasi Komoditas Unggulan;
2) Pembangunan Infrastruktur dan Sistem Distribusi terintegrasi;
3) Peningkatan Kapasitas SDM, Regenerasi, dan Kelembagaan Petani–Nelayan;
4) Memperkuat akses pembiayaan, kemitraan, serta pemasaran berbasis teknologi;
5) Penguatan Ketahanan pangan dan Diversifikasi Sistem Pangan;
6) Membangun pendekatan adaptif dan sistem mitigasi untuk Adaptasi Iklim, Resiliensi Ekosistem, dan Bencana;
7) Integrasi Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata untuk menciptakan nilai ekonomi baru;
8) Inovasi Teknologi dan Smart Farming untuk produktivitas dan efisiensi sektor primer;

b. Berkembangnya Industri Pengolahan Produk Pertanian sebagai Motor Penggerak Ekonomi Lokal, dengan strategi :

1) Membangun Hilirisasi dan Penguatan Nilai Tambah Industri Lokal;
2) Mendorong Digitalisasi Industri, UMKM, dan Sistem Promosi;
3) Penguatan UMKM, Koperasi, dan Ekosistem Industri Rakyat sebagai pendorong utama industrialisasi berbasis rakyat;
4) Akselerasi Investasi dan Pembiayaan Industri untuk mempercepat pertumbuhan industri;
5) Memperluas jangkauan pasar melalui penguatan identitas; produk, sertifikasi mutu, dan pengembangan saluran ekspor;
6) Penguatan SDM Industri dan Kewirausahaan Yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
7) Membangun infrastruktur fisik dan fasilitas pendukung logistik agar produksi dan distribusi industri berjalan efisien;
8) Ketahanan dan Keberlanjutan Industri Lokal Melalui pendekatan tangguh dan ramah lingkungan;

c. Terwujudnya Ekonomi Lokal yang Kokoh melalui Dukungan Perdagangan dan Pariwisata, dengan strategi :

1) Transformasi digital dan pembangunan infrastruktur pendukung sektor tersier yang terintegrasi dan adaptif;
2) Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif berbasis Budaya, komunitas, dan kemitraan;
3) Transformasi pariwisata tangguh, berkelanjutan, dan inklusif, serta berorientasi pada pasar wisata tematik;
4) Revitalisasi Perdagangan Serta Pelaku Usaha Lokal;
5) Penguatan Promosi, Branding, dan Positioning Daerah;
6) Mendorong ekosistem kelembagaan yang adaptif dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan sektor tersier;
7) Membangun sistem Adaptasi dan Mitigasi Risiko Ekonomi terhadap Geopolitik dan Krisis Eksternal;

3. Tujuan Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri, dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Aksesibilitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan, dengan strategi :

1) Penguatan infrastruktur jalan, transportasi, dan konektivitas wilayah yang terintegrasi untuk pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal;
2) Penataan permukiman dan pengurangan kawasan kumuh inklusif berbasis kolaborasi dan tata ruang;
3) Penguatan sistem penyediaan infrastruktur dasar yang adaptif, efisien dan berkelanjutan;
4) Ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana dan perubahan iklim;
5) Modernisasi tata kelola infrastruktur berbasis teknologi, data, dan digitalisasi infrastruktur;
6) Penguatan penataan ruang dan Percepatan Legalisasi Dokumen

Perencanaan Infrastruktur serta sinkronisasi lintas sektor;
7) Memperkuat kapasitas dan koordinasi kelembagaan untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan;
8) Penguatan kolaborasi dan kemandirian infrastruktur;
9) Peningkatan Infrastruktur Informasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;

4. Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan ketahanan ekosistem yang berkelanjutan, dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan, dengan strategi :
   1) Penguatan sistem pengelolaan sampah dan air limbah berbasis regulasi, teknologi, dan kolaborasi komunitas;
   2) Penguatan peran komunitas dan CSR dalam menjaga pengelolaan lingkungan dan mendorong perubahan perilaku;
   3) Pengendalian Pertambangan dan Pengelolaan Konservasi DAS Berbasis Data dan Komunitas;
   4) Digitalisasi dan pemantauan lingkungan berbasis data dan peralatan modern;
   5) Pengembangan RTH dan Ekowisata berbasis komunitas, data dan teknologi untuk Rehabilitasi Lahan dan Pengendalian Ruang;
   6) Penguatan perlindungan kawasan lindung dan rawan melalui pemantauan, penghijauan, dan pemberdayaan;
   7) Penguatan perangkat hukum dan penegakan aturan untuk perlindungan lingkungan;
   8) Pengendalian dampak urbanisasi dan integrasi lingkungan dalam perencanaan ruang;
   9) Tata kelola adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko lingkungan;
5. Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan baik, dengan Sasaran :
   a. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang baik, dengan strategi :
      1) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital;
      2) Penguatan kolaborasi antar stakeholder dalam memperkuat tata organisasi, serta dan mitigasi keamanan dan kebencanaan;
      3) Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah untuk peningkatan PAD;
      4) Penyelarasan dan penegakkan regulasi pusat dan daerah;
      5) Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan pelatihan;
      6) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas;
   b. Akuntabilitas Keuangan yang Semakin Baik Diikuti dengan Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah;
      1) Terwujudnya Efektifitas Pemerintahan yang baik;
      2) Meningkatnya Keamanan dan Kerukunan Masyarakat;
      3) Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat.

4.1.5. Arah kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2026, sejalan dan sinergis dengan ada Arah kebijakan Pembangunan Nasional, Arah kebijakan Pembangunan Provinsi.

Arah kebijakan Pembangunan Nasional

Arah Kebijakan Kabupaten Sikka mengacu pada arah kebijakan Nasional yang termuat dalam RKP Tahun 2026 dengan Tema **"Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**" dengan program :

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan Kemiskinan

6. Pencegahan dan pemberantasan Narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersesiaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani.
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas, terjangkau bersanitasi baik baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program Kredit usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota Inovatif-karakteristik mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan indyustrisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan pengingkatan prestasi olah raga.

Program Hasil Terbaik cepat :

1. Memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBS dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6. Menaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh) TNI/Polri dan pejabat negara
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai (BLT) dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sejalan dengan Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Nasional dengan ditetapkannya Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yang dijabarkan per misi :

1. Arah kebijakan **Meningkatkan kualitas SDM yang unggul, inovatif, dan sejahtera** bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh bagi masyarakat, tetapi juga untuk membentuk fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sikka. Dengan memprioritaskan prinsip inklusi dan kesetaraan dalam akses, diharapkan dapat tercapai pembangunan manusia yang berkualitas dan terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan kompetitif.
2. Arah kebijakan **Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing** difokuskan pada pembangunan ekonomi di Kabupaten Sikka. Kesejahteraan ekonomi merujuk pada kondisi di mana anggota masyarakat secara luas menikmati tingkat kehidupan yang baik secara ekonomi, menggambarkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat di Kabupaten Sikka. Saat ini, corak perekonomian Kabupaten Sikka masih bertumpu pada sektor Primer sehingga pertumbuhan ekonomi daerah ini cenderung mengalami perlambatan, yang tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, dalam perencanaan jangka panjang daerah diperlukan arah kebijakan yang tepat untuk mewujudkan perekonomian yang stabil, mandiri, dan berdaya saing. Arah kebijakan bidang kesejahteraan ekonomi

3. Arah Kebijakan **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel** difokuskan pada pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi prasyarat penting yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong keberhasilan berbagai aspek lainnya. Misi ini memiliki sasaran pokok yaitu terwujudnya pemerintahan yang responsif dan akuntabel melalui penguatan reformasi birokrasi.
4. Arah Kebijakan **Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat** berfokus pada Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Arah Kebijakan **Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi yang inklusif dan tangguh** berfokus pada Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi yang inklusif dan tangguh
6. Arah Kebijakan **Mewujudkan infrastruktur antar wilayah yang berkeadilan** berfokus pada pengembangan infrastruktur wilayah. Infrastruktur wilayah merupakan faktor pendukung utama dalam proses pembangunan untuk menghasilkan manusia yang unggul dan sejahtera.
7. Arah Kebijakan **Meningkatkan pembangunan sarana prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan** berfokus pada pelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan tempat dimana semua aktivitas pembangunan dijalankan dan dilakukan.
8. Arah Kebijakan **Mewujudkan pembangunan yang kolaboratif, terintegrasi dan berkesinambungan** berfokus pada Mewujudkan pembangunan yang kolaboratif, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 dengan tema : **Peningkatan Produktivitas dalam memenuhi kebutuhan pangan dan energi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif**, dengan prioritas :

Penyusunan RKPD Kabupaten Sikka juga memperhatikan Rencana Kerja pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 dengan tema : **Peningkatan Produktivitas dalam memenuhi kebutuhan pangan dan energi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif**, dengan prioritas :

1. Pembangunan Ekonomi berkelanjutan, dengan fokus pada :
    a. Memajukan sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan dan keluatan sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan berbasis potensi daerah
    b. Memperkaya ekowisata, geowisata, geopark, dan wisata budaya berbasis komunitas, menampilkan jati diri dan pesona NTT ke dunia
    c. Mengakselerasi program penciptaan lapangan kerja dan wira usaha baru serta meningkatkan kapasitas wirausaha
    d. Memastikan seluruh Masyarakat NTT yang bekerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaa

2. Pemberdayaan Komunitas, dengan fokus pada :
    a. Mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal khususnya oleh anak muda milenial dan perempuan
    b. Digitalisasi, kolaborasi dan revitalisasi koperasi menuju kemandirian ekonomi

c. Menciptakan ekosistem yang mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis Potensi Desa
d. Optimalisasi dan penguatan kapasitas BUMDES untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat

3. Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan, dengan fokus pada :
   a. Membangun jalan, sumber daya air, air minum bersih,kelistrikan, dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (*green and blue infrastructure*), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim
   b. Meningkatkan kualitas layanan transportasi public guna meningkatkan konektivitas antar wilayah
   c. Pembangunan infrastruktur digitan untuk memperluas akses inbternet dan komunikasi

4. Pemerataan Akses dan Layanan Kesehatan, dengan fokus pada :
   a. Pencegahan dan percepatan penurunan stiunting dengan pendekatan pentahelix
   b. Memastikan seluruh Masyarakat NTT sebagai peserta aktif BPJS
   c. Penguatan infrastruktur di fasilitas layanan kesehatan
   d. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses
   e. Pemerataan distribusi dan peningkatan kualitas SDM Kesehatan

5. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, dengan fokus pada :
   a. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur Pendidikan berkualitas
   b. Membangun sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah
   c. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus
   d. Insentif Pendidikan bagi siswa/mahasiswa berprestasi kurang mampu serta tenaga pendidik di daerah perifer
   e. Mengoptimalkan penggunaan teknologi iuntuk pembelajaran ormal dan non formal

6. Reformasi Birokrasi dan HAM, dengan fokus pada :
   a. Mentraformasi pelayanan public menjadi lebih transparan, efisien, professional proaktif dan melayani
   b. Meningkatkan kesejahteraan Asn sebagai salah satu penggerak ekonomi
   c. Memperkuat sumber pendapat daerah
   d. Meningkatkan keamanan daerah dan melindungi hak-hak Masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif Masyarakat dan kerja sama lintas sektor

7. Kolaborasi Ayo Bangun NTT, dengan fokus pada :
   a. Melibatkan dan mengoptimalkan kontribusi diaspora dan potensi Keluarga Besar NTT untuk membangun daerah
   b. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh program pemerintah kabupaten/kota serta CSO/NGO untuk Pembangunan di Provinsi NTT

Arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif dan Berkarakter Sosial, dengan arah kebijakan
   a. Membangun dasar kebijakan dan sistem pelayanan SDM yang inklusif, responsif, dan berbasis nilai lokal.
   b. Memantapkan tata kelola dan infrastruktur layanan SDM yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

c. Meningkatkan daya saing dan kesejahteraan manusia melalui inovasi dan integrasi sosial berbasis komunitas.
d. Membangun SDM yang tangguh, adil gender, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial, budaya, dan lingkungan.
e. Menjamin keberlanjutan pembangunan SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan responsif terhadap dinamika global.

2. Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing, dengan arah kebijakan :
   a. Membangun fondasi pengembangan sektor primer untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi
   b. Memperkuat kapasitas dan kapabilitas sektor primer untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
   c. Pengembangan sektor industri pengolahan berbasis sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
   d. Penguatan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat
   e. Memantapkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah untuk kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan

3. Mewujudkan Infrastruktur Antar Wilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, dengan arah kebijakan :
   a. Memperkuat fondasi infrastruktur dasar yang inklusif, tangguh, dan terintegrasi, melalui penataan tata ruang, penyediaan infrastruktur dasar, serta penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat
   b. Mengkonsolidasikan sistem infrastruktur wilayah yang tangguh dan berdaya saing melalui integrasi layanan dasar, penguatan kelembagaan, dan tata kelola ruang yang adaptif terhadap investasi dan perubahan iklim
   c. Mendorong akselerasi dan inovasi infrastruktur strategis yang tangguh, cerdas, dan inklusif untuk memperkuat daya saing wilayah dan kualitas hidup masyarakat
   d. Memperkuat integrasi keberlanjutan dan inklusivitas infrastruktur wilayah dalam mendukung transformasi ekonomi hijau, resiliensi sosial, dan daya saing investasi daerah
   e. Mewujudkan infrastruktur dan daerah yang berkelanjutan, tangguh, dan mandiri melalui transformasi hijau, digitalisasi menyeluruh, serta tata Kelola kolaboratif berbasis masyarakat

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan dan Berkelanjutan, dengan arah kebijakan :
   a. Memperkuat dasar tata kelola lingkungan yang inklusif, kolaboratif, dan berbasis komunitas untuk mendorong perubahan perilaku dan perlindungan ekosistem secara terencana
   b. Mengintegrasikan sistem pengelolaan lingkungan yang efektif dan responsif melalui inovasi teknologi, penguatan kelembagaan, serta kolaborasi multipihak dalam pencegahan dan pengendalian degradasi lingkungan
   c. Mendorong transformasi sistem pengelolaan lingkungan yang inovatif, berbasis teknologi, dan terintegrasi dalam tata kelola wilayah serta pemberdayaan komunitas untuk mewujudkan ekosistem yang sehat, tangguh dan berkelanjutan
   d. Mengokohkan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dan responsif melalui konsolidasi kelembagaan, inovasi tata ruang, dan perluasan partisipasi untuk mewujudkan keadilan ekologis dan ketahanan wilayah
   e. Mewujudkan lingkungan hidup daerah yang resilien, regeneratif, dan

berkeadilan transformasi tata kelola, teknologi hijau, dan kemandirian komunitas dalam menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas hidup

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Kolaboratif dan Bebas KKN, dengan arah kebijakan :
   a. Membangun fondasi tata Kelola pemerintah melalui optimalisasi potensi daerah, penyelarasan dan penegakkan regulasi pusat dan daerah, serta peningkatan pengawasan dan akuntabilitas
   b. Penguatan fondasi tata Kelola pemerintah melalui kolaborasi stakeholder, optimalisasi potensi daerah dan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas.
   c. Pembangunan tata Kelola pemerintah melalui peningkatan kualitas SDM serta pengawasan dan akuntabilitas
   d. Penguatan tata Kelola pemerintah melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kualitas SDM, serta pengawasan dan akuntabilitas.
   e. Pemantapan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital, serta peningkatan pengawasan dan akuntabilitas.

Arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026 mengacu pada tema pembangunan Tahun 2026 **"Penguatan Kualitas SDM dan Peningkatan Infrastruktur Berbasis Lingkungan serta Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas menuju Sikka yang Kreatif, Unggul dan Mandiri".**

Arah kebijakan adalah Meningkatkan kualitas Pendidikan, kesehatan, kompetensi tenaga kerja, partisipasi perempuan dalam politik jabatan publik dan ekonomi, ketersediaan dan konsumsi pangan lokal, pertumbuhan PDRB sektoral, PAD, daya beli masyarakat, investasi, keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, kualitas SDM Aparatur, pengelolaan keuangan daerah, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial, peran pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa, pembangunan infrastruktur dasar, pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan kualitas pelayanan publik.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2026

Program Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yang terdiri dari program kepala daerah dan program perangkat daerah. Program dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Kepala daerah, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
   a. Jaminan Pendidikan, 1 sarjana bagi KK Miskin Ekstrim dan Meningkatkan kuota Bantuan Beasiswa Yang berprestasi dari KK miskin yang dilaksanakan melalui program Kesejahteraan Rakyat
   b. Peningkatan pemberian Insentif bagi Guru honor Mulai dari PAUD Sampai SMP yang dilaksanakan melalui program Pendidik dan Tenaga Pendidikan.`
   c. Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Warga Kabupaten Sikka berbasis E-KTP dan Meningkatkan sarana, prasarana dan kualitas pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan melalui program Perlindungan dan Jaminan Sosial
   d. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan berbasis Teknologi berupa bantuan sarana produksi, sarana dan prasarana pertanian yang dilaksanakan melalui program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
   e. Membangun pusat kreatif digital untuk mendukung pengembangan pariwisata melalui seni budaya, UMKM dan Konten Kreator Milenial yang

dilaksanakan melalui program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

f. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan menjadikan terumbu karang (dive), wisata budaya dan wisata Rohani sebagai branding untuk dijual yang dilaksanakan melalui program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
g. Peningkatan alat tangkap perikanan yang dilaksanakan melalui program Pengelolaan Perikanan Tangkap
h. Revitalisasi Pasar Tradisional yang dilaksanakan melalui program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
i. Bantuan Pembangunan rumah layak huni bagi Keluarga miskin yang dilaksanakan melalui program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
j. Meningkatkan Bantuan Dana Kelurahan 1 (satu) kelurahan yang dilaksanakan melalui program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka tahun 2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2 Pengelolaan Pendidikan
3 Pengembangan Kurikulum
4 Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5 Pengendalian Perizinan Pendidikan
6 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
7 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
8 Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
9 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
11 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
12 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
13 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
14 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
15 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
16 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
17 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
18 Penataan Bangunan Gedung
19 Penyelenggaraan Jalan
20 Pengembangan Jasa Konstruksi
21 Penyelenggaraan Penataan Ruang
22 Pengembangan Perumahan
23 Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
24 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
25 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
26 Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
27 Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
28 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
29 Penanggulangan Bencana
30 Pemberdayaan Sosial
31 Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
32 Rehabilitasi Sosial
33 Perlindungan dan Jaminan Sosial
34 Penanganan Bencana
35 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

36 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
37 Penempatan Tenaga Kerja
38 Hubungan Industrial
39 Pembangunan Kawasan Transmigrasi
40 Pengembangan Kawasan Transmigrasi
41 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
42 Perlindungan Perempuan
43 Peningkatan Kualitas Keluarga
44 Pemenuhan Hak Anak (PHA)
45 Program Perlindungan Khusus Anak
46 Pengendalian Penduduk
47 Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
48 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
49 Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
50 Penanganan Kerawanan Pangan
51 Pengawasan Keamanan Pangan
52 Perencanaan Lingkungan Hidup
53 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
54 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
55 Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
56 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
57 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
58 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
59 Pengelolaan Persampahan
60 Pendaftaran Penduduk
61 Pencatatan Sipil
62 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
63 Pengelolaan Profil Kependudukan
64 Penataan Desa
65 Administrasi Pemerintahan Desa
66 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
67 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
68 Pengelolaan Pelayaran
69 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
70 Pengelolaan Aplikasi Informatika
71 Penyelenggaraan Statistik Sektoral
72 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
73 Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
74 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
75 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
76 Pengembangan UMKM
77 Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
78 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
79 Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
80 Perencanaan dan Pembangunan Industri
81 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
82 Promosi Penanaman Modal
83 Pelayanan Penanaman Modal
84 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
85 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
86 Pembinaan Perpustakaan

87 Pengelolaan Arsip
88 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
89 Pengelolaan Perikanan Tangkap
90 Pengelolaan Perikanan Budidaya
91 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
92 Pengembangan Kebudayaan
93 Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
94 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
95 Pemasaran Pariwisata
96 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
97 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
98 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
99 Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
100 Penyuluhan Pertanian
101 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
102 Perekonomian dan Pembangunan
103 Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
104 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
105 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
106 Penelitian dan Pengembangan Daerah
107 Pengelolaan Barang Milik Daerah
108 Pengelolaan Keuangan Daerah
109 Pengelolaan Pendapatan Daerah
110 Kepegawaian Daerah
111 Pengembangan Sumber Daya Manusia
112 Penyelenggaraan Pengawasan
113 Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
114 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
115 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
116 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
117 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
118 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
119 Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
120 Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
121 Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
122 Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
123 Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

5.1. Rencana Target Indikator Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Tahun 2026

Rencana Target Indikator Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Tahun 2026 dapat dlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Rencana Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	Target
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,24
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B
3.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,11
4.	Pendapatan Per Kapita	Rp	20172000
5.	Rasio Gini	Indeks	0,2355
6.	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	57,57
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,21
8.	HLS (Harapan Lama Sekolah)	Angka	17,04
9.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Angka	10,38
10.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	38,73
11.	Indeks Resiko Bencana	Indeks	121,81
12.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	B
13.	Opini BPK	Opini	WTP
14.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,43
15.	Indeks Profesionalitas ASN		80,35
16.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka	74,72
17.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,60
18.	Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas)	Indeks	86
19.	Pertumbuhan sektor primer	%	3,30
20.	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	4,20
21.	Angka Kemiskinan	Angka	11,13
22.	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	1,80
23.	Pengeluaran Per Kapita	Rp Juta/Orang/ Bulan	9,694
24.	Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum	%	5,40
25.	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	9,60

Tabel 5.2
Rencana Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	2026
I	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**		
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	38,73
2	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	57,57
3	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	1,80
4	Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum	%	5,40
5	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	4,20
6	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	9,60
7	Pertumbuhan sektor primer	%	3,30

NO	INDIKATOR	SATUAN	2026
II	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,21
2	Indeks Resiko Bencana	Indeks	121,81
III	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**		
1	Angka Kemiskinan	Angka	11,13
2	HLS (Harapan Lama Sekolah)	Angka	17,04
3	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,04
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,24
5	Pendapatan Per Kapita	Rp	20172000
6	Pengeluaran Per Kapita	Rp Juta/Orang/Bulan	9,694
7	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,11
8	Rasio Gini	Indeks	0,2355
9	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Angka	10,38
10	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka	74,72
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,43
2	Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas)	Indeks	86
3	Indeks Profesionalitas ASN		80,35
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,60
6	Opini BPK	Opini	WTP
7	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	B

5.2. Program, Indikator, Target Kinerja dan Anggaran

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

5.2.1. Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan Program per Perangkat Daerah dengan Indikator Program, Kegiatan dan Sum Kegiatan berserta Target Kinerja Sub Kegiatan yang disertai dengan Target Anggaran masing-masing Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.3
Rekapitulasi Pagu Anggaran per PD Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Rincian Belanja
1	Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Dan Olahraga	411.434.426.843,33
2	Dinas Kesehatan	172.281.975.488,36
3	RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE	99.772.745.360,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.051.772.918,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	23.118.474.996,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.474.559.030,50
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.975.640.944,00
8	Dinas Sosial	4.266.013.624,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.452.184.679,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.303.059.768,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	3.482.731.692,00

No	Perangkat Daerah	Rincian Belanja
12	Dinas Lingkungan Hidup	7.741.667.392,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.029.723.110,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.200.830.646,80
15	Dinas Perhubungan	6.940.289.481,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.698.961.230,00
17	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.286.255.976,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.533.984.143,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.092.504.758,00
20	Dinas Perikanan	8.647.547.599,23
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.156.787.626,00
22	Dinas Pertanian	29.602.510.424,00
23	Sekretariat Daerah	35.422.155.720,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30.011.411.508,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	8.278.912.479,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	121.417.148.823,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD)	235.687.381.965,00
28	Badan Pendapatan Daerah	9.042.383.658,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.259.649.460,00
30	Inspektorat Daerah	5.738.087.581,00
31	Kecamatan Alok	5.616.099.169,99
32	Kecamatan Alok Barat	4.960.791.468,00
33	Kecamatan Alok Timur	5.957.908.944,68
34	Kecamatan Bola	1.410.427.348,00
35	Kecamatan Doreng	1.429.337.252,00
36	Kecamatan Hewokloang	1.497.345.838,00
37	Kecamatan Kangae	1.656.755.060,00
38	Kecamatan Kewapante	1.860.347.708,00
39	Kecamatan Koting	1.311.620.993,00
40	Kecamatan Lela	1.698.857.080,00
41	Kecamatan Magepanda	1.407.447.029,00
42	Kecamatan Mapitara	1.410.399.420,00
43	Kecamatan Nelle	1.291.193.510,00
44	Kecamatan Nita	1.958.423.915,00
45	Kecamatan Paga	1.367.066.550,00
46	Kecamatan Palue	1.663.511.596,00
47	Kecamatan Talibura	1.693.345.609,00
48	Kecamatan Tana Wawo	1.319.373.384,00
49	Kecamatan Waiblama	1.536.155.554,00
50	Kecamatan Waigete	1.424.802.342,00
51	Kecamatan Mego	1.520.048.699,08
52	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.576.200.072,00
	TOTAL	**1.348.969.237.464,97**

Tabel 5.4
Rencana Program Kegiatan SubKegiatan PerUnit PerPerangkat Daerah serta Rencana Pendanaan Tahun 2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	SMP NEGERI 1 MAUMERE			21.760.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			21.760.000
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			21.760.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	21.760.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	9.760.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.360.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000
	SMP NEGERI 2 MAUMERE			21.760.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	21.760.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	9.760.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.360.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000
	SMP NEGERI 4 MAUMERE			23.200.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.200.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	17.200.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.800.000
	SMP NEGERI 1 NITA			21.760.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	21.760.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	9.760.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.360.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000
	SMP NEGERI 2 NITA			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI 1 TALIBURA			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI 2 TALIBURA			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI 1 KEWAPANTE			21.160.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	21.160.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	9.760.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.360.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.400.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.400.000
	SMP NEGERI 1 PAGA			24.760.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	24.760.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.200.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.200.000
	SMP NEGERI 2 PAGA			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI 1 MEGO			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI 1 LELA			21.160.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	21.160.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	9.760.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.360.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.400.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.400.000
	SMP NEGERI 1 BOLA			23.520.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.520.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.520.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.120.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI 2 BOLA			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI 2 MEGO			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	20.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
X	NON URUSAN			3.000.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI 3 PAGA			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI 1 WAIGETE			21.160.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	21.160.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	9.760.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.360.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.400.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.400.000
	SMP NEGERI 1 PALUE			22.000.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	22.000.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.800.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4.800.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	17.200.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.800.000
	SMP NEGERI KEWAPANTE			21.160.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	21.160.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	9.760.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.360.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.400.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.400.000
	SMP NEGERI ALOK TIMUR			19.960.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	19.960.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.800.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4.800.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	15.160.000
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.400.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.360.000
	SMP NEGERI 2 WAIGETE			24.760.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	24.760.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.200.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.200.000
	SMP NEGERI RERO ROJA			24.760.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	24.760.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.200.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.200.000
	SMP NEGERI MAPITARA			20.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	20.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
	SMP NEGERI NUBA ARAT			21.160.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	21.160.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	9.760.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.360.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.400.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.400.000
	SMP NEGERI PRUDA			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI ALOK			20.760.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	20.760.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	9.760.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.360.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.000.000
	SMP NEGERI PIGANG			21.500.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	21.500.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	9.760.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.360.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.740.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.740.000
	SMP NEGERI HEBAR			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI HAMAR			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI WERANG			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI 43 WOLOMOTONG			23.560.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI 44 ST. PETRUS KLOANGPOPOT			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI 3 WAIGETE			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	20.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
X	NON URUSAN			3.000.000
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.000.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI TANAH MERAH			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI HENGA			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI PEMANA			25.600.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	25.600.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	16.600.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.400.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.800.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI SATAP PAGA			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	17.560.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
X	NON URUSAN			6.000.000
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			6.000.000
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.000.000
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
	SMP NEGERI SATAP BLORO			20.160.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	20.160.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	9.760.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.360.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.400.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.400.000
	SMP NEGERI SATAP WARA			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI SATAP SUKUN			26.200.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	26.200.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	17.200.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.800.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI SATAP MORO			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI 46 NANGAHALE			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			410.342.807.941
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			407.234.702.641
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			407.234.702.641
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	301.328.666.914
1.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	34.263.200
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	34.263.200
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	300.817.009.650
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2834 Orang/bulan	300.697.057.650
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	119.952.000
1.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	54.980.000
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	42.500.000
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	425 Orang	12.480.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	189.020.800
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.809.700
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	42.659.100
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	22.248.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	41.304.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	182.899.764
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	59.998.400
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	122.901.364

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	50.493.500
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	50.493.500
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	105.743.606.627
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	63.297.636.948
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	865.137.200
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	28 Unit	3.532.562.800
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	201.578.000
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	333.068.800
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2283 Paket	4.039.717.100
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	24 Peserta Didik	21.781.200
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	524 Orang	4.460.753.192
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	108.000.000
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	336 Satuan Pendidikan	538.444.500
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	336 Satuan Pendidikan	34.222.805.000
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	150 Orang	17.000.000
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150 Orang	107.000.600
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	150 Konten Digital	121.857.400
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	150.000.000
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	28.470.700
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	336 Komunitas	73.360.000
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	36.165.000
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	1.667.590.000
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Unit	1.257.396.880
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	210 Orang	178.841.900
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	336 Satuan Pendidikan	94.043.800
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	82 Ruang	8.226.978.876
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	20 Paket	3.015.084.000
1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	31.442.835.979
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	1.007.640.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	965.164.800
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	1.410.262.000
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Ruang	2.383.510.683
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	150 Paket	562.906.000
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	24 Peserta Didik	16.100.000
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	260 Orang	2.216.776.596
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	54.700.000
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	90 Satuan Pendidikan	10.943.000
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	90 Satuan Pendidikan	19.395.172.000
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	90 Orang	25.943.200
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	90 Orang	81.812.800
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	3 Konten Digital	86.068.700
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	94.000.000
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	11.923.800
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	90 Komunitas	19.286.000
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	21.641.300
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	90 Satuan Pendidikan	39.844.000
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8 Ruang	2.645.150.800
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	90 Orang	90.840.300
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	303.150.000
1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	9.794.213.600
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	718.130.000
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	18 Paket	1.358.698.100
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	40 Orang	288.000.000
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	90 Orang	77.999.600
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	313 Satuan Pendidikan	34.506.400
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	313 Satuan Pendidikan	5.714.370.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	313 Orang	43.278.800
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	49.959.700
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	33.332.800
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	31.224.200
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	1.005.690.000
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	43 Paket	410.634.000
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	313 Satuan Pendidikan	28.390.000
1.01.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.208.920.100
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15 Orang	108.000.000
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan	16.701.900
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	5 Satuan Pendidikan	617.300.000
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	40.000.000
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	12 Dokumen	94.324.700
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	12 Peserta Didik	332.593.500
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-	68.325.200
1.01.03.2.01.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	68.325.200
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	488 Buku	68.325.200
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	58.913.900
1.01.04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	58.913.900
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	32.991.900
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan	25.922.000
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-	35.190.000
1.01.05.2.01.	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	24.990.000
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	24.990.000
1.01.05.2.02.	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	10.200.000
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	10.200.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.108.105.300
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			3.108.105.300
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	135.399.200
2.19.02.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	135.399.200
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	75 Orang	135.399.200
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	2.897.706.100
2.19.03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	392.466.300
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	392.466.300
2.19.03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.412.492.800
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	12 Kegiatan	2.078.000.000
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	68 Orang	334.492.800
2.19.03.2.03.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	92.747.000
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	28 Orang	30.000.000
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	28 Orang	62.747.000
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-	75.000.000
2.19.04.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	75.000.000
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	75.000.000
	SMP NEGERI 3 MAUMERE			20.160.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	20.160.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	9.760.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	3.360.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.400.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4.400.000
	SMP NEGERI KOLISIA			20.160.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	20.160.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	6.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	9.760.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.360.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.400.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4.400.000
	SMP NEGERI 45 WATU PAJUNG			21.160.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	21.160.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	9.760.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.360.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.400.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.400.000
	SMP NEGERI SATAP WOLOMAPA			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	21.160.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	12.160.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	3.000.000
X	NON URUSAN			2.400.000
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			2.400.000
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.400.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.400.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
	SMP NEGERI 47 OJANG			23.560.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.560.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.560.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.160.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	3.000.000
	SMP NEGERI 48 SA ATE GAIKIU			22.038.902
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	22.038.902
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	6.000.000
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	16.038.902
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.478.902
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.400.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	8.160.000
	PUSKESMAS BOGANATAR			1.024.365.192
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.024.365.192
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.024.365.192
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.018.241.192
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	42.172.600
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	14.579.600
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	2.095.700
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	2.901.900
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	22.595.400
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	976.068.592
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	125 Orang	77.555.500
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	914 Orang	30.480.000
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	33 Orang	17.640.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	89 Orang	12.100.000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	313.661.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	27.300.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	11.000.000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	35.435.000
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	65 Orang	10.160.000
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	28 Dokumen	107.390.500
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	15 Dokumen	276.666.592
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	561 Orang	10.160.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	12.560.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	1.800.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	32.160.000
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	0
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	0
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	6.124.000
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	80 Persen	0
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	0
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	6.124.000
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	6.124.000
	PUSKESMAS WATUBAING			1.710.220.586
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.710.220.586
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.710.220.586
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.703.587.586
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	139.574.200
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	11 Unit	66.345.300
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	73.228.900
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.564.013.386
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	355 Orang	93.960.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3504 Orang	64.840.000
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	58 Orang	25.080.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	324 Orang	18.840.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	491.759.200
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	9.160.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	10.080.000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	68.976.000
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	58 Orang	9.160.000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17 Dokumen	150.881.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	522.643.186
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	130 Orang	12.900.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	20.100.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	2.194.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	2 Dokumen	63.440.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	6.633.000
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	6.633.000
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.633.000
	PUSKESMAS WAIGETE			1.801.885.224
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.801.885.224
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.801.885.224
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.786.018.424
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	249.856.700
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	24.938.800
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	78 Unit	89.049.600
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	135.868.300
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.536.161.724
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	494 Orang	100.320.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4443 Orang	65.880.000
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	61 Orang	18.600.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	321 Orang	40.800.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8 Dokumen	455.430.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	26.760.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	16.540.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	36.158.000
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	107 Orang	8.240.000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	28 Dokumen	157.966.000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	37 Dokumen	521.587.724
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	120 Orang	4.140.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	3 Dokumen	18.140.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	920.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	2 Dokumen	64.680.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	15.866.800
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	15.866.800
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	15.866.800
	PUSKESMAS TANARAWA			1.463.712.691
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.463.712.691
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.463.712.691
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.460.185.691
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	87.133.300
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	27.765.600
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	0
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	15.361.400
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	44.006.300
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.373.052.391
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	182 Orang	76.440.000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1762 Orang	38.640.000
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45 Orang	75.600.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	135 Orang	19.740.000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	402.660.500
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen	21.000.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	23.640.000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	65.544.000
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	12.320.000
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	27 Dokumen	72.707.000
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	25 Dokumen	399.841.891
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	117 Orang	36.550.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	3 Dokumen	47.880.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	689.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	3 Dokumen	11.760.000
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	7 Dokumen	68.040.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	0
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	3.527.000
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	80 Persen	0
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	0
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	3.527.000
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	3.527.000
	PUSKESMAS HEWOKLOANG			1.169.658.300
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.169.658.300
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.169.658.300
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.128.518.300
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	94.177.842
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	16 Unit	37.419.700
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	3.950.800
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	7.367.400
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	45.439.942
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.034.340.458
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	170 Orang	63.130.000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	146 Orang	14.000.000
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	133 Orang	16.240.000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	621 Orang	25.500.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1846 Orang	10.640.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6011 Orang	25.500.000
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	659 Orang	46.750.000
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2580 Orang	7.480.000
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	63 Orang	25.200.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	89 Orang	16.940.000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	185 Orang	3.920.000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	149.618.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	7.560.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	7.980.000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	45.008.100
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	63 Orang	13.820.000
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	144.720.000
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	33 Dokumen	314.344.358
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	2.800.000
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89 Orang	4.200.000
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	185 Orang	5.180.000
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3600 Orang	22.320.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	9.340.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	560.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	11.760.000
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	2 Dokumen	39.830.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	0
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 0	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	41.140.000
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	80 Persen	25.840.000
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5 Dokumen	25.840.000
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	15.300.000
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	15.300.000
	PUSKESMAS BERU			1.700.342.893
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.700.342.893
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.700.342.893
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.691.476.893
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standarPersentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standarPersentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah SakitPersentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen100 Persen86 persen86 Persen	197.762.900
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	26.486.500
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	0
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	43 Unit	10.840.000
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	160.436.400
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.493.713.993
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	470 Orang	69.440.000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 Orang	0
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	470 Orang	103.460.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	87 Orang	26.460.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	462 Orang	25.200.000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9 Dokumen	435.800.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	2.100.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	37.380.000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	68.110.000
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	150 Orang	13.720.000
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	21 Dokumen	72.360.000
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	47 Dokumen	497.493.993
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	8.250.000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	11.200.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.500.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	2 Dokumen	77.280.000
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	7 Dokumen	43.960.000
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	0
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	8.866.000
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	80 Persen	0
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	0
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	8.866.000
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	8.866.000
	PUSKESMAS KOPETA			1.615.558.396
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.615.558.396
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.615.558.396
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.611.560.196
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	217.582.800
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	11 Unit	97.230.400
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit	28.388.800
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	91.963.600
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.393.977.396
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	497 Orang	151.140.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4691 Orang	73.368.000
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	35.280.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	390 Orang	8.120.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13 Dokumen	352.224.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	22.400.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7 Dokumen	20.720.000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9 Dokumen	40.484.300
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5000 Orang	11.760.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	160.888.600
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	20 Dokumen	442.156.496
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	6.556.000
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5000 Orang	7.000.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	5 Dokumen	53.620.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	2.100.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	6.160.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	3.998.200
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	3.998.200
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	3.998.200
	PUSKESMAS WOLOMARANG			1.452.756.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.452.756.000
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.452.756.000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.442.556.000
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	166.831.800
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	55.520.700
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	0
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	13.881.200
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	97.429.900
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.275.724.200
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	475 Orang	18.240.000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4569 Orang	36.120.000
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	34 Orang	22.400.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	361 Orang	6.720.000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	653 Orang	18.480.000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	354.549.600
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	13.160.000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	121.250.000
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17 Dokumen	100.600.000
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	395.974.600
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1.120.000
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40 Orang	4.480.000
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	47 Orang	4.480.000
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	2.240.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	6 Dokumen	96.670.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	42.000.000
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	6 Dokumen	37.240.000
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	0
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	10.200.000
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	80 Persen	0
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	0
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	10.200.000
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	10.200.000
	PUSKESMAS MAGEPANDA			1.390.571.940
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.390.571.940
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.390.571.940
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.381.035.940
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	130.485.200
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 Unit	27.505.300
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	28 Unit	12.389.100
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	90.590.800
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.250.550.740
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	219 Orang	70.320.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2651 Orang	39.520.000
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	18 Orang	18.200.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	194 Orang	20.160.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8 Dokumen	425.798.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	9.660.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	21.840.000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	78.544.000
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6 Orang	3.080.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	0 0	78.208.000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	7 Dokumen	374.608.740
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	1.120.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4 Dokumen	26.780.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	2.282.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	2 Dokumen	58.800.000
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	6 Dokumen	21.630.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	9.536.000
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	9.536.000
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	9.536.000
	PUSKESMAS NELLE			1.181.186.450
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.181.186.450
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.181.186.450
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.153.274.450
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	72.588.500
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	30.108.700
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	13 Unit	6.651.400
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	35.828.400
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.080.685.950
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	81 Orang	72.350.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1305 Orang	51.800.000
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	49 Orang	25.200.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	66 Orang	11.200.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11 Dokumen	289.296.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	21.280.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	23.030.000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	44.220.000
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	625 Orang	10.550.000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	81.537.250
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10 Dokumen	364.834.750
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2 Orang	7.000.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	5 Dokumen	9.400.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	807.950
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	2 Dokumen	42.000.000
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	4 Dokumen	26.180.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	27.912.000
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	27.912.000
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	80 Dokumen	27.912.000
	PUSKESMAS KOTING			1.174.491.300
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.174.491.300
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.174.491.300
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.159.592.300
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	90.172.100
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	35.093.400
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	6.680.300
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	22 Unit	10.842.300
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	37.556.100
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.069.420.200

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	94 Orang	58.800.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	795 Orang	35.280.000
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	37 Orang	24.360.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	78 Orang	13.440.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	300.863.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	25.200.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	20.440.000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	30.700.000
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	37 Orang	3.640.000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	34 Dokumen	94.984.000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	287.370.200
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	5.040.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4 Dokumen	111.160.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	443.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	2 Dokumen	23.520.000
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	14 Dokumen	34.180.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	14.899.000
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	14.899.000
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	14.899.000
	PUSKESMAS NITA			1.945.799.964
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.945.799.964
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.945.799.964
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.927.831.964
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standarPersentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standarPersentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah SakitPersentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen100 Persen86 persen86 Persen	242.313.200
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	12 Unit	30.520.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	28 Unit	10.731.600
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	201.061.600
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.685.518.764
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	296 Orang	93.000.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4853 Orang	72.400.000
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	111 Orang	23.040.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	428.629.800
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	59.550.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	24.540.000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	78.002.000
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	23.680.000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen	235.981.500
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	21 Dokumen	548.841.464
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	35.650.000
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	7.320.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	53.100.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	1.784.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	17.968.000
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	17.968.000
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	17.968.000
	PUSKESMAS NANGA			1.242.691.760
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.242.691.760
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.242.691.760
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.233.841.760

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	124.391.000
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	7 Unit	30.472.300
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	31.127.300
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	62.791.400
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.109.450.760
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	144 Orang	48.640.000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	819 Orang	63.560.000
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	66 Orang	39.060.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	89 Orang	17.290.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11 Dokumen	346.536.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	34.720.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	10.570.000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	55.216.000
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	66 Orang	33.600.000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	29 Dokumen	80.780.000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	13 Dokumen	318.158.760
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2 Orang	3.640.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4 Dokumen	15.120.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	560.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	3 Dokumen	10.710.000
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	10 Dokumen	31.290.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	8.850.000
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	8.850.000
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	8.850.000
	PUSKESMAS PAGA			1.617.704.100
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.617.704.100
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.617.704.100
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.609.450.100
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	163.588.100
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit	11.319.000
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	0
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	4.392.100
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	147.877.000
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.445.862.000
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	247 Orang	127.120.000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3487 Orang	48.440.000
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	33 Orang	26.460.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	174 Orang	16.240.000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	452.410.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	28.000.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	22.680.000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	80.080.000
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	33 Orang	10.080.000
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	32 Dokumen	130.562.000
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10 Dokumen	429.139.500
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2 Orang	6.020.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	8.540.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	730.500
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	2 Dokumen	59.360.000
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	0
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	0
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	8.254.000
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	80 Persen	0
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	0
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	8.254.000
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	8.254.000
	PUSKESMAS LEKEBAI			1.176.198.300
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.176.198.300
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.176.198.300
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.173.750.300
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	21.627.600
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	19.626.900
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	0
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	2.000.700
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	0
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.152.122.700
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	123 Orang	63.640.000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1585 Orang	41.795.000
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	23.360.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	46 Orang	19.800.000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8 Dokumen	366.300.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	10.180.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	16.380.000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	32.371.500
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	25 Orang	4.800.000
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	16 Dokumen	113.746.500
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10 Dokumen	337.449.700
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	10.140.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	2.120.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	2 Dokumen	88.320.000
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen	21.720.000
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	0
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	2.448.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	80 Persen	0
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	0
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	2.448.000
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	2.448.000
	PUSKESMAS WOLOFEO			1.394.304.943
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.394.304.943
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.394.304.943
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.379.305.143
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	73.749.200
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	29 Unit	15.927.100
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	349 Unit	6.932.400
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	24 Unit	2.705.600
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	48.184.100
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.305.555.943
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	156 Orang	75.600.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1486 Orang	11.600.000
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6 Orang	5.760.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	72 Orang	28.620.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	510.597.500
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	13.800.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	19.200.000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	23.080.000
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6 Orang	8.880.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen	104.156.000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	9 Dokumen	426.500.443
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	3.000.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7.180.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	2.602.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	12.000.000
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	7 Dokumen	52.980.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	14.999.800
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	14.999.800
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	14.999.800
	PUSKESMAS FEONDARI			1.106.077.348
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.106.077.348
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.106.077.348
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.085.055.348
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	13.348.800
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	2.263.500
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	0
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	0
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	11.085.300
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.071.706.548
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88 Orang	68.400.000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1028 Orang	41.200.000
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	13 Orang	3.840.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	53 Orang	16.500.000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8 Dokumen	360.820.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	10.640.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	21.600.000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	43.740.000
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	13 Orang	9.280.000
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	102.520.000
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10 Dokumen	301.966.548
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2 Orang	7.640.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	19.000.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	2.940.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	2 Dokumen	24.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	7 Dokumen	37.620.000
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	0
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	21.022.000
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	80 Persen	0
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	0
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	21.022.000
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	21.022.000
	PUSKESMAS BOLA			1.372.526.100
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.372.526.100
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.372.526.100
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.364.619.600
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	123.586.200
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	0
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	0
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	60 Unit	3.057.700
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	120.528.500
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.241.033.400
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	131 Orang	151.080.000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1846 Orang	38.322.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	43 Orang	14.280.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	66 Orang	5.420.000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145 Orang	2.640.000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11 Dokumen	370.880.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	3.480.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	30.880.000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	0
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	90.830.500
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	43 Orang	9.720.000
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	54.360.000
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	9 Dokumen	363.720.900
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	66 Orang	2.640.000
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3 Orang	1.320.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	3 Dokumen	43.320.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	980.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	2 Dokumen	23.760.000
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	6 Dokumen	33.400.000
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	7.906.500
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	80 Persen	0
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	0
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	7.906.500
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	7.906.500
	PUSKESMAS HABIBOLA			1.404.514.766
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.404.514.766
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.404.514.766
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.393.197.766
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	76.370.100
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	11.319.000
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	0
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	16 Unit	17.765.100
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	47.286.000
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.316.827.666
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	234 Orang	69.120.000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2335 Orang	64.260.000
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	46 Orang	49.800.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	122 Orang	11.660.000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8 Dokumen	419.476.800
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	4.050.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	10.340.000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13 Dokumen	13.352.800
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	46 Orang	12.080.000
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	39 Dokumen	184.090.000
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	441.366.066
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	2.060.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	9.320.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8 Dokumen	1.132.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	24.720.000
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	0
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	0
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	11.317.000
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	80 Persen	0
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	0
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	11.317.000
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	11.317.000
	PUSKESMAS MAPITARA			1.339.839.860
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.339.839.860
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.339.839.860
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.332.683.360
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	66.020.200
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	22.468.300
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	105 Unit	17.834.900
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	25.717.000
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.266.663.160
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	119 Orang	87.360.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1170 Orang	41.680.000
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	11 Orang	6.000.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	66 Orang	18.360.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9 Dokumen	473.342.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	9.330.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	26.160.000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	21.597.300
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	48 Orang	4.640.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	28 Dokumen	111.235.200
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	13 Dokumen	388.738.660
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2 Orang	9.620.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4 Dokumen	18.700.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	1.530.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	13.920.000
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	7 Dokumen	34.450.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	7.156.500
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	7.156.500
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	7.156.500
	PUSKESMAS TELUK			1.473.908.296
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.473.908.296
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.473.908.296
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.469.438.296
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	117.578.400
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	43 Unit	45.314.600
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	0
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	4.297.800
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	67.966.000
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.351.859.896
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	187 Orang	19.840.000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2156 Orang	37.120.000
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	36 Orang	18.600.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	128 Orang	23.500.000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	342.792.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	9.200.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	14.860.000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	29.170.000
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0	0 0	3.760.000
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen	122.372.000
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	11 Dokumen	425.813.896
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	5 Dokumen	252.320.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	2.032.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	7.520.000
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	6 Dokumen	42.960.000
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	0
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	4.470.000
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	80 Persen	0
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	0
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	4.470.000
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	4.470.000
	PUSKESMAS PALUE			1.223.008.300
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.223.008.300
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.223.008.300
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.215.048.300
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	72.490.100
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	8 Unit	37.692.600
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	0
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	67 Unit	3.253.000
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	31.544.500
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.142.558.200
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52 Orang	90.120.000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815 Orang	36.407.500
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6 Orang	14.160.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	72 Orang	13.840.000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	344.714.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	44.400.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	14.480.000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	22.270.000
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6 Orang	6.000.000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	33 Dokumen	95.577.500
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	11 Dokumen	330.859.200
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	3 Dokumen	30.360.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	1.130.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	2 Dokumen	39.840.000
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	9 Dokumen	58.400.000
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	0
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	7.960.000
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	80 Persen	0
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	0
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	7.960.000
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	7.960.000
	PUSKESMAS TUANGGEO			1.013.057.100
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.013.057.100
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.013.057.100

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.003.077.100
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standarPersentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standarPersentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah SakitPersentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen100 Persen86 persen86 Persen	65.594.100
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	30.350.300
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	23 Unit	2.893.200
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	32.350.600
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	937.483.000
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58 Orang	70.080.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	644 Orang	27.120.000
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	13 Orang	31.440.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	56 Orang	24.960.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9 Dokumen	229.338.400
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	12.330.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	16.420.000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	32.842.000
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4 Orang	10.680.000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23 Dokumen	80.559.000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10 Dokumen	299.013.600
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	3 Dokumen	19.320.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	340.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	2 Dokumen	54.240.000
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	4 Dokumen	28.800.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	9.980.000
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	9.980.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	9.980.000
	PUSKESMAS WAIPARE			1.520.642.733
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.520.642.733
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.520.642.733
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.512.330.233
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	229.029.733
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	29 Unit	78.959.200
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	19.510.400
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	130.560.133
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.283.300.500
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	184.730.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4645 Orang	32.908.000
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	53 Orang	12.600.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	255 Orang	5.950.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	371.755.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	10.500.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	13.440.000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	51.520.000
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	41 Orang	6.720.000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	127.558.000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	431.889.500
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	378 Orang	6.300.000
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	25 Orang	6.920.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	5.110.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	280.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	2559 Dokumen	15.120.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	8.312.500
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	8.312.500
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	8.312.500
	PUSKESMAS KEWAPANTE			1.384.186.255
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.384.186.255
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.384.186.255
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	1.376.576.755
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	154.683.800
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	42.673.300
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	0
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	3.782.800
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	108.227.700
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.221.892.955
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	243 Orang	43.200.000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2630 Orang	38.640.000
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang	15.120.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	230 Orang	19.250.000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	409.730.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	7.560.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	15.260.000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	37.100.000
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2 Orang	5.320.000
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	22 Dokumen	145.730.000
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	19 Dokumen	361.852.955
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2 Orang	6.160.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	5 Dokumen	56.840.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	840.000
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	59.290.000
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	0
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	0
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	7.609.500
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	80 Persen	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	0
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	7.609.500
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	7.609.500
	DINAS KESEHATAN			137.381.380.491
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			137.381.380.491
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			137.381.380.491
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100 %	73.793.120.819
1.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	170.142.000
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	71.746.000
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	98.396.000
1.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	72.377.458.210
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1242 Orang/bulan	71.881.028.210
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	496.430.000
1.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dihasilkan	100 Persen	47.971.000
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	36.768.000
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	11.203.000
1.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	293.895.400
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	10.299.200
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	69.946.200
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	38.000.000
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	175.650.000
1.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100 Persen	30.493.500
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	17.023.900
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	13.469.600
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	504.835.609
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138.033.669
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	5.350.000
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	361.451.940

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	368.325.100
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	368.325.100
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar	0,8 Indeks 100 % 100 Persen 88 persen	59.107.050.164
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	70 Persen 100 Persen 86 persen 86 Persen	10.877.463.850
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	39.998.700
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	6 Unit	557.814.616
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	0
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	20 Unit	52.019.800
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	3.474.870
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	22.549.870
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	100.000.000
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	0
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100 Unit	178.282.000
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	9.357.113.194
1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	20 Layanan	269.141.000
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	25 Paket	297.069.800
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	47.864.778.115
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5505 Orang	97.575.600
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5500 Orang	215.595.694
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4908 Orang	105.728.000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56000 Orang	16.040.200
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5398 Orang	59.270.000
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	192 Orang	7.081.600
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120 Orang	5.348.400
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1115 Orang	7.800.400
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4156 Orang	9.740.000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6.464 Orang	5.780.000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	3 Dokumen	13.550.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	21.460.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	87.500.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	121.383.065
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 Dokumen	438.142.900
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	206.630.000
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	0
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	3 Dokumen	19.230.000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	552.927.000
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	43.696.590.760
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	66.673.800
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1.348.956.296
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	14.280.000
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	561 Orang	13.670.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	414.880.000
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	374 Orang	24.760.000
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	242.669.600
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	2 Dokumen	24.894.800
1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	0
1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	2 Dokumen	26.620.000
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	12 Bulan	60.579.900
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	25 Dokumen	60.579.900
1.02.02.2.04.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang menerapkan BLUD Persentase Rumah Sakit yang mendapat izin operasional	20 Persen 100 Persen	304.228.300
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	25 Unit	304.228.300
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	3.277.089.608
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	100 Persen	1.855.855.708
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	77 Orang	1.732.011.608
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	123.844.100
1.02.03.2.03.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	30 Persen 30 Persen	1.421.233.900
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	1.421.233.900
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan sarana produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta sarana pengolahan makanan dan minuman	100 %	427.329.900
1.02.04.2.01.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian ijin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	100 Persen	90.499.500
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	70 Dokumen	90.499.500
1.02.04.2.03.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi untuk produk makan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	100 Persen	137.911.500

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70 Dokumen	137.911.500
1.02.04.2.06.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	100 Persen	198.918.900
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	35 Unit	198.918.900
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70 %	776.790.000
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	80 Persen	632.190.000
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	632.190.000
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	80 Persen	144.600.000
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	144.600.000
	RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE			99.772.745.360
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			99.772.745.360
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			99.772.745.360
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	45.434.134.000
1.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	45.434.134.000
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6288 Orang/bulan	45.434.134.000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	54.338.611.360
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	54.338.611.360
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	54.338.611.360
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			23.051.772.918
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			23.051.772.918
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			23.051.772.918
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	8.102.941.618
1.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	250.717.200
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	250.717.200
1.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.482.386.590
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	5.314.326.590
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	168.060.000
1.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	251.922.100

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.474.900
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	26.439.700
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.750.000
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.207.500
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	195.050.000
1.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.650.000.000
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1.650.000.000
1.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	262.663.828
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	98.201.500
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	164.462.328
1.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	205.251.900
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	86.141.100
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	31.968.200
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.600.000
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	81.542.600
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-	224.998.500
1.03.02.2.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	224.998.500
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,1 KM	103.980.000
1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	121.018.500
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	2.309.574.400
1.03.03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.309.574.400
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	20 Liter/Detik	2.309.574.400
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	125.000.000
1.03.04.2.01.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	125.000.000
1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	125.000.000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-	483.802.900
1.03.05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	483.802.900
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	100 M^3/Hari	334.802.900
1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	149.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-	1.216.984.700
1.03.06.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.216.984.700
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	300 M	1.216.984.700
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-	93.478.500
1.03.08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	93.478.500
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50 Dokumen	93.478.500
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	10.250.577.900
1.03.10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	10.250.577.900
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	236.931.600
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	881,42 KM	111.296.500
1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	2 KM	6.012.867.500
1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,7 KM	1.690.903.400
1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	4 Meter	2.198.578.900
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-	109.414.200
1.03.11.2.01.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	56.138.300
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	20 Orang	56.138.300
1.03.11.2.02.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	8.370.000
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	8.370.000
1.03.11.2.04.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-	44.905.900
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	20 Paket Pekerjaan	38.220.700
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	10 Lembaga	6.685.200
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-	135.000.200
1.03.12.2.01.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-	49.511.500
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	49.511.500
1.03.12.2.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	41.875.600
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	40 Layanan	41.875.600
1.03.12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	43.613.100
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	43.613.100

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN			23.118.474.996
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			21.793.813.796
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			21.793.813.796
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.509.265.754
1.04.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	47.000.600
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	47.000.600
1.04.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.312.471.500
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang 14 bulan Orang/bulan	2.260.211.500
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	52.260.000
1.04.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	77.025.000
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.190.000
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.990.000
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	58.845.000
1.04.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	23.778.454
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	23.778.454
1.04.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	48.990.200
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	46.740.200
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.250.000
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	484.050.700
1.04.02.2.01.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	47.307.700
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	7.949.700
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	21.136.700
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	18.221.300
1.04.02.2.03.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	425.743.000
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	259.553.300
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit Rumah	166.189.700
1.04.02.2.05.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	11.000.000
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	11.000.000
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	11.065.400.000
1.04.04.2.01.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	11.065.400.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	15 Unit Rumah	2.505.400.000
1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	214 Unit	8.560.000.000
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-	7.735.097.342
1.04.05.2.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	7.735.097.342
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	21 Lokasi	7.735.097.342
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.324.661.200
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			1.324.661.200
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-	31.561.200
2.10.04.2.01.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	31.561.200
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	31.561.200
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	1.293.100.000
2.10.05.2.01.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.293.100.000
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.293.100.000
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			4.474.559.031
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.474.559.031
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4.474.559.031
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.558.843.031
1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	13.800.000
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	13.800.000
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.121.601.274
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1148 Orang/bulan	3.082.301.274
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	39.300.000
1.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	6.000.000
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	53.958.100
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.073.100
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.600.000
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	35.285.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	157.793.700
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.775.600
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	137.018.100
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	205.689.957
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	205.689.957
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	755.095.000
1.05.02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	662.569.500
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3 Dokumen	18.108.300
1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	50 Orang	30.691.200
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	20 laporan	613.770.000
1.05.02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	48.850.000
1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	5 Dokumen	48.850.000
1.05.02.2.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	43.675.500
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	43.675.500
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-	160.621.000
1.05.04.2.01.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	160.621.000
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen	98.678.900
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	13 Unit	61.942.100
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			2.975.640.944
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.952.069.344
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.952.069.344
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.564.842.444
1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	19.236.900
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	19.236.900
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.218.924.760
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.145.244.560
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	73.680.200

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	72.649.100
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.862.400
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	8.306.700
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.480.000
1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	92.149.584
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.960.608
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	57.188.976
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	161.882.100
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	143.269.000
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.000.000
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	12.613.100
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	387.226.900
1.05.03.2.01.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	57.326.200
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	600 Orang	57.326.200
1.05.03.2.03.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	279.900.900
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dokumen	227.261.500
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	52.639.400
1.05.03.2.04.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	49.999.800
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	3 Kegiatan	49.999.800
X	NON URUSAN			23.571.600
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			23.571.600
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.571.600
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	23.571.600
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.600.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.971.600
	DINAS SOSIAL			4.266.013.624
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.266.013.624
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			4.266.013.624
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3.030.547.824
1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	23.398.160

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	23.398.160
1.06.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.331.929.720
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.274.779.720
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	57.150.000
1.06.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	105.509.600
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.552.000
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	17.677.600
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.850.000
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.550.000
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	59.880.000
1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	479.543.244
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.150.000
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	45.162.080
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	433.231.164
1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	90.167.100
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	60.167.200
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	5.000.000
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.999.900
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Bekerja Sama dalam Penanganan PPKS	100 %	307.278.600
1.06.02.2.02.	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.316.000
1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	5.316.000
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan PPKS	85,71 %	301.962.600
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Keluarga	52.142.300
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	144.839.300
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	21 Orang	38.705.900
1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	17.000 Orang	66.275.100

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	100 %	31.318.900
1.06.03.2.01.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100 %	31.318.900
1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	31.318.900
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	100 %	400.785.400
1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	2,84 %	400.785.400
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	133.066.800
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Orang	48.797.300
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10.000.000
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	113.688.700
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	16.370.700
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	63.403.100
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	15.458.800
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	409.354.400
1.06.05.2.01.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	13.566.000
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	13.566.000
1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	395.788.400
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	23.285 Orang	246.435.800
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	34.673 Usulan	149.352.600
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	66.890.700
1.06.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	66.890.700
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	62 Orang	66.890.700
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-	19.837.800
1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	19.837.800

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	19.837.800
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			6.452.184.679
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.356.042.179
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			6.356.042.179
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.856.419.441
2.07.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	40.842.100
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	40.842.100
2.07.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.584.229.410
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	2.514.699.410
2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	69.530.000
2.07.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	73.534.600
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.158.200
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.720.000
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	14.996.400
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.660.000
2.07.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	16.837.100
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	16.837.100
2.07.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	83.012.788
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.604.000
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.408.788
2.07.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	29.728.443
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	26.728.443
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	3.000.000
2.07.01.2.13.	Penataan Organisasi	-	-	28.235.000
2.07.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen	28.235.000
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	3.288.434.800
2.07.03.2.01.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	3.254.209.800
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	10 Orang	3.254.209.800
2.07.03.2.02.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	13.189.600
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga	13.189.600
2.07.03.2.04.	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	-	21.035.400
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	21.035.400
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-	161.241.838

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.07.04.2.01.	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	113.330.738
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	60 Orang	18.524.400
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	94.806.338
2.07.04.2.03.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	25.156.000
2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	2 Dokumen	9.860.000
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	200 Orang	5.174.900
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	20 Orang	10.121.100
2.07.04.2.04.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	22.755.100
2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	30 Orang	5.764.400
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	2 Orang	16.990.700
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	49.946.100
2.07.05.2.01.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	12.816.300
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	12.816.300
2.07.05.2.02.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	37.129.800
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	13.370.000
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	23.759.800
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			96.142.500
3.32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			96.142.500
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	48.117.200
3.32.03.2.01.	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	48.117.200
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	42.780.200
3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	5.337.000
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	48.025.300
3.32.04.2.01.	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	-	48.025.300
3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	15 Kepala Keluarga	48.025.300
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			9.303.059.768
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.303.059.768
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			388.050.300

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	50.405.300
2.08.02.2.01.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	28.725.600
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	7.045.600
2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	21.680.000
2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	21.679.700
2.08.02.2.02.0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	1 Lembaga	21.679.700
2.08.02.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0
2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	10 Lembaga	0
2.08.02.2.03.0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen	0
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	235.915.000
2.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	61.973.400
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	30 orang	34.817.900
2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	30 orang	27.155.500
2.08.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	173.941.600
2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	173.941.600
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	11.941.400
2.08.04.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	11.941.400
2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	1 Dokumen	11.941.400
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	25.781.000
2.08.06.2.01.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	25.781.000
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	25.781.000
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	64.007.600

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.08.07.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	64.007.600
2.08.07.2.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	1 Dokumen	64.007.600
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.915.009.468
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.503.506.534
2.14.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	51.600.000
2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	51.600.000
2.14.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.189.124.820
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	3.109.240.520
2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	79.884.300
2.14.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	108.804.700
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.039.300
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.500.000
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.870.400
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	69.395.000
2.14.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	52.427.214
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	47.441.914
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.985.300
2.14.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	101.549.800
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	67.349.800
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.200.000
2.14.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	32.000.000
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	96.000.000
2.14.02.2.02.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	96.000.000
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	96.000.000
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-	2.882.383.334
2.14.03.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	1.029.499.672
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	928.699.672
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	21 Organisasi	100.800.000
2.14.03.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	863.478.862

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	640 Orang	863.478.862
2.14.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	989.404.800
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	66.152.000
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3811 Orang	923.252.800
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	10 Unit	0
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	2.433.119.600
2.14.04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	2.433.119.600
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	2.433.119.600
	DINAS KETAHANAN PANGAN			3.482.731.692
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.482.731.692
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			3.482.731.692
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.198.828.134
2.09.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	27.720.000
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	27.720.000
2.09.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.938.747.150
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.876.636.150
2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	62.111.000
2.09.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	122.302.500
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.962.500
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.015.000
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.000.000
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	96.325.000
2.09.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	58.590.184
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.358.396
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	29.231.788
2.09.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	51.468.300
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	51.468.300
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-	1.141.719.800

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.09.03.2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	157.887.600
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	4 Unit	15.767.900
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan	31.584.400
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	2 Laporan	78.365.300
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	32.170.000
2.09.03.2.02.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-	474.825.400
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	16,6 Ton	474.825.400
2.09.03.2.04.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	509.006.800
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	15.579.600
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	493.427.200
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-	68.000.000
2.09.04.2.01.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-	40.000.000
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	40.000.000
2.09.04.2.02.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	28.000.000
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	12 Laporan	28.000.000
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-	74.183.758
2.09.05.2.01.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	74.183.758
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.119.900
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	51.063.858
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			7.741.667.392
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.739.294.868
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			4.739.294.868
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	100 %	3.184.969.668
2.11.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	14.960.400
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	14.960.400
2.11.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.170.009.268
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	3.078.604.268
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.100.000
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	56.305.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	24.097.400
2.11.02.2.01.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang Tersedia	100 %	24.097.400
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	12 Dokumen	24.097.400
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	98.645.800
2.11.03.2.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut yang Dilakukan	100 %	73.274.000
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	14 Dokumen	73.274.000
2.11.03.2.02.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100 %	25.371.800
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	70 Laporan	25.371.800
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	137.103.900
2.11.04.2.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	100 %	137.103.900
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4,4 Ha	137.103.900
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	100 %	9.165.700
2.11.05.2.02.	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian B3 dan limbah B3	100 %	9.165.700
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	4 Dokumen	9.165.700
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	16.765.500
2.11.06.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	16.765.500
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	65 Badan Usaha	16.765.500
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	81.266.800
2.11.08.2.01.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	81.266.800
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	57.569.800
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	15 Kelompok Orang	23.697.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	20.473.100
2.11.10.2.01.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	20.473.100
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	30 Pengaduan	6.967.100
2.11.10.2.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	15 Sanksi	13.506.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	100 %	1.166.807.000
2.11.11.2.01.	Pengelolaan Sampah	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	100 %	1.166.807.000
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	13 Kelompok	16.857.600
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	25.506.200
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	13.390,08 Ton	1.124.443.200
X	NON URUSAN			3.002.372.524
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			3.002.372.524
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.002.372.524
X.XX.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terselesaikan	100 %	6.652.600
X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	6.652.600
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umun Perangkat Daerah yang Disediakan	100 %	44.983.300
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	10.768.300
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.005.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	28.210.000
X.XX.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diselesaikan	100 %	6.451.800
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0
X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	6.451.800
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.826.395.224
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.736.836
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.786.658.388
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup	100 %	117.889.600
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	115.705.600

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.184.000
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.029.723.110
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.029.723.110
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.029.723.110
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.991.356.710
2.12.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	31.799.900
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33 Laporan	31.799.900
2.12.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.614.916.700
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.526.978.700
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	87.938.000
2.12.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	162.541.200
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	691 Paket	62.381.700
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400 Paket	20.000.000
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.239.500
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	69.920.000
2.12.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	123.829.310
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	3.590.100
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	111.603.210
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	8.636.000
2.12.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	58.269.600
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	38.170.400
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	12.600.000
2.12.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	7.499.200
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	228.503.700
2.12.02.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	220.006.100
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	5.999.100
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	6 Dokumen	88.157.000
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	125.850.000
2.12.02.2.02.	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	8.497.600
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0 Dokumen	8.497.600
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	243.635.800
2.12.03.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	188.808.600

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	8500 Dokumen	8.369.800
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	15 Layanan	175.518.800
2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	400 Dokumen	4.920.000
2.12.03.2.02.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	54.827.200
2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	7 Laporan	2.720.000
2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	15 Laporan	5.875.000
2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	10 Laporan	6.460.000
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	36 Laporan	35.117.800
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	20 Laporan	4.654.400
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	551.682.500
2.12.04.2.01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	445.835.800
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	402.569.600
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	35.048.800
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 Laporan	8.217.400
2.12.04.2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	50.303.300
2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	10.019.600
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 Laporan	30.783.200
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	9.500.500
2.12.04.2.04.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	55.543.400
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	62 Laporan	23.183.300
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	5 Laporan	32.360.100
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	14.544.400
2.12.05.2.01.	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	14.544.400

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3.878.400
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	10.666.000
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3.200.830.647
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.200.830.647
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3.200.830.647
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.752.874.207
2.13.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	57.777.626
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	57.777.626
2.13.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.489.971.930
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	2.408.807.930
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	81.164.000
2.13.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	105.237.100
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.463.200
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49 Paket	18.066.100
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.390.000
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.507.800
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	55.810.000
2.13.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	33.255.206
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	23.757.806
2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.500.000
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.997.400
2.13.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	66.632.345
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	56.465.598
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1.050.147
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.116.600
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6.000.000
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	-	-	13.260.000
2.13.02.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-	13.260.000
2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	19 Desa	13.260.000
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-	286.159.300
2.13.04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	286.159.300

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	181 Dokumen	38.673.000
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	91.876.150
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	181 Dokumen	55.684.150
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	181 Dokumen	99.926.000
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	148.537.140
2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	148.537.140
2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	30 Dokumen	32.834.500
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	23 Dokumen	115.702.640
	DINAS PERHUBUNGAN			6.940.289.481
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.940.289.481
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			6.940.289.481
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.948.229.597
2.15.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	21.500.000
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	21.500.000
2.15.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.566.124.340
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14/45 Orang/bulan	3.475.384.140
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	90.740.200
2.15.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	82.389.300
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.847.100
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.273.200
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.250.000
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.004.000
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	54.015.000
2.15.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	95.866.357
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	750.000
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	74.296.357
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.820.000
2.15.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	182.349.600

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	180.763.800
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	1.585.800
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-	2.891.540.864
2.15.02.2.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.135.428.132
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	90 Unit	1.011.583.600
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1190 Unit	1.123.844.532
2.15.02.2.03.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	42.755.900
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	42.755.900
2.15.02.2.04.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	480.936.232
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	480.936.232
2.15.02.2.05.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	173.312.200
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	173.312.200
2.15.02.2.06.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	31.998.200
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	31.998.200
2.15.02.2.08.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-	12.727.000
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	12.727.000
2.15.02.2.09.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	14.383.200
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	14.383.200
2.15.02.2.11.	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	100.519.020
2.15.03.2.06.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	-	-	100.519.020
2.15.03.2.06.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	100.519.020
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			3.698.961.230
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.698.961.230
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			3.513.390.930

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo	100 %	3.245.562.700
2.16.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo	6 Dok	34.111.900
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	34.111.900
2.16.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	12 Bulan	2.792.978.320
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang/bulan	2.712.016.820
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	17.319.500
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	63.642.000
2.16.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase administrasi kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	100 %	0
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	0
2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0
2.16.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	100 %	126.894.070
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.969.600
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	76.801.970
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.200.000
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.882.500
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	40.040.000
2.16.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah yang diadakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	100 %	0
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0
2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0
2.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas kominfo	100 %	237.645.510
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	200.389.422
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	7.997.700
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	29.258.388
2.16.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo	100 %	53.932.900

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	31.474.600
2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	0
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	18.050.000
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.408.300
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	5 Media	121.993.100
2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan informasi dan komunikasi publik	5 Media	121.993.100
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	12.869.200
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10 Komunitas	22.918.100
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Permohonan	15.260.300
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	0 Rekomendasi	0
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	44.587.900
2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	0 Dokumen	0
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	0 Konten	0
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	15 Orang	26.357.600
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE	75 %	145.835.130
2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain	10 Dok	0
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	0 Dokumen	0
2.16.03.2.02.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan e- government (SPBE) Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang tersedia	8 OPD	145.835.130
2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	31.650.300
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	51 Perangkat Daerah	14.606.300
2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	8 Aplikasi	99.578.530
2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	0 Dokumen	0
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			149.355.500
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral untuk Penyusunan Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 %	149.355.500
2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral di setiap OPD	100 %	149.355.500
2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan	50 %	42.651.800

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
		rekomendasi dari pembina data statistik		
2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	50 %	13.173.800
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	50 %	55.521.900
2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	63 Orang	38.008.000
2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	0 %	0
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			36.214.800
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengamanan Data dan Konten Informasi Pemerintah Daerah yang Tersedia	100 %	36.214.800
2.21.02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penggunaan Persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah	100 %	36.214.800
2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	11.693.600
2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	17.075.000
2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	18 Perangkat Daerah	7.446.200
2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	0 Dokumen	0
	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			10.286.255.976
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.730.840.376
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			5.730.840.376
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKUKM	100 %	5.264.344.076
2.17.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja DPKUKM	16 Dokumen	52.314.700
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	52.314.700
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16 Dokumen	0
2.17.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4.177.336.900
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39/12 Orang/bulan	4.068.919.500
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	108.417.400
2.17.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	110.867.900
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.944.500
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.625.000
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.278.400

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	60.020.000
2.17.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	787.479.276
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	139.648.632
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	647.830.644
2.17.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	136.345.300
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	131.210.000
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5.135.300
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	30 Unit Usaha	23.333.100
2.17.02.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi penerbitan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam KSP/USP Koperasi	30 Unit Usaha	16.434.400
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 Unit Usaha	16.434.400
2.17.02.2.02.	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	6.898.700
2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Unit Usaha	6.898.700
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP yang sehat	65 Unit Usaha	66.770.000
2.17.04.2.01.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Jumlah Koperasi Sehat	65 Unit Usaha	66.770.000
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	40 Unit Usaha	66.770.000
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan.	30 Unit Usaha	256.960.400
2.17.07.2.01.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Terdata	30 Unit Usaha	256.960.400
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	260 Unit Usaha	49.999.600
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1400 Unit Usaha	144.352.900
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	30 Orang	15.895.800
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	260 Unit Usaha	30.870.700
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30 Orang	15.841.400
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terfasilitasinya Pengembangan UMKM	90 Unit Usaha	119.432.800

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.17.08.2.01.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran,SDM serta desain dan teknologi	90 Unit Usaha	119.432.800
2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	30 Orang	74.999.900
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	30 Unit Usaha	44.432.900
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			4.555.415.600
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			2.325.321.600
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Pembangunan Fasilitas Pasar Meningkatkan Pembangunan Fasilitas Pasar	100 % 47 Unit	2.122.267.000
3.30.03.2.01.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Bertambahnya Jumlah Pengelolaan Pasar	3 Unit	1.985.386.200
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1.985.386.200
3.30.03.2.02.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Melakukan Pembinan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja	100 %	136.880.800
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	136.880.800
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	100 %	94.481.800
3.30.04.2.01.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Ketersedian Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting	100 %	94.481.800
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	56.828.600
3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	18.871.900
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	18.781.300
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	100 %	108.572.800
3.30.06.2.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang,dan Alat Perlengkapan terhadap ketentuan yang berlaku	100 %	108.572.800
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	834 Unit	69.403.700
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1077 Orang	39.169.100
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			2.230.094.000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Berkembangnya Pemanfaatan Sumber Daya industri Daerah demi Mendukung Peningkatan PDRB Sektor Industri	100 %	2.230.094.000
3.31.02.2.01.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	2.230.094.000
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	2.230.094.000
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			3.533.984.143
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.533.984.143
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			3.533.984.143

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.277.444.843
2.18.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	40.649.700
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	40.649.700
2.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.821.562.551
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	2.738.162.551
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	83.400.000
2.18.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	6.000.000
2.18.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	162.396.995
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.706.895
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	66.823.200
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.558.300
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.323.600
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.625.000
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.360.000
2.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	186.466.897
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	121.196.621
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	65.270.276
2.18.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	60.368.700
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	40.957.300
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	8.900.000
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.511.400
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	35.550.400
2.18.02.2.02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	35.550.400
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.550.400
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-	7.648.000
2.18.03.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	7.648.000
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.648.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-	59.448.300
2.18.04.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	59.448.300
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2250 Pelaku Usaha	30.589.300

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	28.859.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-	62.567.100
2.18.05.2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	62.567.100
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	35 Kegiatan Usaha	62.567.100
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-	91.325.500
2.18.06.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	91.325.500
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	91.325.500
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			4.092.504.758
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.092.504.758
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			739.897.300
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	15.469.900
2.23.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Kantor yang disediakan	100 Persentase	15.469.900
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.470.200
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.999.700
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pembinaan perpustakaan	100 %	724.427.400
2.23.02.2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Perpustakaan	100 Persentase	244.805.200
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	15.999.600
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2 Perpustakaan	19.999.700
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	8.999.800
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	49.999.800
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 Eksemplar	100.000.000
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	30 Eksemplar	30.000.000
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	4 Perpustakaan	19.806.300
2.23.02.2.02.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Perpustakaan	100 Persentase	479.622.200
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	25 Perpustakaan	86.199.600

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	120 Orang	293.422.600
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	60 Lokus	100.000.000
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			3.352.607.458
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	3.197.757.558
2.24.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	100 Persentase	39.919.900
2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	39.919.900
2.24.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	100 Persentase	2.904.751.970
2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.833.759.970
2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	70.992.000
2.24.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Perpustakaan	100 Persentase	0
2.24.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0
2.24.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Kantor yang disediakan	100 Persentase	74.169.900
2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.299.900
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	63.870.000
2.24.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persentase	128.287.588
2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	97.898.400
2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.389.188
2.24.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	100 Persentase	50.628.200
2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	41.728.200
2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	8.900.000
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip	100 %	124.182.600
2.24.02.2.01.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis	100 Persentase	81.219.800
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	42 Berkas	20.391.300
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	100 Berkas	11.733.700
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Laporan	49.094.800
2.24.02.2.02.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Statis	100 Persentase	7.945.200
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10 Arsip	7.945.200
2.24.02.2.03.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	100 Persentase	35.017.600
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	35.017.600

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	100 %	30.667.300
2.24.03.2.01.	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah	100 Persentase	9.930.100
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	9.930.100
2.24.03.2.03.	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase Penyelamatan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah	100 Persentase	20.737.200
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Daftar	20.737.200
	DINAS PERIKANAN			8.647.547.599
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			8.647.547.599
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			8.647.547.599
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas perikanan	100 %	4.524.971.799
3.25.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kemampuan perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	27.529.100
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	27.529.100
3.25.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas perikanan	100 %	2.882.815.510
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2.794.515.510
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	88.300.000
3.25.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100 %	109.146.700
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	20.711.700
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.500.000
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	74.935.000
3.25.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.412.105.489
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.025.408.045
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.820.900
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	382.876.544
3.25.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	93.375.000
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	86.387.500
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	6.987.500
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Tangkap	100 %	3.139.678.300

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.25.03.2.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas nelayan	100 %	3.139.678.300
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	3.139.678.300
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	100 %	32.756.800
3.25.04.2.02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya kapasitas kelompok pembudidaya	100 %	32.756.800
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	1 Kelompok	32.756.800
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100 %	950.140.700
3.25.06.2.03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Pengolahan Ikan	100 %	950.140.700
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26 Ton	950.140.700
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			5.156.787.626
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			799.755.400
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			799.755.400
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	703.755.400
2.22.02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	37.758.800
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Objek	37.758.800
2.22.02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	665.996.600
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	11 Objek	665.996.600
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	96.000.000
2.22.05.2.02.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	96.000.000
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	16 Objek	96.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			4.357.032.226
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			4.357.032.226
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.482.575.876
3.26.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	31.500.000
3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	31.500.000
3.26.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.201.528.700
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3.124.428.700
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	77.100.000
3.26.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	85.930.700
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.701.200
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	11.954.500
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.300.000
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	55.975.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.26.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	6.643.600
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	6.643.600
3.26.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	120.778.076
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	862.500
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.727.100
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.188.476
3.26.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	36.194.800
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	26.743.800
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.550.000
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5.901.000
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-	518.919.400
3.26.02.2.01.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	136.505.400
3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	119.406.600
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	17.098.800
3.26.02.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	382.414.000
3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47.070.000
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	320.595.500
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	14.748.500
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-	147.393.090
3.26.03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	147.393.090
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	43.703.900
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	48.048.490
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Promosi	55.640.700
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-	208.143.860
3.26.05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	144.891.060
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	100.000.000
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	80 Orang	33.204.860
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	120 Orang	11.686.200

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.26.05.2.02.	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	63.252.800
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang	63.252.800
	DINAS PERTANIAN			29.602.510.424
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			29.602.510.424
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			29.602.510.424
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	20.788.549.450
3.27.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	65.105.300
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	65.105.300
3.27.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	18.970.676.388
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	282 Orang/bulan	18.852.206.788
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	118.469.600
3.27.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	500.000
3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	500.000
3.27.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	81.416.700
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.616.700
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.100.000
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	63.700.000
3.27.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.531.062.562
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	94.106.086
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.436.956.476
3.27.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	139.788.500
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	134.488.500
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	5.300.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	6.684.695.292
3.27.02.2.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-	3.488.658.592
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	163.798.300
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	3.324.860.292
3.27.02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3.196.036.700
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	3.196.036.700
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	1.196.804.182
3.27.03.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	1.196.804.182
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1.196.804.182
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-	607.707.200

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.27.04.2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	607.707.200
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	21 Wilayah	347.077.000
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	21 Laporan	260.630.200
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-	324.754.300
3.27.07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	324.754.300
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2402 Unit	205.604.900
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	2 Unit	119.149.400
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			881.766.171
X	NON URUSAN			881.766.171
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			881.766.171
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	881.766.171
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	30.400.000
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	30.400.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	689.674.071
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.186.200
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	94.917.871
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	9.790.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan	576.780.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	11.952.000
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.952.000
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	63.240.100
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	60.240.100
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	3.000.000
X.XX.01.2.11.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	15.000.000
X.XX.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	15.000.000
X.XX.01.2.14.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	71.500.000
X.XX.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3 Laporan	36.500.000
X.XX.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	35.000.000
	BAGIAN PEMERINTAHAN			319.479.400
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			106.999.700
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH			106.999.700
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	106.999.700
4.01.02.2.01.	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	55.370.000
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	55.370.000
4.01.02.2.04.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	51.629.700
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	51.629.700

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X	NON URUSAN			212.479.700
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			212.479.700
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	212.479.700
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	74.659.900
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	74.659.900
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	19.200.000
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	19.200.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	81.952.800
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	21.227.700
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.545.400
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	50.179.700
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.860.000
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.860.000
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	28.807.000
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	24.757.000
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4.050.000
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			13.297.476.041
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			13.109.642.050
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH			13.109.642.050
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	13.109.642.050
4.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	13.109.642.050
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	126 Dokumen	3.923.942.050
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	58 Dokumen	160.000.000
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1000 Dokumen	9.025.700.000
X	NON URUSAN			187.833.991
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			187.833.991
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	187.833.991
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	34.917.300
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	34.917.300
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	54.726.900
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.447.300
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.104.600

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	45.175.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.860.000
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.860.000
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	65.342.291
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2.200.000
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	59.142.291
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	4.000.000
X.XX.01.2.13.	Penataan Organisasi	-	-	24.987.500
X.XX.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	24.987.500
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			409.621.698
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			217.643.200
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH			217.643.200
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	217.643.200
4.01.03.2.02.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	217.643.200
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	5.846.800
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	147.950.000
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	63.846.400
X	NON URUSAN			191.978.498
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			191.978.498
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	191.978.498
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.294.105
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	20.294.105
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	59.385.858
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	14.060.558
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.237.400
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.315.200
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	39.772.700
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	63.467.500
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	57.979.500
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	5.488.000
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	48.831.035
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	44.731.035
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	4.100.000
	BAGIAN PEREKONOMIAN			428.054.800
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			309.211.000
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH			309.211.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	309.211.000
4.01.03.2.01.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	309.211.000
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	27.330.000
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	224.585.500
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	57.295.500
X	NON URUSAN			118.843.800
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			118.843.800
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	118.843.800
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	31.483.000
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	31.483.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	45.089.500
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.581.500
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.038.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	32.470.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.860.000
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.860.000
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	34.411.300
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	31.561.300
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	2.850.000
	BAGIAN HUKUM			663.879.146
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			571.046.930
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH			571.046.930
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	571.046.930
4.01.02.2.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	571.046.930
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	253.124.630
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	211.225.300
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	106.697.000
X	NON URUSAN			92.832.216
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			92.832.216
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	92.832.216
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	27.799.780
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	27.799.780
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	23.993.000
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.518.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	14.475.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	9.360.000
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.360.000
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	31.679.436

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	27.979.436
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.700.000
	BAGIAN ORGANISASI			515.513.628
X	NON URUSAN			515.513.628
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			515.513.628
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	515.513.628
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	28.209.528
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	28.209.528
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	79.284.400
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.329.700
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.944.700
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	66.010.000
X.XX.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	14.992.100
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	14.992.100
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	33.999.500
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.999.500
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	31.946.300
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	28.346.300
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	3.600.000
X.XX.01.2.13.	Penataan Organisasi	-	-	327.081.800
X.XX.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	165.943.500
X.XX.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	17.270.100
X.XX.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	49.033.000
X.XX.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	49.377.200
X.XX.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Dokumen	45.458.000
	BAGIAN UMUM			5.705.738.493
X	NON URUSAN			5.705.738.493
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			5.705.738.493
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.705.738.493
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	60.909.690
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.909.690
X.XX.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	13.999.300
X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	13.999.300
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	303.500.950
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	142.377.400
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	38.083.350
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	62.633.200

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	21.882.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	38.525.000
X.XX.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	74.508.900
X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	74.508.900
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.874.418.668
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	624.864.094
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	2.249.554.574
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	820.088.441
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	602.776.500
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	17.307.500
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	149.654.441
X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	50.350.000
X.XX.01.2.11.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	64.445.844
X.XX.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	64.445.844
X.XX.01.2.12.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	1.493.866.700
X.XX.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket	1.076.590.400
X.XX.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	14 Paket	417.276.300
	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM			241.959.716
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			119.462.680
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH			119.462.680
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	119.462.680
4.01.03.2.04.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	119.462.680
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	9 Dokumen	42.357.300
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4 Dokumen	41.039.100
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	7 Dokumen	36.066.280
X	NON URUSAN			122.497.036
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			122.497.036
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	122.497.036
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	21.000.000
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	21.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	53.100.247
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.841.047
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.990.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.499.200
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	34.770.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.807.600
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.807.600
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	40.589.189
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	37.339.689
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	3.249.500
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			703.159.588
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			317.715.000
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH			317.715.000
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	317.715.000
4.01.03.2.03.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	317.715.000
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	209.955.000
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	14.120.000
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	16 Orang	93.640.000
X	NON URUSAN			385.444.588
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			385.444.588
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	385.444.588
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	22.695.000
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	22.695.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	68.849.300
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	22.799.300
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.400.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	38.650.000
X.XX.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	26.826.400
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	11.319.400
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.507.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	245.557.588
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	214.547.200
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	31.010.388
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	21.516.300
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	19.316.300
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.200.000
	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN			12.255.507.039

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X	NON URUSAN			12.255.507.039
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			12.255.507.039
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	12.255.507.039
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	39.407.200
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	39.407.200
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	11.436.156.510
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/bulan	11.319.091.140
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen	117.065.370
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	70.947.050
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.460.900
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.324.150
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.522.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	49.640.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	88.776.803
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	63.898.803
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.878.000
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	43.763.296
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	39.513.796
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.249.500
X.XX.01.2.11.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	576.456.180
X.XX.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	176.456.180
X.XX.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	400.000.000
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			30.011.411.508
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			4.310.225.492
4.02.	SEKRETARIAT DPRD			4.310.225.492
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-	4.310.225.492
4.02.02.2.01.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	881.400.000
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dokumen	881.400.000
4.02.02.2.02.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	365.632.000
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	10.432.000
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	177.600.000
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	177.600.000
4.02.02.2.03.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	177.600.000
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	177.600.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4.02.02.2.04.	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	1.150.293.492
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	789.580.000
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	280.713.492
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	80.000.000
4.02.02.2.05.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	995.950.000
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	70 Laporan	127.600.000
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	105 Dokumen	868.350.000
4.02.02.2.08.	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	739.350.000
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6 Dokumen	739.350.000
X	NON URUSAN			25.701.186.016
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			25.701.186.016
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	25.701.186.016
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	130.032.400
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	89.783.700
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	40.248.700
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.757.616.030
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	2.611.786.030
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	145.830.000
X.XX.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	201.775.000
X.XX.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	183.220.000
X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	18.555.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	614.619.100
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	27.507.400
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.462.200
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	296.203.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	28.681.500
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	186.765.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	650.516.522
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	409.633.418
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	240.883.104
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	660.013.500
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	401.172.900
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	33.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	225.340.600
X.XX.01.2.15.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	17.337.603.464
X.XX.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/Bulan	17.215.103.464
X.XX.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	0
X.XX.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	122.500.000
X.XX.01.2.16.	Layanan Administrasi DPRD	-	-	3.349.010.000
X.XX.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	140 Laporan	2.071.010.000
X.XX.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 Paket	1.278.000.000
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH			8.278.912.479
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			3.696.853.400
5.01.	PERENCANAAN			2.322.184.500
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	1.444.226.700
5.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	815.205.800
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	13.779.000
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	162.320.300
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	960 Usulan	137.575.500
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	501.531.000
5.01.02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	33.917.800
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	33.917.800
5.01.02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	396.333.100
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	220.724.200
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	175.608.900
5.01.02.2.04.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	198.770.000
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	198.770.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	877.957.800
5.01.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	369.544.100
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	44.951.400
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	13.322.100
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	24.735.400
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	22.613.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	28.087.400
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	16.925.600
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	19.019.200
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	199.890.000
5.01.03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	243.982.500
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	21.762.000
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	19.996.300
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	43.640.100
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	48.397.000
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	50.488.200
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	21.369.600
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	23.048.500
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	15.280.800
5.01.03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	264.431.200
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	74.299.100
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	15.820.500
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	49.392.700
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	31.498.000
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	34 Dokumen	31.173.700
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	34 Laporan	13.897.800

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	23.219.300
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	25.130.100
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.374.668.900
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	1.374.668.900
5.05.02.2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	745.313.600
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	3 Laporan	450.715.800
5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	62.608.600
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	3 Laporan	120.107.500
5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	111.881.700
5.05.02.2.03.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	139.232.300
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	139.232.300
5.05.02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	490.123.000
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	367.989.600
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	122.133.400
X	NON URUSAN			4.582.059.079
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			4.582.059.079
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.582.059.079
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.776.800
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	44.776.800
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.861.548.770
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	3.736.923.370
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	334 Dokumen	124.625.400
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	236.335.100
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.266.200
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.070.400
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	13.533.500
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	45.000.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	145.465.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	298.592.509

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	238.351.133
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.241.376
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	140.805.900
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	94.894.200
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	9.416.000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.998.400
X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	6.947.300
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	4.550.000
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			121.417.148.823
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			4.449.252.900
5.02.	KEUANGAN			4.449.252.900
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	3.368.811.800
5.02.02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	1.818.823.700
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	99.999.900
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	100.000.000
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	58.776.900
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	59.212.200
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	80.000.000
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	80.000.000
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	620.000.000
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	620.000.000
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	26.999.700
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen	73.835.000
5.02.02.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	518.721.500
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	950 Dokumen	150.623.500
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	9500 Dokumen	278.034.000
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	900 Laporan	90.064.000
5.02.02.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	1.031.266.600

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	357.113.800
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	528.017.400
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	146.135.400
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	1.080.441.100
5.02.03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	1.080.441.100
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	182.324.100
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	123.944.600
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	254.639.900
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	0
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	70 Laporan	282.961.200
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	202 Dokumen	88.192.200
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 Laporan	148.379.100
X	NON URUSAN			116.967.895.923
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			116.967.895.923
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	116.967.895.923
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	59.289.600
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	59.289.600
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	115.752.977.075
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	115.327.636.975
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	282.577.600
X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	132.316.800
X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.445.700
X.XX.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	88.084.600
X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	0
X.XX.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	88.084.600
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	186.055.900
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	7.991.500
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	75.000.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	17.059.400
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86 Laporan	86.005.000
X.XX.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	16.752.200

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	16.752.200
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	744.641.448
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.980.400
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	209.999.348
X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.295.700
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	489.366.000
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	120.095.100
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	70.510.100
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	10.700.000
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.000.000
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	23.885.000
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)			235.687.381.965
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			235.687.381.965
5.02.	KEUANGAN			235.687.381.965
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	235.687.381.965
5.02.02.2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	235.687.381.965
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	7.176.001.445
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	227.011.380.520
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	1.500.000.000
	BADAN PENDAPATAN DAERAH			9.042.383.658
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			2.048.804.700
5.02.	KEUANGAN			2.048.804.700
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	2.048.804.700
5.02.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	2.048.804.700
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	33.532.800
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	75.044.900
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	38.813.900
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5740 Unit	513.051.900
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	394.706.500
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	224.181.400
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	300 Obyek Pajak	96.120.200

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	57.984.800
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	11 Dokumen	319.043.300
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	30 Dokumen	120.760.600
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	30 Dokumen	86.458.000
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	44.920.900
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	44.185.500
X	NON URUSAN			6.993.578.958
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			6.993.578.958
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.993.578.958
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	36.524.400
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	36.524.400
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.391.321.418
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	6.264.511.418
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	126.810.000
X.XX.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	35.010.000
X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	35.010.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	126.298.400
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	5.891.600
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	59 Paket	23.250.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	33 Paket	21.916.800
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	75.240.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	321.783.140
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	5.175.000
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.853.580
X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	117.451.400
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	108.303.160
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	82.641.600
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	46.765.000
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	12.450.000
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	23.426.600
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			6.259.649.460

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			6.259.649.460
5.01.	PERENCANAAN			3.531.987.360
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.531.987.360
5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	18.283.500
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	0
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	18.283.500
5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.285.316.960
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	3.219.337.860
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	65.979.100
5.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	30.547.100
5.01.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	296 Orang	30.547.100
5.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	98.476.700
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	994.500
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.991.200
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.750.000
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.456.000
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	76.285.000
5.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	33.108.000
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	33.108.000
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0
5.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	26.973.000
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.537.600
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.435.400
5.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	39.282.100
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	37.382.100
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	1.900.000
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	0
5.03.	KEPEGAWAIAN			2.442.677.200
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	2.442.677.200
5.03.02.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	260.335.200
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	241.694.700
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	18.640.500
5.03.02.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	-	-	120.917.800
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	120.917.800

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
5.03.02.2.03.	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	2.025.652.800
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	54 Orang	530.000.000
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	1.495.652.800
5.03.02.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	35.771.400
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	60 Orang	14.665.000
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan	21.106.400
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			284.984.900
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	284.984.900
5.04.02.2.02.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	284.984.900
5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	4 Dokumen	284.984.900
	INSPEKTORAT DAERAH			5.738.087.581
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			767.478.000
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH			767.478.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-	553.093.800
6.01.02.2.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	487.040.300
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	154 Laporan	125.225.600
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan	33.786.700
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	11.050.700
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	36 Laporan	45.351.000
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	28 Laporan	179.776.900
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	65 Dokumen	91.849.400
6.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	66.053.500
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	9 Laporan	66.053.500
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-	214.384.200
6.01.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-	28.600.600
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	28.600.600
6.01.03.2.02.	Pendampingan dan Asistensi	-	-	185.783.600
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	241 perangkat daerah	185.783.600
X	NON URUSAN			4.970.609.581
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			4.970.609.581
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.970.609.581
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	26.392.100
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	26.392.100
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.969.859.900

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45/14 Orang/bulan	3.897.865.800
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.994.100
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	69.000.000
X.XX.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	718.775.300
X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	277.140.000
X.XX.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	122 Orang	441.635.300
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	116.863.100
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.035.400
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.410.200
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	675.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	108.742.500
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	39.294.698
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.908.098
X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	599.600
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	787.000
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	99.424.483
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	65.608.303
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	4.500.000
X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.316.180
	KELURAHAN MADAWAT			428.015.720
7	UNSUR KEWILAYAHAN			367.669.300
7.01.	KECAMATAN			367.669.300
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	31.296.500
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	31.296.500
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	31.296.500
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	336.372.800
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	336.372.800
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	18.690.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	12.337.800
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	298.585.000
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	6.760.000
X	NON URUSAN			60.346.420

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			60.346.420
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	60.346.420
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.370.000
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	20.370.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	16.099.400
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.443.400
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.950.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.706.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	10.239.868
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.239.868
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	13.637.152
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	6.924.143
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	6.213.009
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	500.000
	KELURAHAN KABOR			427.402.588
7	UNSUR KEWILAYAHAN			334.319.900
7.01.	KECAMATAN			334.319.900
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	35.810.000
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	35.810.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	35.810.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	298.509.900
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	5.755.900
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	5.755.900
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	292.754.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	17.754.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	275.000.000
X	NON URUSAN			93.082.688
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			93.082.688
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	93.082.688
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	19.200.000
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	19.200.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	24.411.300
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1.015.100
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.941.700
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.500.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.954.500

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	41.143.188
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.732.800
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.410.388
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.328.200
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	6.178.200
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	2.150.000
	KELURAHAN NANGALIMANG			401.110.990
7	UNSUR KEWILAYAHAN			334.105.600
7.01.	KECAMATAN			334.105.600
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	26.737.500
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	26.737.500
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	26.737.500
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	307.368.100
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	307.368.100
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	7.208.200
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	53.582.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	246.577.900
X	NON URUSAN			67.005.390
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			67.005.390
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	67.005.390
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.217.000
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	20.217.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	25.245.700
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	679.200
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.874.000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.220.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.472.500
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	9.553.556
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	9.553.556
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	11.989.134
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	6.343.734
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.645.400
	KELURAHAN KOTA UNENG			444.004.966
7	UNSUR KEWILAYAHAN			378.081.900
7.01.	KECAMATAN			378.081.900

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	11.970.000
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	11.970.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	120 dokumen Laporan	11.970.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	366.111.900
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	366.111.900
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	4.501.900
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas Pokmas / Ormas	339.350.000
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	150 Dokumen Laporan	22.260.000
X	NON URUSAN			65.923.066
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			65.923.066
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	65.923.066
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	19.200.000
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan Dokumen	19.200.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	19.745.100
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	497.400
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.190.700
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.560.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket Paket	6.497.000
X.XX.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0
X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	18.977.896
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	18.977.896
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.000.070
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	5.000.070
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	3.000.000
	KELURAHAN WURING			419.144.568
7	UNSUR KEWILAYAHAN			329.164.900
7.01.	KECAMATAN			329.164.900
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	5.600.000
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	5.600.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	150 Laporan	5.600.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	323.564.900
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	323.564.900
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	150 Lembaga Kemasyarakatan	10.350.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	4.210.400
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	174 Pokmas / Ormas	309.004.500
X	NON URUSAN			89.979.668
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			89.979.668
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	89.979.668
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.365.000
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen Dokumen	20.365.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	16.302.500
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	984.200
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.204.300
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.614.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.500.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	37.881.268
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	10.471.080
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	27.410.188
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	15.430.900
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	13.880.900
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.550.000
	KELURAHAN HEWULI			363.383.814
7	UNSUR KEWILAYAHAN			320.530.780
7.01.	KECAMATAN			320.530.780
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	320.530.780
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	320.530.780
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	2.113.580
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	22.494.800
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	115 Pokmas / Ormas	281.922.400
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	14.000.000
X	NON URUSAN			42.853.034
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			42.853.034
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	42.853.034
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.623.800

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	20.623.800
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	10.363.600
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	656.700
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.706.900
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.000.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.792.934
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.792.934
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	0
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.072.700
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	2.372.700
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	700.000
	KELURAHAN WAILITI			381.857.710
7	UNSUR KEWILAYAHAN			334.521.000
7.01.	KECAMATAN			334.521.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	334.521.000
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	334.521.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.142.100
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	215 Pokmas / Ormas	312.548.900
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	11.830.000
X	NON URUSAN			47.336.710
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			47.336.710
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	47.336.710
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	16.200.000
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	16.200.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	20.722.000
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.108.000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.750.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.864.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.670.010
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.670.010
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.744.700
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	644.700

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	4.100.000
	KELURAHAN WOLOMARANG			445.427.376
7	UNSUR KEWILAYAHAN			329.052.800
7.01.	KECAMATAN			329.052.800
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	329.052.800
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	329.052.800
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	5.487.100
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas / Ormas	309.565.700
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	133 Laporan	14.000.000
X	NON URUSAN			116.374.576
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			116.374.576
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	116.374.576
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	25.705.000
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen Dokumen	25.705.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	16.091.300
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100% Paket	866.300
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	8.832.500
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	500.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.542.500
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	3.350.000
X.XX.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	826.300
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	826.300
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	65.905.176
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.084.400
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	54.820.776
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.846.800
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	6.796.800
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.050.000
	KELURAHAN WAIOTI			409.212.113
7	UNSUR KEWILAYAHAN			409.212.113
7.01.	KECAMATAN			409.212.113
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	81.172.373
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	16.080.000
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	16.080.000
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.569.800
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.499.800
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.970.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1.100.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	40.791.873
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	9.601.485
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	31.190.388
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	18.730.700
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	11.260.700
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	4.500.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.970.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	16.979.000
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	16.979.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	16.979.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	306.105.740
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	1.065.000
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.065.000
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	305.040.740
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	305.040.740
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	4.955.000
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	4.955.000
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	35 Orang	4.955.000
	KELURAHAN NANGAMETING			364.850.041
7	UNSUR KEWILAYAHAN			287.087.028
7.01.	KECAMATAN			287.087.028
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	13.436.000
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	13.436.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	13.436.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	254.693.860
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	254.693.860
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	11.297.760
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1.358.300
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	235.096.200
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	6.941.600
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	18.957.168

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	18.957.168
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	18.957.168
X	NON URUSAN			77.763.013
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			77.763.013
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	77.763.013
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	21.850.000
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	21.850.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	16.803.370
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.297.900
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.374.270
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.250.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.121.200
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.760.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	20.427.643
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.927.643
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.500.000
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	18.682.000
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	17.032.000
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	1.650.000
	KELURAHAN WAIROTANG			389.005.370
7	UNSUR KEWILAYAHAN			343.056.500
7.01.	KECAMATAN			343.056.500
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	27.496.200
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	27.496.200
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16 Laporan	27.496.200
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	315.560.300
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	315.560.300
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8.567.200
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	51.970.100
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	246.133.000
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	8.890.000
X	NON URUSAN			45.948.870
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			45.948.870
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	45.948.870
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	19.991.200

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	19.991.200
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.838.800
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	769.600
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.529.200
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.540.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	14.997.770
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.000.470
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	997.300
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.121.100
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	2.121.100
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.000.000
	KELURAHAN BERU			393.902.620
7	UNSUR KEWILAYAHAN			393.902.620
7.01.	KECAMATAN			393.902.620
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	66.752.020
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	16.576.000
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	16.576.000
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	17.062.760
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1.929.360
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.413.500
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.000.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.049.900
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	5.670.000
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	13.582.800
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13.582.800
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	10.892.400
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.892.400
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.638.060
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	4.018.680
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	3.869.380
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	750.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	16.702.000
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	16.702.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	16.702.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	310.448.600
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	310.448.600
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	6.203.200
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	20.375.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	282.190.400
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1.680.000
	KELURAHAN KOTA BARU			421.627.160
7	UNSUR KEWILAYAHAN			328.308.060
7.01.	KECAMATAN			328.308.060
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	16.652.000
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	16.652.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 bulan Laporan	16.652.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	311.656.060
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	311.656.060
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	68.606.060
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	238.050.000
X	NON URUSAN			93.319.100
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			93.319.100
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	93.319.100
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	34.055.000
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	34.055.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	28.173.100
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.393.000
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	6.945.100
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	5.000.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan Paket	4.035.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan Laporan	10.800.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	14.007.000
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan Laporan	12.596.400

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan Laporan	1.410.600
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	17.084.000
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 bulan Unit	8.658.000
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan Unit	6.376.000
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan Unit	2.050.000
	KECAMATAN ALOK			3.915.564.906
7	UNSUR KEWILAYAHAN			176.758.500
7.01.	KECAMATAN			176.758.500
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	125.520.000
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	125.520.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	125.520.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	11.208.400
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	11.208.400
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	11.208.400
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	24.070.000
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	24.070.000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	24.070.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	15.960.100
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	15.960.100
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	15.960.100
X	NON URUSAN			3.738.806.406
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			3.738.806.406
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.738.806.406
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	10.428.000
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10.428.000
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.636.794.600
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang/14 bulan Orang/bulan	3.600.877.000
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	35.917.600
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	25.356.900
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.015.100
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.802.000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.340.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.199.800

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	21.721.300
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	21.721.300
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	18.362.296
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.173.996
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.188.300
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	26.143.310
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	25.143.310
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.000.000
	KECAMATAN ALOK BARAT			3.350.978.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN			54.993.000
7.01.	KECAMATAN			54.993.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	42.880.000
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	42.880.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	42.880.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	12.113.000
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	12.113.000
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22 Lembaga Kemasyarakatan	12.113.000
X	NON URUSAN			3.295.985.000
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			3.295.985.000
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.295.985.000
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	17.029.400
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	17.029.400
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.224.738.100
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36/14 Orang/bulan	3.182.318.100
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	42.420.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	12.835.900
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	526.400
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.323.500
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.961.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4.025.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	13.766.100
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	13.766.100
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	27.615.500

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	26.865.500
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	750.000
	KECAMATAN ALOK TIMUR			3.979.311.641
7	UNSUR KEWILAYAHAN			93.471.100
7.01.	KECAMATAN			93.471.100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	58.051.500
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	58.051.500
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	58.051.500
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	15.229.600
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	15.229.600
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.229.600
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	12.640.000
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	12.640.000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	12.640.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	7.550.000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.550.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	7.550.000
X	NON URUSAN			3.885.840.541
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			3.885.840.541
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.885.840.541
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.750.000
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	7.750.000
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.778.038.283
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	3.741.678.283
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	36.360.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	19.167.600
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	672.000
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.871.400
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.100.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.970.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.554.200
X.XX.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	13.735.300
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5.093.600

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	8.641.700
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	21.278.908
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.777.908
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.501.000
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	45.870.450
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	37.024.100
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3.900.000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.946.350
	KECAMATAN BOLA			1.410.427.348
7	UNSUR KEWILAYAHAN			115.440.528
7.01.	KECAMATAN			115.440.528
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.072.228
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.072.228
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.072.228
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	69.999.100
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	43.428.300
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	43.428.300
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	26.570.800
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	26.570.800
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	8.249.200
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	8.249.200
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	8.249.200
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	20.640.000
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	20.640.000
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	10.320.000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	10.320.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	12.480.000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	12.480.000
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	6.480.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	6.000.000
X	NON URUSAN			1.294.986.820
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.294.986.820

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.294.986.820
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	6.000.000
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.242.647.120
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14/14 Orang/bulan	1.217.687.220
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	24.959.900
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.912.000
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	1.086.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.370.000
X.XX.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	456.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.698.200
X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.098.200
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.600.000
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	37.729.500
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	35.229.800
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.499.700
	KECAMATAN DORENG			1.429.337.252
7	UNSUR KEWILAYAHAN			126.654.100
7.01.	KECAMATAN			126.654.100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	106.325.200
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	106.325.200
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	106.325.200
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	10.853.900
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	10.853.900
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	10.853.900
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	8.575.000
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	8.575.000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	8.575.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	900.000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	900.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	900.000
X	NON URUSAN			1.302.683.152
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.302.683.152

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.302.683.152
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	6.000.000
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.167.634.568
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.135.518.268
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	32.116.300
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.021.000
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	547.000
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.449.300
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	524.700
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	31.465.688
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28.465.688
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	91.561.896
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	86.821.896
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.000.000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.740.000
	KECAMATAN HEWOKLOANG			1.497.345.838
7	UNSUR KEWILAYAHAN			170.598.700
7.01.	KECAMATAN			170.598.700
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persentase	131.040.000
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Persentase	131.040.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	131.040.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentase	10.768.700
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persentase	10.768.700
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.768.700
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persentase	9.900.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persentase	9.900.000
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	45 Orang	9.900.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persentase	18.890.000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persentase	18.890.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen	18.890.000
X	NON URUSAN			1.326.747.138
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.326.747.138
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	100 Persentase	1.326.747.138
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persentase	15.550.000
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	15.550.000
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persentase	1.200.229.010
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.164.377.010
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	35.852.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentase	13.599.600
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.874.600
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.225.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.500.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	55.129.128
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.006.540
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	51.122.588
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	42.239.400
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	40.439.400
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	1.800.000
	KECAMATAN KANGAE			1.656.755.060
7	UNSUR KEWILAYAHAN			151.166.200
7.01.	KECAMATAN			151.166.200
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	105.440.000
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	78.000.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	78.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	27.440.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	27.440.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	16.966.200
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	16.966.200
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	16.966.200
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	20.720.000
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	20.720.000
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	4.320.000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	16.400.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	8.040.000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	8.040.000
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9 Dokumen	4.020.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	4.020.000
X	NON URUSAN			1.505.588.860
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.505.588.860
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.505.588.860
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	12.000.000
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12.000.000
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.441.612.660
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.409.812.660
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	31.800.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	10.332.300
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	1.304.300
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	5.025.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.003.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	16.927.200
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.612.200
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.315.000
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	24.716.700
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	22.566.700
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	2.150.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	KECAMATAN KEWAPANTE			1.860.347.708
7	UNSUR KEWILAYAHAN			206.935.400
7.01.	KECAMATAN			206.935.400
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	151.006.500
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	151.006.500
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	151.006.500
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	20.570.200
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	20.570.200
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	20.570.200
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	4.200.000
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	4.200.000
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	19 Orang	4.200.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	31.158.700
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	31.158.700
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	31.158.700
X	NON URUSAN			1.653.412.308
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.653.412.308
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.653.412.308
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	11.100.000
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	11.100.000
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.516.270.280
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.479.870.280
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	36.400.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	25.980.200
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.582.700
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	13.827.500
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.390.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.180.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	49.466.028
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	17.475.500
X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.580.400
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.410.128

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	50.595.800
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	40.954.200
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5.800.000
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.841.600
	KECAMATAN KOTING			1.311.620.993
7	UNSUR KEWILAYAHAN			69.172.000
7.01.	KECAMATAN			69.172.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	55.074.200
7.01.02.2.03.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	55.074.200
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0 Dokumen	55.074.200
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	8.937.800
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	8.937.800
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	8.937.800
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	5.160.000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	5.160.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	5.160.000
X	NON URUSAN			1.242.448.993
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.242.448.993
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.242.448.993
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	8.039.800
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	8.039.800
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.187.161.460
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.164.045.060
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	23.116.400
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	11.494.200
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	5.287.200
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	2.650.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	3.557.000
X.XX.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	12.057.933
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	10.997.733

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1.060.200
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	23.695.600
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	23.695.600
	KECAMATAN LELA			1.698.857.080
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.698.857.080
7.01.	KECAMATAN			1.698.857.080
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.587.254.380
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	6.000.000
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.541.512.280
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	1.511.752.880
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	29.759.400
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	11.755.000
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1.255.800
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.999.200
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.500.000
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	17.134.200
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.744.200
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.390.000
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	10.852.900
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	10.852.900
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	85.602.700
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	85.602.700
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	85.602.700
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	7.000.000
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.000.000
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	11.000.000
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	11.000.000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	11.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	8.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	8.000.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	8.000.000
	KECAMATAN MAGEPANDA			1.407.447.029
7	UNSUR KEWILAYAHAN			147.763.700
7.01.	KECAMATAN			147.763.700
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	111.731.200
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	40.080.600
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	40.080.600
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	71.650.600
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	71.650.600
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	7.575.000
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.575.000
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	7.575.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	22.557.500
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	22.557.500
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	7.880.000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	14.677.500
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	5.900.000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	5.900.000
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	5.000.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	900.000
X	NON URUSAN			1.259.683.329
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.259.683.329
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.259.683.329
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.000.000
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	6.000.000
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.193.847.510
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.162.647.510
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	31.200.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.930.600
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.089.400

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.841.200
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.311.019
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.311.019
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	50.594.200
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	46.594.700
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.000.000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.999.500
	KECAMATAN MAPITARA			1.410.399.420
7	UNSUR KEWILAYAHAN			86.402.700
7.01.	KECAMATAN			86.402.700
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	51.277.000
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	51.277.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	51.277.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %	12.165.700
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	12.165.700
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	12.165.700
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	14.800.000
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	14.800.000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	14.800.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	8.160.000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	8.160.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	8.160.000
X	NON URUSAN			1.323.996.720
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.323.996.720
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.323.996.720
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	10.648.600
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	10.648.600
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.255.319.720
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.223.363.720
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	31.956.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	11.596.800

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	960.200
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.526.600
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.110.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.381.300
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.000.000
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.381.300
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	43.050.300
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	43.050.300
	KECAMATAN NELLE			1.291.193.510
7	UNSUR KEWILAYAHAN			138.566.900
7.01.	KECAMATAN			138.566.900
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	91.777.900
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	77.377.900
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan Laporan	52.540.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	24.837.900
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	14.400.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan Laporan	14.400.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	10.514.000
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	10.514.000
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga Masyaraka Lembaga Kemasyarakatan	10.514.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	24.845.000
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	24.845.000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen Dokumen	24.845.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	11.430.000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	11.430.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen Dokumen	11.430.000
X	NON URUSAN			1.152.626.610
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.152.626.610
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.152.626.610
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	12.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan Laporan	12.000.000
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.061.192.970
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang Orang/bulan	1.030.592.970
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen Dokumen	30.600.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	10.282.400
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket Paket	871.200
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket Paket	1.527.200
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket Paket	2.700.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket Paket	5.184.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	40.286.940
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	955.400
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan Laporan	15.430.740
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan Laporan	23.900.800
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	28.864.300
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit Unit	24.420.100
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit Unit	1.000.000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.444.200
	KECAMATAN NITA			1.958.423.915
7	UNSUR KEWILAYAHAN			111.797.400
7.01.	KECAMATAN			111.797.400
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	81.347.900
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	45.427.900
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	31.575.500
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	13.852.400
7.01.02.2.03.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	23.020.000
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	23.020.000
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	12.900.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	12.900.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	9.999.500
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	9.999.500
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	9.999.500

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	20.450.000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	20.450.000
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15 Desa Dokumen	4.090.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Desa Dokumen	4.090.000
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15 Desa Dokumen	4.090.000
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 Desa Dokumen	4.090.000
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	15 Desa Dokumen	4.090.000
X	NON URUSAN			1.846.626.515
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.846.626.515
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.846.626.515
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	14.970.200
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	14.970.200
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.700.740.800
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.664.402.000
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	36.338.800
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	13.539.800
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.483.400
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.773.000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.685.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.598.400
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	42.050.515
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.640.127
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.410.388
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	75.325.200
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	66.812.800
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1.000.000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.512.400
	KECAMATAN PAGA			1.367.066.550
7	UNSUR KEWILAYAHAN			90.638.200
7.01.	KECAMATAN			90.638.200
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	27 Laporan	58.047.600

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24 dokumen	35.168.400
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	24.638.400
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14 Dokumen	10.530.000
7.01.02.2.03.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	3 Laporan	22.879.200
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	14 Dokumen	22.879.200
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	1 Dokumen	16.843.900
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayan Desa	1 dokumen	16.843.900
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Lembaga Kemasyarakatan	16.843.900
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60 Dokumen	8.359.200
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	60 dokumen	8.359.200
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	8.359.200
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18 Laporan	7.387.500
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18 Laporan	7.387.500
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen	7.387.500
X	NON URUSAN			1.276.428.350
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.276.428.350
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuoaten/Kota	6 Laporan	1.276.428.350
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 dokumen/laporan	12.180.000
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12.180.000
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji/Tunjangan ASN dan terlaksananya Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	13 org / 14 bln Dokumen	1.140.730.400
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.109.720.000
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	31.010.400
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 paket	35.621.200
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	696.600
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.601.600
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.200.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.573.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	15.550.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27 Laporan	12.528.150
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	12.528.150
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 paket	75.368.600
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	72.761.300
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.798.700
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	808.600
	KECAMATAN PALUE			1.663.511.596
7	UNSUR KEWILAYAHAN			136.031.800
7.01.	KECAMATAN			136.031.800
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	76.252.000
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	55.802.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	48.802.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	7.000.000
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	20.450.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	20.450.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	9.999.800
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	9.999.800
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	9.999.800
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	25.870.000
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	25.870.000
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8 Laporan	5.190.000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen	20.680.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	23.910.000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	23.910.000
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	9.450.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	14.460.000
X	NON URUSAN			1.527.479.796
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.527.479.796

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.527.479.796
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	12.207.500
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12.207.500
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.418.867.420
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.387.838.020
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	31.029.400
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	17.712.000
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.661.000
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.051.000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.500.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.500.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	59.400.776
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.580.000
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	54.820.776
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	19.292.100
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	16.452.100
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.840.000
	KECAMATAN TALIBURA			1.693.345.609
7	UNSUR KEWILAYAHAN			108.810.000
7.01.	KECAMATAN			108.810.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	73.680.000
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	73.680.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	73.680.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	14.040.000
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	14.040.000
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyarakatan	14.040.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	0
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	0
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	21.090.000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	21.090.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	21.090.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X	NON URUSAN			1.584.535.609
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.584.535.609
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.584.535.609
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	8.550.000
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	8.550.000
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.526.266.680
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.489.744.180
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	36.522.500
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	15.964.200
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	582.600
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.275.600
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.600.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.506.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.003.729
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.422.329
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.581.400
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	26.751.000
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	24.501.000
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	2.250.000
	KECAMATAN TANA WAWO			1.319.373.384
7	UNSUR KEWILAYAHAN			87.031.800
7.01.	KECAMATAN			87.031.800
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	77.134.300
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	38.064.600
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	17.630.200
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	20.434.400
7.01.02.2.03.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	23.749.700
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	10 Dokumen	23.749.700
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	15.320.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 Laporan	15.320.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	9.897.500

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	9.897.500
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	9.897.500
X	NON URUSAN			1.232.341.584
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.232.341.584
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.232.341.584
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	15.000.000
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	15.000.000
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.030.340.970
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11/14 Orang/bulan	1.005.140.970
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	25.200.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	11.364.800
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.999.800
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.345.000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.200.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.820.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	69.593.626
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.594.150
X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	5.999.700
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.999.776
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	106.042.188
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	34.031.888
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	72.010.300
	KECAMATAN WAIBLAMA			1.536.155.554
7	UNSUR KEWILAYAHAN			130.649.400
7.01.	KECAMATAN			130.649.400
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	80.339.400
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	80.339.400
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	47.408.200
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	32.931.200
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	12.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	12.000.000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	16.310.000
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	16.310.000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	16.310.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasann Pemerintahan Desa	100 %	22.000.000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	22.000.000
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 Dokumen	11.000.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	11.000.000
X	NON URUSAN			1.405.506.154
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.405.506.154
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.405.506.154
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	8.000.000
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan Laporan	8.000.000
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1.315.263.750
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang /14 Bulan Orang/bulan	1.277.038.750
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	38.225.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	18.565.800
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.727.800
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	11.110.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.728.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.339.504
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.339.504
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	57.337.100
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	56.487.100

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	850.000
	KECAMATAN WAIGETE			1.424.802.342
7	UNSUR KEWILAYAHAN			167.381.400
7.01.	KECAMATAN			167.381.400
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	118.320.600
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	102.565.400
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	51.339.100
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	51.226.300
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	15.755.200
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	15.755.200
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	10.000.800
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	10.000.800
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.800
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	9.060.000
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	9.060.000
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	0
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	9.060.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	30.000.000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	11 Desa	30.000.000
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 Dokumen	15.000.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	15.000.000
X	NON URUSAN			1.257.420.942
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.257.420.942
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupeten/Kota	100 %	1.257.420.942
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8.550.000
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	8.550.000
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Kegiatan	1.165.542.638
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/14 Bulan Orang/bulan	1.130.817.638
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	34.725.000
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat daerah	6 Kegiatan	16.522.600

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.262.100
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.168.500
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.092.000
X.XX.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 Kegiatan	2.207.200
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.207.200
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Kegiatan	6.339.504
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.339.504
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Paket	58.259.000
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	53.959.000
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	1.800.000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.500.000
	KECAMATAN MEGO			1.520.048.699
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.490.503.299
7.01.	KECAMATAN			1.490.503.299
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.420.903.299
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	8.040.000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	8.040.000
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.364.727.437
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.364.727.437
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.614.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.614.000
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.532.662
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.103.800
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.428.862
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	37.989.200
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	37.989.200
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	44.480.000
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	44.480.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	44.480.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	14.920.000
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	14.920.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	14.920.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	10.200.000
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	10.200.000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	10.200.000
X	NON URUSAN			29.545.400
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			29.545.400
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	29.545.400
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	29.545.400
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	29.545.400
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			4.576.200.072
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			2.172.923.404
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			2.172.923.404
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	439.976.550
8.01.02.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	439.976.550
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 Orang	12.335.700
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	50 Keluarga	34.607.500
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	70 Orang	393.033.350
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	870.113.054
8.01.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	870.113.054
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	810.914.654
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	36 Orang	59.198.400
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	111.301.600
8.01.04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	111.301.600

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	111.301.600
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-	63.632.300
8.01.05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	63.632.300
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	63.632.300
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-	687.899.900
8.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	687.899.900
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	86 Orang	687.899.900
X	NON URUSAN			2.403.276.668
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			2.403.276.668
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.403.276.668
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	29.736.000
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	29.736.000
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.230.423.880
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ bulan	2.154.530.680
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	75.893.200
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	49.460.900
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.973.300
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.232.500
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	3.750.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4.470.100
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	30.035.000
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	45.179.788
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.711.500
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	29.468.288
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	48.476.100

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	34.577.700
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	4.300.000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.598.400

5.2.2. Kegiatan yang berkaitan dengan SPM

Tabel 5.5
Kegiatan yang berkaitan dengan SPM Tahun 2026

No.	Urusan / PD / Nama Sub Kegiatan	Indikator	Target	
			Kinerja	Anggaran
	Pendidikan			
	Dinas PKO			
1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	25 Paket	2.204.300.000
2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	877 Orang	3.899.363.580
3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	985 Orang	4.264.881.480
4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	73.541.000
5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	120 Orang	47.086.940
6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	336 Sat. Pend.	535.126.300
7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	336 Sat. Pend.	50.000.000
8	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150 Orang	94.026.400
9	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150 Orang	75.000.000
10	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	150 Konten Digital	74.305.700
11	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6 Dokumen	131.627.600
12	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	336 Dokumen	160.810.000
13	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	21 Komunitas	44.024.000
14	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	25.072.600

No.	Urusan / PD / Nama Sub Kegiatan	Indikator	Target	
			Kinerja	Anggaran
15	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	3.662.428.800
16	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	617.781.700
17	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	165 Orang	75.000.000
18	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	180 Orang	147.700.600
19	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	336 Sat. Pendi	71.667.000
20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	120 Ruang	7.740.848.250
21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Ruang	7.600.160.904
22	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1.517.800.000
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	5.169.719.001
24	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	6 Paket	1.537.400.000
25	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	492 Orang	2.145.478.380
26	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	90 Orang	54.000.000
27	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	86 Sat. Pendi	11.950.700
28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	86 Sat. Pendi	41.988.120
29	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	83 Orang	50.000.000
30	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	3 Konten Digital	60.391.700
31	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	86 Dokumen	71.499.740
32	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	19.714.700
33	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	1.743.768.950
34	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	83 Orang	50.000.000
35	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	86 Orang	57.081.000
36	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	1.137.017.840
37	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	402.423.894
38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	9 Paket	831.587.500

No.	Urusan / PD / Nama Sub Kegiatan	Indikator	Target	
			Kinerja	Anggaran
39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	16 Orang	240.000.000
40	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	16 Orang	234.000.000
41	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	82 Orang	67.277.900
42	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	18.000.000
43	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	270 Sat. Pendidik	25.621.800
44	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	270 Sat. Pendidik	45.674.870
45	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dok.	30.579.700
46	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dok.	41.649.960
47	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dok.	12.989.300
48	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	45 Paket	426.202.900
49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15 Orang	90.000.000
50	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	270 Sat. Pendidik	5.669.900
51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dok.	11.410.600
52	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dok.	48.474.630
53	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	695 Peserta Didik	191.293.500
54	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dok.	18.692.000
55	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dok	24.999.780
56	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Lap.	16.170.400
57	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8 Lap.	74.999.680
58	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	12 Paket	2.372.006.164

No.	Urusan / PD / Nama Sub Kegiatan	Indikator	Target	
			Kinerja	Anggaran
59	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	234.849.000
60	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	479.123.761
	Kesehatan			
	Dinas Kesehatan			
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.398 Orang	212.229.600
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.452 Orang	33.075.000
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.153 Orang	421.047.011
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.204 Orang	285.950.860
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.908 Orang	26.842.080
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.956 Orang	55.280.000
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60.435 Orang	14.799.840
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22.411 Orang	59.270.000
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22.192 Orang	20.049.840
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.529 Orang	520.246.896
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4.075 Orang	941.260.600
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6.339 Orang	102.600.000
	Pekerjaan Umum			
	Dinas PUPR			
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dok.	20.549.970
2	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	20 Liter/Detik	3.194.793.711
3	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	50 Liter/Detik	4.681.044.935
4	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	164.415.139
5	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	20 Liter/Detik	574.870.700
6	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	525 M^3/Hari	1.348.000.000
7	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	20 M^3/Hari	3.598.899.100
8	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan	1 Dok	20.549.970

No.	Urusan / PD / Nama Sub Kegiatan	Indikator	Target	
			Kinerja	Anggaran
		Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun		
	Perumahan			
	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
1	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dok	13.699.930
2	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dok	29.806.140
3	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	12 Unit	303.697.400
4	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit	164.660.070
5	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	157.836.900
6	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	148.087.230
	Keamanan dan Ketertiban			
	Satuan Polisi Pamong Praja			
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	75 Orang	37.793.800
2	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 Lap	598.270.000
3	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	30 Lap	481.315.980
4	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dok	156.622.000
5	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	13 Desa/Kelurahan	46.004.800
6	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200 Orang	153.618.200
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dok	74.916.280
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	21 Kawasan	40.999.320
3	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dok	259.291.270

No.	Urusan / PD / Nama Sub Kegiatan	Indikator	Target	
			Kinerja	Anggaran
4	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dok	185.890.500
5	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.000 Orang	212.428.790
6	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	92.624.100
7	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dok	124.999.800
8	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	400 Orang	64.112.700
	Sosial			
	Dinas Sosial			
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Orang	68.887.610
2	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	67.546.600
3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	47.978.000
4	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	76 Orang	111.286.630
5	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	62.310.200
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	275 Orang	218.884.900
7	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	32.132.770
8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	15.655.700
9	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	27.263.450
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	57.817.900
11	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	17.900.000

No.	Urusan / PD / Nama Sub Kegiatan	Indikator	Target	
			Kinerja	Anggaran
12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12.079.500

5.2.3. Kegiatan yang diusulkan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Kegiatan yang diusulkan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD beserta target anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.6

Rekapitulasi Kegiatan yang diusulkan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No	PENGUSUL / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	**AGUSTINUS ADEO DATUS, SP**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	565.000.000,00
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	65.000.000,00
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	90.000.000,00
4	Pembangunan Jalan	100.000.000,00
5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000,00
6	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	40.000.000,00
7	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	40.000.000,00
2.	**Agustinus Feliksius Segon**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	150.000.000,00
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	40.000.000,00
3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	410.000.000,00
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	90.000.000,00
5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.000.000,00
6	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	260.000.000,00
3	**ALEXANDER AGATO HASULIE**	**1.000.000.000,00**
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	50.000.000,00
2	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	50.000.000,00
3	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	100.000.000,00
4	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	350.000.000,00
5	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	50.000.000,00
6	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	150.000.000,00
7	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	250.000.000,00
4	**ALFONSUS AMBROSIUS**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	15.000.000,00
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	90.000.000,00
3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	395.000.000,00
4	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	400.000.000,00
5	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000,00
6	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	50.000.000,00

No	PENGUSUL / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
5	**ANTONIUS HENDRIKUS REBU**	**1.000.000.000,00**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00
2	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	140.000.000,00
3	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000,00
4	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	110.000.000,00
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	350.000.000,00
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100.000.000,00
6	**Antonius Tanjung**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	300.000.000,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	30.000.000,00
4	Pembangunan Jalan	185.000.000,00
5	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	35.000.000,00
6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	60.000.000,00
7	Pengadaan Mebel Sekolah	50.000.000,00
8	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	200.000.000,00
9	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	30.000.000,00
10	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	50.000.000,00
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	40.000.000,00
7	**BAHRUDDIN, S.E.**	**1.000.000.000,00**
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20.000.000,00
2	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	280.000.000,00
3	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	325.000.000,00
4	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	175.000.000,00
5	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	200.000.000,00
8	**Beatus Wilfridus Djogo**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	320.500.000,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	38.000.000,00
3	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	56.500.000,00
4	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	70.000.000,00
5	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	100.000.000,00
6	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	415.000.000,00
9	**BENEDIKTUS LUKAS RAJA, S.E.**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	300.000.000,00

No	PENGUSUL / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	300.000.000,00
4	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	50.000.000,00
5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000,00
6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	150.000.000,00
7	Pengadaan Perlengkapan PAUD	50.000.000,00
10	**CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	75.000.000,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	35.000.000,00
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	160.000.000,00
4	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	55.000.000,00
5	Pembangunan Jembatan	215.000.000,00
6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	175.000.000,00
7	Pengadaan Perlengkapan PAUD	50.000.000,00
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	85.000.000,00
9	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	150.000.000,00
11	**DARIUS EVENSIUS, S.Sos.**	**1.000.000.000,00**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20.000.000,00
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	50.000.000,00
4	Pembangunan Jalan	150.000.000,00
5	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	75.000.000,00
6	Pengadaan Mebel Sekolah	100.000.000,00
7	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	180.000.000,00
8	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	75.000.000,00
9	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	250.000.000,00
12	**FABIANUS TOA**	**1.000.000.000,00**
1	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	15.000.000,00
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	375.000.000,00
3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	125.000.000,00
4	Pengadaan Mebel Sekolah	110.000.000,00
5	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	325.000.000,00
6	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50.000.000,00
13	**FRANSISKUS SIKU PARERA**	**1.000.000.000,00**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	140.000.000,00
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000,00
3	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	210.000.000,00

No	PENGUSUL / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
4	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	350.000.000,00
5	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	100.000.000,00
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100.000.000,00
14	**FRANSISKUS STEPHANUS SAY, S.E.**	**1.000.000.000,00**
1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	50.000.000,00
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	404.600.000,00
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	260.400.000,00
4	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	115.000.000,00
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	170.000.000,00
15	**GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.**	**1.500.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	44.000.000,00
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	361.000.000,00
3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100.000.000,00
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	250.000.000,00
5	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	66.500.000,00
6	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	15.000.000,00
7	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	111.000.000,00
8	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	262.500.000,00
9	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	190.000.000,00
10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100.000.000,00
16	**Heriawan**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	50.000.000,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	60.000.000,00
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	140.000.000,00
4	Pengadaan Mebel Sekolah	25.000.000,00
5	Pengadaan Perlengkapan PAUD	10.000.000,00
6	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	122.500.000,00
7	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	420.000.000,00
8	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	62.500.000,00
9	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	110.000.000,00
17	**HERLINDIS DONATHA DA RATO, S.SIT.**	**1.500.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	205.000.000,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.000.000,00
3	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	200.000.000,00
4	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	172.000.000,00
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	400.000.000,00
6	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	128.000.000,00

No	PENGUSUL / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
7	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	187.000.000,00
8	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	150.000.000,00
18	**HYGINUS CLAUDIUS DAGA**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	150.000.000,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	35.000.000,00
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	50.000.000,00
5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	300.000.000,00
6	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	200.000.000,00
7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	15.000.000,00
8	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	150.000.000,00
19	**Leonard Winarto,SS.M.HUM**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	160.000.000,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	6.000.000,00
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10.000.000,00
4	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	129.000.000,00
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	40.000.000,00
6	Pengadaan Mebel Sekolah	54.000.000,00
7	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	36.000.000,00
8	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	50.000.000,00
9	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	50.000.000,00
10	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	90.000.000,00
11	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	70.000.000,00
12	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	55.000.000,00
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	250.000.000,00
20	**Lukas Lero**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	50.000.000,00
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	29.000.000,00
3	Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000,00
4	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	101.000.000,00
5	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	60.000.000,00
6	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	100.000.000,00
7	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	160.000.000,00
8	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	200.000.000,00
9	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	100.000.000,00
21	**MARIA ANGELORUM MAYESTATIS**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	120.000.000,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00

No	PENGUSUL / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	85.000.000,00
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	120.000.000,00
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	100.000.000,00
6	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	49.000.000,00
7	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	150.000.000,00
8	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	100.000.000,00
9	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	25.000.000,00
10	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	71.000.000,00
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	130.000.000,00
22	**MARTHEN LUTHER ADJI, SE**	**960.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	150.000.000,00
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	100.000.000,00
3	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	50.000.000,00
4	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	205.000.000,00
5	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	105.000.000,00
6	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	350.000.000,00
23	**Nurhayati Bonda,SPd**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	224.000.000,00
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	30.000.000,00
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	20.000.000,00
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.000.000,00
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	80.000.000,00
6	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	102.000.000,00
7	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	354.000.000,00
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	150.000.000,00
24	**PETRUS WODA**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	50.000.000,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	140.000.000,00
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	15.000.000,00
4	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	70.000.000,00
5	Pembangunan Jalan	135.000.000,00
6	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	165.000.000,00
7	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	20.000.000,00
8	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	235.000.000,00
9	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	120.000.000,00
10	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	50.000.000,00
25	**Piet Christian Da Cunha**	**1.000.000.000,00**

No	PENGUSUL / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	143.000.000,00
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000,00
3	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	200.000.000,00
4	Pengadaan Mebel Sekolah	100.000.000,00
5	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	348.000.000,00
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	24.000.000,00
7	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	85.000.000,00
26	**STEFANUS SUMANDI, S.Fil.**	**1.500.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100.000.000,00
2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	100.000.000,00
3	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	500.000.000,00
4	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	550.000.000,00
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	250.000.000,00
27	**SUFRIYANCE MERISON BOTU, S.S.**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	40.000.000,00
2	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	70.000.000,00
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20.000.000,00
4	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	300.000.000,00
5	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	420.000.000,00
6	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	150.000.000,00
28	**Yohanes Vinsensius Roma,SP**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	175.000.000,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	50.000.000,00
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100.000.000,00
4	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	50.000.000,00
5	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	295.000.000,00
6	Pengadaan Mebel Sekolah	140.000.000,00
7	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	190.000.000,00
29	**Yohanes Yos De Peskim**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	35.000.000,00
2	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	50.000.000,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000,00
4	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	30.000.000,00
5	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	25.000.000,00
6	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	196.000.000,00
7	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	50.000.000,00
8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	30.000.000,00
9	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	419.000.000,00

No	PENGUSUL / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
10	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	30.000.000,00
30	**YOSEF NONG SONI, S.Pi.**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25.000.000,00
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.000.000,00
3	Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000,00
4	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	177.000.000,00
5	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	198.000.000,00
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	350.000.000,00
31	**YOSEP DON BOSCO**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	50.000.000,00
2	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	50.000.000,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100.000.000,00
5	Pembangunan Jalan	100.000.000,00
6	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50.000.000,00
7	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	65.000.000,00
8	Pengadaan Mebel Sekolah	75.000.000,00
9	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	70.000.000,00
10	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000,00
11	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	285.000.000,00
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	80.000.000,00
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	25.000.000,00
32	**YOSEPH KARMIANTO ERI, S.Fil.**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	83.000.000,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000,00
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	30.000.000,00
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	70.000.000,00
5	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	20.000.000,00
6	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	15.000.000,00
7	Pembangunan Jalan	70.000.000,00
8	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	70.000.000,00
9	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	17.000.000,00
10	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	40.000.000,00
11	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	15.000.000,00
12	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	70.000.000,00
13	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000,00

No	PENGUSUL / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
14	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	350.000.000,00
33	**Yunus Noce Fernandez**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	53.000.000,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	80.000.000,00
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	40.000.000,00
5	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	30.000.000,00
6	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	45.000.000,00
7	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	50.000.000,00
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9.000.000,00
9	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	235.000.000,00
10	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	198.000.000,00
11	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	10.000.000,00
34	**Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	75.000.000,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	56.000.000,00
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	255.000.000,00
4	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	25.000.000,00
5	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	131.000.000,00
6	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	250.000.000,00
7	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	88.000.000,00
8	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	120.000.000,00
35	**Yuvinus Solo**	**1.000.000.000,00**
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	50.000.000,00
2	Pembangunan Jalan	400.000.000,00
3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	150.000.000,00
4	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	50.000.000,00
5	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	17.000.000,00
6	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	30.000.000,00
7	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	92.000.000,00
8	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	161.000.000,00
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	50.000.000,00
	Total	**36.460.000.000,00**

Tabel 5.7

Rincian usulan Permasalahan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
	Yuvinus Solo					
27-03-2025	Hibah Pembangunan Kapela Kapela St Benediktus Glaak. Kapela yang ada saat ini kondisinya kurang memadai untuk menampung jemaat yang semakin	Desa Hale, Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
	berkembang. Fasilitas yang terbatas juga menghambat kelancaran kegiatan keagamaan					
27-03-2025	Instalasi dan Sambungan Rumah Listrik PLN (900 Watt). Banyak masyarakat berpenghasilan rendah belum memiliki akses listrik yang memadai. Sambungan listrik PLN 900 Watt adalah kebutuhan dasar yang penting untuk mendukung aktivitas sehari-hari	Desa Hale, Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	12	Unit	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Instalasi dan Sambungan Rumah Listrik PLN (900 Watt). Banyak masyarakat berpenghasilan rendah belum memiliki akses listrik yang memadai. Sambungan listrik PLN 900 Watt adalah kebutuhan dasar yang penting untuk mendukung aktivitas sehari-hari	Desa Hebing, Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	12	Unit	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Instalasi dan Sambungan Rumah Listrik PLN (900 Watt). Banyak masyarakat berpenghasilan rendah belum memiliki akses listrik yang memadai. Sambungan listrik PLN 900 Watt adalah kebutuhan dasar yang penting untuk mendukung aktivitas sehari-hari	Ian, Desa Bola, Kecamatan Bola, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	8	Unit	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Instalasi dan Sambungan Rumah Listrik PLN (900 Watt). Banyak masyarakat berpenghasilan rendah belum memiliki akses listrik yang memadai. Sambungan listrik PLN 900 Watt adalah kebutuhan dasar yang penting untuk mendukung aktivitas sehari-hari	Ladan Ba'it, Desa Hokor, Kecamatan Bola, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	8	Unit	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Bantuan Sarana Produksi Hortikultura Sayur-Sayuran	Blidit, Desa Egon Buluk, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Kelompok	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Bantuan Ternak Kambing bagi Masyarakat	Duruduen, Desa Watudiran, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	18	Ekor	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	Bantuan Ternak Kambing bagi Masyarakat	Paudolor, Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	18	Ekor	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	Bantuan Ternak Kambing bagi Masyarakat	Koli Buluk, Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	18	Ekor	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	Bantuan Ternak Kambing bagi Masyarakat	Desa Wolon Terang, Kecamatan Doreng, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	18	Ekor	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	Pembuatan Drainase mencegah terjadinya genangan air	RT 009 RW 004 Watubaler, Desa Hebing, Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	50	Meter	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
27-03-2025	Peningkatan Jalan Natarmaget - Pante Liat. Infrastruktur jalan yang belum memadai memperlambat distribusi barang dan jasa	Dusun Napun Kontas, Desa Hale, Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	275	Meter	Pembangunan Jalan
27-03-2025	Peningkatan Jalan Pedat - Wairgahu. Infrastruktur jalan yang belum memadai memperlambat distribusi barang dan jasa	Desa Hebing, Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	165	Meter	Pembangunan Jalan
27-03-2025	Rehab Ruang Kelas SDK Watu Baler. SDK Watu Baler memiliki ruang kelas yang tidak layak digunakan rombongan belajar. Ruangan yang kokoh akan menciptakan suasana belajar yang aman dan kondusif.	Desa Hebing, Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Unit	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
27-03-2025	Pembangunan Lapangan Serba Guna (Volley dan Futzal) di SMP PGRI Lerohae	Desa Hebing, Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
27-03-2025	Pembangunan Lanjutan Pagar SMP PGRI Lerohae. Pagar yang belum selesai menyebabkan lingkungan sekolah tidak aman	Desa Hebing, Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	60	Meter	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
27-03-2025	Bantuan Perahu 5,5 Meter Lengkap Mesin dan Alat Tangkap bagi Kelompok Nelayan. Nelayan di daerah ini menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan alat tangkap ikan yang modern dan efisien. Banyak nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional yang kurang produktif, sehingga hasil tangkapan tidak optimal.	Desa Ipir, Kecamatan Bola, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	1	Paket	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP					
27-03-2025	Hibah pembangunan Kapela Sanctisima Rotat	Desa Ladogahar Kecamatan Nita, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Unit	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
27-03-2025	Bantuan untuk kelompok Hortikultura di Desa Ladogahar	Desa Ladogahar Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Kelompok	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Bantuan untuk kelompok Hortikultura di Desa Lusitada	Desa Lusitada Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Kelompok	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Bantuan untuk kelompok Hortikultura di Desa Nitakloang	Desa Nitakloang Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Kelompok	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Bantuan ternak babi di Desa Nita Kecamatan Nita	Desa Nita Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	2	Paket	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	Bantuan pupuk di Desa Magepanda	Desa Magepanda Kecamatan magepanda, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	8	Paket	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Hibah dana untuk kelompok karang taruna di Desa Lusitada	Desa Lusitada Kecamatan Nita, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	2	Paket	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
27-03-2025	Hibah alatmusik keyboard dan warles untuk kelompok kor di Kapela Stasi Wuliwutik	Desa Wuliwutik Kecamatan Nita, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	2	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Bantuan instalasi sambungan rumah listrik PLN (900 watt) untuk 8 unit di desa Takaplager	Desa Takaplager Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	8	Unit	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Bantuan instalasi dan sambungan rumah listrik PLN (900 watt) untuk 6 unit di Desa Tilang	Desa Tilang Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	6	Unit	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Bantuan peralatan tukang untuk kelompok Duba Nian	Desa Nitakloang Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Paket	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Bantuan mesin produksi alat tusuk sate dan tusuk gigi di Desa Bloro	Desa Bloro Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Paket	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Batuan ternak babi untuk kelompok Lau wolo dan Retwol	Desa Nita kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	2	Paket	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	Bantuan Handtraktor untuk dua kelompok di Desa Done Kecamatan Magepanda	Desa Done kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	2	Kelompok	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
27-03-2025	Bantuan ternak babi di Desa Riit Kecamatan Nita	Desa Riit Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Kelompok	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	Bantuan ternak babi di desa Mahebora Kecamatan Nita	Desa Mahebora Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Kelompok	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	Bantuan ternak babi di Desa Masebewa	Desa Masebewa Kecamatan Paga, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Kelompok	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
16-04-2025	Bantuan untuk kelompok tenun ikat Desa Ladogahar Kecamatan Nita	Desa Ladogahar,, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3	kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
16-04-2025	Bantuan untuk kelompok tenun ikat di Desa Bloro	Desa Bloro Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2	kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
16-04-2025	Bantuan untuk kelompok tenun ikat di Desa Lusitada	Desa Lusitada Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2	kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
16-04-2025	Bantuan untuk kelompok tenun ikat di Desa Done Kecamatan Magepanda	Desa Done Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
16-04-2025	Bantuan untuk kelompok tenun ikat di Desa Kolisia B	Desa Kolisia B Kecamatan Magepanda,, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,	1	kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
			USAHA KECIL DAN MENENGAH			
16-04-2025	Bantuan untuk kelompok tenun ikat di Desa Kolisia A	Desa Kolisia A Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
16-04-2025	Bantuan pupuk di Desa Wodamude	Desa Wodamude Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	4	Paket	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
25-04-2025	Belum tersediannya pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja di yayasan PUBAKAT	Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Paket	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	Yunus Noce Fernandez					
27-03-2025	Pengadaan Sound System bagi Kegiatan Kerohanian di Situs Betlehem Paroki Nelle	Desa Nelle Wutung, Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Pengadaan Alat Musik dan LCD Proyektor Toshiba untuk Kelompok Sekolah Minggu Gereja Stasi Nara	Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Pembukaan Jalan Lingkungan	Dusun Enak dari RT 004 ke RT 005 RW 001, Desa Nelle Urung, Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	500	Meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Peningkatan Jalan / Rabat Jalan Beton Lebar 2 M, Tebal 12 Cm	Dusun 4 RT 13 Lorong Wolomotong Desa Nelle Lorang, Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	100	Meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Peningkatan Jalan / Rabat Jalan Beton Lebar 3 M, Tebal 12 Cm	Mu'u Utur-Bolaboer Rt.19 Dusun Habipiret, Desa Manubura, Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	100	Meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Hibah Pembebasan Lahan Pembangunan Kapela Nara	Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Paket	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
27-03-2025	Peningkatan Kualitas Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Rusak Berat	Desa Manubura, Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	5	Unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
27-03-2025	Peningkatan Kualitas Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Rusak Sedang	Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2	Unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
27-03-2025	Pembangunan MCK pada PAUD Dominikus Savio	Dusun Kolibuluk, Desa Nelle Urung, Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
27-03-2025	Pembangunan / Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Wodonggabo, Kapela Habipiret, Napun Basar, Desa Manubura, Kecamatan Nelle., Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERHUBUNGAN	3	Unit	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
27-03-2025	Bantuan Benang, Obat Celup dan Perlengkapan Lainnya untuk Kelompok Tenun Ikat	Dusun 2 dan Dusun 4, Desa Nelle Lorang, Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2	Kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Bantuan Benang, Obat Celup dan Perlengkapan Lainnya untuk Kelompok Tenun Ikat Boganvil	RT 003 RW 001, Dusun Enak, Desa Nelle Urung,	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN	1	Kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
		Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Bantuan Benang, Obat Celup dan Perlengkapan Lainnya untuk Kelompok Tenun Ikat Mawar	RT 009 RW 003, Dusun Kolibuluk, Desa Nelle Urung, Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Bantuan Benang, Obat Celup dan Perlengkapan Lainnya untuk Kelompok Tenun Ikat	Dusun Baluele, Desa Manubura, Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2	Kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Bantuan Benang, Obat Celup dan Perlengkapan Lainnya untuk Kelompok Tenun Ikat	Dusun Habipiret, Desa Manubura, Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Bantuan Benang, Obat Celup dan Perlengkapan Lainnya untuk Kelompok Tenun Ikat	Dusun Keduwair, Desa Manubura, Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Bantuan Usaha Batako Kelompok Maju Bersama	Dusun Kolibuluk RT 010 RW 003, Nelle Urung, Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Kelompok	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Bantuan Ternak Kambing	Dusun 2 dan Dusun 4, Desa Nelle Lorang, Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	2	Kelompok	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	Bantuan Ternak Kambing	Dusun Ritat, Desa Manubura, Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Kelompok	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	Bantuan Peralatan Studio bagi Kelompok Konten Kreator Digitalisasi Desa Wisata (Kamera DSLR/Mirrorless, Tripod Kamera, Clip-on, Drone, Printer, Lithing, Leptop)	Desa Manubura, Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1	Paket	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
27-03-2025	Bantuan Perahu 5,5 Meter Lengkap Mesin dan Alat Tangkap bagi Kelompok Angin Timur	Desa Lela, Kecamatan Lela, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	1	Paket	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
	YOSEPH KARMIANTO ERI, S.Fil.					
27-03-2025	Masih adanya Pemuda yang tidak memilki keahlian khusus dalam mengoperasioalkan komputer. Diperlukan pelatihan komputer; Video dan Desain Grafis	Karunia Bunda Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Paket	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Masih terdapatnya jalan tanah di Pemukimana Warga. Diperlukan pekerjaan Rabat	Desa Lepolima Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	60	Meter	Pembangunan Jalan
27-03-2025	Masih terdapatnya jalan tanah di Pemukiman Warga. Diperlukan pekerjaan rabat.	RT: 26 / RW: 06 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Paket	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Terdapatmya kelompok pertanian membutuhkan fasilitas pertanian berupa Kultifator pendampingan penggunaan	Patisomba; Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Paket	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Terdapat Drainase di Pemukian Warga rusak. Diperlukan perbaikan Drainase	RT; 001 / RW: 001 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	60	Meter	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
27-03-2025	Masih terdapat kegiatan Rohani Orang Muda Katolik Desa Watugong tidak memilki kursi. Diperlukan bantuan Kursi	Desa Watugong Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Terdapat Kegiatan Organisasi Mahasiswa membutuhkan bantuan biaya untuk melaksanakan kegiatan	DPC PMKRI ST. Thomas Morus Cabang Maumere Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
27-03-2025	Terdapat Organisasi Pemuda belum memilki biaya dalam melaksanakan kerja organisasi.	Gerakan Pemuda ANSOR Kab. Sikka Kelurahan Beru	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
		Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka				
27-03-2025	Masih terdapat nelayan tidak memilki sampan dalam menangkap ikan	Kecamatan Alok Timur & Palue, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	1	Paket	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	Terdapat Kantor Desa belum menyelesaikan proses pembebasan lahan	Desa Nitung Lea Kecamatan Palue, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Paket	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
27-03-2025	Terdapat kegiatan sosial masyarakat tidak memilki kursi	Kecamatan Palue Desa Nitung Lea, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
27-03-2025	Masih terdapat kelompok Dasawisma membutuhkan bantuan perangkat alat masak	Kecamatan Nele, Kangae, Kewapante, Bola, Mapitara dan Doreng, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6	Paket	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	-. Bantuan Rumah Ibadah; Kepala Cawalo'o	Kapela Cawalo'o Kecamatan Palue, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Bantuan kepada Cabang Olahraga Dojang Taekwondo	Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
27-03-2025	Ketiadaan fasilitas lapangan Olahraga bagi peserta didik di SDN Watulagar (Bantuan Peembangunan Lapangan Bola Voli)	Desa Watumerak , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	paket	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
23-04-2025	Bantuan Alat Musik Kampung Araobat dengan Soundsystem untuk menjaga kearifan lokal budaya	Desa Kloangpopot Kecamatan Doreng , Kab. Sikka	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1	Paket	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
	Yohanes Vinsensius Roma,SP					
27-03-2025	Perlu pengadaan bibit pala untuk peningkatan perekonomian masyarakat	dusun Solot, RT.13, RT.14, RT.15, RT.16, RT.16A, Desa Tebuk, Kab. Sikka , Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	10	Ha	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Perlu pengadaan bibit Pala untuk peningkatan perekonomian Masyarakat	dusun Nataweru, dan Dusun Kei, Desa Lusitada, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	5	ha	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Perlu pengadaan bibit Pala untuk peningkatan perekonomian Masyarakat	Desa Bloro, Kecamatan Nita, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	5	ha	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	belum adanya alat pertanian sehingga perlu bantuan pengadaan alat pertanian (mesin potong rumput) merek Stiil (KT Metenler)	Desa Bloro, Kecamatan Nita, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	15	Unit	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
27-03-2025	Bantuan pengadaan bangku di Kapela (Kapela Solot)	Desa Tebuk, Kecamatan Nita, Kab. Sikka, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Hibah Rehab Rumah Doa di lingkungan Tebuk 2	lingkungan tebuk 2, Desa Tebuk, Kecamatan Nita, Kab. Sikka, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	masih kekurangannya mebeler sebagai sarana pendukung belajar untuk siswa (SMP Santi Sima Trinitas Bloro) Kecamatan Nita	Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	paket	Pengadaan Mebel Sekolah
27-03-2025	Kurangnya mebeler fasilitas Pendidikan SDK Tebuk/ TK Teras, untuk Guru 3 unit dan 25 unit mebeler untuk siswa	Desa Tebuk, Kecamatan Nita, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2	Paket	Pengadaan Mebel Sekolah
27-03-2025	masih rendah dalam usaha produktif bagi kelompok pemberdayaan perempuan sehingga perlu bantuan pengadaan Benang untuk Ikat Tenun dan Pewarna Kimia serta Paket Pelatihan bagi Kelompok Wanita (Desa Bloro 2 Kelompok; Desa Tebuk 3 Kelompok)	Desa Bloro, Kecamatan Nita, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5	kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	belum ada akses jalan sehingga perlu bantuan pembukaan jalan lingkungan Dusun Solot RT.14 dan RT 15 di Desa Tebuk	Dusun Solot, RT 14 dan RT.15, Desa Tebuk, Kecamatan Nita, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	600	meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
27-03-2025	belum ada akses jalan sehingga perlu pembukaanjalan lingkungan di Desa Bloro	Desa Bloro, Kecamatan Nita, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	600	meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
23-04-2025	jaringan air bersih menuju PONET PUSKESMAS NITA belum ada, karena itu perlu pembangunan menara air, pengadaan dinamo, dan tanki 2.500 liter serta instalasi menuju PONET Puskesmas Nita	Desa Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS KESEHATAN	1	paket	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
23-04-2025	bantuan pengadaan organ dan sound sistem serta pelatihan organis untuk lingkungan Solot, Desa Tebuk	lingkungan Solot, Desa Tebuk, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
23-04-2025	bantuan pengadaan organ dan sound sistem serta pelatihan organis untuk lingkungan Tebuk Desa Tebuk	lingkungan tebuk, Desa Tebuk, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
23-04-2025	bantuan pengadaan organ dan sound sistem serta pelatihan organis untuk lingkungan Rane Desa Tebuk	lingkungan Rane, Desa Tebuk, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
23-04-2025	bantuan pengadaan organ dan sound sistem serta pelatihan organis untuk lingkungan Blatat Desa Nita kloang	lingkungan blatat, Desa Nita Kloang, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
23-04-2025	bantuan pengadaan organ dan sound sistem serta pelatihan organisir untuk di lingkungan Siran Sina Desa Bloro	lingkungan Siran Sina, Desa Bloro, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
	SUFRIYANCE MERISON BOTU, S.S.					
27-03-2025	Lokasi yang ditentukan untuk pembangunan Pos Polisi berada di lahan yang cukup rawan terhadap longsor sehingga perlu ada penanganan preventif sebelum pembangunan dimulai berupa Penggusuran lahan dan pekerjaan turap pengaman area untuk pembangunan Pos Polisi di Nua Pero, Desa Detu Binga.	Kampung Nua Pero, Desa Detu Binga, Kecamatan Tanawawo, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Paket	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Belum tercukupinya penyediaan fasilitas Tenda dan Kursi untuk mendukung kegiatan rutin di lingkungan St. Yosef Pekerja di Desa Nitakloang dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi banyak orang seperti acara sosial, budaya, atau kegiatan darurat. Pengadaan Tenda Jadi 4 kotak dan Kursi Napoli 300 Unit untuk pelaksanaan kegiatan kerohanian di Lingkungan St. Yosef	Desa Nitakloang, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Kesulitan aksesibilitas terhadap permodalan menjadi pemicu peternak tidak bisa mengembangkan usahanya sehingga pemerintah perlu hadir untuk membangkitkan iklim usaha di kelompok-kelompok peternak. Pengadaan ternak ayam petelur (usia 16-17 Minggu/ siap bertelur) beserta kandang dan perlengkapannya untuk Kelompok Ternak ROMANTIS.	Dusun Rotat, Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Paket	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	Masih ada warga Kecamatan Nita yang tergolong tidak mampu kesulitan membangun rumah layak huni. Sehingga perlu ada kebijakan bantuan rumah layak huni kategori bangun baru/terima kunci. Kepala Keluarga Kurang Mampu penerima Bantuan : STEFANUS MOA, Alamat : Nitakloang, RT/RW: 001/ 001 Desa: Nitakloang; ALBERTUS MO'A, Alamat : Dusun Rotat, Desa Ladogahar; TADEUS TANA, Alamat : Dusun Rotat, Desa Ladogahar	Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3	Unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
27-03-2025	Banyak SDM punya keterampilan tapi tidak ditunjang dengan manajemen, modal dan konsep pemasaran yang bagus sehingga profit rendah. Karenanya akan lebih baik diawali dengan program Peningkatan kapasitas diikuti bantuan peralatan dan bahan untuk industri rumah tangga (usaha jualan kue dan jajanan) untuk Kelompok KEMBANG MAWAR Desa Nitakloang.	Desa Nitakloang, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Paket	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Masih ada warga masyarakat di Kecamatan Nita yang belum menggunakan sumber listrik dari PLN. Karenanya perlu diupayakan Bantuan Sambungan Rumah Listrik PLN untuk warga yang tergolong kurang mampu.	Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	35	KK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Daging babi memiliki permintaan yang tinggi, baik untuk konsumsi lokal maupun keperluan adat tradisi di Kabupaten Sikka. Bantuan ini akan mendorong peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Pengadaan Ternak Babi (1 ekor jantan dan 1 ekor betina	Desa Tebuk, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Paket	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
	untuk setiap anggota kelompok) untuk kelompok VICTORY di Desa Tebuk.					
27-03-2025	Dusun Munegajut hingga saat ini belum bisa mengakses jaringan listrik dari PLN sehingga perlu alternatif sumber listrik lainnya yang bisa dipakai masyarakat. Pengadaan Solar Cell (Listrik Tenaga Surya) untuk warga Dusun Munegajut menjadi alternatif sementara yang baik sembari menunggu ketersediaan jaringan PLN masuk ke daerah ini.	Dusun Munegajut, Desa Riit, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Paket	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Lapangan Futsal Gelora Samador yang kurang memadai sehingga perlu dilakukan rehabilitasi lapangan gelora Samador	Lapangan Futsal Gelora Samador, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
	STEFANUS SUMANDI, S.Fil.					
27-03-2025	Belum adanya rehap gedung SMPK Tana Nua di Desa Masabewa Kec. Paga	Desa Masabewa Kec. Paga , Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3	Ruang	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
27-03-2025	Masih banyak warga belum mendapatkan bantuan kelapa genja untuk petani di Desa Natakoli Kec. Mapitara	Desa Natakoli Kec. Mapitara, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1333	Pohon	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Belum adanya Hibah pembanguan Aula Paroki Renha Rosari Hale-Hebing di Desa Hebing Kec. Mapitara	Desa Hebing Kec. Mapitara , Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Unit	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	"Kerja sama penelitian budaya antara Baperida dengan IFTK Ledalero untuk pembuatan buku "Pancasila Perspektif Budaya Sikka"	Madawat Kecamatan Alok, Kab. Sikka	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1	Paket	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
27-03-2025	"Belum adanya pelatihan jasa usaha Catering dan pengadaan peralatan dapur untuk dua kelompok Di Desa Natakoli (Dusun Wolomotong dan Dusun Natakoli)	Di Desa Natakoli (Dusun Wolomotong dan Dusun Natakoli) , Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2	Kelompok	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	"Belum adanya pelatihan Budidaya Hortikultura dan Pengadaan sarana produksi Pertanian (Tomat, Lombok, Wortel dan Kentang) di Desa Natakoli Kec. Mapitara"	Di Desa Natakoli Kec. Mapitara , Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	4	Kelompok	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Belum adanya pelatihan dan pengadaan peralatan paska kerja Desain Grafis di Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur	Di Waioti Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Kelompok	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	"Belum adanya pelatihan Las Keterampilan orang mudah di LPK Karya Misi PT Langit Laut Biru di Kelurahan Kota Uneng Keamatan Alok	Di Kelurahan Kota Uneng Keamatan Al, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Kelompok	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	"Belum adanya pelatihan dan bantuan mesin rajang tembakau di Kampung Kolibuluk, Dusun Luah Desa Hoder, Kecamatan Waigete (Nama Kelompok " BANTENG LUAH")	Di Kampung Kolibuluk, Dusun Luah, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6	Unit	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	"Pelatihan dan bantuan peralatan mesin pengupas kopi di Dusun Umatawu Desa Natakoli, Kecamatan Mapitara (Nama Kelompok SUDAN SOGOR)"	Di Dusun Umatawu Desa Natakoli, Kecamatan Mapita, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Kelompok	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
23-04-2025	masih ada sekolah yang mengalami rusak berat maka perlu direhap ruang kelas SMP PGRI EGON di Desa Egon Kecamatan Waigete	Desa Egon Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3	ruang	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
27-03-2025	Hibah Pembangunan Gereja Stasi Santa Maria Perumnas	Perumnas, Kelurahan Madawat. Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
	Piet Christian Da Cunha					
27-03-2025	Hibah Pembangunan Lanjutan Rumah Doa	Samping Kantor Lurah Wairotang. Kelurahan Wairotang. Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Pengadaan Alat Musik Keybord untuk Kelompok Paduan Suara AD Mayorem Dei Gloriam Paroki Santo Thomas Morus	Paroki Santo Thomas Morus, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Unit	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
27-03-2025	Bantuan Portable Audio System untuk KGB Maria Bunda Kita	Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Unit	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Bantuan Portable Audio System untuk KGB Maria Bunda Yesus Lingkungan Gunung Karmel	Misir, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Unit	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Bantuan Portable Audio System untuk KGB Ina Ola Bohe Kasing	Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Unit	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Pembangunan Lapangan Serba Guna SMP Seminari Maria BSB (Olahraga)	Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
27-03-2025	Pengadaan Kursi dan Meja Sekolah bagi SDK Brai	Desa Watugong, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	100	Unit	Pengadaan Mebel Sekolah
27-03-2025	Pelatihan dan Bantuan Penyedian Tenda Jadi 4x6 Meter bagi Lingkungan Tuang Wuut	Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4	Unit	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Pelatihan dan Bantuan Penyedian Tenda Jadi 4x6 Meter bagi Lingkungan Centrum	Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2	Unit	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Pembuatan Drainase	Belakang SD 4 samping Toko Laris. Kelurahan Madawat. Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	150	Meter	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
27-03-2025	Pengadaan Gerobak Sampah Dorong	Kelurahan Kota Uneng. Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	Unit	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
27-03-2025	Pengadaan Gerobak Sampah Dorong	Kelurahan Kabor. Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	Unit	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
27-03-2025	Pengadaan Gerobak Sampah Dorong	Kelurahan Madawat. Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	Unit	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
27-03-2025	Peningkatan Jalan / Rabat Jalan Beton Lebar 2 M, Tebal 12 Cm, Bangunan Pelengkap 20%	Centrum RT.008 RW.002. Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	100	Meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Peningkatan Jalan / Rabat Jalan Beton Lebar 2 M, Tebal 12 Cm, Bangunan Pelengkap 20%	Lorong Veteran Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	50	Meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Peningkatan Jalan / Rabat Jalan Beton Lebar 3,5 M, Tebal 12 Cm, Bangunan Pelengkap 20%	Kompleks Biara Karmel RT.003 RW.010, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	100	Meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Peningkatan Jalan / Rabat Jalan Beton Lebar 2 M, Tebal 12 Cm, Bangunan Pelengkap 20%	RT.014 RW.005, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	150	Meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
	PETRUS WODA					
27-03-2025	Masih terdapat kelompok Peternak yang belum memiliki jenis ayam kampung. Oleh karenanya perlu diberikan bantuan	Desa Paga Kecamatan Paga, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Paket	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	Masyarakat membutuhkan bantuan Tenda Jadi dalam mendukung kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Desa Loke Kecamatan Tanawawo, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
27-03-2025	Masih terdapat kegiatan sosial kemasyarakatan yang meminjam kursi dari rumah warga. Oleh karenanya dibutuhkan bantuan kursi	Kecamatan Tanawawo, Desa Loke, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	150	Unit	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
27-03-2025	Orang Muda Katolik Stasi Lekuwoda, membutuhkan Tenda Jadi dalam mendukung kegiatan sosial keagamaan	Desa Lekuwoda Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Dalam mendukung kegiatan Orang Muda Katolik, diperlukan bantuan penujang berupa Sound System dan Keyboard	Kecamatan Magepanda Desa Lekuwoda, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Masih terdapatnya kegiatan Karang Taruna tidak memilki Sound System.	Karang Taruna Wodamude Desa Wodamude Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
27-03-2025	Masih terdapatnya Kelompok Pertania tidak memiliki bibit Holtikutura berupa; Tomat, Lombok dan Pepaya	Kelompok Tani Mego Maju Desa Bhera Kecamatan Mego, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Paket	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	MAsih terdapatnya kelompok pertaninan membutuhkan bantuan Holtikultura; Tomat, Lombok, Pepaya, Ketimun, Semangka	Kelompok Tani Nita Maju Desa Nita Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Paket	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Kelompok Pertaninan memberlukan antuan Holtikultura; Tomat, Lombok, Pepaya, Ketimun, Semangka	Kelompok Tani Bangkit Bersama Desa Nita Kloang Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Paket	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Masih terdapat rumah tidak huni di Pemukiman Warga	Desa Leguwoda Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	4	Paket	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
27-03-2025	Masih terdapat kelompok tani yang membutuhkan bantuan Handtraktor dan pendampingan teknis pengoperasionalnya	Kecamatan Magepanda Desa Leguwoda, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Paket	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
27-03-2025	Masih terdapat kelompok tani yang membutuhkan bantuan Handtraktor dan pendampingan teknis pengoperasionalnya	Desa Leguwoda Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Paket	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
27-03-2025	Kelompok Pertaninan belum memiliki bibit holtikultura berupa; Semangka dan Bawang	Desa Reroroja Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Paket	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Masih terdapat kelompok mebeler belum memiliki mesin pres kayu dan pelatihan teknis mengoperasionalkanya.	Kelompok Mebeler Dusun Koro Dusun Koro Desa Reroroja Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Paket	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Tidak adanya bibit Holtikultura; Bawang, Lombok, Tomat. Oleh karenanya perlu diberikan bantuan	Desa Wodamude Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Paket	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Masih terdapatya kelompok pertanian belum memiliki bibit Holtikultura berupa Tomat, Lombok dan Bawang	Desa Reroroja Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Paket	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Masih adanya rumah warga tidak memilki listrik. Oleh karenanya diperlukan bantuan Lampu Rumah Tenaga Surya; SOLARES	Dusun Magelo'o Desa Reroroja Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Paket	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Masih terdapatnya rumah warga tidak memilki listrik. Oleh sebab itu, diperlukan bantuan Lampu Rumah Tenaga Surya (SOLARES)	Dusun Duli Desa Leguwoda Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Paket	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Kelompok Pertanian membutuhkan bantuan Holtikultura; Sayur & Pepaya, Lombok	Desa Lepolima Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Paket	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Terdapat jalan di Pemukiman Warga rusak berat. Diperlukan pekerjaan Rabat	Dusun Woloboa A Desa Leguwoda Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Pake	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Terdapat jalan rabat dipemukiman warga Rusak Berat. Diperlukan pekerjaan Rehabiltasi Rabat	Dusun Woloboa B Desa Leguwoda Kecamatan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN	1	Paket	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
		Magepanda, Kab. Sikka	PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
27-03-2025	Masih adanya jalan tanah dipemukiman warga. Oleh karenanya, diperlukan pekerjaan Rabat	Dusun Woloba C Desa Leguwoda Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Paket	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Menyambungkan Akses Jalan untuk kedua Desa; Desa Dage Sime dan Desa Serolewalelu	Desa Reroroja Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	110	Meter	Pembangunan Jalan
27-03-2025	Terdapat jalan dipemukiman warga Rusak Berat. Diperlukan pekerjaan Rabat	Desa Leguwoda Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Paket	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Terdapat Taman Pendidikan Al - Alquran belum memilki anggaran untuk melaksanakan kegiatan. Diperlukan bantuan Anggaran	Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
27-03-2025	Terdapat jakan rabat yang ada Rusak Berat. Diperlukan rehabilitasi.	Perumnas; Melati 05 RT; 002/ RW; 001 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Paket	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
	Nurhayati Bonda,SPd					
27-03-2025	Bantuan kepada Masjid Al - Muhajirin Perumnas	Masjid Al Muhajirin Perumnas Kelurahan Madawat Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Terdapat rumah warga yang tergabung dalam kelompok, tidak memiliki bak penampung. Bantuan Profil Tank PVC; 1100 L	Kelompok Harapan Bahagia Kilometer Dua Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3	Paket	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Terdapat rumah warga belum memilki bak penampung,. Warga membentuk Kelompok untuk mengajukan bantuan Profil Tank PVC; 1100 L,	Kelompok Pemana Jaya Desa Pemana Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3	Unit	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Terdapat jalan dipemukiman warga Rusak Berat. Perlu direhabilitasi	Kota Uneng di RT;001 / RW; 004 Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Unit	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Masih adanya jalan rabat rusak di pemukiman warga Perlu direhabilitasi	Kota Uneng di RT: 005/ RW;002 Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Unit	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	MAsih adanya jalan rusak di pemukiman warga. Oleh karenanya perlu direhabilitasi	Kelurahan Kota Uneng di RT: 011/ RW;004 Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Unit	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Terdapat nelayan tidak memilki Coolbox Fiberglass 100 Liter. Oleh karenanya perlu diberikan bantuan	Kelompok Harapan Jaya Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	6	Paket	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	Masih adanya kelompok nelayan tidak memilki mesin ketinting untuk melaut. Oleh karena perlu diberikan Bantuan Mesin Disel 7 PK, kepada KUB Sinar Buton	KUB Sinar Buton Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	6	Unit	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	Diperlukan Bantuan Seperangkat Sound Sistem bagi Majelis Taklim Al Hidayah dalam mendukung kegiatan keagamaan	Majelis Taklim Al Hidayah Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Terdapat kekurangan fasilitas belajar berupa Laptop Azus bagi MIS Almuhajirin Perumnas. Oleh karenanya perlu diberikan bantuan	MIS Almuhajirin Perumnas Kelurahan Madawat Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5	Unit	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
27-03-2025	Terdapat kekurangan biaya pendidikan untuk melanjutkan Studi S2. Diperlukan bantuan Pendidikan S2	Kelurahan Madawat Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Orang	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Dibutuhan Pelatihan bagi UMKM dan bantuan Etalase bagi UMKM Al-Muhajirin Perumnas.	UMKM Al-Muhajirin Perumnas Kelurahan Madawat Kecamatan Alok , Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3	Unit	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Masih ada warga tidak memilki bank penampung air. Diperlukan Bantuan Profil Tank PVC 1110 Liter	Desa Parumaan Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3	Unit	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Masih adanya warga tidak memilki bak penampung. Oleh karena perlu diberikan bantuan Profil Tank PVC 1110 Liter	Kecamatan Alok Timur Desa Parumaan, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3	Unit	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Diperlukan Bantuan tenda jadi ukuran 4x6 untuk Masjid Nur Hidayah	Desa Parumaan Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	3	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Diperlukan Bantuan tenda jadi ukuran 4x6 untuk Masjid Baitusshodiq	Desa Parumaan Kecamatan Alok timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	2	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Masih adanya Sekolah tidak memilki Drumband. Diperlukan bantuan Drumband bagi Sekolah MTS Muhammadiyah Parumaan	MTS Muhammadiyah Parumaan Desa Parumaan Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
27-03-2025	Diperlukan Bantuan Sound Sistem bagi Ibu-Ibu Muslimat Darussalam Waioti	bu-Ibu Muslimat Darussalam Waioti Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Terdapat genangan air di Pemukiman Warga saat Musim Hujan. Diperlukan Pembangunan Sumur resapan	RT;13 / RW; 004 Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Paket	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Diperlukan bantuan Pendidikan untuk melanjutkan Studi S3	Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Orang	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
27-03-2025	Diperlukan Bantuan Mesin Disel 10 PK untuk KUB Bintang Laut,	KUB Bintang Laut Desa Koja Gete Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	3	Unit	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	Diperlukan pelatihan bagi UMKM dan bantuan etalase bagi kelompok UMKM	Kelurahan Madawat Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3	Unit	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Diperlukan Bantuan Kepada Muslimat Nahdlatul Ulama Beru	Muslimat Nahdlatul Ulama Beru Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Diperlukan bantuan mesin diesel 10 PK untuk KUB Kakap Merah	KUB Kakap Merah Desa Koja Doi Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	3	Paket	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	Terdapat Bangunan TK rusak. Perlu di rehabilitasi.	TK. Nurul Huda Bebeng Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
16-04-2025	Terbatasnya Ketersediaan Tempat Penampungan Air Untuk Kelompok Cahaya Nangahure	Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	11	Unit	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
	MARTHEN LUTHER ADJI, SE					
27-03-2025	Hibah pengadaan AC bagi Gereja Kristen Kalvari (GMIT)	Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Hibah Dana Cabor seperti: Futsal, Silat, Kempo, tenis meja, Tarung Drajat dan Taekwondo	Kelurahan Madawat	DINAS PENDIDIKAN DAN	1	Paket	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
		Kecamatan Alok, Kab. Sikka	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
27-03-2025	Bantuan rumah layak huni untuk keluarga tidak mampu	Kelurahan Waioti, Kota Baru, Kota Uneng, Wailiti dan Wuring, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	5	Unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
27-03-2025	Hibah Beasiswa untuk Mahasiswa kurang mampu	Kelurahan Waioti, Nangameting, Wairotang, Beru, Kota Baru, Wolomarang, Wailiti dan Wuring, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	20	orang	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
27-03-2025	Bantuan pemasangan meteran listrik bagi keluarga kurang mampu	Kelurahan Waioti, Nangameting, Wairotang, Beru, Kota Baru, Wolomarang, Wailiti dan Wuring, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	15	Unit	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Hibah kursi untuk Paguyuban Alor, sabu, Timor, Sumba dan Raijua	Kelurahan Waioti, Nangameting, Wairotang, Beru, Kota Baru, Wolomarang, Wailiti dan Wuring, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	5	Kelompok	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Belum tersedianya turap pengaman kali	Rt/Rw 012/002 Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	50	Mater	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
27-03-2025	Peningkatan rabat jalan di lorong Binter Kelurahan Kota Uneng	Rt/Rw 005/003 jln. Don juang, Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	50	Meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Peningkatan rabat jalan di Kelurahan Wailiti	Rt 018 Kelurahan Wailiti Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	100	Meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
	MARIA ANGELORUM MAYESTATIS					
27-03-2025	Bantuan stimulan rumah layak huni	Kelurahan Kabor kecamatan Alok, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
27-03-2025	Pengadaan garam kasar dan alat pembakar untuk kelompok petani garam	Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Paket	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Pengadaan ternak kambing untuk para peternak	Kecamatan Alok dan Alok Timur, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	5	Kelompok	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	Pengadaan ternak babi untuk masyarakat peternak	Kecamatan Alok dan Alok timur, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	5	Kelompok	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	pengadaan gerobak jualan untuk pedagang	Kecamatan Alok, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5	unit	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Pelatihan pembuatan pakan ternak dan pengadaan mesin pakan ternak	Kecamatan Alok, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Paket	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Pengadaan Mesin Press Batako	Kecamatan Alok, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	unit	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
27-03-2025	Rehabilitasi ruang kelas SMP Negeri Alok Timur	Kecamatan ALok Timur, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Ruang	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
27-03-2025	Pembebasan lahan untuk PAUD/TK SInar Watugong	Desa Watugong Kecamatan ALok Timur, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Bidang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
27-03-2025	Rehap atau perbaiki atap dan seng yang sudah rusak di SDI Madawat	Kelurahan Madawat Kecamatan Alok, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
27-03-2025	Pengadaan Drumband untuk SDK Brai dan SDK Maumere III	Kecamatan ALok dan Alok Timur, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2	Paket	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
27-03-2025	Pengadaan kapal motor fiber 5,5 meter lengkap mesin dan alat tangkap	Kecamatan Alok, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	1	Unit	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	Pengadaan Perahu sampan fiberglass 4 meter	Kecamatan Alok, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	3	Unit	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	Pembangunan MCK di SMPN ALok Barat	Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
27-03-2025	Pelatihan dan pengadaan benang dan obat obatan pewarna untuk kelpompok tenun ikat	Kecamatan Alok, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3	Kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Pengadaan kursi plastik untuk kegiatan kerohanian untuk lingkungan waioti 1 dan 2	Kelurahan Waioti kecamatan Alok, Kab. Sikka, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Hibah untuk pembangunan mesjid di Lebantour	Desa Kojadoi Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Hibah untuk kelpmpok kategorial gereja yakni Santa Ana St.Yohakim	Kecamatan Alok, Kab. Sikka, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Pembukaan Jalan baru jalan lingkungan	Kelurahaan Wuring kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Paket	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Belim adanya sarana MCK yang memadai di SMPN ALok sehingga perlu di bangun	Kecamatan Alok, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
25-04-2025	perlunya penguatan kompetensi dengan pelatiahan dan pengadaan mesin jahit untuk kelompok penjahit di wairotang	Wairotang-kelurahan wairotang kecamatan alok timur, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	Kelompok	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
25-04-2025	Perlunya pengadaan AC floor Standing untuk gereja Katedral	Gereja Katedral-kelurahan kota uneng, Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	2	unit	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
25-04-2025	Perlu pengadaan untuk soundsystem mic wireles untuk lingkungan kabor B1-kelurahan Kabor	lingkungan Kabor B1-kelurahan kabor- Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
	Lukas Lero					
27-03-2025	Belum terpenuhi ruang belajar siswa di SDI Blidit	Desa Egon Buluk Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Ruangan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
27-03-2025	Pembangunan perahu 5,5 m dilengkapi mesin dan alat tangkap	Desa Mahekelan Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	2	Unit	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	Rehabilitas jaringan air minum bersih dari sumber mata air Napun Hikot	Desa Egon, Egon buluk dan Mahekelan, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100	Meter	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
27-03-2025	Bantuan satu mesin perontok padi Merek Isoko	Desa Egon Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Unit	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Pelatihan dan penyediaan alat penyulingan moke	Desa Egon Kecamatan	DINAS PERDAGANGAN,	10	Paket	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
		Waigete, Kab. Sikka	PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Hibah rehab Kapela Stasi Kolit	Desa Kolit Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Unit	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Bantuan ternak kambing di Desa Runut, Egon, Nangatobong dan Wairterang	Desa Runut, Desa Egon, Desa Nangatobong dan Desa Wairterang, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	100	Ekor	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	Bantuan Handtraktor Merek G1000	Desa Runut Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Unit	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Bantuan bibit bawang merah lokal bagi kelompok tani di Egon Buluk	Desa Egon Buluk Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Ton	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Bantuan Tenda jadi dan kursi di desa Egon buluk	Desa Egon Buluk Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	Kotak	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
29-04-2025	belum adanya akses jalan sehingga perlu Pembukaan jalan baru Kontra-Wolomapa	egon buluk desa nangatobong - kecamatan waigete, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3	KM	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
	Leonard Winarto,SS.M.HUM					
27-03-2025	Bantuan Penyedian Tenda Jadi dan Kursi Plastik untuk Kelompok Keagamaan dan Pemuda	Desa Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	4	Kelompok	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Hibah Pembangunan Kapela Karakabu	Desa Karakabu, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Hibah PC Core i3 bagi Kampus Katolik Cristo Re	Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	5	Unit	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Pengadaan Kursi dan Meja Sekolah bagi SMPK Kimang Buleng	Desa Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	38	Set	Pengadaan Mebel Sekolah
27-03-2025	Rehabilitasi Bangunan Sekolah pada SDK Nita 1 (3 ruangan)	Desa Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3	Unit	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
27-03-2025	Bantuan Alat Musik Drumband untuk SD Inpres Manunai	Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
27-03-2025	Rehabilitasi Bangunan Sekolah pada SMPK Kimang Buleng (1 ruangan)	Desa Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Unit	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
27-03-2025	Bantuan Sarana Produksi Hortikultura Sayur-Sayuran (paket benih, pupuk, bokashi dan pestisida) per Ha	Kelompok Nita 1, Nita 2, Nita 3, Nita 4, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	4	Kelompok	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Bantuan Sarana Produksi Hortikultura Sayur-Sayuran (paket benih, pupuk, bokashi dan pestisida) per Ha	Kelompok Tani Detuara, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Kelompok	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Bantuan Sarana Produksi Hortikultura Sayur-Sayuran (paket benih, pupuk, bokashi dan pestisida) per Ha	Kelompok Tani Bukit Buleng, Desa Riit, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Kelompok	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Bantuan Sarana Produksi Hortikultura Sayur-Sayuran (paket benih, pupuk, bokashi dan pestisida) per Ha	Kelompok Tani Horin Koting, Desa Karakabu, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Kelompok	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Pengadaan Bibit Alpukat	Kelompok Tani Alpukat Bloro, Desa Bloro, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Kelompok	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Bantuan Ternak Anak Babi 3 Bulan	Kelompok Solot Indah, Desa Tebuk, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Kelompok	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
27-03-2025	Bantuan Ternak Anak Babi 3 Bulan	Kelompok Blatat Jaya, Desa Nitakloang, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Kelompok	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	Pengadaan Pupuk bagi Petani Sawah	Kelompok Tani Tanangalu 1 dan Tanangalu 2, Desa Masabewa, Kecamatan Paga, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	2	Kelompok	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
27-03-2025	Peningkatan Jalan / Rabat Jalan Beton Lebar 2 M, Tebal 12 Cm, Bangunan Pelengkap 20%	Desa Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	100	Meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Peningkatan Kualitas Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2	Unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
27-03-2025	Pembangunan / Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Sepanjang jalan kabupaten Desa Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERHUBUNGAN	15	Unit	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
27-03-2025	Bantuan Cool Box 220 Liter Plastik HDPE Merek Tanaga untuk Pengawetan Ikan	Desa Paga, Kecamatan Paga, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	5	Unit	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	Bantuan Cool Box 220 Liter Plastik HDPE Merek Tanaga untuk Pengawetan Ikan	Desa Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	5	Unit	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	Bantuan Cool Box 220 Liter Plastik HDPE Merek Tanaga untuk Pengawetan Ikan	Desa Korobhera, Kecamatan Mego, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	5	Unit	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	Bantuan Benang, Obat Celup dan Perlengkapan Lainnya untuk Kelompok Tenun Ikat	Kelompok Ikat Dua Nita, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Pelatihan dan Bantuan Alat Cukur Rambut dan Perlengkapannya	Kelompok Mr. Cool, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Kelompok	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Pelatihan dan Bantuan Alat Pertukangan Kayu dan Batu	Kelompok Mahkota, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Kelompok	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Pelatihan dan Bantuan Alat Bengkel Motor	Bengkel Aldo Nita, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Kelompok	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Pelatihan dan Bantuan 3 Unit Alat Mesin Jahit Portable	Kelompok Wanita Kreatif, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Kelompok	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	HYGINUS CLAUDIUS DAGA					
27-03-2025	Perlu adanya Bantuan Pagar Gereja Stasi Yohanes Pemandi Patisomba	Kelurahan Wuring Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Perlu adanya Pembangunan Pagar Pembatas SMP Negeri 3 Maumere	Kelurahan Wuring Kecamatan Alok Barat , Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
27-03-2025	Belum adanya pagar pengaman Perlu adanya pagar pengaman pada PAUD Cinta Anak	Kelurahan Wuring kecamatan Alok Barat , Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
27-03-2025	Perlu pembangunan Drainase di wilayah watuturan (musim Hujan Air meluap kejalan)	Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat , Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	150	Meter	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
27-03-2025	Perlu adanya Pembangunan Pagar Pembatas di SD Belang (belum ada pagar pembatas sekolah)	Kelurahan Wailiti kecamatan Alok Barat , Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
27-03-2025	Perlu Adany Bantuan Rabat Jalan Dilorong Bayu rabat 400 meter lebar 3	Kelurahan Wailiti Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN	1	Paket	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
			PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
27-03-2025	Perlu Ada Bantuan Handtraktor dan Alat Semprot di Kelompok Sinar Tani	Kelurahan Wailiti kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Paket	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
27-03-2025	Belum adanya Pagar Pembatas SDN Pemana	Desa Pemana Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
27-03-2025	Perlu Adanya Bantuan pembebasan Lahan untuk Pembangunan Mushola di Nangahure Lembah	Kelurahan Wuring Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Bidang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
27-03-2025	Umat Membutuhkan Bantuan pengadaan bangku gereja dan tempat berlutut (Kapela Pomat)	Kelurahan Wailiti Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	20	Unit	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
23-04-2025	Perlu adanya Bantuan Laptop Untuk SD Belang	Kelurahan Wuring Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2	Buah	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
	HERLINDIS DONATHA DA RATO, S.SIT.					
27-03-2025	Pagelaran Seni Tari Budaya Sikka (Sanggar Seni Budaya) di Desa Lela dan Desa Sikka	Desa Lela Kecamatan Lela dan Desa Sikka Kecamatan Lela, Kab. Sikka	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2	Kelompok	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
27-03-2025	Hibah peningkatan pembangunan Sarana Ibadah Taman Doa untuk kelompok Umat Basis di Dusun Waturepa Desa Lela dan Desa Nelle Lorang	Desa Lela Kecamatan Lela dan Desa Nelle Lorang Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	2	Kelompok	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Hibah Rehab Gereja tua Sikka	Desa Sikka Kecamatan Lela, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Unit	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Hibah pengembangan Kapela Stasi di Desa Du dan Desa Wukur	Desa Du Kecamatan Lela dan Desa Wukur Kecamatan Lela, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Unit	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Pengadaan Crome book di SDK Du dan SDK Habi	Desa Du Kecamatan lela dan Desa Habi Kecamatan Kangae, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2	Paket	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
27-03-2025	Pengadaan Crome book untuk SDI Arat dan SDK Koting	Desa Koting B dan Desa Koting C Kecamatan Koting, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2	Paket	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
27-03-2025	Pembangunan baru Ruang Guru SDK Lela II	Desa Lela Kecamatan Lela, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Unit	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
27-03-2025	Pengembangan sarana Doa Gua Maria di Desa Koting B	Desa Koting B Kecamatan Koting, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Unit	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Festival budaya seni tari tradisional Se-Kecamatan lela	Desa Lela Kecamatan Lela, Kab. Sikka	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1	Kegiatan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
27-03-2025	Usaha ternak DOC ayam Yoper	Desa Geliting Kecamatan Kewapante, Desa Kojadoi Kecamatan Alok Timur dan Desa Koting B Kecamatan Koting, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	3	Paket	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	Belum tersedianya rumah layak huni	Desa Korowuwu, Desa Hepang dan Desa Lela Kecamatan Lela, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	5	Unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
27-03-2025	Usaha ternak DOC ayam Yoper	Desa Nelle wutung dan Koting D, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	2	Desa	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	Belum tersedianya POS PAUD di Desa Watutedang	Desa Watutedang Kecamatan Lela, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN	1	Unit	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
			PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN			oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
24-04-2025	Bantuan Perlatan tukang kayu dan tukang batu	Desa Watutedang Kecamatan Lela, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4	Paket	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
24-04-2025	Bantuan peralatan menjahit dan peralatan paska menjahit	Desa Korowuwu dan Lela, Kecamatan Lela, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4	Paket	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	Heriawan					
27-03-2025	koondisi jalan yang rusak sehingga perlu peningkatan jalan rabat lingkungan RT.019, RW.009	RT.019, RW.009, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	120	meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	kurangnya alat tangkap ikan rumpon laut dangkal untuk 2 kelompok di Desa Gunuung Sari dan 3 kelompok di deasa Pemana, pengadaan berupa bahan pembuatan rumpon (tali, gabus, pemberat/semen dll)	Desa Gunung Sari dan Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	1	paket	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	masyarakat nelayan mengalami kekurangan cool box untuk pengawetan ikan ukuran 120 liter sehingga perlu bantuan cool box untuk masyarakat nelayan	Desa Pemana Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	50	unit	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	seng masyarakat pesisir banyak rusak parah sebagai akibat korosi air laut sehingga perlu bantuan seng untuk memperbaiki kondisi bangunan yang rentan hancur akibat korosi air laut di wilayah kepulauan untuk Desa Pemana dan Desa Gunung Sari	Desa apemana dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	750	lembar	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
27-03-2025	masih ada kekurangan mebeler sekolah berupa meja kursi siswa di MIN 2 sikka dalam rangka menunjang belajar siswa maka perlu bantuan mebeler untuk rasa kenyamanan siswa dalam proses belajar di sekolah	Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	paket	Pengadaan Mebel Sekolah
27-03-2025	belum ada granit untuk lantai Masjid AT-TAQWA Gunung Sari sehingga perlu bantuan berupa pengadaan Granit lantai ukuran 60x60	Desa Gunuung Sari, Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	kondisi jalan yang rusak sangat mempengarui akses masyarakat maka perlu bantuan pembangunan rabat jalan lingkungan di Kelurahan kota uneng di RT.004, RW.004	RT.004 / RW.004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	100	meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	drainase yang ada rusak berat sehingga perlu rehab dan pembangunan drainase dilingkungan RT.001 / RW.002, Kelurahan Kota Uneng	RT.001/RW.002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	paket	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	masyarakat belum memiliki tanki semprot/Handspayer karena itu perlu bantuan pengadaan alat semprot untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian di Desa Pemana, Desa gunung Sari dan Desa Semparong, Desa Koja Doi	Desa Pemana, Desa Gunung Sari, Desa Semparong di Kecamatan alok dan Desa Koja Doi di Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	paket	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
27-03-2025	kondisi jalan yang rusak dan berlubang sehingga perlu peningkatan jalan Rabat lingkungan RT.001/RW.004	RT.001/RW.004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	100	meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	POS PAUD belum memiliki LAPTOP guna meningkatkan kegiatan belajar mengajar dan system pelaporan POS PAUD BAMBINO maka diperlukan bantuan pengadaan sebuah sebuah LAPTOP	Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	unit	Pengadaan Perlengkapan PAUD
27-03-2025	Belum memiliki peralatan untuk usaha jualan jajanan kecil untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Perlu bantuan pelatihan dan pengadaan peralatan usaha jualan jajanan kecil yakni: 1. Minuman POP ICE, JUS d KUE. 1 unit Kontainer, jualan. 1 unut kompor Gas, 1 unut tabung gas, 2 unit meja jualan, 10 unit kursi plastic, toples kue, 1 unitmesin press minuman 1 unit Blender, 2 unit Galon, bahan-bahan pembuatan Jus, 2 lusin peralatan makan minuman.	RT.036/RW.011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	paket	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Belum memiliki keterampilan dan peralatan untuk usaha jualan jajanan kecil untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Perlu bantuan pelatihan dan pengadaan peralatan	RT.036/RW.011. Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,	1	paket	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
	usaha jualan jajanan kecil yakni: Makanan dan jualan kantin. unit meja Panjang atasan keramik, 2 unut meja pendek atasan keramik, 4 unit bangku Panjang, 10 unit kursi plastic, 1 unit kompor Gas, 1 unit tabung Gas, 2 lusin peralatan makan minum, 1 unit etalase, bahan-bahan untuk jualan. (Kelompok DENMARK)		USAHA KECIL DAN MENENGAH			
27-03-2025	Belum memiliki keterampilan dan peralatan untuk usaha jualan jajanan kecil untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Perlu bantuan pelatihan dan pengadaan peralatan usaha jualan jajanan kecil yakni: Membutuhkan pelatihan da bantuan peralatan usaha jualan kopi dan warung makan: 1 unit gerobak, jualan, 1 unit kompor gas, 1 unit tabung gas, 4 unit meja pendek, , atasan keramik, 16 unit kursi plastic, 2 lusin peralatan makan minum, bahan-baan jualan (DENMARK)	RT.036/RW.011. Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	paket	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	belum memiliki tenda jadi sehingga perlu bantuan pengadaan tenda jadi untuk di Desa Pemana dan Desa Gunung Sari sebagai peluang kelompok untuk pengembangan usaha kelompok sehingga selain sebagai peningkatan ekonomi kelompok dan juga bisa meringankan biaya bagi masyarakat.	Desa Pemana dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	unit	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	kelompok masyarakat UMKM belum memiliki kursi untuk pemberdayaan dan peningkatan usaha kelompoknya karena itu perlu pengadaan kursi merek Napoli untuk sewa pake sehingga dapat meningkatkan ekonomi kelompok masyarakat	Desa Pemana dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	500	buah	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	belum memiliki Depot air minum untuk pelayanan terdekat kepada masyarakat, karena itu perlu pengadaan depot air minum untuk pengembangan usaha kelompok masyarakat UMKM kelompok NAFIRI Napunglangir di RT.001 / RW.008, Kelurahan Wolomarang sebagai pemberdayaan dan peningkatan usaha kelompok UMKM NAFIRI Napunglangir	Napunglangir RT.001 / RW.008, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	paket	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
23-04-2025	belum adanya pembangunan Musolla Min 1 Sikka, karena itu perlu bantuan pembangunan Musolla untuk mendukung kegiatan Rohani siswa-siswidan juga umat sekitar dalam beribadah	Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.					
27-03-2025	Pelatihan dan pengadaan peralatan pertukangan kayu	Kecamatan Kangae, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2	Kelompok	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Pelatihan dan pengadaan peralatan pertukangan batu	Kecamatan Kewapante, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	Kelompok	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Pelatihan dan pengadaan peralatan pertukangan kayu	Kecamatan Kewapante, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2	Kelompok	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Pelatihan dan pengadaan peralatan pertukangan batu	Kecamatan Kangae, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	Kelompok	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Pengadaan peralatan pembuatan kue	Kecamatan Kewapante, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3	Kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Pengadaan peralatan pembuatan kue	Kecamatan Hewokloang, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2	Kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Pengadaan gerobak jualan untuk pedagang	Kecamatan Kewapante, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3	Unit	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Pengadaan gerobak jualan untuk pedagang	Kecamatan Kangae, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN	3	Unit	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
			DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Pengadaan soundsystem spiker mike wireless komplit untuk Lingkungan,OMK dan Kelompok Doa	Kecamatan Kewapante, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	4	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Pengadaan soundsystem spiker mike wireless komplit untuk Lingkungan,OMK dan Kelompok Doa	Kecamatan Kangae, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	4	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Pengadaan soundsystem spiker mike wireless komplit untuk Lingkungan,OMK dan Kelompok Doa	Kecamatan Hewokloang, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	2	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Pengadaan lampu penerangan jalan di Lorong Hotel Sea Word Waiara	Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kab. Sikka	DINAS PERHUBUNGAN	1	Paket	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
27-03-2025	Pembangunan Pagar sekolah SMP Negri 1 Kewapante	Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
27-03-2025	Bantuan stimulan pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu	Kecamatan Kewapante, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	5	Unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
27-03-2025	Bantuan stimulan pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu	Kecamatan Kangae, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	5	Unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
27-03-2025	Bantuan stimulan pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu	Kecamatan Hewokloang, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3	Unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
27-03-2025	Pemasangan sambungan Listrik PLN untuk keluarga berpenghasilan rendah	Kecamatan Kewapante, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	15	SR	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Pemasangan sambungan Listrik PLN untuk keluarga berpenghasilan rendah	Kecamatan Kangae, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	15	SR	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Pemasangan sambungan Listrik PLN untuk keluarga berpenghasilan rendah	Kecamatan Hewokloang, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	7	SR	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	pelatihan dan penyediaan benang dan obat obatan pewarrna untuk kelompok tenun ikat	Kecamatan Kangae, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4	Kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	pelatihan dan penyediaan benang dan obat obatan pewarrna untuk kelompok tenun ikat	Kecamatan Koting, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2	Kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	pelatihan dan penyediaan benang dan obat obatan pewarrna untuk kelompok tenun ikat	Kecamatan Kewapante, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5	Kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Bangunan dan perlengkapan Pustu Bei Yang Tidak Memadai sehingga perlu di rehabilitasi	Desa Blatatatin, Kecamatan Kangae, Kab. Sikka	DINAS KESEHATAN	1	Paket	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
27-03-2025	Puskesmas belum ada pagar sehingga tidak nyaman,masyarakat sekitar sering mengikat ternak di halaman Puskesmas sehingga perlu di bangun pagar pengaman	Kecamatan Kewapante, Kab. Sikka	DINAS KESEHATAN	1	Paket	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
27-03-2025	pelatihan dan penyediaan benang dan obat obatan pewarrna untuk kelompok tenun	Hewokloang, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2	Kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
23-04-2025	Pengadaan peralatan pembuatan kue	Kecamatan Kangae, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Paket	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
01-05-2025	Masih Kurangnya Sarana Pendukung Petanian untuk Petani di Desa Egon Buluk Perlu Pengadaan Handtraktor lengkap	Desa Egon Buluk, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	2	Unit	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
01-05-2025	Sering Terjadi Longsor yang mengakibat Pundasi Bangunan mengalami Kerusakan sehingga Perlu di bangun Turap Pengaman Sekolah untuk SDN Wegok	SDN Wegok, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	FRANSISKUS STEPHANUS SAY, S.E.					
27-03-2025	Banyak warga yang berdomisili di sepanjang pesisir Pantai Watukrus atap rumahnya mengalami korosi berat. Kondisi ini perlu didukung melalui pengadaan Seng gelombang BJLS 0,20 untuk Rumah Tangga Miskin sehingga bisa menjadi rumah yang lebih layak dihuni.	Dusun Baluk, Desa Watukrus, Kecamatan Bola, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	4000	Lembar	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
27-03-2025	Kondisi atap dan plafon ruang kelas di SDK Doreng saat ini rusak berat dan sangat tidak mendukung kenyamanan siswa dan guru saat proses KBM berlangsung karena rusak berat pasca erupsi Gunung Lewotobi dan musim hujan.	SDK Doreng Dusun Nenbura RT.013/RW.005 Desa Nenbura, Kecamatan Doreng, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2	Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
27-03-2025	Infrastruktur jalan yang belum memadai pada ruas Dusun Wolonbetan menuju Dusun Borablupur memperlambat distribusi barang dan jasa, sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan sosial masyarakat. Sehingga dibutuhkan Peningkatan Kualitas Jalan (Rabat) di ruas ini sehingga meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.	Dusun Borablupur, Desa Burabekor, Kecamatan Bola, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	250	M^2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Gelombang dan arus laut yang keras menyebabkan banyak rumpon nelayan di pantai selatan yang terlepas atau putus karena kualitas tali pengikat yang sudah tidak kuat. Sehingga dibutuhkan pengadaan Tali Rafia Asli Mandar 18 mm bagi kelompok nelayan pemilk rumpon di Desa Watukrus.	Desa Watukrus, Kecamatan Bola, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	2500	Kg	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	Pemerintah mendukung dan mefasilitasi ketersediaan SDM yang memiliki keterampilan khusus untuk dilatih, didampingi dan dikembangkan menjadi lapangan pekerjaan baru yang potensial menyerap tenaga kerja baru. Dalam hal ini pelatihan las tenda jadi dan bantuan peralatan kerja untuk kelompok Karang Taruna di Dusun Wololora.	Dusun Wololora, Desa Umauta, Kecamatan Bola, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Kelompok	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Infrastruktur jalan lingkungan di Dusun Ili Leku yang belum memadai memperlambat distribusi barang dan jasa, sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan sosial masyarakat. Peningkatan kualitas jalan (Rabat) yang baik akan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat lebih aman dan nyaman.	Dusun Ili Leku, Desa Wolonwalu, Kecamatan Bola, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	150	M^2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Pemerintah mendukung dan memfasilitasi SDM yang memiliki keterampilan khusus untuk dilatih dan dikembangkan menjadi lapangan pekerjaan baru melalui pelatihan dan pengadaan bahan-bahan Fiberglass untuk pembuatan bak penampung air oleh kelompok kerja mandiri di Desa Watukrus.	Dusun Baluk, Desa Watukrus, Kecamatan Bola, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4	Paket	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
23-04-2025	Infrastruktur jalan lingkungan di Dusun Diret menuju Klakat di Desa Wolokoli yang belum memadai memperlambat distribusi barang dan jasa, sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan sosial masyarakat. Peningkatan kualitas jalan (Rabat) yang baik akan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat lebih aman dan nyaman.	Dusun Klakat, Desa Wolokoli, Kecamatan Bola, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	150	M	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
	FRANSISKUS SIKU PARERA					
27-03-2025	Pembangunan Pagar SDK Bokang	Desa Lewomada, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
			KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
27-03-2025	sudah tersedianya sumur Bor namun belum bisa dialirkan ke rumah warga sehingga dibutuhkan pengadaan pipa air minum model plastik warna hitam	Desa mamai dan Desa Bangkoor, Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Paket	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Pengadaan Kapal fiber 2GT dengan mesin 120PS lengkap alat tangkap	Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	1	Unit	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	Pengadaan mesin Rontok padi	Desa bangkoor, Desa Dara Gunung, Desa Watubaing kecamatan Talibura, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	10	Unit	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Pengadaan alat semprot tanaman lengkap tangki	Desa Bangkoor,Darat Gunung dan Watubaing Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	20	Unit	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
	FABIANUS TOA					
27-03-2025	Kondisi jalan lingkungan yang menghubungkan Biara Mater Scapularis menuju Jalan raya Wairklau - Nilo hanya berlapis tanah sehingga sangat menghambat mobilitas warga dan lebih beresiko pada musim hujan. Perlu ada peningkatan kualitas jalan (Rabat) untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.	RT.02/RW.03 Dusun Kojatada, Desa Wuliwutik, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	250	M^2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Lapangan Upacara di SDN Wuring menjadi area genangan air pada musim hujan sehingga tidak bisa digunakan juga mengganggu kenyamanan proses KBM di kelas sehari-hari karena abu yang ditimbulkan. Mengatasi ini diperlukan penataan kembali lapangan upacara tersebut dengan pemasangan paving block.	SDN Wuring Nangahure, RT.012/RW.003 Kelurahan Wuring, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	750	M^2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
27-03-2025	Ketidakmampuan modal kelompok mendapatkan sarana pra sarana kerja yang berkualitas untuk menunjang kinerjanya sehingga produktivitas kelompok kewirausahaan di Kelurahan Beru menurun. Sarana kerja utama yang dibutuhkan berupa Generator 60 KVA sebagai penunjang operasional kerja.	Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Unit	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Kondisi meubelair yang ada di SDN Watuwitir saat ini sudah banyak yang rusak termakan usia dan dalam kondisi tidak nyaman digunakan oleh siswa dan guru sehingga perlu ada pengadaan baru.	SDN Watuwitir Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	100	Set	Pengadaan Mebel Sekolah
27-03-2025	Banyak SDM punya keterampilan tapi tidak ditunjang dengan manajemen, modal dan konsep pemasaran yang bagus sehingga profit rendah. Berkaitan dengan masalah ini diperlukan peningkatan Kapasitas dan Bantuan Peralatan bagi kelompok Perempuan pengrajin kue di Kelurahan Beru.	Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Banyak SDM punya keterampilan tapi tidak ditunjang dengan manajemen, modal dan konsep pemasaran yang bagus sehingga profit rendah. Berkaitan dengan masalah ini diperlukan peningkatan Kapasitas dan Bantuan Peralatan bagi kelompok Perempuan Pengelolah Cathering Prasmanan di Kelurahan Beru.	Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2	Kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Masih ada rumah warga di perkotaan yang belum memenuhi standar layak untuk rumah sehat. Terhadap ini perlu diupayakan Rehab Sedang terutama untuk Rumah Warga Kurang Mampu di Kecamatan Alok Timur.	Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2	Unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
27-03-2025	Masih banyak kelompok-kelompok pengrajin tenun ikat yang tidak melihat peluang tenun ikat sebagai salah satu penunjang ekonomi rumah tangga sehingga diproduksi dalam skala kecil untuk kebutuhan domestik saja. Guna memicu produktivitas lebih para pengrajin ini harus dibantu benang (kapa) untuk kelompok-kelompok pengrajin tenun ikat.	Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	800	Kg	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Ruas jalan Banteng di Kelurahan Madawat RT.01/RW.01 berada di pemukiman kota yang cukup padat dengan intensitas mobilisasi	RT.01/RW.01 (menuju rumah alm. Papache)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN	1	Paket	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
	warga cukup tinggi sehingga perlu peningkatan kualitas yang lebih baik guna meningkatkan kenyamanan pengguna jalan.	Kelurahan Madawat, Kab. Sikka	PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
27-03-2025	Tim sepakbola BUTENK FC sebagai salah satu kelompok pengembangan bakat, mental dan pembinaan karakter kaum muda remaja saat ini tidak memiliki fasilitas/peralatan pembinaan olahraga yang memadai dan menunjang.	Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Set	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
	DARIUS EVENSIUS, S.Sos.					
27-03-2025	"Belum adanya turab pengaman dan rabat jalan lingkungan	Nelle Wutung Dusun Tadalado, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	100	Meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	"Belum adnya Rabat jalan di samping Desa Watuliwung ke Habiheret"	Di Desa Watuliwung Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	125	Meter	Pembangunan Jalan
27-03-2025	"Bantuan tenda jadi 5 Kotak dan 250buah kursi plastik untuk 1 kelompok di Wetak Desa Langir Kecamatan Kangae "	Wetak Desa Langir Kecamatan Kangae, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	Paket	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	"Belum adanya bntuan tenda jadi 5 kotak dan 250 buah kursi plastik untuk 1 kelompok di Desa Watuliwung Kecamatan Kangae"	Desa Watuliwung Kecamatan Kangae, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	Paket	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	"Belum adanya bantuan peralatan mesin permebelan untuk 1 kelompok di Desa Habi Kecamatan Kangae"	Desa Habi Kecamatan Kangae, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Paket	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	"Masih Kurangnya bantuan kursi dan meja siswa untuk SMP Bank Saller Hewokloang di Desa Wolomapa Kecamatan Hewokloang	Desa Wolomapa Kecamatan Hewokloang, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	100	Buah	Pengadaan Mebel Sekolah
27-03-2025	"Pelatihan dan pengadaan ternak ayam kampung untuk 1 kelompok di Desa Nele Wutung Kecamatan Nelle " , Kab. Sikka	Desa Nele Wutung Kecamatan Nelle "	DINAS PERTANIAN	1	Kelompok	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	"Pelatihan dan pengadaan ternak ayam kampung untuk 1 kelompok di Desa Lela Kecamatan Lela " , Kab. Sikka	Desa Lela Kecamatan Lela	DINAS PERTANIAN	1	Kelompok	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	"Pelatihan dan bantuan ternak ayam kampung untuk 1 kelompok di Desa Wolomapa Kecamatan Hewokloang "	Desa Wolomapa Kecamatan Hewokloang, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Kelompok	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	Pelatihan dan Pengadaan ternak ayam kampung untuk 1 kelompo di Desa Koting B Kecamatan Koting	Desa Koting B Kecamatan Koting, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Kelompok	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	"Pengadaan ternak ayam kampung untuk 1 kelompok di Desa Umagera Kecamatan Kewapante	Desa Umagera Kecamatan Kewapante, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Kelompok	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	Pelatihan dan Pengadaan modal usaha Ubi Keripik Untuk 1 kelompok di Desa Nelle Wutung Kecamatan Nelle	Desa Nelle Wutung Kecamatan Nelle , Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	"Pengadaan Tanah untuk kuburan umum bagi masyarakat Kecamatan Nelle di Desa Nelle Wutung	Desa Nelle Wutung Kecamatan Nelle , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
27-03-2025	"Pelatihan dan Pengadaan bibit bawang merah bagi petani di Desa Watuliwung Kecamatan Kangae	Desa Watuliwung Kecamatan Kangae , Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Kelompok	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	"Pelatihan untuk usaha depot air minum bersih di Desa Nelle Urung Kecamatan Nelle	Desa Nelle Urung Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Kelompok	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	"Bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu (20 orang di Desa Nele Wutung dan Nele Lorang Kec. Nelle)	Desa Nele Wutung dan Nele Lorang Kec. Nelle, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	20	Orang	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
	CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE					

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
27-03-2025	Perlu bantuan Plat Deker /Jembatan di Ijunatar (Masyarakat Masih Menggunakan Jembatan Bambu)	Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat , Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100	M3	Pembangunan Jembatan
27-03-2025	Perlu Pengadaan bantuan Hantraktor dan alat semprot DI Kelompok Tani Tajir Ijunatar	Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat , Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Paket	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
27-03-2025	Perlu bantuan Furniture (meja, kursi, dll)	Kelurahan Madawat Kecamatan Alok , Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Pengadaan Perlengkapan PAUD
27-03-2025	Perlu Bantuan Kursi untuk lingkungan 10 St.Asisi Centrum	Kelurahan Nangameting , Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	200	Buah	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Perlu Bantuan Keyboard umat di lingkungan Fransiskus de Sales	Kelurahan Kota Baru, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Buah	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Bantuan Beasiswa Bagi 10 orang	Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	11	Orang	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
27-03-2025	Perlu Peningakatan rabat j di Jalan Garuda 300 Meter	Kelurahan Kota Baru, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Paket	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Pelatihan tenun ikat untuk kelompok 4 desa watugong	Desa Watugong, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4	Kelompok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Perlu Bantuan Lampu Jalan di Jln. M.S Sadipun Gang Bougenville (Belum Ada Lampu Jalan)	kelurahan Beru, Kab. Sikka	DINAS PERHUBUNGAN	50	Unit	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
27-03-2025	Perlu Pembuatan Pagar sekolah SD Iligetang (sebagian Belum ada Pagar Pembatas)	Kelurahan Beru, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
29-04-2025	Belum adanya keyboard untuk lingkungan 18 st. Markus Paroki Thomas Morus	Lingkungan 18 St. Markus Paroki Thomas Morus Kecamatan ALok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
	BENEDIKTUS LUKAS RAJA, S.E.					
27-03-2025	"Hibah untuk (pembangunan candi Gereja) Stasi Magetake Dusun Magetake Desa Korobhera Kecamatan Mego "	Dusun Magetake Desa Korobhera Kecamatan Mego , Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Unit	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	"Hibah untuk Gereja Paroki St. Yohanes Maria Vianey Magepanda di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda (Untuk pembangunan Aula Paroki) di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda"	Desa Magepanda Kecamatan Magepanda , Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Unit	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	"Belum adanya pembebasan lahan untuk pembangunan gedung sekolah SDN 191 Tanawawo di Desa Tuwa Kecamatan Tanawawo"	Desa Tuwa Kecamatan Tanawawo, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Unit	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
27-03-2025	"Untuk mendukung kegiatan Kepemudan dan Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi GMNI Sikka "	Kelurahan Nangameting Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	"Untuk mendukung kegiatan anak-anak SDI Ladubewa dalam hal pengembangan bakat pada olahraga fudzal dan Bolla Volley) maka dibangun lapangan multi fungsi "	Desa Done Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
27-03-2025	"Pengadaan laptop untuk Guru Paud di wilayah kecamatan Magepnda, Paga dan Mego untuk menunjang kegiatan Administrasi dan penyelenggaran pendidikan di tingkat lembaga Pendidikan Anak Usia Dini	DiDesa Wolowiro, Bhera dan Reroroja Kecamatan Paga, Mego dan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	Unit	Pengadaan Perlengkapan PAUD
27-03-2025	"Hibah Untuk Yayasan Daarul Amiin Maumere untuk menunjang kegiatan Yayasan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan di Kabupaten Sikka	Di Desa Reroroja Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	"Pengadaan Drumband dan Kostum Drumband untuk SMPK Maria Immaculata Magepanda untuk menunjang pengembangan minat dan bakat anak_anak SMPK Maria Immaculata Magepanda	Di Desa Wodamude Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
27-03-2025	Hibah Untuk mendukung kegiatan kepemudaan produktif sosial kemasyarakatan untuk Yayasan Indonesia Bisa di Desa Bhera Keamatan Mego	Desa Bhera Keamatan Mego, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Kelompok	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
23-04-2025	Masih kuragnya pengadaan handtraktor untuk Kelompok tani di Kecamatan Magepanda dan Kecamatan mego	Magepanda, Woda Mude, Done, Korobhera, Kolisia, Kolisia Bdan Desa Leguwoda di Kecamatan Magepanda dan Kecamatan mego, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	10	Unit	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
	Beatus Wilfridus Djogo					
27-03-2025	Pengadaan mesin Jiandong 24 PK untuk membantu nelayan atau petani dalam meningkatkan produktivitas kerja mereka	kecamatan magepanda desa waturia, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	3	unit	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	Pengadaan mesin Jiandong 5 PK untuk membantu nelayan atau petani dalam meningkatkan produktivitas kerja merek	Kecamatan Magepanda desa waturia, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	2	unit	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	Bantuan pemasangan penerangan jalan umum bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan warga, terutama pada malam hari. Dengan adanya penerangan yang memadai, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan dan kriminalitas di lingkungan sekitar,	Kecamatan Nita (semua desa), Kab. Sikka , Kab. Sikka	DINAS PERHUBUNGAN	1	Paket	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
27-03-2025	Bantuan hand traktor Kubota untuk kelompok tani Tani Kojalaka agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mempercepat proses pengolahan lahan.	Kecamatan Nita desa Tilang, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	Paket	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
27-03-2025	Bantuan stimulan rumah tak layak huni sebagai upaya untuk memberikan tempat tinggal yang lebih layak bagi masyarakat yang masih tinggal dalam kondisi rumah tidak memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.	Kecamatan Nita dan Mego (semua Desa), Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	17	rumah	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
27-03-2025	Bantuan instalasi listrik dan KWH meter daya 900 VA bertujuan untuk memberikan akses listrik bagi rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik atau masih mengalami keterbatasan daya.	Kecamatan mego dan nita (semua desa), Kab. Sikka , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	26	SR	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Bantuan untuk perlengkapan dan prasarana doa untuk lingkungan St. Michael, St.Yohanes, St. Petrus, St. Gabriel, Gua Maria Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria,Kombas maria Ratu rosari lingkungan santo mikael paroki tilang, lingkungan bunda pemurah stasi santa nirmala kojawota, Kombas bunda penghibur lingkungan maria yasinta ini diharapkan dapat menunjang sarana peribadatan agar lebih layak dan representatif bagi umat yang beribadah.	Kecamatan Nita desa tilang, Bloro, Nirangkliung, nangablo, Kab. Sikka, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	7	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Bantuan untuk perlengkapan dan prasarana doa untuk Komunitas Umat Basis (KUB) Waten Lipu Rakang Lingkungan St. Klemens Stasi St. Thomas Nanga Bantuan ini diharapkan dapat menunjang sarana peribadatan agar lebih layak dan representatif bagi umat yang beribadah.	kecamatan lela desa kolidetung, Kab. Sikka , Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Bantuan untuk perlengkapan dan prasarana doa untuk masjid Waturia Bantuan ini diharapkan dapat menunjang sarana peribadatan agar lebih layak dan representatif bagi umat yang beribadah.	Kecamatan Magepanda Desa Waturia, Kab. Sikka, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Bantuan alat musik keyboard dan sound system untuk Lingkungan Don Bosco Paroki Wairpelit dan Lingkungan Trisia Alfia Stasi Stefanus bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya	Kecamatan nita desa takaplager dan kecamatan magepanda desa waturia, Kab. Sikka, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	2	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Bantuan untuk perlengkapan dan prasarana doa untuk lingkungan Komunitas Bunda Penasihat, Komunitas Bunda Penghibur Orang Berduka Cita, Komunitas Ratu Rosari, Komunitas Bunda Kristus, Komunitas Bunda Pelidung, Komunitas Maria Bukang Ami, Komunitas Bunda Penghibur Paroki St. Trinitas Bloro Bantuan ini diharapkan dapat menunjang sarana peribadatan agar lebih layak dan representatif bagi umat yang beribadah.	Kecamatan nita desa lusitada, Kab. Sikka , Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	7	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
	BAHRUDDIN, S.E.					
27-03-2025	Bantuan Cool Box 120 Liter Keterbatasan fasilitas penyimpanan berdampak pada cepatnya penurunan kualitas ikan pasca tangkap, minimnya cool box menyebabkan ikan mudah busuk, menurunkan harga jual dan merugikan nelayan	Kecamatan Alok, Alok Barat, Alok Timur (Semua Desa) , Kab. Sikka , Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	80	Unit	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	Bantuan Lem Fiber Bahan Fiber sering mengalami kerusakan sementara keterbatasan lem fiber menghambat perbaikan dan berpotensi mengurangi efektifitas penyimpnan dan transportasi ikan	kecamatan Alok, Alok Barat, Alok Timur (semua desa) , Kab. Sikka , Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	3	paket	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	Bantuan Cool Box 300 Liter Keterbatasan fasilitas penyimpanan berdampak pada cepatnya penurunan kualitas ikan pasca tangkap, minimnya cool box menyebabkan ikan mudah busuk, menurunkan harga jual dan merugikan nelayan	Kecamatan Alok, Alok Barat, AlokTimur (Semua Desa), Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	8	unit	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	Pelatihan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dalam kegiatan sosial dan tanggap darurat (Bantuan pengadaan tenda Jadi)	kecamatan Alok, Alok Barat, Alok Timur kelurahan Wuring dan Wolomarang Kab. Sikka , Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	20	kotak	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Bantuan pengadaan alat masak untuk kelompok abon ikan wuring indah mendukung kebutuhan masyarakat kurang mampu.	Kecamatan Alok Barat kelurahan wuring, Kab. Sikka , Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	paket	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Bantuan sambungan listrik untuk masyarakat yang belum memiliki akses listrik yang memadai.	Alok, Alok Barat, Alok Timur (Semua Desa) , Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	21	SR	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Bantuan pengadaan profil tank 750 liter untuk kebutuhan penyimpanan air bersih masyarakat.	Alok, Alok Barat, Alok Timur (Semua Desa), Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	51	Unit	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Pembangunan rabat jalan di Rw 07 Kelurahan Wolomarang guna menunjang aktifitas masyarakat	kecamatan Alok Barat , Kab. Sikka , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	200	Meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Bantuan stimulan pengadaan bahan bangunan seperti tiang besi, sporal, semen dan pasir untuk rumah tidak layak huni masyarakat yang membutuhkan.	Kecamatan Alok, Alok Barat, Alok Timur (Semua Desa) , Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Paket	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	Antonius Tanjung					
27-03-2025	Bantuan Pembangunan Bahu Jalan di Koting, Desa Gehak - Waturepa diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur, memperlancar mobilitas, dan mendukung ekonomi masyarakat. Saat ini, ketiadaan bahu jalan menghambat aktivitas warga, terutama saat hujan.	KECAMATAN KOTING D, DESA GEHAK - WATUREPA, Kab. Sikka , Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	170	Meter	Pembangunan Jalan
27-03-2025	Pembangunan Rabat Jalan di Dusun Gere guna meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, memperlancar aktivitas masyarakat, serta mendukung pengembangan ekonomi wilayah.	Kecamatan Koting Desa koting A, Kab. Sikka , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	200	Meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Bantuan Rehab Plafon dan Pemasangan Keramik di dua ruang kelas SDI Gere agar kondisi ruang belajar lebih layak, nyaman, dan aman bagi siswa serta guru. Plafon yang rusak dan lantai yang belum berkeramik seringkali menghambat kenyamanan dalam proses belajar mengajar.	Kecamatan Koting Desa Koting A, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	paket	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
27-03-2025	Bantuan Chromebook untuk SDI Gere, guna mendukung pembelajaran berbasis digital. Penggunaan Chromebook akan meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap materi ajar digital	Kecamatan Koting Desa Koting A, Kab. Sikka , Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3	Unit	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
27-03-2025	Bantuan Kursi dan Meja Siswa untuk SDI Inpres koting , SDK Gehak agar kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih nyaman dan efektif.	Kecamatan Koting Desa Koting A, Kab. Sikka , Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	paket	Pengadaan Mebel Sekolah
27-03-2025	Bantuan Laptop untuk guru di SDI Gere guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan	Kecamatan Koting Desa Koting A,	DINAS PENDIDIKAN DAN	3	unit	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
	administrasi sekolah. Saat ini, banyak guru yang belum memiliki akses terhadap perangkat yang diperlukan untuk menyusun materi ajar, membuat laporan, serta mengikuti pelatihan daring.	Kab. Sikka, Kab. Sikka	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
27-03-2025	Bantuan Benang tensel bagi pengrajin tenun di Koting guna menjaga keberlangsungan usaha tenun tradisional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Koting yang menggantungkan penghidupan pada produksi kain tenun sering mengalami kesulitan mendapatkan benang sutra sebagai bahan baku utama	Kecamatan Koting (Semua Desa), Kab. Sikka , Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	250	kg	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Bantuan Bibit Pala guna mendukung pengembangan usaha dan kesejahteraan kelompok tani. Bibit pala akan membantu petani dalam meningkatkan hasil produksi dan memperluas usaha pertanian mereka.	Kecamatan Koting, Kab. Sikka , Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1000	bibit	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27-03-2025	Bantuan Seng Spandek 0,30 (4 Meter) untuk mendukung pembangunan paroki waerpelit di Koting serta melindungi rumah dari dampak cuaca ekstrem.	Kecamatan Koting dan Lela (Semua Desa), Kab. Sikka , Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	300	lembar	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Hibah Pembebasan Lahan untuk pembangunan PAUD di Desa Watutedang untuk meningkatkan akses pendidikan anak usia dini di wilayah Kecamatan Lela.	Kecamatan Lela desa Watutedang, Kab. Sikka , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	paket	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
27-03-2025	"Pelatihan dan Bantuan Tenda untuk Kelompok di Koting Kelompok di Koting membutuhkan bantuan tenda jadi 4x6 untuk mendukung berbagai kegiatan. Selain itu, pelatihan manajemen dan perawatan tenda diperlukan agar penggunaannya lebih optimal dan berkelanjutan. Bantuan ini diharapkan memperlancar aktivitas kelompok serta meningkatkan manfaat bagi masyarakat"	Kecamatan Koting desa Koting A, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	kotak	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Bantuan Kursi untuk Lingkungan guna meningkatkan kenyamanan dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti keagamaan, rapat warga, serta acara sosial lainnya.	Kecamatan Koting Desa Koting A, Kab. Sikka , Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	300	unit	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Bantuan Keyboard dan Sound System untuk mendukung berbagai kegiatan di lingkungan masyarakat seperti acara keagamaan, seni, serta rapat warga.	Kecamatan Koting desa Koting A, Kab. Sikka, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	4	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Hibah Bangku Kapela di Kapela Wutik untuk mengatasi keterbatasan jumlah bangku yang menghambat pelaksanaan kegiatan dan aktivitas keagamaan	Kecamatan Koting desa Koting D, Kab. Sikka , Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	30	unit	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
23-04-2025	Bantuan stimulan pengadaan Seng Spandek 0,30 (6 Meter),besi dan sementara untuk perbaikan atap rumah yang tidak layak huni sehingga dapat menunjang fungsi hunian	RT 08 RW 003 Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kab. Sikka , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Paket	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	ANTONIUS HENDRIKUS REBU					
27-03-2025	Rehabilitasi ruang kelas SDK Mauloo	Desa Mbengu kecamatan Paga, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3	Ruang	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
27-03-2025	Rehabilitasi TK Sang Timur	Desa Mbengu kecaamatan Paga, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Unit	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
27-03-2025	Rehabilitasi ruang kelas SDK Paga	Desa Paga Kecamatan Paga, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3	Ruang	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
27-03-2025	Ganti rugi pengadaan tanah untuk lapangan umum Ratekombo kecamatan Tanawawo	Desa Bu Watuweti kecamatan Tanawawo, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Bidang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
27-03-2025	Ganti rugi pengadaan tanah untuk PAUD di desa Mbengu	Desa Mbengu kecamatan Paga, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Bidang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
27-03-2025	Pengadaan perahu motor fiber 5,5 m lengkap mesin 5PK dan alat tangkap	Desa Mbengu Kecamatan Paga,	DINAS PERIKANAN	3	Unit	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
		Kab. Sikka, Kab. Sikka				
27-03-2025	nelayan sudah memiliki perahu tapi tidak memiliki mesin oleh kerena itu butuh pengadaan mesin ketinting	Kecamatan Paga dan Kecamatan Mego, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	10	Unit	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	Pelatihan dan pengadaan peralatan tukang kayu berupa mesin plener merk Oskar	Desa Paga kecamatan Paga, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Paket	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Pelatihan dan pengadaan peralatan servis elektronik	Desa Paga Kecamatan Paga, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Paket	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Bengkel kayu tidak memiliki genset sehingga jika listrik mati banyak peralatan yang rusak oleh kerena itu perlu pelatihan dan pengadaan mesin genset lengkap dinamo	Desa Paga Kecamatan Paga, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Unit	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	belum adanya turnamen turnamen Futsal	Desa Lewolabo, Kecamatan Paga , Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
27-03-2025	belum adanya pelatihan dan pengadaanpengadaan mal Batako dan mal batu roster/batu bunga ,tandon air 800 liter dan gerobak pasir untuk pekerja tukang	Desa Rubit kecamatan hewokloang , Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4	Paket	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	ALFONSUS AMBROSIUS					
27-03-2025	"Pelatihan dan pengadaan peralatan kerja yang menunjang kegiatan pengrajin batu merah (Bantuan terpal, skop, cangkul dan gerobak) di Kelurahan Wailiti Kecamata Alok Barat "	Kelurahan Wailiti Kecamata Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Paket	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	"elatihan dan pengadaan peralatan yang menunjang pekerjaan penjahit pakaian (Bantuan mesin jahid) di Kelurahan Nangalimang, Madawat, Wolomarang dan Wailiti di Kecamatan Alok dan Alok Barat "	Kelurahan Nangalimang, Madawat, Wolomarang dan Wailiti di Kecamatan Alok dan Alok Barat ", Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	Unit	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	"Untuk peningkatan ekonomi masyarakat perlu dibantu ternak kambing di Kelurahan Nangalimang, Wolomarang dan Wailiti "	Kelurahan Nangalimang, Wolomarang dan Wailiti , Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	400	Ekor	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	"Belum adanya kursi plastik untuk KBG Maria dari Lourdes, KBG Yesus Gembala Yang Baik Lingkungan Yohanes dari Salib dan KBG Ina Wateng Mi Lingkungan St. Agustinus Padua Paroki Spiritus Santo Misir di Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok "	Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	"Bantuan benang dan Naftol untuk kelompok tenun ikat di Kelurahan Nangalimang, Madawat dan Wailiti Di Kecamatan Alok dan Alok Barat Nama Kelompk ""TENUN IKAT BHINEKA"""	Kelurahan Nangalimang, Madawat dan Wailiti Di Kecamatan Alok dan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Paket	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	"Lanjutan pembangunan Pagar Puskesmas Wolomarang di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat "	Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS KESEHATAN	1	Paket	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
27-03-2025	"Belum adanya pembangunan RTK Puskesmas Wolomarang	Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS KESEHATAN	1	Unit	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	Bantuan untuk kegiatan Turnament futsal Afkab Sikka (Futsal	Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
	ALEXANDER AGATO HASULIE					
27-03-2025	Belum memiliki perahu bagi nelayan untuk peningkatan perekonomian hidup sehingga perlu bantuan Pengadaan perahu nelayan untuk kecamatan Waigete, Talibura dan Mapitara	Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	2	unit	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27-03-2025	Masyarakat belum memiliki rumah layak huni sehingga perlu bantuan Pembangunan rumah layak huni	Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3	unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
						Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
27-03-2025	Masyarakat belum memiliki akses rabat jalan sehingga Perlu bantuan Rabat jalan lingkungan sebagai akses Masyarakat desa hoder	Desa Hoder Daranatar, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	200	meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Masyarakat belum memiliki akses rabat jalan sehingga Perlu Rabat jalan lingkungan sebagai akses Masyarakat desa hoder	Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	200	meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Masyarakat belum memiliki peralatan suling moke sehingga perlu bantuan Pengadaan peralatan Suling Moke untuk kelompok di Waigete	Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	paket	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Belum memiliki kandang dan benih ayam pedaging sehingga perlu bantuan Pengadaan bangunan kendang dan benih ayam pedaging untuk kelompok di Egon Gahar	Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	1	paket	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
27-03-2025	pengadaan mesin Genset 60 KVA untuk kelompok tukang di Kecamatan Mapitara	Desa Egon Gahar Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2	unit	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	belum memiliki mesin SKAP untuk mebeler karena itu perlu bantuan pengadaan mesin dan perlengkapan mebeler untuk kelompok pertukangan	Desa Natakoli, Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	paket	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
29-04-2025	Belum memiliki jaringan internet sehingga perlu bantuan pengadaan sarana internet bagi SDI Pelibaler	Pelibaler Desa Wolonterang, Kecamatan Doreng, Kab. Sikka	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Paket	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
	Agustinus Feliksius Segon					
27-03-2025	Peningkatan jalan desa (Rabat) SDN Aiwuat - Bliroherat 500 Meter lebar 3 Meter	Meraduet RT16/RW 8, Dusun Legar, Desa Wolomotong , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Paket	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Perlu bantuan pembangunan Taman Doa di Paroki St.Petrus Kloangpopot (Umat sementara membangun Taman Doa)	Desa Wolomotong, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Perlu pembangunan Lapangan Voli untuk peserta didik di SD Inpres Eha	Desa Wolomotong, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
27-03-2025	Perlu pembangunan MCK PAUD Klerengbalat serta pagar pengaman (belum ada MCK dan Pagar Pengaman)	Dusun Eha, Desa Wolomotong , Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
27-03-2025	Perlu bantuan pengadaan keyboard dan soundsystem untuk Paduan Suara Gemericik Cantare (belum memiliki peralatan penunjang musik yakni keyboard dan soundsystem)	Dusun Eha, Desa Wolomotong , Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Perlu bantuan pengadaan keyboard dan soundsystem untuk kelompok koor Stasi Hokor (Belum memiliki Peralatan)	Dusun Hokor Desa Hokor, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Perlu bantuan pengadaan benang dan pewarna bagi ibu ibu di desa Hokor	Dusun Hokor Desa Hokor , Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Paket	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Perlu bantuan pengadaan gentong bagi kelompok mikro kecil pengiris tuak Mahe Kogan Wawi Tain di desa Hokor (Belum memiliki tempat penampungan moke)	Dusun Hokor Desa Hokor , Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	20	Buah	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Pemasangan Meteran Listrik dengan Daya 900 Watt untuk 40 rumah (belum Memiliki Meteran)	Desa Wolomotong DesaKloangpopot, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	40	Unit	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
27-03-2025	Pembangunan 4 Ruang Guru di SMPN 43 Wolomotong	Desa Wolomotong, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2	Ruang	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
	AGUSTINUS ADEO DATUS, SP					

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
27-03-2025	"-. Masyarakat sangat membutuhkan akses jalan untuk mempermudah arus Jasa dan Barang	Desa Pruda, Kecamatan Talibura , Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	80	Meter	Pembangunan Jalan
27-03-2025	Kondisi atap seng Kapela rusak. Perlu di rehabilitasi dan kegaiatan Agama ketiadaan Keyboard dan Sound System	Desa Hikong Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Kondisi atap seng Kapela dalam keadaan rusak. Perlu dibantu untuk direhabilitasi. Sedangkan kegiatan Gerejani ketiadaan Sound System dan Keyboard.	Kecamatan Talibura Desa Hikong, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	MAsih terdapat bangunan Kapela rusak. Perlu direhabilitasi Atap Seng, sedangkan kegiatan Gerejani ketiadaan Sound System dan Keyboard	Kecamatan Talibura Desa Hikong A, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Kapela perlu di Rehap Atap Seng dan lainnya, sedangkan kegaiatan Gerejani ketiadaan Keyboard dan Sound System	Desa Hudek Duen Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Masih terdapat bangunan Kapela rusak. Perlu direhabiltasi Atap Seng, sedangkan kegiatan Gerejani tidak memilki Sound System dan Keyboard	Kecamatan Talibura Desa Hudek Duen A, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Gereja Paroki Boganatar membutuhkan bantuan untuk proses pembangunan dan kegiatan Gerejani	Desa Kringa Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Kapela perlu di Rehap Atap Seng dan lainnya, sedangkan Kegaiatan Agama ketiadaan Keyboard dan Sound System	Desa Timu Tawa Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	-. Kapela perlu di Rehap Atap Seng dan lainnya, sedangkan Kegaiatan Agama ketiadaan Keyboard dan Sound System	Desa Ojang Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Masih terdapat bangunan Kapela rusak. Diperlukan rehabiltasi. Sedangkan kegiatan Gerejani tidak memiki Sound System dan Keyboard	Desa Henga Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Lapangan FUTSAL rusak. Diperlukan rehabilitasi dan penambangan fasilitas lapangan	SMPK ST. Antonius Boganatar Desa Kringa Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
27-03-2025	Masih terdapat sekolah tidak memilki bangunan Pagar. Diperlukan pembangunan Pagar Sekolah	SDK Boganatar Desa Kringa Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
27-03-2025	Terdapat organisasi Pemuda membutuhkan bantuan biaya untuk melaksanakan kegiatan Latihan Dasar Kepempinan dan Seminar tentang Bonus Demografis bagi pelajar SLTA	Pemuda Hikong Desa Hikong Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
27-03-2025	-. Klub Sepak Bola di Kecamatan Talibura ketiadaan Fasilitas Latihan, Jersey: Hibah Bantau dalam mendukung aktifitas Orang Muda	Kecamatan Talibura Desa Hikong, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Paket	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
27-03-2025	Masih terdapatnya kegiatan Orang Muda Katolik tidak memilki Tenda Jadi. Diperlukan bantuan Tenda Jadi	OMK Stasi Desa Hikong Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	3	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Orang Muda Katolik Stasi Desa Hikong membutuhkan bantuan Kursi untuk kegiatan Sosial Keagamaan	Kecamatan Talibura Desa Hikong, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	200	Unit	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Kelompok Dasawisma Desa Waigete membutuhkan bantuan seperangkat alat masak	Desa Waigete Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Paket	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Masih terdapat kelompok penenun membutuhkan bantuan seperangkat Benang dan Pewarna	Desa Wairterang Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Paket	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	masih terdapat kelompok UMKM membutuhkan Pelatihan dan bantuan seperangkat alat pembuat kue	Desa Wolokoli Kecamatan Bola, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Paket	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari

TANGGAL USUL	PENGUSUL / MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
						Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Masih terdapat kelompok usaha yang membutuhkan Pelatihan dan Bantuan mesin cetak batako dan meson dompeng	Desa Bola Kecamatan Bola, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Paket	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
27-03-2025	Masih terdapat kelompok Pemuda yang tidak memilki sumber dana dalam menjalankan kerja organisasi	Kecamatan Bola Desa Bola, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27-03-2025	Masih terdapat kelompok memasak yang tidak memilki fasilitas masak. dibutuhkan bantuan seperangkat alat masak	Desa Pruda Kecamatan Waiblama, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Paket	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27-03-2025	Masih terdapat kelompok penenun yang tidak memilki bahan pembuatan sarung dan lainnya. Dibutuhkan bantuan benang dan pewarna	Desa Egon Gahar Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Paket	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Catatan : Secara detail Usulan, Permasalahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD ada pada SIPD

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, ukuran kerberhasilan tersebut berupa indikator-indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan *(impact*) daerah. IKU tersebut berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan usai penetapan program prioritas. IKU daerah Kabupaten Sikka tahun dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 6.1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SIKKA

No	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,24
2	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,72
3	Angka Kemiskinan	11,13
4	Pengeluaran Per Kapita	9,694
5	HLS (Harapan Lama Sekolah)	17,04
6	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	10,38
7	Indeks Pembangunan Gender	90,04
8	Pendapatan Per Kapita	20172000
9	Pertumbuhan Ekonomi	4,11
10	Rasio Gini	0,2355
11	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,8
12	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	4,2
13	Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum	5,4
14	Pertumbuhan sektor perdagangan	9,6
15	Pertumbuhan sektor primer	3,3
16	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	57,57
17	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	57,57
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,21
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,21
20	Indeks Reformasi Birokrasi	B
21	Opini BPK	WTP
22	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B
23	Indeks Inovasi Daerah	38,73
24	Indeks Profesionalitas ASN	80,35
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,6
26	Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas)	86
27	Indeks Resiko Bencana	121,81
28	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,43

6.2. Indikator Kinerja Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja daerah yang menjadi indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome (sasaran), yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya. IKU PD Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target 2026
Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
	Pendidikan		
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.97
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.51
3	APM SD/MI	Angka	96.84
4	APM SMP/MTs	Angka	85.39
5	APK SD/MI	Angka	110.25
6	APK SMP/MTs	Angka	109.45
7	Rasio Guru/Murid SD/MI	Rasio	1:32
8	Rasio Guru/Murid SMP/MTs	Rasio	1:28
9	Angka Melek Huruf	Angka	94.33
10	Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	99.48
11	Angka Putus Sekolah SD/MI	Angka	0.25
12	Persentase Pendidik Pada Jenjang SD yang Memiliki Ijazah Diploma IV/Sarjana dan Memiliki Sertifikat Pendidik	%	33.45
13	Persentase SD yang terakreditasi	%	97.73
14	Persentase Kelulusan SD/MI	%	100
15	Angka Kelulusan SD/MI	Angka	99.56
16	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Angka	99.99
17	Rata-Rata Kemampuan Literasi SD		2.19
18	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD		2.05
19	Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	97.86
20	Angka Putus Sekolah SMP/Mts		0.44
21	Persentase Pendidik Pada Jenjang SMP/Mts yang Memiliki Ijazah Diploma IV/Sarjana dan Memiliki Sertifikat Pendidik	%	31.4
22	Persentase SMP/Mts terakreditasi	%	93.05
23	Persentase Kelulusan SMP/Mts	%	100
24	Angka Kelulusan SMP/Mts	Angka	98.19
25	Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	47.82
26	Persentase Pendidik PAUD yang Memiliki Ijazah Diploma IV/Sarjana Bidang PAUD, Kependidikan Lain atau Psikologi dan Sertifikat Profesi Guru PAUD	%	29.93
27	Persentase Satuan PAUD terakreditasi	%	32.61
28	Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelasaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	%	15.52
	Kesehatan		
1	Angka Kematian Bayi	/1000 KH	7

No	Indikator	Satuan	Target 2026
2	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	4
3	Insidensi HIV	Angka	0,18
4	Annual Paracite Incidence (API)	/1000 penduduk	0
5	Succes Rate TB (BTA +)	%	95
6	Incidence Rate (IR) DBD	100.000 penduduk	70
7	Prevalensi Wasting	%	7,6
8	Prevelensi Stunting	%	6
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)	Indeks	
2	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	46.56
3	Persentase Drainase Skala Kota Dalam Kondisi Baik	%	69.11
4	Prsentase rumah tangga dengan akses air limbah atau sanitasi layak	%	51.88
5	Indeks Kualitas Infrastruktur kePUan (IKPU)	Indeks	57.61
6	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	54.86
	Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar		
2	Indeks Kualitas Urusan Permukiman	%	47,47%
3	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana	%	7,50%
4	Persentase penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR	%	76,54%
5	Persentase Rumah Tangga yang dilayani listrik	%	98,51%
6	Persentase Rumah Tangga yang terlayani air minum bersih	%	79,11%
7	Persentase Rumah Tangga yang terlayani/memiliki sanitasi dasar	%	30,61%
8	Persentase jalan lingkungan yang dibangun	%	31,56%
9	Persentase drainase lingkungan kawasan permukiman yang dibangun	%	24,78%
10	Persentase Konflik Pertanahan yang diselasaikan	%	100
11	Persentase Konflik Pertanahan yang ditangani	%	100
12	Persentase Lahan Yang disediakan untuk pembangunan	%	100
1	Jumlah Regulasi Daerah yang Ditegakkan	Angka	7
2	Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel		76.5
3	Jumlah SOP	SOP	4
4	Jumlah Inovasi	Buah	1
	Sosial		
1	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	57,95
2	Persentase PPKS di Luar Panti Yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	%	3,58
3	Persentase Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Saat Bencana	%	100
	Tenaga Kerja		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.45
2	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	0.05
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Persentase Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15 - 19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)	%	1,9
2	Persentase Angka prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Rate/mCPR)	%	42

No	Indikator	Satuan	Target 2026
3	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	24,50
4	Rasio KDRT Terhadap Anak	Rasio	3,60
5	Rasio Perempuan Korban Kekerasan	Rasio	2,08
6	Kabupaten Layak Anak	Tingkat	Pratama
	Lingkungan Hidup		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71.70
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	52.53
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	94.51
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	68.98
5	Persentase Penanganan Sampah	%	81.08
	Kependudukan Catatan Sipil		
1	Persentase Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas	%	98.87
2	Cakupan penduduk yang memiliki KTP-el	%	97
3	Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga(KK)	%	98
4	Cakupan penduduk (Anak usia 0- 17 thn kuang 1 hari) yang memiliki Kartu Identitas Anak(KIA)	%	70
5	Cakupan Penduduk (Anak) yang memiliki akta kelahiran	%	95
6	Cakupan penduduk yang memiliki akta perkawinan	%	60
7	Cakupan penduduk yang memiliki akta perceraian	%	31
8	Cakupan penduduk yang memiliki akta kematian	%	100
9	Jumlah desa/kel yang memiliki buku pokok pemakaman	Duku	150
10	Jumlah OPD yang memanfaatkan data dan dokumen	OPD	12
11	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	MOU	5
12	Persentase Pengguna Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	2
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1	Penurunan Jumlah desa sangat tertinggal	Desa	1
2	Penurunan Jumlah desa tertinggal	Desa	10
3	Penurunan Jumlah desa berkembang	Desa	5
4	Penurunan Jumlah desa Maju	Desa	5
5	Penurunan Jumlah desa Mandiri	Desa	1
6	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0.649
	Perhubungan		
1	Indeks Kualitas Urusan Perhubungan	Indeks	88,07
2	Cakupan Layanan Transportasi	%	76,69
3	Persentase Angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan	%	82,48
4	Cakupan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardril dan peneraangan jalan umum)	%	66,02
5	Standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten	%	100,00
6	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalulintas	%	12,03
	Komunikasi dan Informatika		
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2.18
2	Kebijakan Internal SPBE		1
3	Tata Kelola SPBE		14
4	Manajemen SPBE		8
	Koperasi dan UKM		
1	Jumlah koperasi yang memiliki Sertifikat Nomor Koperasi	Unit	50
2	Jumlah Koperasi Sehat	Unit	15
3	Jumlah UMKM yang terkurasi	Unit	2814
	Penanaman Modal		
1	Jumlah Nilai Investasi	Rupiah	237,000,000,000

No	Indikator	Satuan	Target 2026
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA)	Unit	11
3	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)	Unit	140
4	Promosi Investasi	Kali	2
	Pemuda dan Olahraga		
1	Perolehan Jumlah Penghargaan Prestasi di Bidang Olahraga	Orang	28
2	Jumlah Pemuda Memperoleh Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan	Orang	300
	Kebudayaan		
1	Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Jumlah	1
2	Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	1
	Perpustakaan		
1	Indeks Pembangunan Literasi Masarakat (IPLM)	Indeks	27,56
2	Nilai tingkat kegemaran membaca	Indeks	29,36
	Kearsipan		
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai kaidah kearsipan	%	55,55
2	Persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem kearsipan	%	55,55
Urusan Pilihan			
	Kelautan dan Perikanan		
1	Produksi Perikanan	Ton	26,805.74
2	Konsumsi Ikan	Kg/kapita	78.53
3	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	13
4	Nilai Produksi Perikanan	Nilai	407,819,207,770
5	Pendapatan Nelayan	Rp	20,050,109
	Pariwisata		
1	Kontribusi Sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	%	0.68
2	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	38,041
3	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1.94
4	Jumlah Belanja Wisatawan	Rupiah/Tahun	77
	Pertanian		
1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	38.23
2	Jumlah Produksi Hortikultura	Ton	158,471.31
3	Jumlah Produksi Perkebunan	Ton	29,004.27
4	Produksi Tanaman Pangan	Ton	186,365.92
5	Produksi Ternak Besar	Ekor	27,464
6	Produksi Ternak Kecil	Ekor	156,136
7	Produksi Ternak Unggas	Ekor	769,148
	Perdagangan		
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	10,81
2	Jumlah barang masuk dan keluar	Ton	3.817.308
	Perindustrian		
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	1,73
2	Jumlah Industri pengolahan	unit	1424
3	Jumlah IKM	unit	120
Unsur Pendukung, Penunjang dan Pengawas			
	SETWAN/SETDA		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC
2	Persentase Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD	%	100
3	Nilai SAKIP	Nilai	B
4	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah		32.6
5	Persentase Layanan Administrasi		83.5

No	Indikator	Satuan	Target 2026
	Perencanaan		
1	Tersedianya Dokumen RPJPD	Dokumen	1
2	Tersedianya Dokumen RPJMD	Dokumen	1
3	Tersedianya Dokumen RKPD	Dokumen	2
4	Indeks Kualitas Perencanaan		77
	Litbang		
1	Persentase Hasil Penelitian yang Ditindaklanjuti Untuk Kebijakan Pembangunan Daerah	%	75
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	65
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	A (70)
4	Jumlah Penelitian		4
5	Jumlah Inovasi		26
	Keuangan		
1	Capaian Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah sesuai ketentuan regulasi	%	100
2	Penetapan APBD tepat waktu	%	Tepat Waktu
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	> 20
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	>10
5	Persentase Belanja Infrastruktur (25%)	%	> 25
6	Persentase Penyerapan Anggaran	%	100
7	Persentase MCP Pengelolaan BMD	%	100
8	Derajat fiskal daerah		10,89
9	Persentase Peningkatan PAD		1,50
	Kepegawaian		
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	50.18
	Urusan Pengawasan		
1	Tingkat Maturitas		3
2	Tingkat Kapabilitas APIP		3
3	Persentase Hasil Temuan Yang ditindaklanjuti		51
	Kesbangpol		
1	Persentase Peran serta masarakat ang ikut Pemilu	%	88
2	Cakupan Partai Politik ang di bina	%	100
3	Persentase Penurunan Konflik konlik sosial	%	88.24

BAB VII
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen RKPD ini memuat Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan serta penetapan Indikator Kinerja Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka merupakan dokumen perencanaan tahunan teknokratik yang menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan pendekatan berbasis kinerja.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka digunakan juga untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi yang dilakukan dapat dilaksanakan setiap Triwulan dan Tahunan. Evaluasi dimaksud untuk melihat perkembangan dan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan termasuk dengan target kinerja.